



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELU

KULUK MESAK

ATAMBUA BARU

KO

ATAMBUA SELATAN

RA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) + KABUPATEN BELU TAHUN 2025-2029

TIMOR LE

+

**ATAMBUA
TAHUN 2025**



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU

dan

BUPATI BELU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahunan.

4. Rencana ...

4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahunan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
6. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
12. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
14. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan.
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.

16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
17. Daerah adalah Kabupaten Belu.
18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Belu.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu.
22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Belu.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RPJMD ini untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan Isu strategis pembangunan, serta kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tujuan RPJMD, terdiri dari:
 - a. sebagai penjabaran tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Belu tahun 2025-2029.
 - b. sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam masa kepemimpinan kepala daerah;
 - c. sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan Visi, Misi dan Program prioritas Bupati dan wakil Bupati sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing; dan
 - d. mewujudkan ...

- d. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

BAB II SISTEMATIKA DAN ISI RPJMD

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD terdiri dari:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Daerah;
 - c. Bab III Visi, Misi, Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. Bab IV Program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - e. Bab V Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua pada
tanggal 22 September 2025

↓ BUPATI BELU ↓

↓ WILLYBRODUS LAY ↓

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 22 September 2025

↓ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU ↓


↓ JOHANES ANDES PRIHATIN ↓

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2025 NOMOR 03

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU: 03

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025 – 2029

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah yang terdiri atas : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (RKPD).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang yang mengamanatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak nasional Tahun 2024, dimana pada tanggal 27 November 2024 Kabupaten Belu melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2025-2029.



Berdasarkan hasil PILKADA menetapkan Bapak Willybrodus Lay, SH sebagai Bupati dan Bapak Vicente Hornai Gonsalves, ST sebagai Wakil Bupati periode 2025-2030 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1997 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa jabatan Tahun 2025-2030 dan telah dilantik di Kupang pada tanggal 24 Maret 2025 oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur atas nama Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk peraturan daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen rencana pembangunan daerah 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD Kabupaten Belu 2025-2029 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya. Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan yang mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya serta merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (delapan) proyek hasil terbaik cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belu Tahun 2025-2045 periode ke-I yang ditujukan untuk “Pemantapan Standar Pelayanan Minimal dan Tata Kelola Pemerintah”.

Dalam penyusunan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Belu merumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan, dengan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang digunakan, meliputi: pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif, dan pendekatan spasial.

RPJMD merupakan bentuk kebijakan publik yang menjamin konektivitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah untuk jangka menengah sehingga perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan lagi dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maupun Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belu untuk dilakukan lagi penyesuaian, sinkronisasi dan sinergisitas karena adanya dinamika kewenangan dan perubahan tugas dan fungsi (tusi) dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan pada Pasal 342 ayat (1) , huruf c Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dokumen RPJMD dapat dilakukan perubahan apabila terjadi perubahan yang mendasar yang dijelaskan lagi pada Pasal 3 yaitu apabila terjadi perubahan kebijakan nasional.

Berpijak pada upaya mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati Belu serta untuk menjamin keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan, dalam konstelasi Nasional, Provinsi dan Kabupaten lain yang berbatasan maupun lingkup waktu, maka diperlukan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Belu yang diharapkan mampu mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan dan sinergitas pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 164



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Grafik	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I Pendahuluan	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-10
1.4 Maksud dan Tujuan	I-12
1.5 Sistematikan Penulisan	I-13
BAB II Gambaran Umum Daerah	II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-97
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	II-140
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II-158
2.2.1 Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2020-2024	II-177
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis	II-197
BAB III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-1
3.1 Visi	III-4
3.2 Misi	III-9
3.3 Tujuan dan Sasaran	III-16
3.4 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan	III-23
BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-1
4.1 Rencana Program Perangkat Daerah	IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-46
BAB V Penutup	V-1
5.1 Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.2 Kerangka Pengendalian	V-2
5.3 Reviu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	V-3
5.4 Penyelarasan RPJMD Terhadap RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029	V-8



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Belu	II-2
Tabel 2.2	18 (Delapan Belas) Desa Persiapan Di Kabupaten Belu	II-3
Tabel 2.3	Jumlah Kecamatan dan Desa Perbatasan di Kabupaten Belu	II-4
Tabel 2.4	Kemiringan lereng di Kabupaten Belu	II-5
Tabel 2.5	Jenis Tanah di Kabupaten Belu	II-14
Tabel 2.6	Sumber Air Baku Yang Dimanfaatkan PDAM Kabupaten Belu	II-16
Tabel 2.7	Alternatif Sumber Air Baku di Kabupaten Belu	II-18
Tabel 2.8	Potensi Sumber Air Baku Embung dan Bendungan di Kabupaten Belu	II-22
Tabel 2.9	Kawasan Lindung di Kabupaten Belu	II-28
Tabel 2.10	Kinerja Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Pangan Kabupaten Belu	II-44
Tabel 2.11	Status Daya Dukung Air Kabupaten Belu Tahun 2021	II-46
Tabel 2.12	Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kabupaten Belu, Tahun 2023	II-49
Tabel 2.13	Distribusi Luas Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Menurut Kecamatan Berdasarkan Tiga Proksi	II-51
Tabel 2.14	Distribusi Luas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Menurut Kecamatan Berdasarkan Tiga Proksi	II-53
Tabel 2.15	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Belu Tahun 2020-2024	II-70
Tabel 2.16	Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Belu Tahun 2020 -2024	II-73
Tabel 2.17	Flora dan Fauna yang dilindungi di Kabupaten Belu	II-75
Tabel 2.18	Tujuh Jenis Fauna yang Ditemukan di Pantai Atapupu	II-76
Tabel 2.19	KK dengan akses terhadap Fasilitas Sanitasi Aman	II-78
Tabel 2.20	Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Belu Tahun 2020-2024	II-80
Tabel 2.21	Kawasan Rawan Bencana Menurut Jenis Bencana di Kabupaten Belu	II-81
Tabel 2.22	Indeks Risiko Per Ancaman	II-85
Tabel 2.23	Jumlah Penduduk, Persentase Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2024	II-91
Tabel 2.24	Proyeksi Penduduk Kabupaten Belu Menurut Kelompok Umur	II-94
Tabel 2.25	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Belu (miliar rupiah), Tahun 2020-2024	II-98
Tabel 2.26	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Belu (miliar rupiah),Tahun 2020-2024	II-100



Tabel 2.27 Nilai Tukar Bawang Putih Varietas Lokal Kabupaten Belu Tahun 2018 -2020	II-105
Tabel 2.28 Indikator Pendukung/Pembentuk IMM	II-111
Tabel 2.29 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Belu Tahun 2020-2024	II-112
Tabel 2.30 Indikator Pendukung Indeks Keluarga Sehat	II-113
Tabel 2.31 Capaian Indeks Keluarga Sehat Tahun 2021-2024	II-115
Tabel 2.32 Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Belu Tahun 2020-2024	II-119
Tabel 2.33 Angka Penemuan (CNR) Semua Kasus TB di Kabupaten Belu Tahun 2020-2024	II-119
Tabel 2.34 Proporsi Jumlah Penduduk Kabupaten Belu Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2024	II-120
Tabel 2.35 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2023-2024	II-124
Tabel 2.36 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	II-125
Tabel 2.37 Rincian Kegiatan Pelayanan PMKS Tahun 2020-2021	II-126
Tabel 2.38 Penerima PKH Kabupaten Belu Tahun 2021-2024	II-128
Tabel 2.39 IPK Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur	II-130
Tabel 2.40 Indikator Pembentuk IPK Kabupaten Belu	II-131
Tabel 2.41 Rasio Ketergantungan Tahun 2019-2024	II-139
Tabel 2.42 Perkembangan Produksi Pertanian di Kabupaten Belu Tahun 2020-2023	II-144
Tabel 2.43 Produksi Perikanan Berdasarkan Sub Sektor di Kabupaten Belu Tahun 2021-2023	II-147
Tabel 2.44 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Belu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2020-2024	II-149
Tabel 2.45 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Belu Tahun 2022-2024	II-151
Tabel 2.46 Panjang Bentangan Jembatan Terbangun Berdasarkan Status Jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-152
Tabel 2.47 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan Rumah di Kabupaten Belu Tahun 2019 – 2023	II-153
Tabel 2.48 Indeks Desa Membangun Kabupaten Belu Tahun 2020-2024	II-155
Tabel 2.49 Hasil Nilai PEKPP Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten Belu Tahun 2024	II-159
Tabel 2.50 Pencapaian MCP Kabupaten Belu tahun 2020-2024	II-160
Tabel 2.51 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belu Tahun 2020-2024	II-161
Tabel 2.52 Capaian SMP Kabupaten Belu Tahun 2022-2024	II-162
Tabel 2.53 Capaian IKU Daerah Tahun 2021-2024	II-165
Tabel 2.54 Capaian IKK Tahun 2021-2024	II-167
Tabel 2.55 Realisasi APBD Tahun 2020-2024	II-179



Tabel 2.56 Proporsi Per Jenis PAD Tahun 2020-2024	II-182
Tabel 2.57 Proporsi Realisasi Belanja per Kelompok Belanja Tahun 2020-2024	II-184
Tabel 2.58 Persentase Realisasi Belanja Pegawai Terhadap Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2024	II-185
Tabel 2.59 Neraca Daerah Tahun 2020-2024	II-188
Tabel 2.60 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030	II-195
Tabel 3.1 Keterkaitan Misi dengan Kata Kunci Visi RPJMD Kabupaten Belu 2025-2029	III-9
Tabel 3.2 Persandingan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029	III-15
Tabel 3.3 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029	III-17
Tabel 3.4 Strategi Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2025-2029	III-24
Tabel 3.5 Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Belu 2025-2029	III-28
Tabel 3.6 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029	III-31
Tabel 3.7 Program Prioritas RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029	III-41
Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah	IV-2
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama	IV-46
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah	IV-47



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Belu Tahun 2020-2024	II-87
Grafik 2.2	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun	II-92
Grafik 2.3	Piramida Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2024	II-93
Grafik 2.4	Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar Kabupaten Belu Tahun 2024	II-95
Grafik 2.5	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2021-2024	II-97
Grafik 2.6	Perbandingan PDRB Per Kapita ADHB Kab.Belu, Kab. Malaka, Kab. TTU dan Kab. TTS Tahun 2020-2024	II-102
Grafik 2.7	Perbandingan PDRB Per Kapita ADHK Kab.Belu, Kab. Malaka, Kab. TTU dan Kab. TTS Tahun 2020-2024	II-103
Grafik 2.8	Perbandingan Indeks GINI Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024	II-104
Grafik 2.9	Perkembangan NTP Provinsi NTT Tahun 2018-2022	II-108
Grafik 2.10	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024	II-109
Grafik 2.11	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024	II-110
Grafik 2.12	Prevalensi Stunting Kabupaten Belu dan Provinsi NTT Tahun 2020-2024	II-117
Grafik 2.13	Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2024	II-122
Grafik 2.14	Perbandingan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2024	II-123
Grafik 2.15	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Tahun 2020-2024	II-136
Grafik 2.16	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Belu Tahun 2020-2024	II-137
Grafik 2.17	Angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2020-2024	II-138
Grafik 2.18	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2024	II-140
Grafik 2.19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020-2024	II-141
Grafik 2.20	Persentase Penduduk Menggunakan HP di Kabupaten Belu Tahun 2020-2024	II-152
Grafik 2.21	Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Belu Tahun 2019-2023	II-153



Grafik 2.22 Rasio Penerimaan Pajak Terhadap PDRB	II-156
Grafik 2.23 Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Belu dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024	II-157
Grafik 2.24 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Belu Tahun 2020-2024	II-158
Grafik 2.25 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020-2024	II-164
Grafik 2.26 Perkembangan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020-2024	II-178
Grafik 2.27 Pertumbuhan Belanja Kabupaten Belu Tahun 2019-2024	II-183



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Lainnya	I-12
Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Belu	II-2
Gambar 2.2 Peta Kelerengkan di Kabupaten Belu	II-6
Gambar 2.3 Peta Geologi di Kabupaten Belu	II-10
Gambar 2.4 Peta Jenis Tanah di Kabupaten Belu	II-14
Gambar 2.5 Peta Cekungan Air Tanah di Kabupaten Belu	II-25
Gambar 2.6 Peta Curah Hujan di Kabupaten Belu	II-26
Gambar 2.7 Peta Pola Ruang Kabupaten Belu	II-36
Gambar 2.8 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Belu	II-39
Gambar 2.9 Peta Kinerja Jasa Lingkungan Hidup sebagai Penyedia Pangan Kabupaten Belu Tahun 2021	II-45
Gambar 2.10 Peta Kinerja Jasa Lingkungan Hidup sebagai Penyedia Air Kabupaten Belu	II-48
Gambar 2.11 Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Berdasarkan Tiga Proksi	II-50
Gambar 2.12 Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Berdasarkan Tiga Proksi	II-52
Gambar 2.13 Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal & Ruang Hidup Berdasarkan Tiga Proksi	II-54
Gambar 2.14 Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal & Ruang Hidup Berdasarkan Tiga Proksi	II-55
Gambar 2.15 Proporsi Luasan DDDT Lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Rekreasi & Ekowisata Berdasarkan Tiga Proksi	II-56
Gambar 2.16 Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Rekreasi & Ekowisata Berdasarkan Tiga Proksi	II-56
Gambar 2.17 Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Berdasarkan Tiga Proksi	II-57
Gambar 2.18 Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Berdasarkan Tiga Proksi	II-58
Gambar 2.19 Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air Berdasarkan Tiga Proksi	II-59
Gambar 2.20 Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air Berdasarkan Tiga Proksi	II-60
Gambar 2.21 Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Mitigasi dari Bencana Banjir Berdasarkan Tiga Proksi	II-61
Gambar 2.22 Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Banjir Berdasarkan Tiga Proksi	II-61



Gambar 2.23	Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Longsor Berdasarkan Tiga Proksi	II-62
Gambar 2.24	Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan & Perlindungan dari Bencana Longsor Kabupaten Belu Berdasarkan Tiga Proksi	II-63
Gambar 2.25	Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan Tiga Proksi.	II-64
Gambar 2.26	Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan Tiga Proksi	II-65
Gambar 2.27	Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Berdasarkan Tiga Proksi	II-66
Gambar 2.28	Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Berdasarkan Tiga Proksi	II-67
Gambar 2.29	Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas Berdasarkan Tiga Proksi	II-69
Gambar 2.30	Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas Berdasarkan Tiga Proksi	II-69
Gambar 2.31	Jumlah Desa/ Kelurahan di Kabupaten Belu dengan kategori Sangat Rentan, Rentan dan Agak Rentan berdasarkan Indeks Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2021	II-88
Gambar 2.32	Indeks Sensitivitas Mata Pencanharian terhadap Perubahan Iklim di Kabupaten Belu Tahun 2024	II-90
Gambar 3.1	Tahapan RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2025-2045	III-3



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah yang terdiri atas : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang yang mengamatkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak nasional Tahun 2024, dimana pada tanggal 27 November 2024 Kabupaten Belu melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2025-2029.

Berdasarkan hasil PILKADA ditetapkan Bapak Willybrodus Lay, SH sebagai Bupati Belu dan Bapak Vicente Hornai Gonsalves, ST sebagai Wakil Bupati Belu periode 2025-2030 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1997 Tahun



2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa jabatan Tahun 2025-2030 dan telah dilantik di Kupang pada tanggal 24 Maret 2025 oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur atas nama Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkan dalam bentuk peraturan daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen rencana pembangunan daerah 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD Kabupaten Belu 2025-2029 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya. Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan yang mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya serta merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (delapan) proyek hasil terbaik cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.



RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belu Tahun 2025-2045 periode ke-I yang ditujukan untuk “Pemantapan Standar Pelayanan Minimal dan Tata Kelola Pemerintah”.

Dalam penyusunan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Belu merumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan, dengan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang digunakan, meliputi: pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, pendekatan holistik-tematik, pendekatan integratif, dan pendekatan spasial.

RPJMD merupakan bentuk kebijakan publik yang menjamin konektivitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah untuk jangka menengah sehingga harus memperhatikan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maupun Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belu.

Berpijak pada upaya mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Belu serta untuk menjamin keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan, dalam konstelasi Nasional, Provinsi dan Kabupaten lain yang berbatasan maupun lingkup waktu, maka diperlukan perencanaan pembangunan jangka menengah



daerah Kabupaten Belu yang diharapkan mampu mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan dan sinergitas pembangunan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 didasari oleh beberapa ketentuan hukum yang terbagi dalam 3 (tiga) klaster yakni:

I. Peraturan Perundang-undangan, yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua di Provinsi Nusa



Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 13);

15. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 Nomor 004 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0132);
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0138);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 140);



19. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020 – 2040 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020 Nomor 08);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 161);

II. Peraturan yang diakui sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

III. Dasar penyusunan RPJMD selain peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang



Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal RPJMD) merupakan penjabaran dari visi dan misi, program kepala daerah.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 yaitu:

1. RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 disusun dengan mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029, yang di dalamnya telah memuat prioritas pembangunan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025 merupakan tindaklanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025-2045, periode ke-I yang ditujukan untuk “Pemantapan Standar Pelayanan Minimal dan Tata Kelola Pemerintah”;
3. RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029;
4. RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD



Provinsi NTT Tahun 2025-2029;

5. RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
6. RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 yang memberi acuan mengenai struktur dan pola ruang terkait dengan rencana pelaksanaan program-program pembangunan, agar kebijakan dan sasaran dalam RPJMD selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.
7. RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 memperhatikan data capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020-2024 dalam penyusunan RPJMD, sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian pembangunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029.
8. RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 memperhatikan kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029;
9. RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 memperhatikan manajemen Risiko Pembangunan Nasional di daerah;
10. Penyusunan RPJMD Kabupaten Belu tahun 2025-2029 juga memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya untuk memastikan bahwa pembangunan

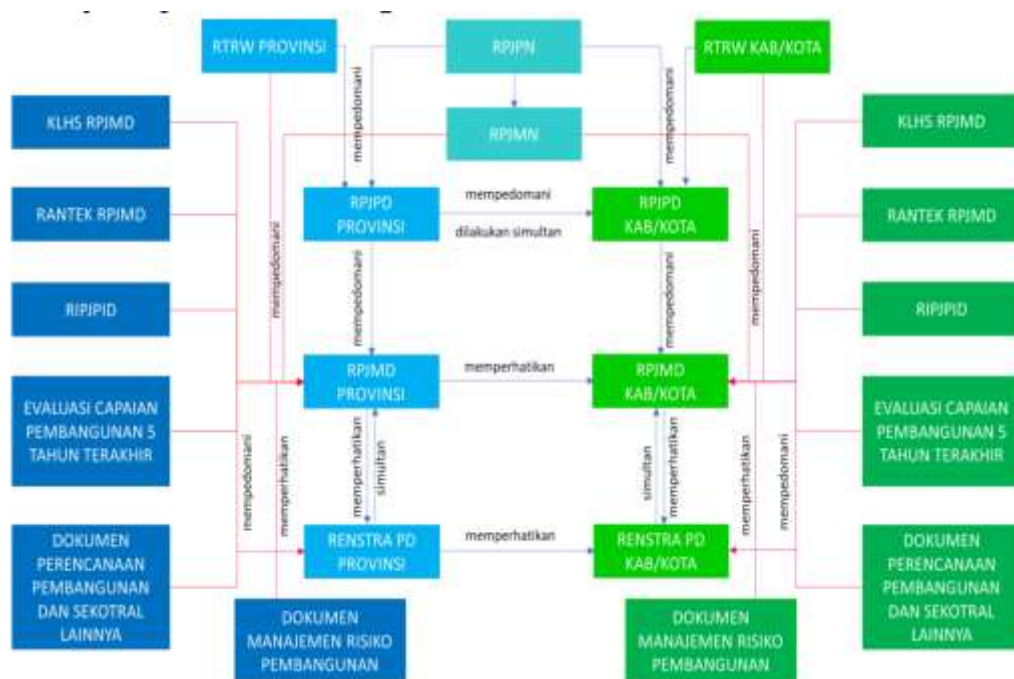


daerah berjalan secara terarah, terukur dan berkelanjutan.

Gambar 1.1 menunjukkan keterkaitan penyusunan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 dengan dokumen lainnya.

Gambar 1.1

Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dengan Dokumen Perencanaan Sektorial Lainnya



Sumber : Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Belu selama 5 (lima) tahun ke depan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial berdasarkan capaian pembangunan, permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta kemampuan keuangan daerah.



Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Sebagai penjabaran tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Belu tahun 2025-2029.
2. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam masa kepemimpinan kepala daerah;
3. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan visi, misi dan program prioritas kepala daerah sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian pembangunan daerah.
5. Sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rancangan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan



dokumen perencanaan pembangunan lainnya;

4. Maksud dan tujuan; dan

5. Sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini terdiri atas tiga subbab yaitu:

(1.) Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat :

1. Aspek geografi dan demografi;
2. Aspek kesejahteraan masyarakat;
3. Aspek daya saing daerah;
4. Aspek pelayanan umum.

(2.) Subbab Gambaran Keuangan Daerah yang memuat Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029.

(3.) Subbab Permasalahan dan Isu Strategis yang memuat:

1. Permasalahan pembangunan daerah; dan
2. Isu strategis daerah.

BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bagian yakni subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 dan subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029.



BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bagian yang terkait satu sama lain yakni subbab Program Perangkat daerah Tahun 2025-2029 dan subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi

Aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek kondisi kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Dari uraian ini diharapkan dapat terpetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Belu.

2.1.1.1 Aspek Geografis

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah administrasi Kabupaten Belu sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040 adalah 1.125,14 km², dengan posisi astronomis terletak antara koordinat 124° 40' 33" BT– 125° 15' 23" BT dan 08° 70' 30" LS – 09° 23' 30" LS, dan batas-batas administrasinya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Ombai
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Malaka
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Negara Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL)
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)



Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Belu



Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

Kabupaten Belu terbagi atas 12 Kecamatan, 69 Desa dan 12 Kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Tasifeto Barat dengan luas wilayah 223,914 Km² atau 19,50% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Atambua Barat dengan luas wilayah 10,994 Km² atau 0,98% dari luas wilayah Kabupaten Belu seperti tertera pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Belu Tahun

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	Raimanuk	9	129,924	11,55
2	Tasifeto Barat	8	223,914	19,50
3	Kakuluk Mesak	6	129,320	11,49
4	Nanaet Duabesi	4	67,818	6,03
5	Kota Atambua	4	16,301	1,45
6	Atambua Barat	4	10,994	0,98
7	Atambua Selatan	4	11,198	1,00



No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
8	Tasifeto Timur	12	209,477	18,62
9	Raihat	6	75,528	6,71
10	Lasiolat	7	61,492	5,47
11	Lamaknen	9	92,500	8,22
12	Lamaknen Selatan	8	96,674	8,59
Total		81	1.125,14	100.00

Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

Berdasarkan surat Gubernur NTT Nomor: BU.410/35.a/DPMD.5.1/10.2022, tanggal 28 Oktober 2022 perihal Kode Register 18 Desa Persiapan di Kabupaten Belu, terdapat 18 (delapan belas) desa persiapan di Kabupaten Belu sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
18 (Delapan Belas) Desa Persiapan Di Kabupaten Belu

No	Kecamatan	Nama Desa Induk	Nama Desa Persiapan
1	2	3	4
1.	Lamaknen	Fulur	Fulur Backhelin
		Makir	Hatulou
		Dirun	Weluli
2.	Tasifeto Timur	Silawan	Tukubesi
		Manleten	Manleten Barat
			Manleten Timur
3.	Raihat	Tohe	Tohe Rai Ain
			Tohe Fatukesi
4.	Tasifeto Barat	Tukuneno	Manuaman Fatukbot
			Manuaman Lidak
		Naekasa	Kubesi
			Banameta
			Raidikur
		Bakustulama	Makereknen
5.	Kakuluk Mesak	Naitimu	Welaka
		Dualaus	Lakafehan
		Kabuna	Fatubesi Lalori
6.	Lamaknen Selatan	Loonuna	Majo Rato

Sumber: Surat Gubernur NTT, 2022



Desa persiapan adalah wilayah yang dipersiapkan untuk menjadi desa baru, melalui pemecahan dari desa induk atau penggabungan beberapa desa. 18 (delapan belas) desa persiapan merupakan pemekaran dari 13 (tiga belas) desa induk. Desa persiapan ini memiliki status yang belum sepenuhnya sebagai desa definitif dan masih dalam proses persiapan sebelum ditetapkan sebagai desa baru secara resmi.

B. Letak dan Kondisi Geografi

Kabupaten Belu adalah salah satu Kabupaten dari 22 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan salah satu dari 6 Kabupaten/Kota yang terletak di daratan Pulau Timor. Posisi geografis Kabupaten Belu berbatasan darat langsung dengan Negara RDTL sepanjang 126,1 Km. Jumlah kecamatan dan desa yang berbatasan darat dan laut secara langsung dengan Negara RDTL adalah sebanyak 7 kecamatan dan 28 desa seperti pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3
Jumlah Kecamatan dan Desa Perbatasan di Kabupaten Belu

No	Kecamatan	Desa	Jumlah
1	Tasifeto Barat	Desa Lookeu	1
2	Nanaet Duabesi	Desa Nanaenoe, Nanaet dan Fohoeka	3
3	Tasifeto Timur	Desa Dafala, Takirin, Tulakadi, Silawan, Sadi, dan Sarabau	6
4	Lasiolat	Desa Maneikun, Lasiolat, Baudaok, dan Fatulotu	4
5	Raihat	Desa Asumanu, Tohe, dan Maumutin	3
6	Lamaknen	Desa Lamaksanulu, Makir, Mahuitas, Kewar, dan Maudemu	5
7	Lamaknen Selatan	Desa Henes, Lakmaras, Loonuna, Lutharato, Sisi Fatuberal, dan Debululik	6

Sumber: SIPD, Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Belu Tahun 2023



Selain 7 kecamatan yang berbatasan darat langsung dengan Negara RDTL, terdapat 1 kecamatan transit yaitu Kecamatan Kakuluk Mesak yang menghubungkan Negara RDTL ke Distrik Oeccusi dan 3 kecamatan di Kawasan Perkotaan Atambua yaitu Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Atambua Selatan yang juga ditetapkan sebagai Kecamatan Perbatasan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

C. Topografi

Kondisi topografi di wilayah Kabupaten Belu berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan ± 1500 m dpl (meter di atas permukaan laut). Berdasarkan tingkat kemiringan lereng, kondisi Topografi Kabupaten Belu dapat tergambar seperti pada Tabel 2.3.

Tabel 2.4
Kemiringan Lereng di Kabupaten Belu

No	Kecamatan	Luas Lahan Berdasarkan Kemiringan Lereng							
		0-2	2-5	5-8	8-15	15-22	22-30	30-45	> 45
1	Atambua Barat	0	3,830	5,448	0	0	0	1,717	0
2	Atambua Selatan	0	3,716	6,464	0	0	0	1,018	0
3	Kakuluk Mesak	19,635	8,081	8,966	4,243	1,250	1,953	77,145	8,048
4	Kota Atambua	0	8,130	6,691	0,013	1,466	0	0	0
5	Lamaknen	5,269	6,702	1,474	0,990	16,372	11,230	49,030	1,434
6	Lamaknen Selatan	0,022	0,125	0	0,823	15,735	17,739	62,231	0
7	Lasiolat	0,003	0,059	0,187	0,885	24,909	19,647	15,802	0
8	Nanaet Duabesi	0,044	0	0	0,495	6,25	28,525	7,894	24,61
9	Raihat	9,283	9,487	0,004	0,163	33,835	15,872	6,884	0
10	Raimanuk	0,004	21,628	4,805	34,403	2,230	41,921	24,934	0
11	Tasifeto Barat	0,030	35,757	29,288	70,298	25,035	19,352	6,862	37,292
12	Tasifeto Timur	84,550	18,386	99,387	0,003	7,114	0,022	0,016	0
	TOTAL	118,841	115,900	162,713	112,316	134,197	156,259	253,532	71,383

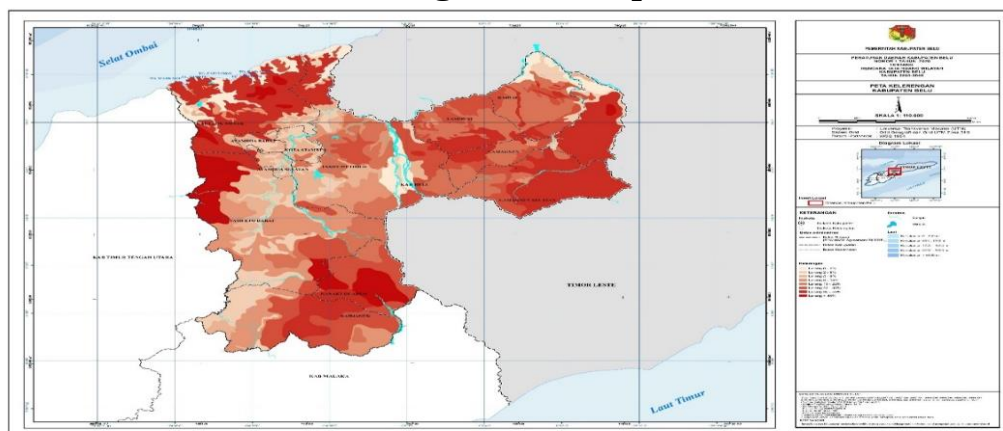
Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040



Keadaan kemiringan lahan wilayah Kabupaten Belu dikelompokkan menjadi 5 tingkatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kelerengan 0-8% atau kelerengan tingkat I, tanah dengan kemiringan lereng ini dapat digunakan secara intensif dengan pengolahan yang kecil.
2. Kelerengan 8-15% atau kelerengan tingkat II (landai), tanah dapat digunakan untuk kegiatan pemukiman dan pertanian, tetapi bila terjadi kesalahan dalam pengolahannya masih mungkin terjadi erosi.
3. Kelerengan 15-25% atau kelerengan tingkat III (agak curam), kemungkinan terjadi erosi lebih besar dibandingkan dengan kelerengan sebelumnya.
4. Kelerengan 25-45% atau kelerengan tingkat IV (curam), jika pertumbuhan menutupi permukaan tanah di tebing, maka lereng akan mudah terkena erosi.
5. Kelerengan >45% atau kelerengan tingkat V (sangat curam), kelerengan yang sangat peka terhadap erosi, kegiatannya harus bersifat non budidaya.

Gambar 2.2
Peta Kelerengan di Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020 – 2040



D. Geologi

Jenis batuan yang dijumpai di Kabupaten Belu dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kompleks Mutis (MU)

Kompleks Mutis terdiri atas batuan malihan (metamorf), dimana secara umum disusun oleh batusabak, filit, sekis, amfibolit, sekis amfibolit, kuarsit, gneis amfibolit dan granulit. Semua indikator ini berada pada bagian utara Pulau Timor, sepanjang sabuk metamorfik tersebut. Kompleks mutis dijumpai di Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat dan Kecamatan Raimanuk.

b. Formasi Maubisse Gamping

Formasi Maubisse Gamping terdiri dari batu gamping kecokelatan sampai ungu. Formasi ini dijumpai di Kecamatan Atambua Barat, Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Tasifeto Barat.

c. Formasi Maubisse Lava Bantal

Formasi Maubisse Lava Bantal terdiri dari susunan beberapa Batuan Vulkanik seperti Trakit, Senit Porafir dan Andesit Leuko yang telah mengalami perubahan yang mengakibatkan batuan berwarna kehijauan. Formasi ini dijumpai di Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

d. Formasi Bisane

Formasi Bisane terdiri dari serpih, Batu Pasir Gampingan dan Batu Sabak. Formasi ini dijumpai di Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Nanaet Duabesi dan Kecamatan Tasifeto Barat.



e. Formasi Aitutu

Formasi Aitutu terdiri dari dua bagian, dimana bagian bawah terdiri dari selang-seling batu Napal dan batu gamping sedangkan bagian atas terdiri dari pergantian pelapisan kolsilulit (batu gamping serpihan) dengan serpih yang berwarna kelabu. Berumur trias akhir. Formasi ini dijumpai di Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

f. Kompleks Bobonaro

Terdiri dari dua satuan batuan yaitu lempung serpihan dan bongkahan-bongkahan asing yang bermacam-macam jenis dan ukuran. Kontak dengan formasi di atasnya adalah tektonik (ketidaksejajaran). Berumur Myosin tengah sampai Pilosen. Kompleks Bobonaro dapat dijumpai di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu.

g. Formasi Noele

Formasi Noele Terdiri dari Napal pasiran berselang-seling dengan batu pasir, konglomerat dan sedikit tuff desit. Berumur Plio-pleistosen. Formasi Noele dapat dijumpai di Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

h. Formasi Batu gamping coral

Formasi Batu Gamping Koral Terdiri dari batu gamping berwarna putih dan batuan gamping napalan setempat berkembang batu gamping terumbu berkorat. Berumur quarter. Formasi ini dapat dijumpai di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur.



i. Alluvium

Alluvium merupakan sejenis tanah liat, halus dan dapat menampung air hujan yang tergenang. Dengan demikian, padi sawah sangat sesuai ditanam di tanah jenis alluvium. Tanah alluvium biasanya terdapat di tebing sungai, delta sungai dan dataran yang tergenang banjir. Banjir yang melimpah akan menimbulkan endapan tanah alluvium di tepi sungai. Alluvium dapat dijumpai di Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

j. Batuan Ultra Basa

Batuan Ultra Basa adalah batuan beku yang kandungan silikanya rendah (18%), tinggi akan kandungan FeO, rendah akan kandungan kalium dan umumnya kandungan mineral mafiknya lebih dari 90%. Batuan ultrabasa umumnya terdapat sebagai opiolit. Batuan Ultra Basa dapat dijumpai di Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasialat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

k. Formasi Noil Toko

Formasi Noil Toko tersusun oleh Batuan Konglomerat, Batu Gamping Konglomeratan, Batu Gamping Globigerina, Batupasir Gampingan, Napal, Tuf, Tuf Gampingan dan serpih. Formasi Noil Toko dapat dijumpai di Kecamatan Raimanuk.

l. Formasi Wailuli

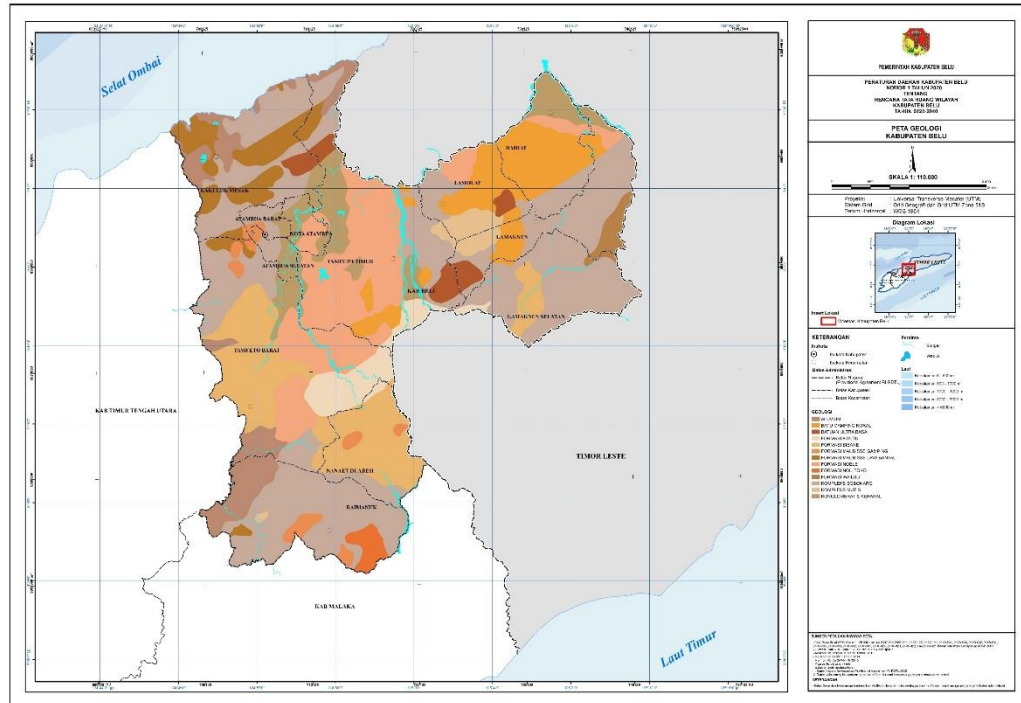
Formasi Wailuli didominasi oleh batu lanau homogen yang berwarna gelap dan batu serpih yang berselang-seling dengan Batu Gamping Kaya Organik, kalsilutit dan Batu Lempung. Formasi Wailuli dapat dijumpai di Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan.



m. Batuan Konglomerat dan Kerakal

Batuan Konglomerat adalah batuan sedimen klastik yang mempunyai bentuk fragmen membundar (*rounded*). Ukuran diameter fragmennya lebih besar dari 2mm, ruang antara fragmen umumnya diisi dengan partikel yang lebih kecil dan/atau semen kimia yang mengikat batuan bersama-sama. Batu Kerakal adalah potongan batuan yang berukuran 150–250 mm. Batuan Konglomerat dan Batuan Kerakal dapat dijumpai di Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

Gambar 2.3
Peta Geologi di Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020 – 2040



Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Belu dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Aluvial:

Tanah Aluvial merupakan jenis tanah yang terbentuk karena hasil endapan. Endapan yang dimaksud adalah endapan dari sungai, danau, atau juga dari air hujan yang biasanya sedikit menggenang karena cekungan. Tanah aluvial menjadi tanah yang subur karena unsur hara yang ada di dalam air secara perlahan terserap ke dalam tanah. Keunggulan tanah aluvial sangat bermanfaat untuk irigasi, kaya akan sumber daya mineral, cenderung mudah diolah dan dapat menyerap air secara maksimal. Jenis tanah Aluvial dapat dijumpai hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu kecuali Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Raihat.

b. Grumosol

Tanah grumusol merupakan tanah yang terbentuk dari batuan induk kapur dan tuffa vulkanik yang umumnya bersifat basa sehingga tidak ada aktivitas organik didalamnya. Hal inilah yang menjadikan tanah ini sangat miskin hara dan unsur organik lainnya. Sifat kapur itu sendiri yaitu dapat menyerap semua unsur hara di tanah sehingga kadar kapur yang tinggi dapat menjadi racun bagi tumbuhan. Karakteristik tanah grumosol memiliki karakteristik bertekstur lempung, Struktur lapisan atas dan lapisan bawah sangat berbeda, koefisien pemuaian tinggi, kandungan zat organik rendah dan memiliki pH netral hingga alkali. Meskipun memiliki sifat dan karakteristik yang tidak begitu menguntungkan, tanah grumusol masih menyimpan prospek salah satunya untuk areal persawahan. Namun sebelumnya harus memperhatikan aspek-aspek pendukung seperti drainase yang baik dan jaringan irigasi yang





memadai dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif dan kekurangan tanah grumusol ini. Jenis tanah Grumusol dapat dijumpai di Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Tasifeto Barat.

c. Latosol

Tanah latosol atau tanah incepticol merupakan tanah yang mempunyai lapisan solum. Lapisan solum yang dimiliki oleh tanah latosol ini cenderung tebal dan bahkan sangat tebal. Lapisan solum tanah ini antara 130 cm hingga 5 meter dan bahkan lebih. Batas horizon dari tanah ini tidaklah begitu terlihat jelas. Karakteristik tanah latosol adalah Memiliki solum tanah yang agak tebal hingga tebal, yakni mulai sekitar 130 cm hingga lebih dari 5 meter. Tanahnya berwarna merah, coklat, hingga kekuning-kuningan, tekstur tanah pada umumnya adalah liat, struktur tanah pada umumnya adalah remah dengan konsistensi gembur, memiliki pH 4,5 hingga 6,5, yakni dari asam hingga agak asam, memiliki bahan organik sekitar 3% hingga 9%, namun pada umumnya hanya 5% saja, mengandung unsur hara yang sedang hingga tinggi. Unsur hara yang terkandung di dalam tanah bisa dilihat dari warnanya. Semakin merah warna tanah maka unsur hara yang terkandung adalah semakin sedikit, Mempunyai infiltrasi agak cepat hingga agak lambat, daya tanah air cukup baik dan memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap erosi tanah. Jenis tanah Latosol dapat dijumpai di seluruh Kecamatan di Kabupaten Belu.

d. Mediteran

Tanah mediteran adalah tanah yang memiliki tingkat kesuburan yang rendah dan terbentuk dari proses pelapukan batuan kapur. Tanah ini juga mengandung banyak mineral seperti besi, air, aluminium, dan senyawa organik lainnya yang membantu





menyuburkan tanah. Selain itu, pada umumnya tanah ini dimanfaatkan untuk menanam padi. Jenis tanah Mediteran dapat dijumpai di Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.

e. Renzina

Tanah Renzina atau tanah mollisol adalah tanah yang bahan induknya berupa batuan basalt, batu kapur, dan granit. Ciri-ciri tanah Renzina antara lain harus kering, berwarna cokelat, merah, dan hitam, serta mengandung bahan organik. Tanah Renzina, adalah tanah yang dihasilkan dari pelapukan bebatuan kapur yang ada di daerah yang curah hujannya cukup tinggi. Adapun ciri-ciri tanah jenis ini antara lain warnanya kehitaman serta sangat miskin unsur hara. Tanah ini banyak ditemukan di wilayah berkapur. Renzina merupakan tanah organik diatas bahan berkapur yang memiliki tekstur lempung seperti vertisol. Tanah Renzina memiliki kadar lempung yang tinggi, teksturnya halus dan daya permeabilitasnya rendah sehingga kemampuan menahan air dan mengikat air tinggi. Tanah Renzina berasal dari pelapukan batuan kapur dengan curah hujan yang tinggi. Tanah memiliki kandungan Ca dan Mg yang cukup tinggi, bersifat basa, berwarna hitam, serta hanya mengandung sedikit unsur hara. Jenis tanah Renzina dapat dijumpai di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lasiolat dan Kecamatan Raihat.



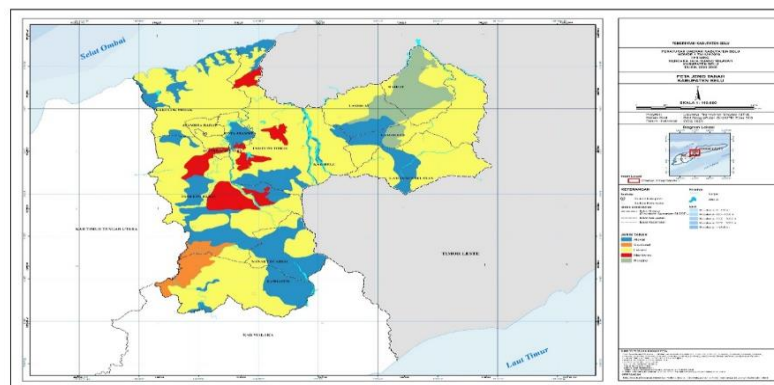


Tabel 2.5
Jenis Tanah di Kabupaten Belu

No	Jenis Tanah	Lokasi
1	Aluvial	Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Raimanuk.
2	Grumosol	Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Tasifeto Barat.
3	Latosol	Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Barat, Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Raimanuk.
4	Mediteran	Kecamatan Atambua Selatan, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Raihat, Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Tasifeto Timur.
5	Renzina	Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lasiolat dan Kecamatan Raihat.

Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

Gambar 2.4
Peta Jenis Tanah di Kabupaten Belu



Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040



E. Hidrologi

Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Belu dijelaskan sesuai kondisi air permukaan dan air tanah.

(1.) Air Permukaan

Air permukaan yaitu sumber air yang mengalir di permukaan bumi, dapat dilihat secara visual tanpa menggunakan peralatan tertentu. Air permukaan sebagian besar terdiri dari air sungai, mata air, air waduk dan air yang terdapat di dalam danau. Potensi sumber air permukaan di wilayah Kabupaten Belu cukup merata di beberapa kecamatan, umumnya berupa mata air yang banyak digunakan sebagai kebutuhan air bersih. Kualitas mata air cukup baik, debit rata-rata mata air berkisar antara 5–200 liter per detik dan akan mengalami kekurangan debit hingga 70% saat musim kemarau (September, Oktober dan November).

1. Air Sungai

Sungai-sungai yang ada di Kabupaten Belu mengalir ke utara dan selatan mengikuti arah kemiringan lereng, sehingga membentuk Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) ataupun DAS mikro. Sungai yang ada memiliki rata-rata panjang aliran 10-50 km dengan anak sungai membentuk orde yang bersifat *horton* dan *shreve*. Pada umumnya sungai-sungai ini mempunyai fluktuasi aliran air yang cukup tinggi pada musim hujan berair dan sering terjadi banjir dengan pola aliran air sepanjang tahun (*perennial*), mengalir hanya pada musim hujan saja (*intermiten*); sedangkan pada musim kemarau kestabilan airnya berkurang bahkan ada yang tidak berair sama sekali atau berair pada waktu datang hujan saja (*ephemeral*).

Salah satu potensi air permukaan diperoleh dari Daerah Aliran Sungai (DAS) yang merupakan areal





tangkapan air hujan dan pengaliran air permukaan berlangsung. DAS di Kabupaten Belu didominasi oleh topografi dengan kelas lereng yang termasuk kategori agak curam dengan kemiringan 26-40%, sehingga sangat peka terhadap erosi. Pola aliran DAS tersebut bersifat dendritik dengan kerapatan aliran air bersifat tergenang diantaranya adalah DAS Hasfuik Maubesi, DAS Fatuketi, DAS Selowai, DAS Umaklaran, DAS Dualaus, DAS Manukakae, DAS Silawan, DAS Lasiolat, DAS Dualasi, DAS Bauho, DAS Lamaksanulu, DAS Talau, DAS Lamaknen dan DAS Duarato.

2. Mata Air

Sumber air bersih dari mata air adalah jenis sumber air baku yang banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih di Kabupaten Belu. Pada saat ini PDAM Kabupaten Belu telah memanfaatkan 7 (tujuh) mata air dan 1 (satu) bendungan. Tabel 2.6 menyajikan data sumber mata air yang telah dimanfaatkan PDAM Kabupaten Belu.

Tabel 2.6
Sumber Air Baku Yang Dimanfaatkan PDAM Kabupaten Belu

No	Nama Sumber Air Baku	Jenis Sumber	Debit		Wilayah Pelayanan	Keterangan
			Terpasang	Riil		
			(m3/detik)	(m3/detik)		
1	Lahurus	Mata Air	20	15	Desa Maneikun, Desa Manleten, Kel. Fatubenao, Kel. Beirafu, Kel. Tulamalae, Kel. Umanen, Kel. Manuaman, Kel. Rinbesi	Aktif



2	Molosoan	Mata Air	20	10	Desa Sarabai, Desa Bauho, Desa Manleten, Kel. Fatubenao, Kel. Tenukiik, Kel. Manumutin, Kel. Atambua	Aktif
3	Tirta Bron A	Mata Air	15	5	Kel. Fatukobot, Kel. Lidak, Kel. Rinbesi, Kel. Berdao, Kel. Manuaman, Kel. Atambua	Aktif
4	Tirta Bron C	Mata Air	12	4	Kel. Rinbesi, Kel. Atambua, Kel. Berdao	Aktif
5	Weutu	Mata Air	15	15	Kel. Manumutin, Kel. Tulamalae, Kel. Umanen	Aktif
6	MA Wefia	Mata Air	2,5	2,5	Desa Lasiolat	Aktif
7	SM Beilaka	Sumur Bor	2,5	2,5	Desa Silawan	Tidak Aktif
8	MA Webenahi	Mata Air	1	0	Desa Silawan	Tidak Aktif
9	SB. Bautasik	Sumur Bor	2,5	0	Desa Kabuna	Tidak Aktif
10	Weoe	Mata Air	10	5	Kel. Fatubenao, Kel. Beirafu, Kel. Tulamalae, Kel. Umanen, Kel. Manuaman, Kel. Rinbesi	Aktif
11	SB. Motabenar	Sumur Bor	2,5	0	Desa Silawan	Tidak Aktif
12	IPA Haekrik	Bendungan	30	5	Kel. Fatukbot, Kel. Fatubenao, Kel. Atambua, Kel. Tanukiik, Kel. Manumutin	Aktif
Jumlah			133	64		

Sumber: PDAM Kabupaten Belu, 2024

Berikut ini pada tabel 2.7 tergambar sumber air baku alternatif yang dapat digunakan untuk menambah air baku bagi pemenuhan kebutuhan penduduk Kabupaten Belu.



Tabel 2.7
Alternatif Sumber Air Baku di Kabupaten Belu

No	Kecamatan	Sumber Air Baku		Debit (L/detik)
1	Tasifeto Timur	1	Embung Sirani	20
		2	MA. We Utu	20
		3	MA. Wehas	2
		4	MA. Wedomu	2
		5	Embung Haekrit	30
		6	MA. Kenebibi	0,2
		7	MA. Tulakadi/Webenahi	2
		8	SB. Motabenar	3
		9	SB. Silawan 2/ beilaka	5
		10	SB. Waskita /Silawan 1	-
		11	MA. Wesalulun	0,3
		12	MA. Wekabaan	3
		13	Biapuruk	1
		14	Weoi	<1
		15	Wetotan	3
		16	Wefulan	2
		17	MA. Lebung	9,05
		18	MA. Weabat	2,35
		19	MA. Abatsali	
		20	MA. Tiis	0,16
		21	SB. Bautasik	2,5
		22	SB. Beilaka	5
		23	MA. Webenahi	3
		24	SB. Motabenar	3
		25	Bendungan Haekrit	30
				128,56
2	Kakuluk Mesak	26	Bendungan Rotiklot	80
		27	SB. Bautasik	5
		28	MA. Haliwen 1	2,3
		29	MA. Haliwen 2	5,3
		30	MA. Haliwen 3	1,36
		31	Sumur We Utu	20
				73,96
3	Tasifeto Barat	32	MA. Lebun	6,9
		33	Wehedafehan	>1



No	Kecamatan	Sumber Air Baku		Debit (L/detik)
		34	Tulatudik	1
		35	Seo B	1
		36	Kali Waekabu	5,67
		37	Tirta C	12
		38	MA. Likis	11,53
		39	MA. Tabian	2,6
		40	MA. Wevanes	2,3
		41	Bendungan We Likis	80
				43
4	Nanaet Duabesi	42	MA. Webot	0,5
		43	Ma. Wedare	2,2
		44	Wehedan	<1
		45	Weibuimesek	< 1
		46	Weuas	1
		47	Hutan Kopi	1
		48	Dibawa Hutan Kopi	3
		49	Tubaki	2
		50	Webihale	1,42
		51	Wekanukur	0,39
				11,51
5	Raimanuk	52	MA. Abatbuti 1	28,47
		53	MA. Abatbuti 2	1,5
		54	MA. Abatbuti 3	0,5
		55	MA. Naiku	5,96
		56	Wehanetan	>2
		57	Wekanukur	>2
		58	Wehatook	3,89
		59	MA. Nania 1	0,59
		60	MA. Nania 2	1,48
		61	MA. Wekone	2,3
		62	MA. Mauasu	0,5
				45,19
6	Lasiolat	63	MA. Tunamuti	4,42
		64	MA. Abatmatan	2,8
		65	MA. Weau	3,06
		66	MA. Wematan Waik 1	3,3
		67	MA. Siata	28,57



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

No	Kecamatan	Sumber Air Baku		Debit (L/detik)
		68	MA. Wetihu	246,9
		69	MA. Wemaruut	3,9
		70	MA. Wekaen	2,88
		71	MA. Fafakur	1
		72	MA. Fohowai	1
		73	MA. Wesubaer	
		74	MA. Sainuan	1,006
		75	MA. Wereha	12,58
		76	MA. Lahurus	20
		77	MA. We Oe	15
		78	MA. Molosoan 2	20
				366,42
7	Raihat	79	MA. Webot	144,9
		80	MA. Wekiik	0,74
		81	MA. Weraikuak 1	2,2
		82	MA. Wesanis	17,26
		83	MA. Rusan	53,7
		84	MA. Wesaseik	1,08
		85	MA. Maumuku	0,12
		86	MA. Wesakis	1,2
		87	MA. Beabot	0,3
		88	Wehitas	>1
		89	Asumanu 1	2
		90	Asumanu 2	>1
		91	MA. Wetear	1,51
		92	MA. We Buris	0,52
				225,53
8	Lamaknen	93	MA. Lesuama	0,35
		94	MA. Selle	-
		95	MA. Ewigelon	0,5
		96	MA. Mauhelek	99,55
		97	MA. We Hut	1,14
		98	Hulutau	>1
		99	SPAM Berewen	
		100	MA. We Abateu	1,04
		101	MA. We Bol (Taon)	
		102	MA. Il Bugili	



No	Kecamatan	Sumber Air Baku		Debit (L/detik)
				102,58
9	Lamaknen Selatan	103	MA. Ilgubul	1,94
		104	MA. Bontil	0,02
		105	MA. Giraltui	2,72
		106	Asahale/Purkou	<1
		107	Koban	<1
		108	Foholulik	>1
		109	MA. We Natal	1,11
				5,79

Sumber : Review Dokumen Rencana Induk SPAM Kabupaten Belu - 2023

Sangat penting pemanfaatan sumber mata air yang ada di Kabupaten Belu untuk dioptimalkan. Sumber mata air di Kabupaten Belu termasuk tipe air tanah yang diremajakan yaitu air yang untuk sementara waktu telah dikeluarkan dari daur hidrologi oleh pelapukan, maupun oleh sebab-sebab lain dan kembali ke daur hidrologi lagi dengan proses-proses metamorfis. Jumlah ketersediaan sumber mata air sebanyak $\pm$ 604 sumber mata air yang tersebar di 12 Kecamatan, dimana 45 % sumber mata air dapat mengeluarkan air sepanjang tahun dan tidak dipengaruhi oleh curah hujan (perennial springs) dengan kondisi ketersediaan air cukup baik; dan sebanyak 35 % sumber mata air bersifat musiman karena mengeluarkan air hanya pada musim tertentu dan tergantung pada curah hujan (intermitent springs), dengan kondisi ketersediaan air sedikit serta 20 % sumber mata air yang kering di musim kemarau dan dapat mengeluarkan air pada periode tertentu saja (periodic springs).





3. Embung dan Bendungan

Selain sungai dan mata air, potensi sumber air baku di Kabupaten Belu yaitu berupa tampungan air. Tampungan air yang ada tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku, irigasi dan kebutuhan bagi ternak maupun usaha pertanian tanaman hortikultura (sayuran).

Potensi tampungan air baku di Kabupaten Belu adalah embung dan bendungan. Embung atau biasa disebut cekungan penampung adalah cekungan yang dalam disuatu daerah perbukitan. Air yang berada di dalam cekungan tersebut adalah limpasan air hujan yang jatuh di daerah tangkapan dan berguna untuk meningkatkan kualitas air di badan terkait dan menjaga kualitas air tanah. Berikut ini adalah uraian nama, lokasi dan perkiraan debit embung dan bendungan di Kabupaten Belu.

Tabel 2.8
Potensi Sumber Air Baku Embung dan Bendungan
di Kabupaten Belu

No.	Kecamatan	Lokasi	Nama Embung /Bendungan	Kondisi
1	Tasifeto Timur	Desa Manleten	Bendungan Haekrit	Perlu dilakukan pengerukan sedimen
		Desa Umaklaran	Bendungan Haliwen	Perlu dilakukan pengerukan sedimen
2	Kakuluk Mesak	Desa Fatuketi	Bendungan Rotiklot	Kualitas air buruk, perlu dilakukan pengolahan Sebelum dikonsumsi

Sumber: Laporan Perencanaan Review Design Rencana Induk SPAM
Kabupaten Belu, 2023

a. Bendungan Haliwen

Bendungan Haliwen terletak di Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur. Embung ini dibangun pada Tahun 2002 sampai 2006 dengan sumber dana dari APBN. Adapun data teknis dari Embung Sirani adalah sebagai berikut:



- a) Luas DAS : 230 Ha
- b) Panjang Tanggul: 220 m
- c) Tinggi Tanggul : 16,5 m
- d) Tampung Kotor : 2.396.000 m³

Kapasitas debit terpasang Bendungan Haliwen ±20 liter/detik, namun saat ini sumber air baku dari bendungan tersebut belum dapat dimanfaatkan karena airnya tidak layak digunakan sebagai air baku sehingga perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Salah satu penyebabnya karena sedimen di dalam bendungan terlalu tebal dan IPA (Instalasi Pengelolaan Air) Sirani tidak dioperasikan akibat biaya pengoperasian unit instalasi pengolahan air yang mahal sehingga jaringan eksisting yang ada dialihkan ke Mata Air Wae Utu.

b. Bendungan Haekrit

Bendungan Haekrit adalah bendungan irigasi yang terdapat di Kabupaten Belu yang dibangun pada Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009 dengan sumber dana LOAN IP-509. Bendungan Haekrit berada di Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur. Luas DAS Bendungan Haekrit sebesar 29,4 km² dengan tata guna lahan di daerah aliran sungai pada umumnya berupa hutan ringan dan semak belukar. Pada saat ini sumber air baku dari Bendungan Haekrit yang digunakan oleh PDAM memiliki kapasitas debit terpasang sebanyak 30 liter/detik dan belum dimanfaatkan sama sekali, sehingga debit tersebut berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber air baku.

c. Bendungan Rotiklot

Bendungan Rotiklot berada di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak yang merupakan salah satu kecamatan



perbatasan RI-RDTL. Saat ini bendungan Rotiklot belum dapat dilakukan pengukuran debit produksi sumber air baku, disebabkan karena bendungan ini masih dalam tahap pengisian. Kapasitas debit sumber air baku bendungan ini juga diprediksi memiliki debit yang cukup besar karena bendungan tersebut memiliki volume sebesar 2,79 juta m³ sehingga berpotensi sebagai sumber air baku.

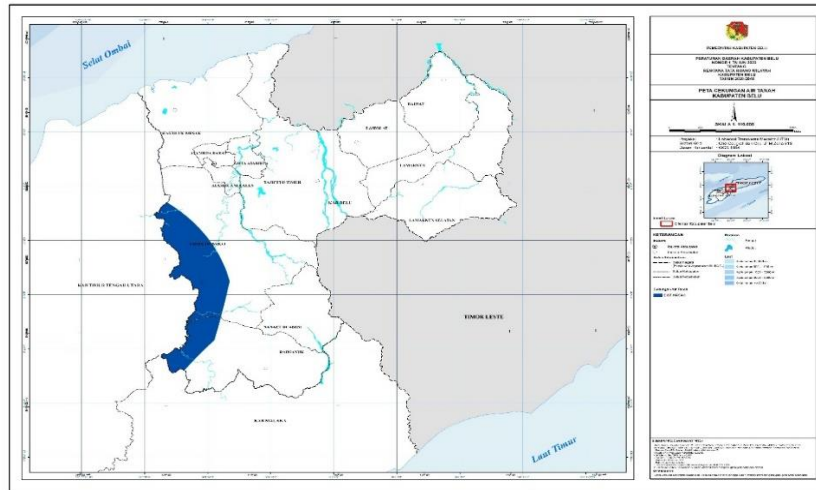
(2.) Air Tanah

Air tanah merupakan komponen penting dalam siklus hidrologi dari sumber daya air di daerah aliran sungai. Air tanah mengalir lambat dan kapasitas keseluruhannya ditentukan oleh kondisi geologi, morfologi dan kondisi hidrogeologi setempat.

Potensi air tanah di wilayah Kabupaten Belu adalah air yang berada pada lapisan di bawah permukaan tanah. Kedalaman air tanah tidak sama pada setiap tempat di wilayah Kabupaten Belu. Hal itu tergantung pada tebal tipisnya lapisan permukaan di atasnya dan kedudukan lapisan air tanah tersebut. Kedalaman air pada sumur-sumur yang digali merupakan cerminan kedalaman air tanah pada suatu tempat. Sebaran potensi sumber air tanah (*ground water basin*) di wilayah Kabupaten Belu memiliki satu Cekungan Air Tanah (CAT) yaitu CAT Aeroiki.



Gambar 2.5
Peta Cekungan Air Tanah di Kabupaten Belu

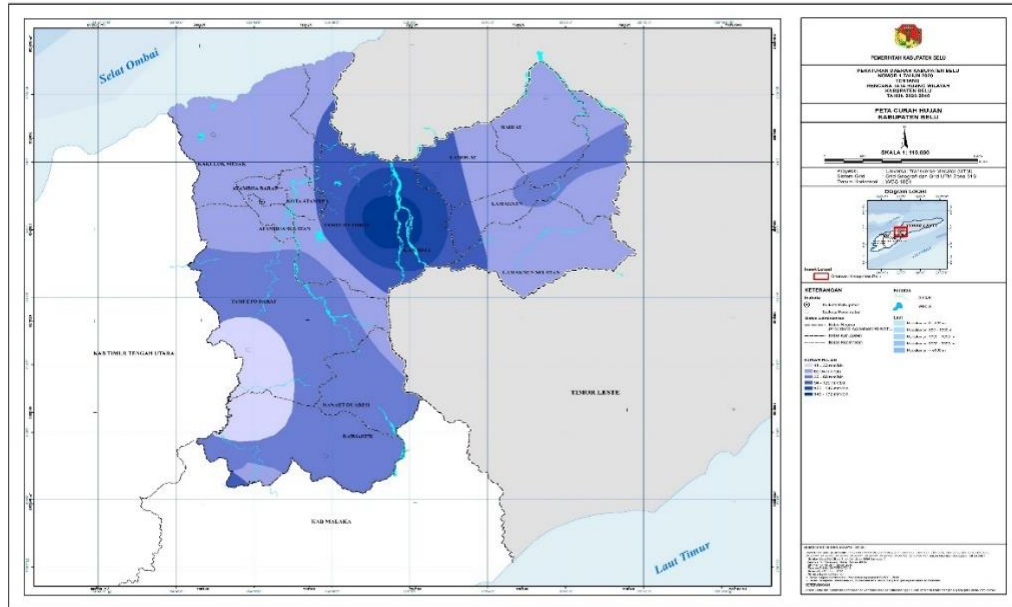


Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

F. Klimatologi

Daerah Kabupaten Belu dengan temperatur rata-rata 24-34°C beriklim tropis, umumnya berubah-ubah tiap setengah tahun berganti dari musim kemarau dan musim hujan dengan musim kemarau yang lebih dominan. Musim hujan yang sangat singkat dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei. Temperatur di Kabupaten Belu memiliki rata-rata suhu sebesar 27,6°C dengan interval suhu 21,5-33,7°C. Rata-rata curah hujan terendah di Kabupaten Belu pada kisaran 16-42 mm/bulan di sebagian wilayah Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Raimanuk. Rata-rata curah hujan tertinggi pada kisaran 146-172 mm/bulan di sebagian wilayah Kecamatan Tasifeto Timur. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Belu secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6
Peta Curah Hujan di Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

G. Hidro-Oseanografi

Hidro-oseanografi menggambarkan tentang sifat-sifat dari pergerakan air laut yang meliputi gelombang laut, pasang surut dan arus laut.

a. Gelombang: Hasil studi Rencana Induk Pelabuhan Atapupu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (2014) menunjukkan bahwa di laut dalam arah gelombang paling dominan berasal dari arah Timur (41,76%) dengan kisaran tinggi gelombang antara 0,1-0,2 m dengan besaran gelombang signifikan (H_s) adalah 0,2 m yang didasarkan pada analisis mawar gelombang (*Waverose*). Selain itu, berdasarkan pengamatan-pengamatan terdahulu dan informasi dari nelayan-nelayan setempat ternyata tinggi gelombang laut berkisar antara 0,30-0,80 m di dekat pantai,



terutama pada Musim Barat dan Tenggara; sedangkan di daerah perairan yang lebih jauh dari pantai dapat mencapai 1,00 m.

b. Pasang Surut: Hasil peramalan untuk lokasi Atapupu dengan metode *least square* diketahui bahwa tipe pasang surut sekitarnya adalah tipe *mixed tide* (tipe campuran) condong ke harian ganda dengan tunggang pasang surut maksimum tertinggi $\pm 3,95\text{m}$ *High Water Spring* (HWS), *Lowest Water Spring* (LWS) = + 0,00 m; sedangkan *Mean Sea Level* (MSL) = + 1,89 m.

c. Arus Laut: Dalam laporan kajian aspek lingkungan PPI Atapupu dinyatakan bahwa arah arus laut di perairan utara Kabupaten Belu (Atapupu dan sekitarnya) adalah arus bolak-balik dimana pada saat air surut arus mengarah ke Timur Laut dan Barat Laut, sedangkan pada saat air pasang arus mengarah ke Tenggara dan Barat Daya dengan kecepatan arus maksimum 0,3 meter per detik (*Laporan Akhir Digitasi Peta Lingkungan Laut NTT, 2009*). Berdasarkan hasil permodelan transformasi gelombang untuk kedua kondisi (HWS dan LWS) dapat dilihat bahwa pada saat muka air LWS terjadi, gelombang yang datang dari laut dalam cenderung pecah (ombak pecah) karena sibet (dasar laut) terbentuk dari batu karang (coral) sebelum mencapai bibir pantai dengan elevasi dasar gelombang pecah = - 0,4 m LWS, sedangkan pada kondisi muka air HWS, gelombang yang datang dari laut dalam cenderung pecah di sebelah hulu bibir pantai (yaitu setelah mencapai daratan) sehingga akan cukup berbahaya karena dapat mengerosi lahan darat (Hasil Elaborasi dengan Distrik Navigasi Kelas II-Kupang, 2016). Kondisi Hidro-oceanografi ini dapat dijadikan rujukan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan pesisir yang ada di wilayah Kabupaten Belu.





2.1.1.1.1 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan data penggunaan lahan yang telah dijelaskan sebelumnya, kawasan budidaya pertanian tanaman pangan dan pertanian hortikultura mendominasi penggunaan lahan di Kabupaten Belu. Hal ini merupakan potensi dalam pengembangan wilayah Kabupaten Belu yang dipertegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040.

Rencana pola ruang Kabupaten Belu telah dibagi menjadi: kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan strategis dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Atambua sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

A. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan mempunyai nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan lindung di Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9
Kawasan Lindung di Kabupaten Belu

No	Kawasan Lindung	Luas (Ha)	Lokasi
1.	Hutan Lindung		
	• Tukubesi	272	Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Kakuluk Mesak
	• Bifemnasi-Sonmahole	8.536	Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Atambua Barat dan Kecamatan Atambua Selatan
	• Lakaan Mandeu	21.712	Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan
	• Lakaan	3.144	Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen Selatan dan Kecamatan Lamaknen



No	Kawasan Lindung	Luas (Ha)	Lokasi
	• Fatukaduak	1.700	Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur
	• Fatusakar	9	Kecamatan Raimanuk dan Kecamatan Nanaet Duabesi.
2.	Kawasan Resapan Air	36.335	Terdapat pada seluruh kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi
3.	Kawasan Sempadan Pantai.	197	Sepanjang tepian pantai di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Tasifeto Timur
4.	Kawasan Sempadan Sungai	2.255	Sempadan sungai terdapat di Sungai Buik, Luradik, Baukama, Baukoek, Motamoru, Welulik, Malibaka dan Talau
5.	Kawasan Sekitar Bendungan	80	Sekitar bendungan Rotiklot, embung Haekrit, embung Sirani dan embung kecil lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan
6.	Kawasan Ekosistem Mangrove	52	Hutan bakau sepanjang pantai utara di Kecamatan Kakuluk Mesak

Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

Selain kawasan yang disebutkan di atas, kawasan lindung juga meliputi Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan, kawasan lindung geologi dan kawasan cagar budaya. Luasan RTH Publik Kawasan Perkotaan Atambua sebesar 433.86 Ha atau 11,27% dari luas wilayah perkotaan Atambua.

B. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kabupaten Belu meliputi:

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, meliputi:
 - a. Kawasan hutan produksi terbatas, terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dengan luasan kurang lebih 653 Ha;



b. Kawasan hutan produksi tetap, terdiri atas

- 1) Kawasan produksi tetap Halilulik terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dengan luasan kurang lebih 604 Ha;
- 2) Kawasan produksi tetap Wemata terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dengan luasan kurang lebih 203 Ha;
- 3) Kawasan produksi tetap Udukama terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat dengan luasan kurang lebih 155 Ha;

2. Kawasan Peruntukan Pertanian, meliputi:

- a. Kawasan tanaman pangan terdapat di Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Lasiolat dengan luasan kurang lebih 3.849 Ha atau 3,42% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Kawasan tanaman pangan ini ditetapkan sebagai Kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- b. Kawasan hortikultura tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dengan luas kurang lebih 58.198 Ha atau 51,73% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Komoditas hortikultura meliputi alpukat, belimbing, semangka, jeruk keprok soe, jeruk besar, jambu biji, jambu air, nangka, pepaya, nenas, pisang, sirsak, sukun, dan sayur-sayuran kubis, sawi, bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, kacang panjang, cabai besar, cabai rawit, tomat, terung dan kangkung.
- c. Kawasan Perkebunan terdapat di seluruh kecamatan dengan luasan kurang lebih 2.892 Ha atau 2,57% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Komoditas perkebunan meliputi kemiri, kelapa, kopi, jambu mete, pinang, tembakau, siri, dan lain-lain sesuai potensi wilayah.



d. Kawasan Peternakan meliputi:

- 1) Kawasan usaha peternakan Sonaf Tari Tasain terdapat di Kecamatan Raimanuk meliputi Desa Teun dan Desa Tasain.
- 2) Kawasan usaha peternakan Uaboeck terdapat di Kecamatan Raimanuk meliputi Desa Mandeu, Desa Duakoran dan Desa Faturika, Kecamatan Nanaet Duabesi meliputi Desa Dubesi dan Desa Nanaenoe serta Kecamatan Tasifeto barat meliputi Desa Lawalutolus.
- 3) Kawasan usaha peternakan Sonis Laloran terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat meliputi Desa Bakustulama, Desa Derokfaturene dan Desa Naekasa.
- 4) Kawasan usaha peternakan Fahinuan Nuadato terdapat di Kecamatan Tasifeto Timur meliputi Desa Sadi, Desa Sarabau, Desa Bauho, Desa Umaklaran dan Desa Manleten.
- 5) Kawasan usaha peternakan Makun Kawasan terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak meliputi Desa Fatuketi dan Desa Dualaus.
- 6) Kawasan usaha peternakan Piebulak terdapat di Kecamatan Lamaknen Selatan meliputi Desa Loonuna, Desa Lutarato, Desa Henes dan Desa Debululik.

3. Kawasan Peruntukan Perikanan meliputi:

- a. Kawasan perikanan tangkap di laut meliputi Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur dan kawasan perikanan tangkap di perairan umum diarahkan di sekitar Embung Haekrit dan Embung Sirani di Kecamatan Tasifeto Timur dan Bendungan Rotiklot di Kecamatan Kakuluk Mesak dengan luas kurang lebih 218 Ha;



- b. Kawasan perikanan budidaya air tawar di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Raihat, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Atambua Selatan dan Kecamatan Atambua Barat dengan luas kurang lebih 1.624 Ha. Kawasan perikanan budidaya air payau berupa bandeng berada di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur dengan luas kurang lebih 111 Ha;
 - c. Kawasan perikanan budidaya air laut terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur;
 - d. Sarana penunjang perikanan terdiri atas:
 - 1) Pangkalan pendaratan ikan di Atapupu, Kecamatan Kakuluk Mesak; dan
 - 2) Tempat pelelangan ikan di Atapupu Kecamatan Kakuluk Mesak.
4. Kawasan Peruntukan Pertambangan meliputi:
- a. Kawasan pertambangan mineral logam meliputi potensi logam berat tersebar di Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lasiolat dan potensi mangan tersebar di Kecamatan Raimanuk, Kecamatan Nanaet Duabesi, Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kecamatan Tasifeto Timur, Kecamatan Lasiolat, Kecamatan Lamaknen dan Kecamatan Lamaknen Selatan;
 - b. Kawasan pertambangan mineral bukan logam meliputi potensi batu bangunan tersebar di Kecamatan Nanaet Duabesi, Tasifeto Timur, Lamaknen Selatan, Lamaknen dan Lasiolat; dan



c. Kawasan pertambangan batuan meliputi:

- 1) Potensi tambang marmer di Kecamatan Tasifeto Barat, Kecamatan Kota Atambua dan Kecamatan Kakuluk Mesak;
- 2) Potensi tambang batu lempung di Kecamatan Lamaknen, Kecamatan Kota Atambua, Kecamatan Tasifeto Timur dan Kecamatan Tasifeto Barat;
- 3) Potensi batu gamping koral tersebar di Kecamatan Tasifeto Barat dan Kecamatan Raimanuk;
- 4) Potensi batu setengah permata dan Kristal kuarsa di Kecamatan Raihat dan Kecamatan Kakuluk Mesak; dan
- 5) Potensi pasir dan batu kali tersebar di sepanjang badan sungai di Kabupaten Belu.

5. Kawasan Peruntukan Industri meliputi rencana kawasan peruntukan industri dan sentra industri kecil dan menengah. Rencana kawasan peruntukan industri dan pergudangan diarahkan di luar Perkotaan Atambua yaitu pada Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Barat dengan luas kurang lebih 80 Ha.

Sentra industri kecil dan menengah terdiri atas:

- a. Sentra industri kecil menengah hasil pertanian dan perkebunan yang terdiri atas makanan ringan, industri kopi bubuk, industri tahu dan tempe, industri gula aren yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu;
- b. Sentra industri kecil menengah hasil kehutanan yang terdiri atas perabot rumah tangga dan kayu, ukiran kayu dan kerajinan kayu cendana, kasur dan bantal yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu;



- c. Sentra industri kecil menengah hasil peternakan berupa pengolahan dan pengawetan daging yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Belu;
 - d. Sentra industri kecil menengah minyak nilam terdapat di Desa Lakmaras, Desa Henes, Desa Loonuna Kecamatan Lamaknen Selatan dan Desa Maudemu Kecamatan Lamaknen;
 - e. Sentra industri kecil menengah hasil olahan ikan berupa tuna loin, abon ikan dan dendeng ikan terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - f. Sentra industri kecil menengah aneka kerajinan rakyat berupa industri tenun, anyaman lontar, anyaman tali gewang, anyaman lidi kelapa, anyaman dari tali sisal, industri kapok, alat musik tradisional serta industri pakaian jadi dari tekstil tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Belu.
6. Kawasan Peruntukan Pariwisata, meliputi:
- a. Panorama gunung Mandeu di Kecamatan Raimanuk;
 - b. Panorama gunung Lakaan, Fulan Fehan dan Air Terjun Lesutil di Kecamatan Lamaknen;
 - c. Sumber air We Bot dan Gua Kelelawar Tohe Leten di Kecamatan Raihat;
 - d. Pantai Teluk Gurita, Aufuik, Sukaerlaran, Pasir putih dan Kolam Susuk di Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - e. Pantai Motaain (perbatasan RI-RDTL) di Kecamatan Tasifeto Timur;
 - f. Pantai Berluli di Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - g. Gua peninggalan Raja Dubesi Nanaet dan Kolam We Bobotok/Halimea di Kecamatan Tasifeto Barat;
 - h. Air Terjun Mauhalek di Kecamatan Lasiolat;
 - i. Rumah Adat Matabesi di Kecamatan Atambua Barat;



- j. Rumah Adat Fatuketi di Kecamatan Kota Atambua;
 - k. Rumah Adat Loe Gatal dan Holhara Ranu Hitu di Kecamatan Lamaknen;
 - l. Rumah Adat Nualain di Kecamatan Lamaknen Selatan;
 - m. Ksadan Takirin di Kecamatan Tasifeto Timur;
 - n. Embung Sirani dan Embung Haekrit di Kecamatan Tasifeto Timur;
 - o. Bendungan Rotiklot di Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - p. Gua Maria Ratu Dualilo di Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - q. Patung Bunda Maria Teluk Gurita di Kecamatan Kakuluk Mesak;
 - r. Kolam Renang Tirta Kencana di Kecamatan Atambua Selatan dan
 - s. Kolam Renang We Bot di Kecamatan Raihat.
7. Kawasan Peruntukan Permukiman
- Kawasan permukiman terdiri atas: kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan terdapat di Perkotaan Atambua dan ibu kota kecamatan dengan luas kurang lebih 3.935Ha dan kawasan peruntukan permukiman perdesaan tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Belu dengan luas kurang lebih 1.848 Ha.
8. Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
- a. Kodim 1605 Belu yang berlokasi di Kecamatan Kota Atambua;
 - b. Koramil yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten;
 - c. Batalyon Infanteri 744/SYB yang berlokasi di Kecamatan Tasifeto Timur;
 - d. Markas Komando Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-RDTL yang berlokasi di Kecamatan Atambua Barat;



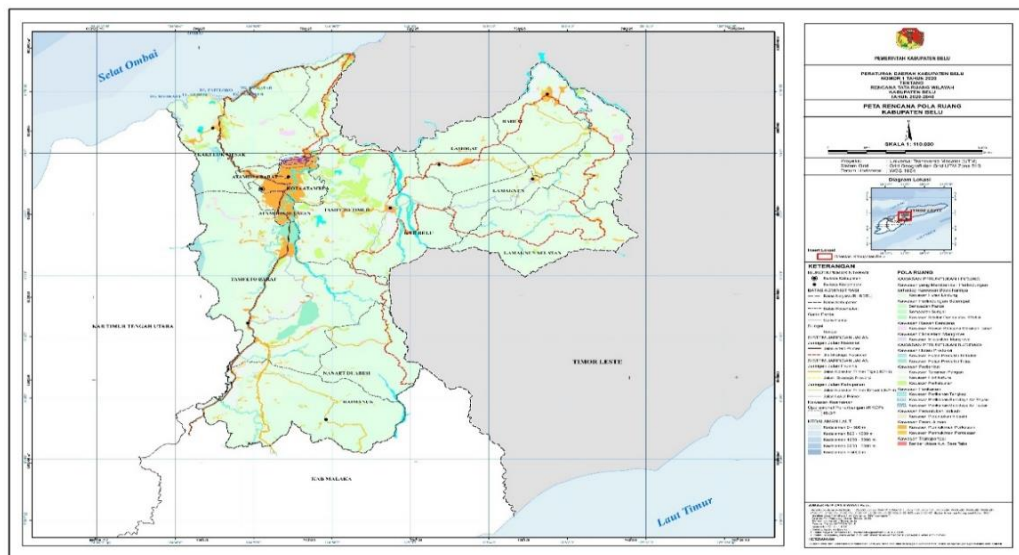
- e. Markas Komando Brimob yang berlokasi di Kecamatan Tasifeto Barat;
- f. Kompi Kavaleri yang terletak di Kecamatan Tasifeto Barat;
- g. Pos-pos pengamanan perbatasan yang tersebar di sepanjang garis batas pada kawasan perbatasan RI - RDTL; dan
- h. Pos Angkatan Laut Atapupu yang berlokasi di Kecamatan Kakuluk Mesak.

9. Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi meliputi:

- Bandar Udara A.A. Bere Tallo yang terdapat di Kecamatan Kota Atambua dengan luas kurang lebih 59 Ha;
- Pelabuhan laut Atapupu untuk transportasi manusia maupun barang terdapat di Kecamatan Kakuluk Mesak; dan
- Pelabuhan penyebrangan teluk gurita yang menghubungkan Pulau Timor dengan Pulau Alor di kecamatan Kakuluk Mesak.

Gambar 2.7
Peta Pola Ruang Kabupaten Belu



Sumber: RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040.



C. Kawasan Strategis

a) Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Kawasan strategis kabupaten di Kabupaten Belu merupakan kawasan yang dinilai sangat strategis secara ekonomi yang didukung oleh potensi sektor unggulan dan karakteristik wilayah sehingga menjadi prioritas pengembangan wilayah di Kabupaten Belu. Kawasan strategis kabupaten di Kabupaten Belu meliputi:

1. Kawasan agropolitan yang diarahkan di kawasan agropolitan Haekesak yang terdapat di Kecamatan Raihat dan Raimanuk. Penilaian terhadap Perwujudan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Raihat dan Raimanuk berada pada nilai 20% dimana telah dilakukan Pengembangan infrastruktur penunjang dan Pengelolaan sistem transportasi. Program yang telah dilakukan ini masih secara umum untuk penyediaan infrastruktur, belum memiliki fokus tujuan untuk pengembangan Kawasan Agropolitan. Adapun program yang belum dilakukan meliputi :
 - Penyusunan RDTR Kawasan Strategis Agropolitan
 - Peningkatan dan pengembangan produksi produk unggulan, pengolahan dan pemasaran berbasis agro pada sentra-sentra produksi
 - Pengembangan wisata agro
2. Kawasan minapolitan yang diarahkan di kawasan minapolitan perikanan budidaya di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur. Penilaian terhadap Perwujudan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Kakuluk



Mesak berada pada nilai 30 % dimana telah dilakukan Penyediaan sarana dan prasarana pendukung , Pengelolaan sistem transportasi dan Pengembangan ikan bandeng sebagai produk unggulan wisata kuliner. Program yang telah dilakukan ini masih secara umum untuk penyediaan infrastruktur, belum memiliki fokus tujuan untuk pengembangan Kawasan Minapolitan. Adapun program yang belum dilakukan meliputi :

- Penyusunan RDTR Kawasan Minapolitan
- Peningkatan, pengembangan, pengolahan dan pemasaran produksi perikanan

3. Kawasan usaha peternakan diarahkan di kawasan usaha peternakan Sonis Laloran di Kecamatan Tasifeto Barat. Penilaian terhadap Perwujudan Pengembangan Kawasan Peternakan Sonis Laloran berada pada nilai 68,75 %. Program yang telah dilaksanakan meliputi:

- Pengembangan Padang penggembalaan
- Pengembangan hijauan makanan ternak
- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung

Program yang belum dilakukan adalah Penyusunan RDTR Kawasan Peternakan Sonis Laloran

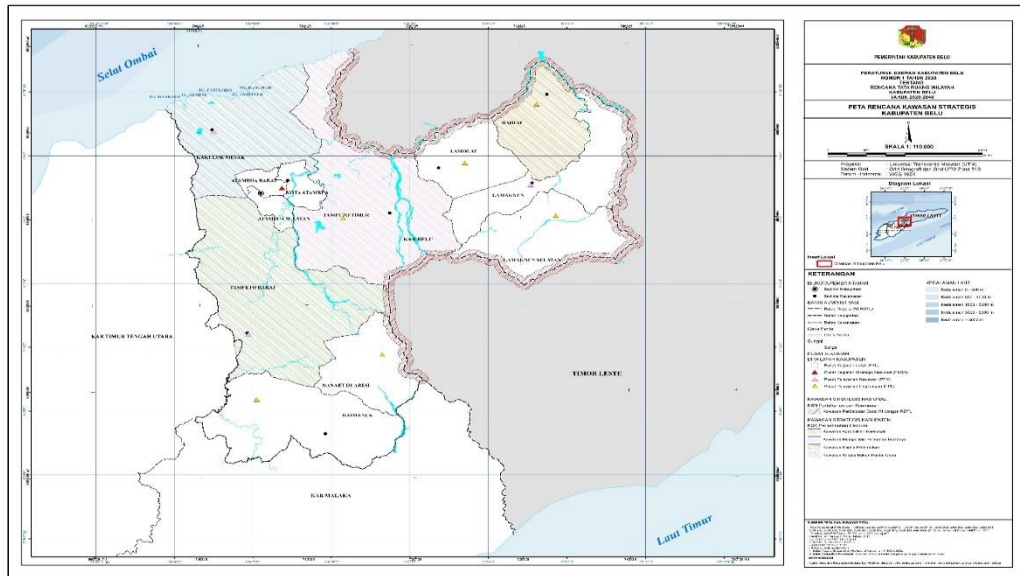
4. Kawasan wisata bahari pantai utara meliputi pantai di Kecamatan Kakuluk Mesak dan Kecamatan Tasifeto Timur. Penilaian terhadap Perwujudan Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Terpadu Wilayah pesisir pantai utara berada pada nilai 56,25%. Program yang telah dilaksanakan meliputi :

- Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata berbasis masyarakat
- Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata
- Fasilitasi dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung



Program yang belum dilakukan adalah Penyusunan RDTR Kawasan Bahari Terpadu.

Gambar 2.8
Peta Kawasan Strategis Kabupaten Belu



Sumber : RTRW Kabupaten Belu Tahun 2020-2040

b) Kawasan Strategis Nasional

Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, telah diamanatkan bahwa kawasan perbatasan negara adalah termasuk dalam kawasan strategis nasional yaitu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Dalam Lampiran II PP tersebut telah ditunjuk PKSN Atambua sebagai salah satu PKSN dari 26 PKSN di perbatasan negara Indonesia. Selanjutnya berdasarkan amanat dari peraturan pemerintah tersebut, dikeluarkan Peraturan



Presiden Nomor 179 Tahun 2014 Tentang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana dalam Perpres tersebut disebutkan tentang PKSN Atambua sebagai salah satu dari 3 PKSN di Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan Pusat Pelayanan Utama dengan fungsi sebagai berikut:

- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
- b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
- c. pusat pemerintahan;
- d. pusat perdagangan dan jasa;
- e. pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan;
- f. pusat pengembangan pariwisata berbasis wisata budaya;
- g. pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan;
- h. pusat industri pengolahan hasil pertambangan mineral (tembaga, emas, dan mangan);
- i. pusat promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal;
- j. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- k. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang;
- l. pusat pelayanan transportasi laut; dan
- m. pusat pelayanan transportasi udara.

Fungsi dari PKSN Atambua inipun tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020 – 2040.



Pada bulan Januari Tahun 2023, ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam Perpres tersebut disebutkan bawah RDTR KPN pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua berfungsi sebagai:

- a. acuan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Belu, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Belu;
- b. acuan untuk Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- c. acuan untuk perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
- d. acuan untuk penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi;
- e. alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik di KPN yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun Masyarakat; dan
- f. dasar dalam penerbitan KKKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cakupan Wilayah Pengembangan dari PKSN ini adalah Wilayah Perencanaan Atambua yang meliputi :

- a. Kelurahan Tulamalae, Kelurahan Bardao, Kelurahan Beirafu, dan Kelurahan Umanen di Kecamatan Atambua Barat;
- b. Kelurahan Manuaman, Kelurahan Rinbesi, Kelurahan Lidak, dan Kelurahan Fatukbot di Kecamatan Atambua Selatan;
- c. Sebagian Desa Kabuna di Kecamatan Kakuluk Mesak;



- d. Kelurahan Manumutin, Kelurahan Fatubena, Kelurahan Tenukiik, dan Kelurahan Kota Atambua di Kecamatan Kota Atambua; dan
- e. Sebagian Desa Umaklaran dan sebagian Desa Sadi di Kecamatan Tasifeto Timur.

Penilaian terhadap perwujudan Struktur Ruang PKSN berada pada nilai 70% dimana telah dilakukannya Program – program dalam rangka fasilitasi, koordinasi dan pendampingan pembangunan, serta pengembangan PKSN Atambua sebagai pusat distribusi barang dan jasa. Rencana Detail Tata Ruang PKSN Atambua telah memiliki ketetapan hukum dengan adanya Perpres No.5 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengembangan dan Peningkatan sarana dan prasarana Bandar Udara AA. Bere Tallo dilakukan pada tahun 2020. Di tahun 2022 ditetapkan Rencana Induk Bandar Udara A.A. Bere Tallo sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 128 Tahun 2022. Namun belum ada Pengembangan dan Peningkatan sarana dan prasarana Bandar Udara AA. Bere Tallo ditahun selanjutnya.

2.1.1.1.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1.1.1.2.1. Daya Dukung Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat menjabarkan kondisi umum daerah untuk mempertimbangkan arah pembangunan daerah. Selain itu, kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan dasar untuk menentukan business as usual dan skenario dengan upaya tambahan untuk isu strategis. Daya dukung merupakan indikasi kemampuan mendukung penggunaan tertentu, sedangkan daya



tampung adalah indikasi toleransi mendukung perubahan penggunaan tertentu (atau pengelolaan tertentu) pada unit spasial tertentu. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, dijelaskan makna daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai berikut:

- a) Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
- b) Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) merupakan instrumen lingkungan yang sangat penting dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan dan menjadi dasar dalam menentukan skenario isu strategis secara tepat. Daya dukung lingkungan hidup merupakan input penting dalam proses kegiatan pembangunan. Dukungan sumber daya alam berupa air, pangan dan lahan merupakan dasar penting dalam proses produksi untuk mencapai tujuan pembangunan. Ketersediaan dan pencadangan sumber daya alam pendukung kegiatan pembangunan harus dipastikan mampu mencukupi kegiatan pembangunan saat ini dan generasi yang akan datang.

a. Daya Dukung Penyedia Pangan

Kinerja dan sebaran daya dukung pangan di Kabupaten Belu dapat dilihat dari hasil perhitungan daya dukung pangan menggunakan Permen LH No. 17 tahun 2009 tentang Daya Dukung Lingkungan Hidup dengan pendekatan produksi beras. Daya dukung lahan merupakan ukuran kemampuan produksi





tanaman pangan (padi) dan/atau tanaman pangan lain dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk di suatu wilayah.

Penentuan status daya dukung lingkungan hidup (DDLH) indikatif jasa lingkungan penyedia pangan dilakukan melalui perhitungan ambang batas penduduk. Ambang batas penduduk adalah jumlah penduduk maksimal yang dapat dilayani oleh ketersediaan jasa lingkungan. Status DDLH indikatif dapat diketahui dengan membandingkan antara ambang batas penduduk dengan jumlah penduduk pada waktu tertentu. Hasil perhitungan DDLH penyediaan pangan tiap Kecamatan di Kabupaten Belu tersaji pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Kinerja Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Pangan
Kabupaten Belu

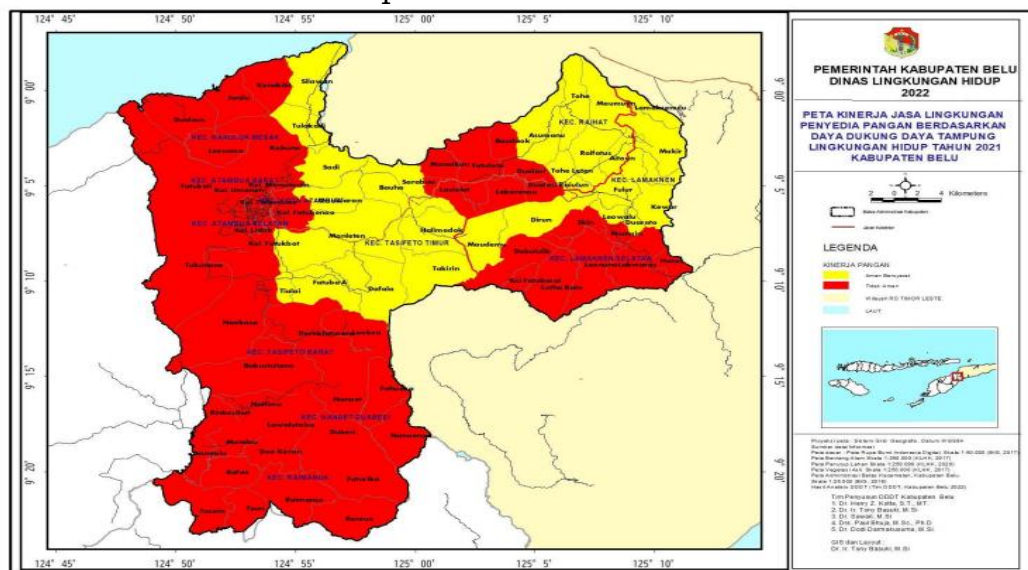
No	Kecamatan	Kinerja Daya Dukung Pangan			
		2017		2021	
		DD Pangan (σ)	Indikatif	DD Pangan (σ)	Indikatif
1	Raimanuk	1,04	Aman Bersyarat	0,40	Tidak Aman
2	Tasifeto Barat	1,20	Aman Bersyarat	0,95	Tidak Aman
3	Kakuluk Mesak	0,20	Tidak Aman	0,21	Tidak Aman
4	Nanaet Duabesi	0,41	Tidak Aman	0,22	Tidak Aman
5	Kota Atambua	0,02	Tidak Aman	0,03	Tidak Aman
6	Atambua Barat	0,01	Tidak Aman	0,01	Tidak Aman
7	Atambua Selatan	0,01	Tidak Aman	0,01	Tidak Aman
8	Tasifeto Timur	1,58	Aman Bersyarat	1,55	Aman Bersyarat
9	Raihat	1,03	Aman Bersyarat	1,75	Aman Bersyarat
10	Lasiolat	0,60	Tidak Aman	0,39	Tidak Aman
11	Lamaknen	1,79	Aman Bersyarat	1,74	Aman Bersyarat
12	Lamaknen Selatan	0,02	Tidak Aman	0,07	Tidak Aman
	Kabupaten Belu	0,56	Tidak Aman	0,56	Tidak Aman

Sumber : Dokumen D3TLH Kabupaten Belu, 2022



Terdapat 5 wilayah kecamatan di Kabupaten Belu di tahun 2017 yang potensi wilayahnya memiliki daya dukung pangan dalam kategori aman bersyarat, namun di tahun 2021 kinerja daya dukung lingkungan penyediaan pangan menurun menjadi 3 wilayah yang kinerja penyediaan pangan dalam kategori aman bersyarat. Tiga wilayah kecamatan yang kinerja daya dukung pangan masuk dalam kategori aman bersyarat adalah Tasifeto Timur, Raihat, dan Lamaknen. Potensi kinerja daya dukung penyediaan pangan belum ada yang masuk dalam kategori Aman (Sustain), artinya belum ada wilayah yang memiliki daya dukung pangan dengan nilai $\sigma > 2$. Sementara, wilayah yang memiliki daya dukung pangan dalam kategori aman bersyarat menjadi indikasi bahwa wilayah tersebut mampu swasembada pangan tetapi belum mampu memberikan kehidupan yang layak bagi penduduknya. Seluruh status DDLH penyedia pangan setiap kecamatan di Kabupaten Belu tersaji secara lebih informatif dalam Gambar 2.9

Gambar 2.9
Peta Kinerja Jasa Lingkungan Hidup sebagai Penyedia Pangan
Kabupaten Belu Tahun 2021



Sumber : KLHS RPJMD 2025-2029



b. Daya Dukung Penyedia Air

Ketersediaan air bersih yang terbatas merupakan masalah utama di sebagian wilayah Kabupaten Belu. Pada beberapa daerah, neraca air tahunannya mengalami defisit. Defisit air bersih tersebut disebabkan oleh variabilitas curah hujan, juga karena kondisi hidrogeologi dan jumlah air pada cekungan air tanah. Prinsip dasar penentuan daya dukung lingkungan hidup adalah membandingkan antara nilai ketersediaan jasa lingkungan dengan kebutuhan populasi dalam suatu wilayah jasa lingkungan. Dengan prinsip tersebut, penentuan daya dukung dan daya tampung air dilakukan melalui perhitungan ambang batas penduduk.

Hasil analisis status daya dukung air setiap kecamatan di Kabupaten Belu disajikan dalam Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Status Daya Dukung Air Kabupaten Belu Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Pend. (orang)	Kebutuhan Air (m3/tahun)	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Daya Dukung Air	Status
1	Raimanuk	14.605	26.840.000,00	70.991.167,57	2,64	Aman
2	Tasifeto Barat	23.408	39.272.000,00	72.846.001,76	1,85	Aman Bersyarat
3	Kakuluk Mesak	25.841	35.180.800,00	20.635.826,70	0,59	Terlampauai (Tidak Aman)
4	Nanaet Duabesi	3.243	7.652.800,00	3.854.633,11	0,50	Terlampauai (Tidak Aman)
5	Kota Atambua	32.586	49.339.200,00	11.935.517,91	0,24	Terlampauai (Tidak Aman)
6	Atambua Barat	23.454	38.684.800,00	9.141.591,25	0,24	Terlampauai (Tidak Aman)
7	Atambua Selatan	26.894	41.830.400,00	8.699.158,42	0,21	Terlampauai (Tidak Aman)
8	Tasifeto Timur	23.680	41.793.600,00	42.184.257,79	1,01	Aman Bersyarat
9	Raihat	17.269	22.974.400,00	19.399.442,25	0,84	Terlampauai (Tidak Aman)
10	Lasiolat	5.965	11.353.600,00	13.919.740,81	1,23	Aman



No	Kecamatan	Jumlah Pend. (orang)	Kebutuhan Air (m3/tahun)	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Daya Dukung Air	Status
						Bersyarat
11	Lamaknen	10.164	20.211.200,00	19.124.875,96	0,95	Terlampauai (Tidak Aman)
12	Lamaknen Selatan	6.487	13.656.000,00	19.823.975,22	1,16	Aman Bersyarat
	Total	213.596	348.788.800,00	308.556.188,75	0,88	Terlampauai (Tidak Aman)

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Belu (2022)

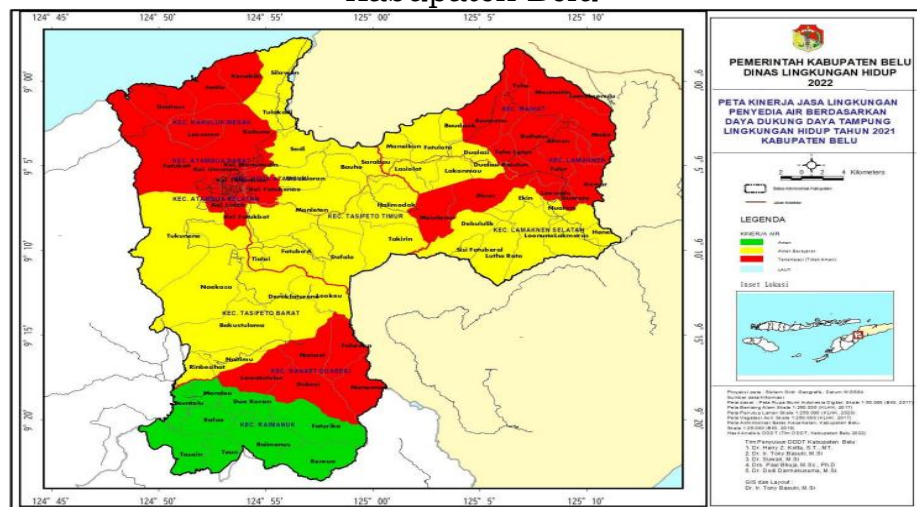
Kebutuhan air total untuk Kabupaten Belu adalah sebesar 348,79 juta m³ /tahun, sementara ketersediaanya sebesar 308,56 juta m³ /tahun, sehingga terjadi defisit sebesar 40,23 juta m³ /tahun. Secara administratif, kebutuhan air terbesar terdapat di Kecamatan Kota Atambua sebesar 49,34 juta m³ /tahun dan terendah terdapat pada Kecamatan Nanaet Duabesi sebesar 7,65 juta m³ /tahun. Ketersediaan air terbesar terdapat di Kecamatan Tasifeto Barat yaitu 72,85 juta m³ /tahun dan terendah terdapat pada Kecamatan Nanaet Duabesi sebesar 3,85 juta m³ /tahun.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka secara umum penduduk di Kabupaten Belu mengalami defisit air permukaan. Adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan dan pesisir serta dengan adanya perubahan iklim, maka permintaan sumber daya air akan meningkat. Hal ini dikarenakan ketersediaan air khususnya air permukaan dari hujan, sangat bervariasi menurut ruang dan waktu, serta ditambah adanya anomali iklim yang mempengaruhi jumlah dan intensitas hujan menyebabkan variabilitas curah hujan yang tinggi pada masing-masing musim. Kondisi ini harus diperhatikan karena tingginya curah hujan pada waktu yang singkat dapat menyebabkan



bencana banjir dan longsor, sedangkan rendahnya curah hujan pada musim kemarau dapat menyebabkan kekeringan. Status kinerja daya dukung penyedia air setiap kecamatan di Kabupaten Belu tersaji secara lebih informatif dalam Gambar 2.10.

Gambar 2.10
Peta Kinerja Jasa Lingkungan Hidup sebagai Penyedia Air
Kabupaten Belu



Sumber : KLHS RPJMD 2025-2029

c. Daya Dukung Fungsi Lindung

Daya Dukung Fungsi Lindung yang ditinjau dari luas guna lahan yang memiliki fungsi lindung, koefisien lindung untuk guna lahan dan luasan wilayah. Secara prinsip semakin besar tutupan vegetasi pada suatu wilayah maka daya dukung fungsi lindung akan semakin tinggi atau baik.

Dalam penghitungan daya dukung fungsi lindung seluruh penggunaan lahan memiliki fungsi lindung tetapi dengan koefisien yang berbeda-beda. Tutupan lahan hutan dan badan air memiliki fungsi lindung yang tinggi dibandingkan dengan tutupan lahan bangunan atau terbuka. Perhitungan luas lahan yang dengan fungsi lindung tiap tutupan lahan Kabupaten Belu ditunjukkan pada Tabel 2.12.



Tabel 2.12
Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kabupaten Belu,
Tahun 2023

No.	Jenis Guna Lahan	Luas (ha)	Koefisien Lindung	Luas x Koefisien
1	Air Danau	137	0,98	134,26
2	Air Rawa	24	0,98	23,52
3	Air Tawar Sungai	1.921	0,98	1.882,58
4	Bandara	31	0,18	5,58
5	Hutan Lindung	1.585	1,00	1.585,00
6	Padang Rumput	8.839	0,28	2.474,92
7	Pasir	13	0,01	0,13
8	Perkebunan	4.580	0,54	2.473,20
9	Permukiman	3.954	0,18	711,71
10	Sawah	4.096	0,46	1.884,16
11	Alang alang	72.770	0,28	20.375,60
12	Tambak	115	0,98	112,70
13	Tanah Kosong	79	0,01	0,79
14	Ladang	14.362	0,21	3.016,02
	Jumlah	112.506	0,31	34.680,18

Sumber : KLHS RPJMD 2025-2029

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan guna lahan eksisting berdasarkan data RTRW Kabupaten Belu 2020 – 2040 maka koefisien lindung Kabupaten Belu sebesar 0,31 termasuk dalam kategori rendah.

2.1.1.1.2.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Berbasis Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem

a) Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

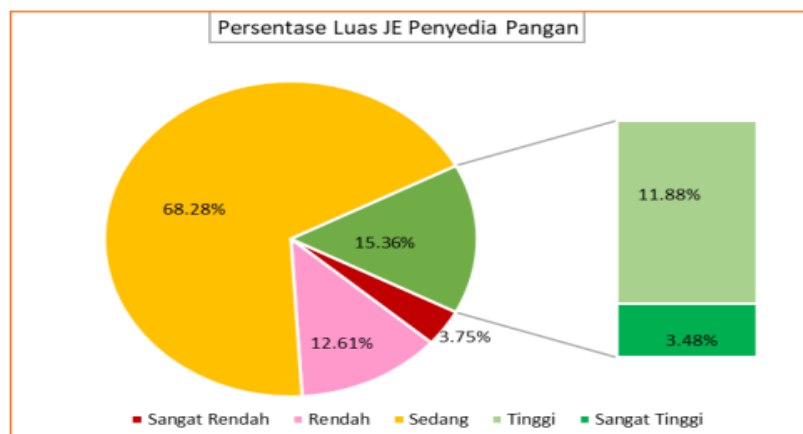
Jenis bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi asli memiliki peran penting dalam memberikan jasa ekosistem penyediaan pangan. Daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyediaan pangan di Wilayah Kabupaten Belu berdasarkan 3 (tiga) proksi



(bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi asli). Tujuan dari analisis daya dukung lahan layanan ekosistem pangan ini yaitu untuk meningkatkan kualitas lingkungan untuk mendukung penyediaan pangan.

Daya dukung jasa penyediaan pangan di Kabupaten Belu ada pada kategori sedang melingkupi 68,28% diikuti kategori tinggi 11,88%. Terdapat 3,48% lahan yang potensi memberikan jasa ekosistem penyedia pangan kategori sangat tinggi. Sementara, daya dukung jasa lingkungan jasa ekosistem penyediaan pangan berkategori rendah dan sangat rendah berturut-turut persentase luasnya hanya 12,60% dan 3,75%. Gambaran umum berbasis tiga proksi (bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi asli) tentang daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyediaan pangan di Kabupaten Belu dapat dilihat pada Gambar 2.11.

Gambar 2.11
Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem
Penyediaan Pangan Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber : KLHS RPJMD 2025-2029

Seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Belu dominasinya merupakan penyedia pangan kategori sedang hingga kategori sangat tinggi. Enam kecamatan yang menyediakan jasa pangan



kategori tinggi hingga sangat tinggi terluas adalah kecamatan Tasifeto Timur (5.163,85 ha), Raimanuk (2.794,58 ha), Tasifeto Barat (2.718,58 ha), Kakuluk Mesak (2.332,92 ha) dan Raihat (1.762,57 ha). Data distribusi luas jasa ekosistem penyediaan pangan menurut kecamatan berdasarkan tiga proksi disajikan pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13
Distribusi Luas Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Menurut
Kecamatan Berdasarkan Tiga Proksi

Kecamatan	Luas (ha)						Persentase					
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Raimanuk	353.36	2138.03	7904.22	1568.23	1226.35	13190.19	0.31	1.89	7.00	1.39	1.09	11.69
Tasifeto Barat	689.90	1587.26	15879.33	2467.99	250.59	20875.07	0.61	1.41	14.07	2.19	0.22	18.50
Kakuluk Mesak	511.71	1814.51	7872.17	2132.05	200.87	12531.31	0.45	1.61	6.97	1.89	0.18	11.10
Nanaet Duabesi	137.52	3152.87	4810.39	247.35	4.52	8352.65	0.12	2.79	4.26	0.22	0.00	7.40
Kota Atambua	8.43	848.50	204.14	758.75	80.30	1900.12	0.01	0.75	0.18	0.67	0.07	1.68
Atambua Barat	236.68	510.36	479.60	80.78	-	1307.42	0.21	0.45	0.42	0.07	0.00	1.16
Atambua Selatan	208.20	516.99	240.30	13.13	49.67	1028.29	0.18	0.46	0.21	0.01	0.04	0.91
Tasifeto Timur	734.37	1905.23	13107.61	4024.72	1139.13	20911.06	0.65	1.69	11.61	3.57	1.01	18.53
Raihat	386.32	249.94	5294.51	1323.40	439.17	7693.34	0.34	0.22	4.69	1.17	0.39	6.82
Lasiolat	384.34	365.88	5306.19	-	-	6056.41	0.34	0.32	4.70	0.00	0.00	5.37
Lamaknen	374.04	700.81	7153.17	739.48	537.31	9504.81	0.33	0.62	6.34	0.66	0.48	8.42
Lamaknen Selatan	209.36	435.92	8813.56	57.90	-	9516.74	0.19	0.39	7.81	0.05	0.00	8.43
Kabupaten Belu	4234.23	14226.30	77065.19	13413.78	3927.91	112867.41	3.75	12.61	68.28	11.88	3.48	100.00

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Belu, 2022

b) Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

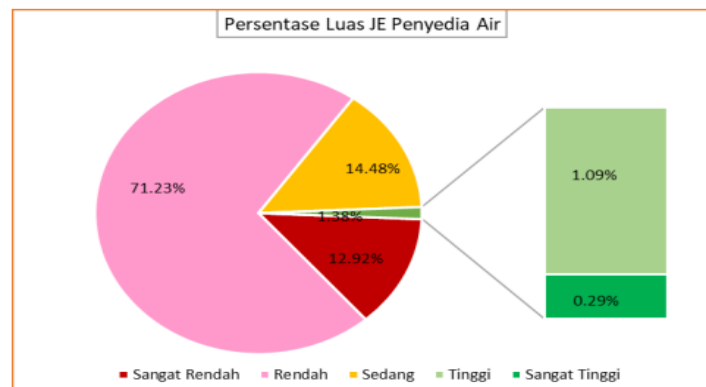
Ketersediaan air bersih yang terbatas merupakan masalah utama di sebagian wilayah Kabupaten Belu. Pada beberapa daerah, neraca air tahunannya memperlihatkan defisit. Defisit air bersih tersebut disebabkan oleh variabilitas curah hujan, juga karena kondisi hidrogeologi dan jumlah air pada cekungan air tanah. Jenis bentang alam, tutupan lahan dan vegetasi asli memiliki peran penting dalam memberikan jasa ekosistem penyediaan air bersih. Daya dukung lingkungan jasa ekosistem



penyediaan air bersih di Wilayah Kabupaten Belu berdasarkan 3 (tiga) proksi diklasifikasikan ke dalam 5 kategori potensi, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.

Hasil analisis distribusi luas daya dukung jasa lingkungan penyediaan air bersih berdasarkan tiga proksi di Kabupaten Belu menunjukkan dominasinya berada pada kategori rendah mencakupi luas 80.396,57 ha atau 71,23% dan kategori sedang seluas 16.340,85 ha atau 14,48% dari total luas jasa yang tersedia. Persentase luas lahan yang memberikan jasa penyediaan air bersih berkategori tinggi dan sangat tinggi hanya sebesar 1,38% (1.547,43 ha). Sembilan kecamatan memiliki kontribusi terhadap jasa ekosistem penyedia air kategori tinggi hingga sangat tinggi, dan tiga wilayah yang menjadi penyumbang utama daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyediaan air bersih di Kabupaten Belu yakni Kecamatan Tasifeto Timur, Nanaet Duabesi, dan Tasifeto Barat. Sajian data dan gambaran distribusi luas daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyediaan air bersih berdasarkan tiga proksi di Kabupaten Belu dapat dipelajari pada Gambar 2.12.

Gambar 2.12
Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem
Penyediaan Air Bersih Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber : KLHS RPJMD 2025-2029



Tabel 2.14
Distribusi Luas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Menurut
Kecamatan Berdasarkan Tiga Proksi

Kecamatan	Luas (ha)						Persentase					
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Total	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Raimanuk	2130.80	8723.60	2269.48	41.65	24.65	13190.18	1.89	7.73	2.01	0.04	0.02	11.69
Tasifeto Barat	2063.03	15653.13	2936.89	178.59	43.44	20875.08	1.83	13.87	2.60	0.16	0.04	18.50
Kakuluk Mesak	1849.93	8390.42	2201.50	34.21	55.24	12531.30	1.64	7.43	1.95	0.03	0.05	11.10
Nanaet Duabesi	3259.27	4287.31	509.02	295.65	1.05	8352.30	2.89	3.80	0.45	0.26	0.00	7.40
Kota Atambua	8.43	1052.64	770.58	-	68.48	1900.13	0.01	0.93	0.68	0.00	0.06	1.68
Atambua Barat	356.13	870.51	80.78	-	-	1307.42	0.32	0.77	0.07	0.00	0.00	1.16
Atambua Selatan	226.38	719.92	32.71	-	49.27	1028.28	0.20	0.64	0.03	0.00	0.04	0.91
Tasifeto Timur	1852.54	13947.74	4494.26	536.27	80.24	20911.05	1.64	12.36	3.98	0.48	0.07	18.53
Raihat	386.32	5457.10	1794.47	55.45	-	7693.34	0.34	4.83	1.59	0.05	0.00	6.82
Lasiolat	746.20	5310.22	-	-	-	6056.42	0.66	4.70	0.00	0.00	0.00	5.37
Lamaknen	1063.24	7164.64	1193.68	83.24	-	9504.80	0.94	6.35	1.06	0.07	0.00	8.42
Lamaknen Selatan	639.93	8819.34	57.48	-	-	9516.75	0.57	7.81	0.05	0.00	0.00	8.43
Kabupaten Belu	14582.20	80396.57	16340.85	1225.06	322.37	112867.05	12.92	71.23	14.48	1.09	0.29	100.00

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Belu, 2022

c) Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Tempat tinggal dan ruang hidup merupakan koleksi keunikan kualitas dan karakteristik (visual, budaya, sosial dan lingkungan) yang memberikan arti terhadap suatu lokasi. Tempat tinggal terbentuk melalui pengalaman dari sejarah, geografi dan geologi dari suatu area, keberadaan flora dan faunanya, tumbuhnya penginderaan terhadap tanah dan sejarahnya setelah menetap selama periode waktu tertentu. Sensitivitas terhadap paparan cahaya matahari pagi yang mengenai wajah atau air hujan yang membasahi punggung, keras dan lembutnya tekstur tanah, warna langit di pagi hari dan di saat senja, aroma tumbuh-tumbuhan di

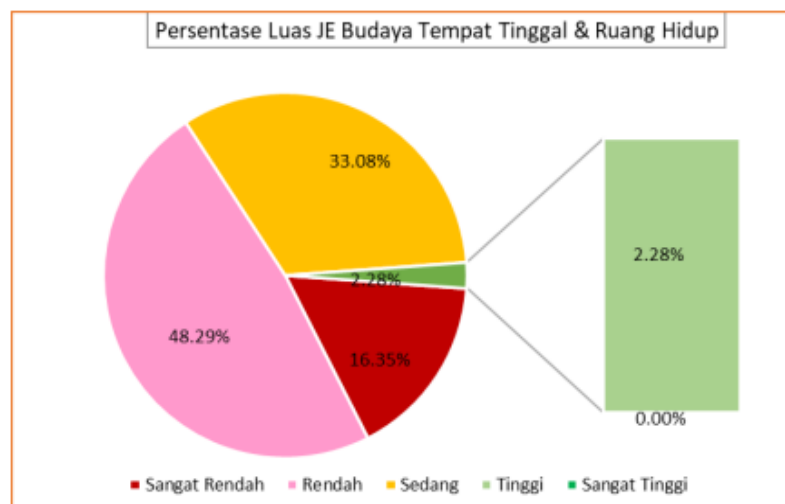


musim bunga, nyanyian dan kicauan burung serta suara mamalia seluruhnya merupakan aspek-aspek lingkungan yang membantu manusia menentukan tempat tinggal dan ruang hidup.

Secara menyeluruh dominasi daya tampung lingkungan jasa ekosistem budaya tempat tinggal dan ruang hidup di Kabupaten Belu pada kategori rendah dengan luas 54.508,49 ha meliputi 48,29% diikuti kategori sedang mencakup 37.334,92 ha (33,08%), kategori sangat rendah seluas 18.449,32 ha (16,35%), dan kategori tinggi seluas 2.574,41 ha (2,28%). Ada lima kecamatan yang menjadi pendukung utama terhadap jasa ekosistem ini yang berkategori tinggi yakni Nanaet Duabesi, Tasifeto Timur, Raimanuk, Kakuluk Mesak, dan Lamaknen.

Gambar 2.13

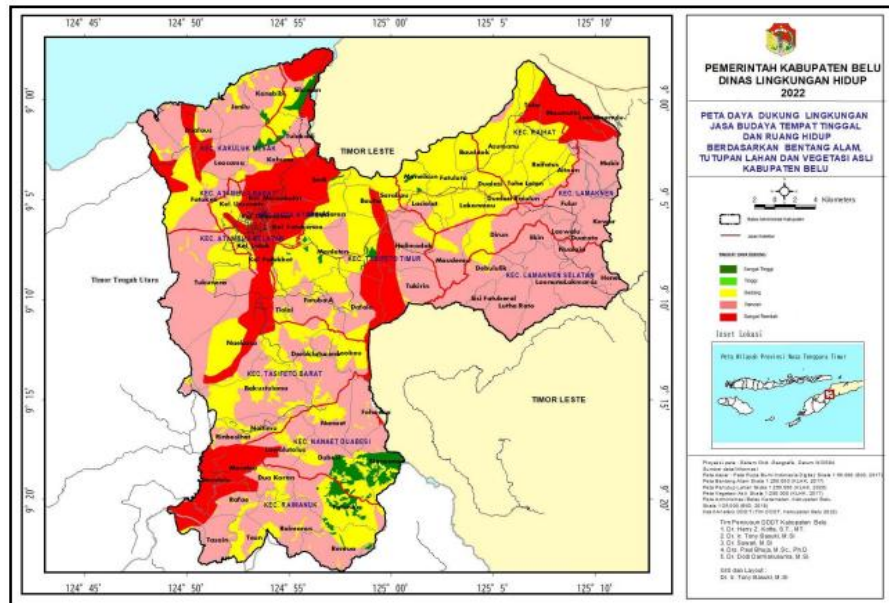
Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem
Budaya Tempat Tinggal & Ruang Hidup Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber : KLHS RPJMD 2025-2029



Gambar 2.14
Peta Daya Dukung Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal &
Ruang Hidup Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber : KLHS RPJMD 2025-2029

d) Jasa Ekosistem Budaya Rekreasi dan Ekowisata

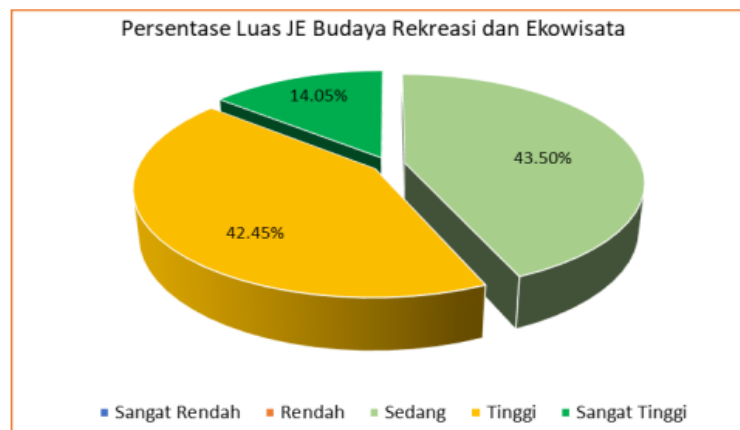
Daerah wisata pada mulanya dipilih terutama untuk tujuan ekonomi: menciptakan peluang lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pada tataran internasional bertujuan meningkatkan pertukaran mata uang.

Daya dukung lingkungan jasa ekosistem budaya rekreasi dan ekowisata Kabupaten Belu berdasarkan 3 (tiga) proksi diklasifikasikan ke dalam 3 kategori potensi, yaitu sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Mengacu pada hasil analisis distribusi luas jasa ekosistem rekreasi dan ekowisata menunjukkan dominasinya pada kategori sedang hingga tinggi dengan total luas 97.010,78 ha (85,95%) dari total luas jasa yang tersedia. Kategori sangat tinggi seluas 15.856,58 ha (14,05%) dan tidak ada jasa ekosistem



budaya rekreasi dan ekowisata yang berkategori sangat rendah maupun rendah.

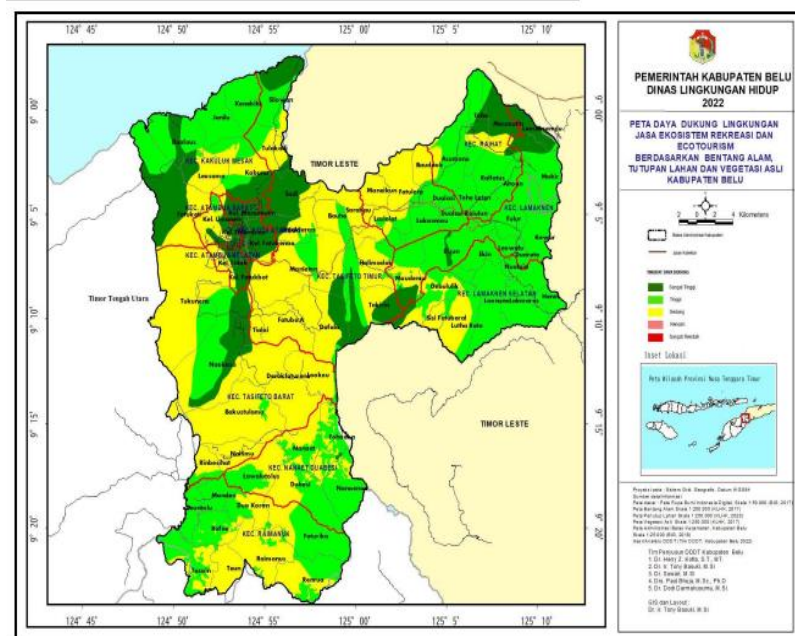
Gambar 2.15
Proporsi Luasan DDDT Lingkungan Jasa Ekosistem Budaya
Rekreasi & Ekowisata Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber : KLHS RPJMD 2025-2029



Gambar 2.16
Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Rekreasi
& Ekowisata Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber : KLHS RPJMD 2025-2029

e) Jasa Pengaturan Iklim

Jasa pengaturan iklim ditentukan oleh 10 faktor yaitu: 1) Suhu, suatu kondisi alam yang dirasakan oleh bumi seperti dingin atau sejuk, dan panas; 2) Tekanan udara, suatu gaya yang tidak terlihat namun terasa timbul karena adanya suatu lapisan udara yang berat; 3) Angin, merupakan tekanan udara yang bergerak dari daerah ke daerah yang lebih rendah; 4) Kelembapan Udara dan Awan; 5) Curah Hujan; 6) Elevasi, ketinggian suatu daerah dari permukaan laut. Iklim di pegunungan lebih dingin; 7) Arus laut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan iklim di daerah pesisir. Umumnya daerah pesisir memiliki iklim yang basah daripada daratan, karena adanya angin yang bertiup ke laut seringkali lembab daripada yang ke daratan; 8) Luas wilayah perairan. Luas wilayah perairan juga berpengaruh pada iklim, yang menyebabkan daerah pesisir lebih dingin pada musim



hangat dan lebih hangat jika di musim dingin; 9) Bahan pencemar udara; 10) Garis lintang, garis yang merupakan jarak yang mengukur garis utara dan garis selatan pada garis khatulistiwa. Kompleksitas pengaruh kesepuluh faktor tersebut juga secara spesifik sangat dikendalikan oleh jenis dan besaran luas bentang alam, tutupan lahan, dan vegetasi di suatu wilayah. Daya dukung lingkungan jasa ekosistem pengaturan iklim di Wilayah Kabupaten Belu berdasarkan jenis bentang alam, tutupan lahan, dan vegetasi (3 proksi) diklasifikasikan ke dalam 5 kategori potensi, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.

Gambar 2.17

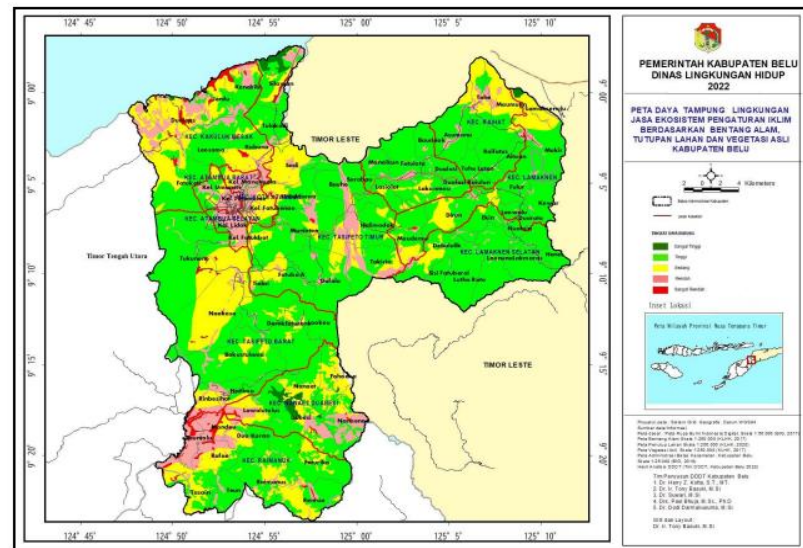
Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem
Pengaturan Iklim Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber : KLHS RPJMD 2025-2029



Gambar 2.18
Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan
Iklim Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber : KLHS RPJMD 2025-2029

Berdasarkan data distribusi luas jasa ekosistem pengaturan iklim maka luas lahan yang mendukung jasa ini paling besar pada kategori tinggi mencapai 71.724,62 ha (63,55 %), diikuti kategori sedang dengan luas jasa mencapai 25.799,76 ha (22,86%), sementara yang berkategori rendah dan sangat rendah masing-masing 13.279,10 ha (11,77%) dan 1.180,76 ha (1,05%). Kategori sangat tinggi dikontribusi luas lahan 883,17 ha (0,78%). Empat kecamatan yang memiliki luasan dalam memberikan jasa ekosistem pengaturan iklim berkategori sangat tinggi adalah Nanaet Duabesi, Tasifeto Timur, Lamaknen, dan Kakuluk Mesak.

f) Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air

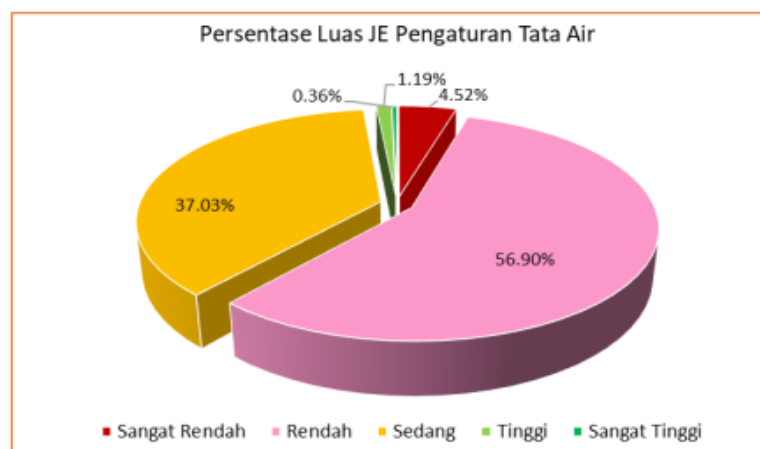
Jasa ekosistem pengaturan di suatu daerah sangat bergantung pada kondisi lingkungan daerah tersebut. Daerah yang masih alami pengaturan tata air akan berbeda dengan daerah



yang telah terganggu. Daya dukung lingkungan jasa ekosistem pengaturan tata air di Wilayah Kabupaten Belu berdasarkan jenis bentang alam, tutupan lahan, dan vegetasi diklasifikasikan ke dalam 5 kategori potensi, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Secara umum potensi daya tampung lingkungan hidup jasa ekosistem pengaturan tata air di Kabupaten Belu berkemampuan dominan berada dalam kategori rendah dengan luas 64.217,15 ha meliputi 56,90% dari total luas jasa yang tersedia. Posisi kedua masuk dalam kategori sedang seluas 41.792,26 ha atau 37,03%. Potensi jasa berkategori tinggi dan sangat tinggi luas totalnya 1.754,91 ha (1,54%). Tujuh kecamatan yang memberikan jasa ekosistem pengaturan tata air utama dalam kategori tinggi dan sangat tinggi di Kabupaten Belu secara berturutan adalah Nanaet Duabesi, Tasifeto Timur, Tasifeto Barat, Kakuluk Mesak, Lamaknen, Kota Atambua, Raimanuk, dan Atambua Selatan.

Gambar 2.19

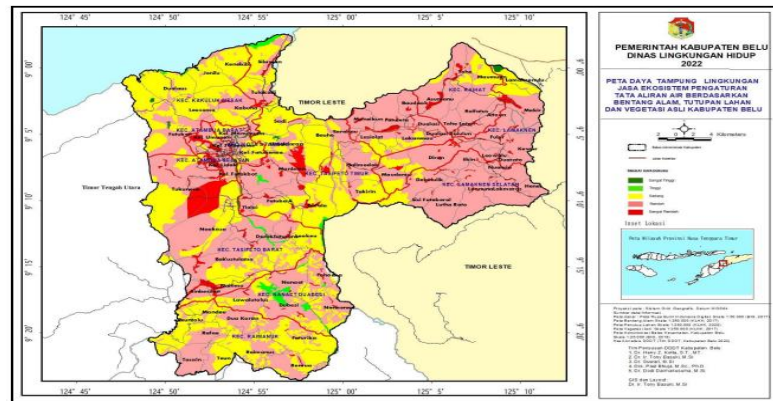
Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem
Pengaturan Tata Air Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber : KLHS RPJMD 2025-2029



Gambar 2.20
Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan
Tata Air Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber : KLHS RPJMD 2025-2029

g) Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Banjir

Jasa ekosistem pengaturan untuk pencegahan dan perlindungan (mitigasi) dari bencana banjir berkaitan dengan kemampuan serta infrastruktur alam dari suatu wilayah untuk menampung, mengelola dan menjalankan siklus hidrologi yang efektif sehingga air dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup secara optimal sekaligus meminimalisir bencana akibat luapan air. Kontribusi bentang alam dalam pengaturan untuk pencegahan dan perlindungan dari bencana banjir sebesar 28 persen, sebesar 60 persen ditentukan oleh jenis tutupan lahan, dan 12 persen lagi dipengaruhi oleh jenis vegetasi asli.

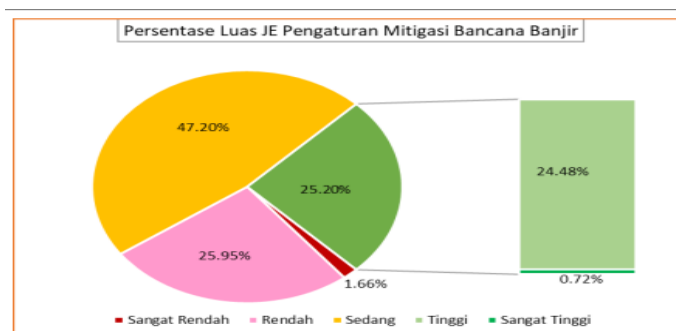
Distribusi luas jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan (mitigasi) bencana banjir menurut kecamatan berdasarkan tiga proksi menunjukkan dominasi potensinya berada pada tingkat sedang dan rendah dengan persentase luas masing-masing 47,20% dan 25,95%. Potensi jasa ekosistem pengaturan mitigasi bencana banjir berkategori sangat rendah mencakupi area



seluas 1.868,01 ha atau 1,66%, sedangkan persentase jasa ini yang masuk kategori tinggi hingga sangat tinggi totalnya sebesar 25,20% atau seluas 28.443,69 ha. Enam wilayah kecamatan yang menjadi penyedia utama jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana banjir di Kabupaten Belu berkategori tinggi hingga sangat tinggi adalah Tasifeto Timur, Tasifeto Barat, Raimanuk, Kakuluk Mesak, Nanaet Duabesi, dan Lamaknen.

Gambar 2.21

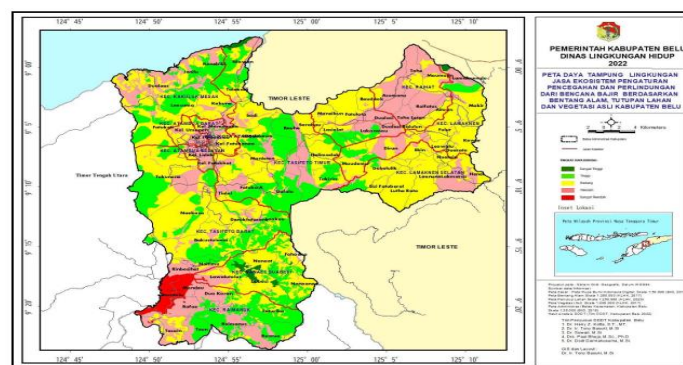
Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem
Mitigasi dari Bencana Banjir Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber : KLHS RPJMD 2025-2029

Gambar 2.22

Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem
Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari
Bencana Banjir Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber : KLHS RPJMD 2025-2029

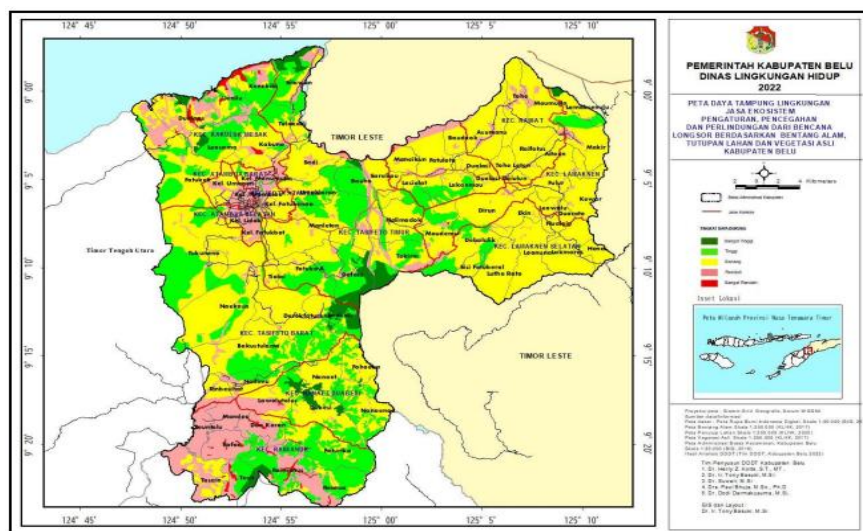


h) Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Longsor

Hasil analisis distribusi luas jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor berdasarkan tiga proksi menunjukkan persentase terbesar berada pada kategori sedang seluas 48.367,42 ha (42,85%) diikuti kategori rendah (33.092,76 ha atau 29,32%), kategori tinggi seluas 26.059,37 (23,09%), dan kategori sangat rendah seluas 2.671,11 ha atau 2,37%; sedangkan kategori sangat tinggi luasannya 2.676,82 ha (2,37%). Berdasarkan total luas jasa yang tersedia, ada enam kecamatan yang menjadi pendukung utama terhadap jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor berkategori tinggi hingga sangat tinggi yakni Tasifeto Timur, Tasifeto Barat, Raimanuk, Kakuluk Mesak, Nanaet Duabesi, dan Lamaknen.

Gambar 2.23

Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem
Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari
Bencana Longsor Berdasarkan Tiga Proksi

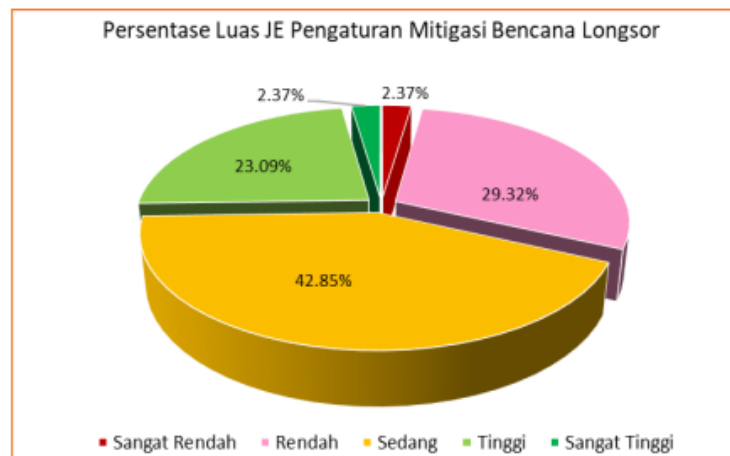


Sumber : KLHS RPJMD 2025-2029



Gambar 2.24

Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem
Pengaturan Pencegahan & Perlindungan dari Bencana Longsor
Kabupaten Belu Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber : KLHS RPJMD 2025-2029

i) Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Potensi bencana kebakaran hutan dan lahan selain dipengaruhi oleh kondisi tutupan lahan, cuaca atau musim, karakteristik dan kebiasaan masyarakatnya, juga dipengaruhi oleh kondisi bentang alam. Kinerja jasa lingkungan hidup sebagai pengatur mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan didefinisikan sebagai struktur alam yang berfungsi untuk pencegahan dan perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan. Indikator keadaannya berupa karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan, sedangkan indikator kinerjanya adalah luasan karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan yang berfungsi sebagai pencegahan dan perlindungan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Kontribusi bentang alam dalam memberikan jasa ekosistem pengatur mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan hanya 8 persen, sebesar 60 persen ditentukan

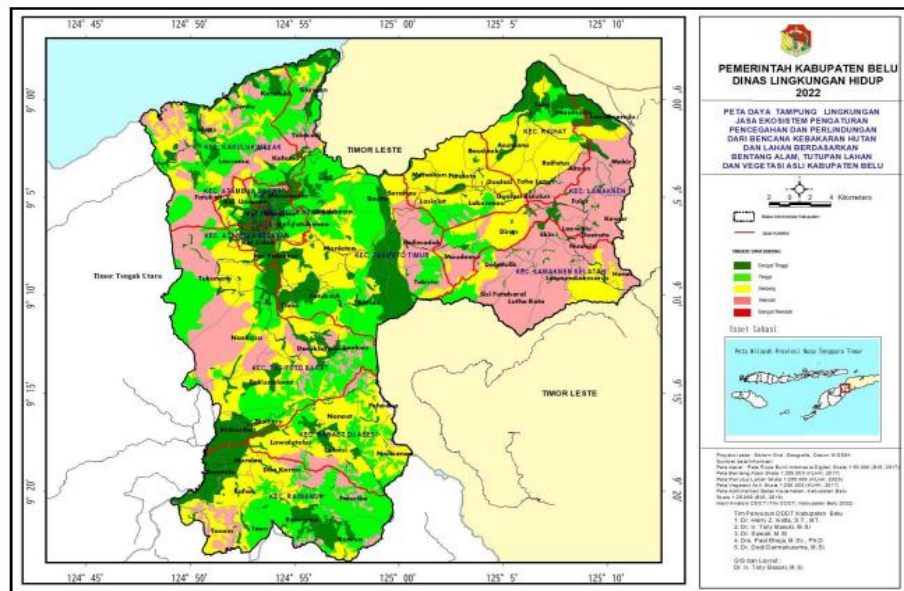


oleh jenis tutupan lahan, dan 32 persen dipengaruhi oleh keberadaan jenis vegetasi asli. Hasil analisis data tiga proksi daya tampung lingkungan jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan (mitigasi) bencana kebakaran hutan dan lahan berhasil mengklasifikasikan empat kategori.

Distribusi luas jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana kebakaran hutan dan lahan tiga proksi maka urutan dominasinya adalah sedang, rendah, tinggi, dan sangat tinggi dengan besaran dan persentase luasnya berturut-turut 35.766,92 ha (31,69%), 29.229,97 ha (25,90%), 28.759,35 ha (25,48%), dan 19.111,17 ha (16,93%).

Gambar 2.25

Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan
Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kebakaran
Hutan dan Lahan Berdasarkan Tiga Proksi

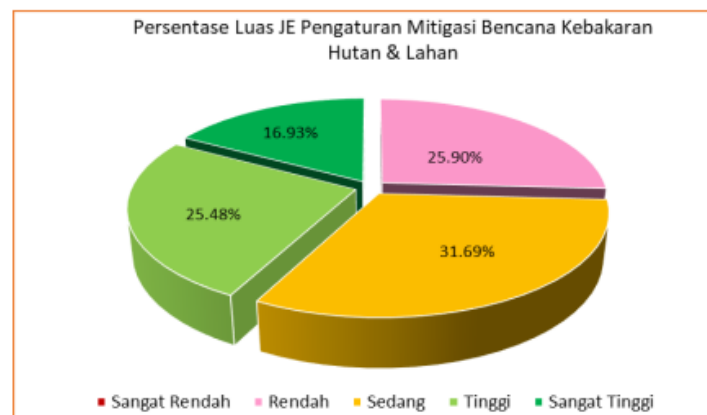


Sumber : KLHS RPJMD 2025-2029



Gambar 2.26

Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem
Pengaturan Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber : KLHS RPJMD 2025-2029

j) **Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah**

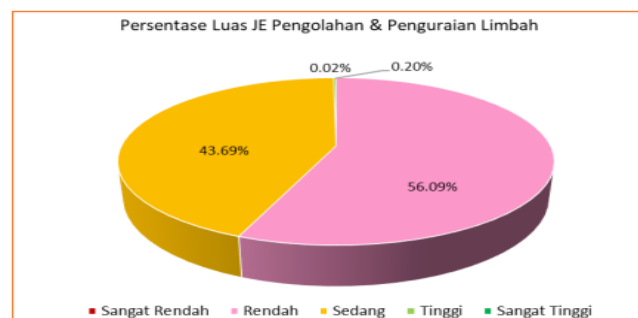
Jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah meliputi kapasitas lokasi dalam menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah. Dalam kapasitas yang terbatas, ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralsir zat organik yang ada dalam air limbah. Jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah paling dominan berkategori rendah (KJE 1,82 – 2,48) luasnya 63.312,93 ha atau 56,09 persen, tersebar pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Belu. Empat kecamatan yang memiliki luasan paling besar untuk kategori ini adalah Tasifeto Barat dengan luas 12.127,75 ha, Raimanuk seluas 10.374,26 ha, Lamaknen Selatan seluas 8.165,73 ha, dan Tasifeto Timur dengan luas 8.005,51 ha. Jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah berkategori sedang (KJE 2,66 – 3,32) luasnya 49.311,52 ha atau 43,69 persen, tersebar pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Belu. Empat kecamatan yang memiliki



luasan paling besar untuk kategori ini adalah Tasifeto Timur dengan luas 12.715,39 ha, Kakuluk Mesak seluas 9.463,36 ha Tasifeto Barat seluas 8.747,32 ha, dan Nanaet Duabesi dengan luas 5.824,37 ha. Sementara, peran bentang alam, penutup lahan dan vegetasi asli terhadap jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah yang berkategori sangat rendah (KJE 1,00 – 1,56) hanya terdapat di Kecamatan Raimanuk dengan total luas 14,58 ha dan Kecamatan Nanaet Duabesi (2,57 ha). Persentase luasan yang berpotensi terhadap jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah yang berkategori tinggi (KJE 3,41- 3,56) seluas 226,17 ha atau 0,20 persen, terdistribusi pada 3 kecamatan di Kabupaten Belu yaitu Tasifeto Timur (190,14 ha), Nanaet Duabesi (35,98 ha), dan Lamaknen (0,05 ha). Distribusi luasan daya dukung lingkungan jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian limbah di Kabupaten Belu berdasarkan tiga proksi sesuai urutan tertinggi, yaitu kategori rendah seluas 63.312,93 ha (56,09%), kategori sedang seluas 49.311,52 ha (43,69%), kategori tinggi seluas 226,17 ha (0,20%), dan kategori sangat rendah seluas 17,15 ha (0,02%).

Gambar 2.27

Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem
Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah
Berdasarkan Tiga Proksi

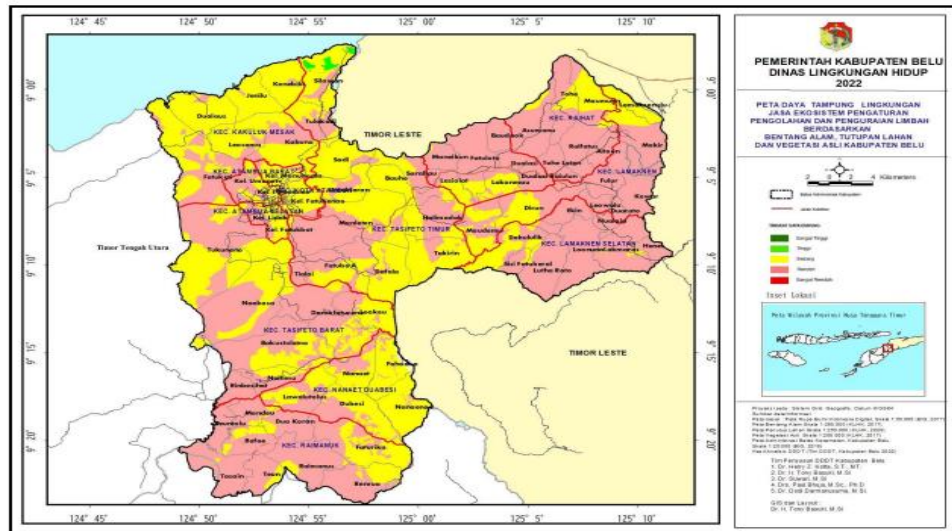


Sumber : KLHS RPJMD 2025-2029



Gambar 2.28

Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan
Pengolahan dan Penguraian Limbah Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber : KLHS RPJMD 2025-2029

k) Daya Dukung dan Daya Tampung Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas

Ekosistem memberikan jasa keanekaragaman hayati di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan. Distribusi dan jasa ekosistem dalam mendukung biodiversitas ditentukan oleh tipe dari bentang alam dan penutupan lahan pada areal bervegetasi. Kontribusi jenis bentang alam terhadap daya dukung biodiversitas sebesar 14 persen, 60 persen ditentukan oleh jenis penutup lahan, dan 16 persen ditentukan oleh jenis vegetasi asli/alami. Jenis bentang



alam, tutupan lahan dan vegetasi asli memiliki peran penting dalam memberikan jasa ekosistem pendukung biodiversitas. Daya dukung lingkungan jasa ekosistem pendukung biodiversitas di Wilayah Kabupaten Belu berdasarkan tiga proksi tersebut (bentang alam 15 jenis, tutupan lahan 16 jenis dan vegetasi asli 12 jenis) menghasilkan 2.880 kombinasi jasa ekosistem yang diklasifikasikan ke dalam 5 kategori potensi, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Distribusi luasan daya dukung lingkungan jasa ekosistem pendukung biodiversitas di Kabupaten Belu berdasarkan tiga proksi adalah berkategori sangat rendah seluas 647,59 ha (0,57%), berkategori rendah seluas 4.442,23 ha (3,94%), berkategori sedang seluas 9.722,14 ha (8,61%), berkategori tinggi seluas 94.343,95 ha (83,59%), dan berkategori sangat tinggi seluas 3.711,52 ha (3,29%).

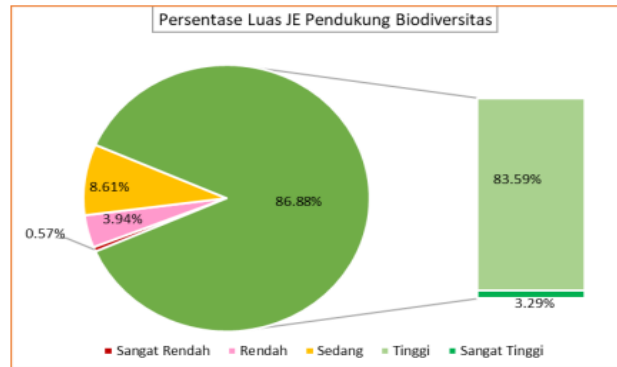
Distribusi luas dan peran jasa ekosistem pendukung biodiversitas berdasarkan tiga proksi menunjukkan bahwa sembilan kecamatan memiliki potensi terhadap jasa ekosistem pendukung biodiversitas berkategori sangat tinggi (nilai KJE 4,24 – 5,00), adalah Kakuluk Mesak dengan luasan 1.459,24 ha, selanjutnya Tasifeto Timur (1.092,75 ha), Nanaet Duabesi (457,24 ha), Tasifeto Barat (337,68 ha), Lamaknen (188,42 ha), Kota Atambua (86,01 ha), Lamaknen Selatan (60,64 ha), Atambua Barat (29,45 ha), dan Lasiolat (0,01 ha).





Gambar 2.29

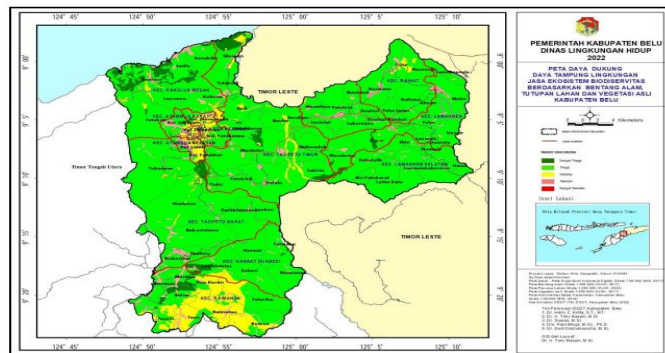
Proporsi Luasan Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem
Pendukung Biodiversitas Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber : KLHS RPJMD 2025-2029

Gambar 2.30

Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung
Biodiversitas Berdasarkan Tiga Proksi



Sumber : KLHS RPJMD 2025-2029

2.1.1.1.3 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

A. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya



masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Indeks ketahanan pangan Kabupaten Belu Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut.

Tabel 2.15
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Belu
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Nilai	Peringkat	Kelompok IKP
1	2020	71.06	277	5
2	2021	71.89	275	5
3	2022	70.48	285	5
4	2023	75.69	233	6
5	2024	71.21	#N/A	5

Sumber : Satu Data Pangan_Badan Pangan Nasional, 2025

Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota. IKP yang dihasilkan dikelompokkan kedalam enam kelompok, yaitu Prioritas 1 (Sangat Rentan), Prioritas 2 (Rentan), Prioritas 3 (Agak Rentan), Prioritas 4 (Agak Tahan), Prioritas 5 (Tahan), Prioritas 6 (Sangat Tahan). Berdasarkan data pada tabel dapat diketahui bahwa IKP Kabupaten Belu tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 4,48



poin dari tahun 2023 dan masuk dalam kategori “tahan”. Hal ini menunjukkan kondisi ketahanan pangan yang menurun di Kabupaten Belu yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti penurunan produksi pangan, tingginya angka stunting, keterbatasan akses air bersih, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata dan masalah distribusi pangan.

B. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Belu umumnya lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Beberapa faktor yang menyebabkan konsumsi listrik per kapita yang masih rendah dibandingkan daerah lain termasuk ketersediaan infrastruktur, tingkat pendapatan masyarakat dan kesadaran akan penggunaan energi. Meskipun konsumsi listrik per kapita masih rendah secara keseluruhan, namun dibandingkan kondisi beberapa tahun lalu terjadi peningkatan yang signifikan di Kabupaten Belu. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti :

- 1) Peningkatan ketersediaan jaringan listrik ke berbagai wilayah;
- 2) Peningkatan pendapatan masyarakat dan kemampuan untuk membayar tagihan listrik;
- 3) Peningkatan kesadaran akan pentingnya penggunaan listrik untuk kebutuhan sehari-hari; dan
- 4) Penggunaan perangkat elektronik yang semakin meluas.

Konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Belu Tahun 2024 sebesar 110.228 kWh sedangkan rasio elektrifikasi sebesar 92%.

C. Rumah Tangga menggunakan Air Bersih

Akses air minum layak di Kabupaten Belu sampai saat ini masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Belu dan menjadi isu yang penting dan membutuhkan perhatian lebih



karena peningkatan air minum yang layak akan berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara keseluruhan. Meskipun ada peningkatan dari tahun 2021 sebesar 9,22%, namun persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak masih belum mencapai target yang diharapkan. Kondisi capaian penyediaan air minum layak di Kabupaten Belu Tahun 2024 adalah sebanyak 24.311 Rumah Tangga dari 61.957 total Rumah Tangga yang baru mencapai akses air minum layak atau sebesar 34,92% yang berarti masih ada 65,8% rumah tangga yang belum memiliki akses.

Tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Belu dalam pemenuhan akses air minum layak diantaranya adalah

- 1) ketersediaan sumber air yang terbatas di Kabupaten Belu;
- 2) kondisi topografi di Kabupaten Belu dimana pada umumnya letak sumber air berada di bawah permukiman penduduk sehingga diperlukan biaya yang besar untuk mendistribusikan air dari sumber air ke permukiman;
- 3) keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Belu sehingga sampai saat ini pembangunan air masih bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat;
- 4) keberlanjutan program pembangunan air yang dilakukan Pemerintah Pusat kurang mendapat perhatian dari Pemerintah khususnya Pemerintah Desa, sehingga banyak program pembangunan air yang kondisinya terbengkalai dengan berbagai persoalan pasca program; dan
- 5) pengelolaan pemanfaatan air belum optimal dan menjadi perhatian pemerintah.



2.1.1.1.4 Lingkungan Hidup Berkualitas

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup diukur dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dimana indeks ini menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Hidup (IKLH) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan komposisi dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut. Rincian indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2020 - 2024 yang merupakan komposisi dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16
Capaian Indikator Lingkungan Hidup
Kabupaten Belu Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan	70,68	67,70	68,82	67,83	68,41
2	Indeks Kualitas Air	58,33	50,00	52,00	51,25	53,75
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	51,09	50,63	50,75	50,09	50,25
4	Indeks Kualitas Udara	92,75	93,36	94,19	92,82	91,85

Sumber :SIPD, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belu, Tahun 2023

Data pada tabel tersebut dapat diketahui Capaian indeks kualitas lingkungan meningkat 0,58 point di tahun 2024 dari capaian 67,83 di tahun 2023 masuk dalam predikat “sedang” (rentang



angka $50 < IKA \leq 70$). Capaian indeks tutupan lahan juga meningkat 0,16 point di tahun 2024 dari capaian 50,09 point di tahun 2023 dan masuk dalam kategori “sedang” (rentang angka $50 < IKA \leq 70$) dan capaian indeks kualitas air (IKA) meningkat 2,5 point di tahun 2024 dari capaian 51,25 point di tahun 2023 masuk dalam predikat “sedang” (rentang angka $50 < IKA \leq 70$). Sedangkan capaian nilai indeks kualitas udara (IKU) di tahun 2024 menurun 0,97 poin dari tahun 2023 namun masih masuk dalam kategori “sangat baik” (rentang angka $90 < IKU \leq 100$).

B. Potensi Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk di antaranya daratan, lautan dan ekosistem perairan lainnya serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman spesies, genetik (varietas/ras) dan ekosistem. Setiap ekosistem mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang berbeda karena setiap ekosistem merupakan habitat dari suatu komunitas. Dengan kata lain, keragaman spesies sangat dipengaruhi oleh tipe ekosistem. Pengenalan akan keragaman hayati menjadikan modal untuk memahami sumber daya potensial bagi pembangunan berkelanjutan. Karakteristik khusus yang dimiliki oleh suatu wilayahpun dapat tergambar dari keragaman hayati tersebut. Spesies hidup dan berevolusi dalam habitat alam yang kompleks di dalam suatu sistem dimana keanekaragaman ekosistem membentuk aneka spesies ikutan. Bila terjadi kerusakan pada spesies tertentu secara langsung berpengaruh pada ekosistem pada umumnya termasuk manusia baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu inventarisasi keragaman hayati yang





ada di daerah Kabupaten Belu merupakan sesuatu yang urgen dari waktu ke waktu. Beberapa sumber referensi dapat mengenalkan spesis tumbuhan-tumbuhan dan hewan di Kabupaten Belu disajikan pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17

Flora dan Fauna yang dilindungi di Kabupaten Belu

No.	Golongan	Nama Spesies	Status			
			Endemik	Terancam	Berlimpah	Dilindungi
1	Hewan Menyusui	- Rusa Timor (Carvus timoremsis)				1 Jenis
Jumlah						1 Jenis
2	Burung	- Koakluk (Cikukua Timor) - Koak Mata Merah				2 Jenis
Jumlah						2 Jenis
3	Reptil	- Buaya Muara - Ular Piton - Biawak Timor				3 Jenis
Jumlah						3 Jenis
4	Amphibi	-				
Jumlah						
5	Ikan	-				
Jumlah						
6	Keong	-				
Jumlah						
7	Serangga	Lebah Madu (<i>Apis Meliferra</i>)				1 Jenis
Jumlah						1 Jenis
8	Tmbuh-tumbuhan	- Avecenniaceae - Bruiguigera sp - Creaps tagal				3 Jenis
Jumlah						3 Jenis

Sumber : BKSDA NTT-2014

Selain jenis flora dan fauna yang dilindungi, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Afonsoa, dkk (2015), menemukan 7 jenis keanekaragaman fauna yang terkonsentrasi di kawasan



hutan mangrove pantai Atapupu yaitu *Scylla serrata* dari kelas Crustasea, *Cerithidea sp* dari kelas Gastropoda, *Conus textile* dari kelas Gastropoda, *Nerita lineata* dari kelas Gastropoda, *Nassarius margaritifer* dari kelas Gastropoda, *Vexillum curvilinearatum* dari kelas Gastropoda dan *Periophthalmodom schlosseri* dari kelas Pisces. Nilai keanekaragaman dari ke-7 jenis fauna dari nilai yang tertinggi sampai yang terendah dalam kategori sedang yaitu *Scylla serrata* dengan nilai keanekaragaman 1.29, *Cerithidea sp* dengan nilai keanekaragaman 1.28, *Conus textile* dengan nilai keanekaragaman 1.26, *Nerita lineata* dengan nilai keanekaragaman 1.24, *Nassarius margaritifer* dengan nilai keanekaragaman 1.29, *Vexillum curvilinearatum* dengan nilai keanekaragaman 1.25 dan *Periophthalmodom schlosseri* dengan nilai keanekaragaman 1.27. Tabel berikut adalah rincian 7 jenis fauna di kawasan ekosistem mangrove pantai Atapupu Desa Jenilu Kecamatan Kakuluk Mesak Kabupaten Belu.

Tabel 2.18

Tujuh Jenis Fauna yang Ditemukan di Pantai Atapupu

No	Nama Jenis Fauna (Indonesia)	Nama Jenis Fauna (Ilmiah)	Jumlah Individu
1	Kepiting Bakau	<i>Scylla serrata</i>	145
2	Siput Bakau	<i>Cerithidea sp</i>	98
3	Siput Batik	<i>Conus textile</i>	86
4	Siput Maritim	<i>Nerita Lineata</i>	51
5	Siput Sihik Hitam	<i>Nassarius margaritifer</i>	46
6	Siput Kerucut	<i>Vexillum curvilinearatum</i>	33
7	Ikan Gelodok	<i>Periophthalmodom schlosseri</i>	27

Sumber: Afonsoa, dkk 2015

Ketergantungan organisme darat terhadap mangrove sangat luas, baik secara langsung maupun tidak langsung, bersifat menetap ataupun sementara. Organisme yang hidup di sekitar kawasan ekosistem mangrove yang sifatnya sementara, umumnya



menempati bagian atas pohon mangrove, yang terdiri atas insekta, burung, kelelawar, monyet, lutung, kucing mangrove, garangan dan ular; sedangkan organisme yang menetap di kawasan ekosistem mangrove kebanyakan hidup pada substrat yang keras sampai lumpur, misalnya perakaran pohon-pohon serta fauna-fauna mangrove. Fauna mangrove hidup pada substrat dengan cara berendam dalam lubang lumpur, berada di permukaan substrat ataupun menempel pada perakaran pepohonan. Ketika air surut, fauna tersebut dapat turun untuk mencari makanan. Jenis mangrove yang teridentifikasi adalah *Rhizophora* sp., *Avicenia* sp., dan *Ceriops togal*.

C. Rumah Tangga Dengan Sanitasi Aman

Sanitasi merupakan komponen esensial dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berperan penting dalam peningkatan kualitas hidup. Komitmen untuk menjamin penyediaan sanitasi yang layak dan aman serta berkualitas bagi setiap rumah tangga merupakan tantangan tersendiri dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Belu. Data terhadap indikator keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak di Kabupaten Belu menunjukkan tren positif diatas 80% namun dari indikator keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang aman masih terbilang rendah. Analisis terhadap capaian indikator sanitasi di Kabupaten Belu selama periode 2020-2024 tergambar pada tabel berikut.





Tabel 2.19

KK dengan akses terhadap Fasilitas Sanitasi Aman

Uraian	Capaian (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
KK dengan akses terhadap Fasilitas Sanitasi Aman	n/a	n/a	0,73	6,75	7,55

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belu 2020-2024

Data diatas menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup keluarga (KK) melalui akses terhadap sanitasi aman, yang dilihat dari capaian indikator KK dengan akses terhadap fasilitas sanitasi aman di Kabupaten Belu tahun 2022-2024 yaitu pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 6,82 point menjadi 7,55% dari capaian tahun 2022 sebesar 0,73%.

C. Persampahan

Produksi sampah di Kota Atambua semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas setiap tahunnya, baik sampah produksi rumah tangga, perdagangan/komersial, maupun industri. Kelemahan utama pada pengelolaan persampahan adalah adanya ketidakseimbangan antara pelayanan persampahan dengan produksi sampah yang ada, antara lain karena laju penumpukan volume timbunan sampah yang cukup tinggi, kurangnya sarana prasarana persampahan, kurangnya kesadaran dan keterbatasan masyarakat dalam membangun sarana dan mengolah sampah. Pengembangan pelayanan persampahan ke depan dilakukan dengan memprediksi volume sampah yang dihasilkan, sehingga





akan diketahui kebutuhan besaran layanan sampai dengan titik keseimbangan. Kegiatan yang perlu dilakukan antara lain penambahan dan perbaikan sarana prasarana penunjang persampahan, serta perbaikan kualitas tata cara pengelolaan sampah (pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah). Seluruh kegiatan pengelolaan sampah tersebut harus dilaksanakan secara terpadu, sehingga dapat optimal dan dampak terhadap lingkungan dapat dikurangi.

Pada Periode 2016–2022, kegiatan penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan meliputi :

- 1) Tong sampah 3 pilah 60 liter : 205 unit
- 2) Tong sampah roda 120 liter : 250 unit
- 3) Tong sampah roda 240 liter : 10 unit
- 4) Tong sampah roda 660 liter : 25 unit
- 5) Alat pencacah sampah (chooper) : 5 unit
- 6) Mobil Tanki air : 3 unit
- 7) Motor Roda 3/otonastrida : 13 unit
- 8) Mobil Dump Truck : 6 unit
- 9) Mesin Press Plastik : 1 unit
- 10) Mesin potong rumput : 4 unit
- 11) Mobil Armroll : 3 unit
- 12) Motor Roda 2 : 16 Unit

Pada Tahun 2021, tercatat bahwa dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Belu didukung pula oleh 96 tenaga kebersihan sedangkan di Tahun 2022 didukung oleh 135 orang tenaga honorer Satgas kebersihan. Persentase penanganan sampah di Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel 2.20.



Tabel 2.20
Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Belu
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Volume Timbulan SRT	M2/tahun	85338.83	87434.27	81,746.40	81,746.40	94,034
2	Volume Timbulan SSSRT	M2/tahun	12506.89	13202.45	10.177.10	10.903	14,043
3	Total Volume Timbulan Sampah	M2/tahun	97845.71	100637,00	91,923.51	92.649	108,077
4	Total Volume Sampah yang di angkut ke TPA	M2/tahun	40668.3	43614	46,740.02	70.116	34,237
5	Penanganan Sampah Kabupaten Belu	%	41.56	43.34	50.85	75.68	31.68
6	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani	%	16,92	17,55	16,10	24,10	13,03

Sumber: Dinas LH dan Perhubungan Kab Belu, 2025

2.1.1.1.5 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

A. Indeks Risiko Bencana

Kabupaten Belu merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana beragam di Provinsi Nusa Tenggara Timur karena berada pada pesisir, dataran dan perbukitan. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dipadukan dengan data dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan hasil kajian risiko bencana yang dapat mengancam Kabupaten Belu adalah banjir, tsunami, cuaca ekstrem, gempa bumi, gelombang ekstrem, abrasi, epidemi, dan wabah penyakit.



Jenis-jenis ancaman bencana di Kabupaten Belu termasuk bencana yang disebabkan oleh:

1. Aspek geologi meliputi: gempa bumi, tsunami dan tanah longsor;
2. Aspek hidrometeorologi meliputi banjir, cuaca ekstrem (angin puting beliung), gelombang ekstrem dan abrasi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan; dan
3. Aspek biologi meliputi epidemi dan wabah penyakit.

Uraian secara rinci sebaran kawasan rawan bencana dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut ini.

Tabel 2.21
Kawasan Rawan Bencana Menurut Jenis Bencana di
Kabupaten Belu

No.	Jenis Kawasan Rawan Bencana	Lokasi yang Berpotensi	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR	Lamaknen	Dirun, Lamaksanulu, Leowalu, Fulur
		Tasifeto Timur	Bauho, Takirin, Halimodok, Sarabau, Sadi, Umaklaran, Manleten
		Raihat	Tohe, Maumutin, Asumanu
		Tasifeto Barat	Naitimu, Lawalutolus, Rinbesihat, Naekasa
		Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Leosama, Jenilu, Kenebibi, Kabuna
		Kota Atambua	Atambua, Fatubenao, Tenukiik, Manumutin
		Raimanuk	Teun, Tasain, Leuntolu, Rafae, Renruea
		Lasiolat	Lasiolat
		Lamaknen	Nualain, Lutarato,



No.	Jenis Kawasan Rawan Bencana	Lokasi yang Berpotensi	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
		Selatan	Lakmaras, Kewar
		Atambua Barat	Umanen
		Atambua Selatan	Fatukbot, Rinbesi
		Nanaet Duabesi	Nanaenoe
2	KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR	Lamaknen	Kewar, Fulur, Duarato, Makir, Lamaksenulu Dirun, Leowalu, Maudemu, Mauhitas
		Tasifeto Timur	Silawan, Tulakadi, Sadi, Umaklaran, Manleten, Fatubaa, Dafala, Takirin, Bauho, Sarabau, Tialai, Halimodok
		Raihat	Asumanu, Tohe, Raifatus, Aitoun, Tohe Leten
		Tasifeto Barat	Tukuneno, Naekasa, Lookeu, Derok faturene, Bakustulama, Rinbesihat, Naitimu, Lawalutulus
		Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Jenilu, Kenebibi, Leosama, Kabuna
		Kota Atambua	Atambua, Manumutin, Fatubenao
		Raimanuk	Raifatus, Renrua, Duakoran, Mandeu, Rafae, Faturika, Leuntolu, Teun, Tasain
		Lasiolat	Lasiolat, Lakanmau, Dualasi Raiulun, Dualasi, Fatulotu, Baudaok
		Lamaknen Selatan	Ekin, Loonuna, Nualain, Lakmaras, Henes, Debululik, Sisi Fatuberal,



No.	Jenis Kawasan Rawan Bencana	Lokasi yang Berpotensi	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
			Lutarato
		Atambua Barat	Umanen
		Atambua Selatan	Manuaman, Rinbesi, Lidak, Fatukbot
		Nanaet Duabesi	Dubesi, Nanaet, Fohoea, Nanaenoe
3	KAWASAN RAWAN BENCANA TSUNAMI	Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Kenebibi, Leosama, Jenilu
		Tasifeto Timur	Silawan
4	KAWASAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN	Lamaknen	Kewar, Fulur, Duarato, Makir, Lamaksenulu, Dirun, Leowalu, Maudemu, Mauhitas
		TasifetoTimur	Silawan, Tulakadi, Sadi, Umakalaran, Manleten, Fatubaa, Dafala, Takirin, Bauho, Sarabau, Tialai, Halimodok
		Raihat	Asumanu Tohe, Raifatus, Aitoun, Tohe Leten, Maumutin
		Tasifeto Barat	Tukuneno, Naekasa, Lookeu, Derok faturene, Bakustulama, Rinbesihat, Naitimu, Lawalutulus
		Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Jenilu, Kenebibi, Leosama, Kabuna
		Kota Atambua	Atambua, Manumutin, Fatubenao, Tenukiik
		Raimanuk	Raifatus, Renrue, Duakoran, Mandeu, Rafae, Faturika, Leuntolu, Teun, Tasain
		Lasiolat	Lasiolat, Lakanmau, Dualasi



No.	Jenis Kawasan Rawan Bencana	Lokasi yang Berpotensi	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
			Raiulun, Dualasi, Fatulotu, Baudaok, Maneikun
		Lamaknen Selatan	Ekin, Loonuna, Nualain, Lakmaras, Henes, Debululik, Sisi Fatuberal, Lutarato
		Atambua Barat	Umanen, Berdao, Tulamala, Beirafu
		Atambua Selatan	Manuaman, Rinbesi, Lidak, Fatukbot
		Nanaet Duabesi	Dubesi, Nanaet, Fohoea, Nanaenoe
5	KAWASAN RAWAN BENCANA KEKERINGAN	Lamaknen	Kewar, Fulur, Duarato, Makir, Lamaksenu, Dirun, Leowalu, Maudemu, Mauhitas
		Tasifeto Timur	Silawan, Tulakadi, Sadi, Umaklaran, Manleten, Takirin, Fatubaa, Dafala, Bauho, Sarabau, Tialai, Halimodok
		Raihat	Asumanu, Tohe, Raifatus, Aitoun, Tohe Leten, Maumutin
		Tasifeto Barat	Tukuneno, Naekasa, Lookeu, Derok faturene, Bakustulama, Rinbesihat, Naitimu, Lawalutulus
		Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Jenilu, Kenebibi, Leosama, Kabuna
		Kota Atambua	Atambua, Manumutin, Fatubena, Tenukiik
		Raimanuk	Raifatus, Renrua Duakoran, Mandeu, Rafae, Faturika,



No.	Jenis Kawasan Rawan Bencana	Lokasi yang Berpotensi	
		Kecamatan	Desa/Kelurahan
			Teun, Tasain
		Lasiolat	Lasiolat, Lakanmau, Dualasi Raiulun, Dualasi, Fatulotu Baudaok, Maneikun
		Lamaknen Selatan	Ekin, Loonuna, Nualain, Lakmaras, Henes, Debululik, Sisi Fatuberal Lutarato
		Atambua Barat	Umanen, Berdao, Tulamalae, Beirafu
		Atambua Selatan	Manuaman, Rinbesi, Lidak, Fatukbot
		Nanaet Duabesi	Dubesi, Nanaet, Fohoeka, Nanaenoe
6	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	Kakuluk Mesak	Fatuketi, Dualaus, Jenilu Kenebibi
		TasifetoTimur	Silawan

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu, 2024

Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) Ancaman bencana pada wilayah Kabupaten Belu beserta skor dan kelas resikonya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22
INDEKS RISIKO PER ANCAMAN

INDEKS RISIKO PER ANCAMAN	SKOR TAHUN 2021	SKOR TAHUN 2022	KELAS RISIKO
Kebakaran Hutan & Lahan	36.00	36,00	Tinggi
Tanah Longsor	24.00	24,00	Tinggi
Kekeringan	24.00	24.00	Tinggi
Banjir	21.60	21.60	Tinggi
Gempa Bumi	21.60	21,60	Tinggi
Cuaca Ekstrim	20.40	20.40	Tinggi



INDEKS RISIKO PER ANCAMAN	SKOR TAHUN 2021	SKOR TAHUN 2022	KELAS RISIKO
Gelombang Ekstrim & Abrasi	17.60	17.60	Tinggi
Tsunami	15.38	16,00	Tinggi

Sumber : BUKU IRBI 2022

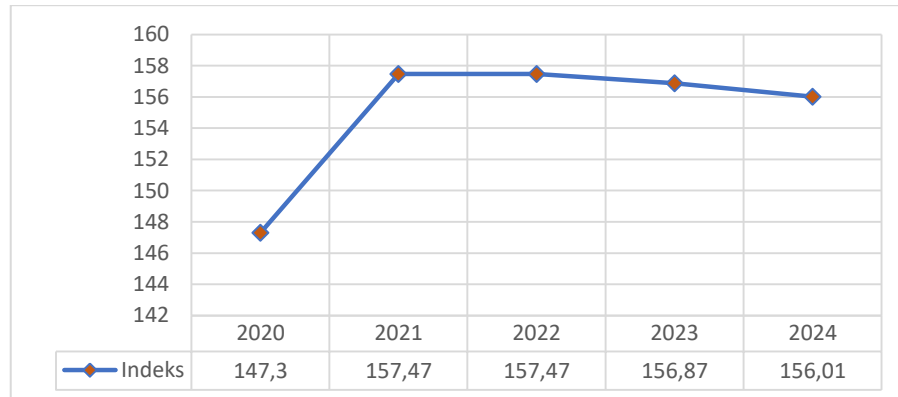
Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa ancaman bencana di Kabupaten Belu termasuk dalam kategori kelas risiko tinggi, dimana kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman bencana dengan kategori kelas risiko tinggi dengan skor 36,00. Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya pengelolaan risiko bencana untuk mengurangi kerugian akibat bencana seminimal mungkin. Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Belu yang merupakan hasil perhitungan untuk multi ancaman, tahun 2020 memiliki indeks risiko senilai 147.3 dengan kategori tinggi meningkat di tahun 2021 menjadi 157,47 dengan kategori tinggi. Sedangkan tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 156,01 dengan kategori tinggi. Rincian perkembangan nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Belu Tahun 2020-2024 selengkapnya, dapat dilihat pada Grafik 2.1.





Grafik 2.1

Indeks Resiko Bencana Kabupaten Belu Tahun 2020-2024



Sumber : BUKU IRBI 2024

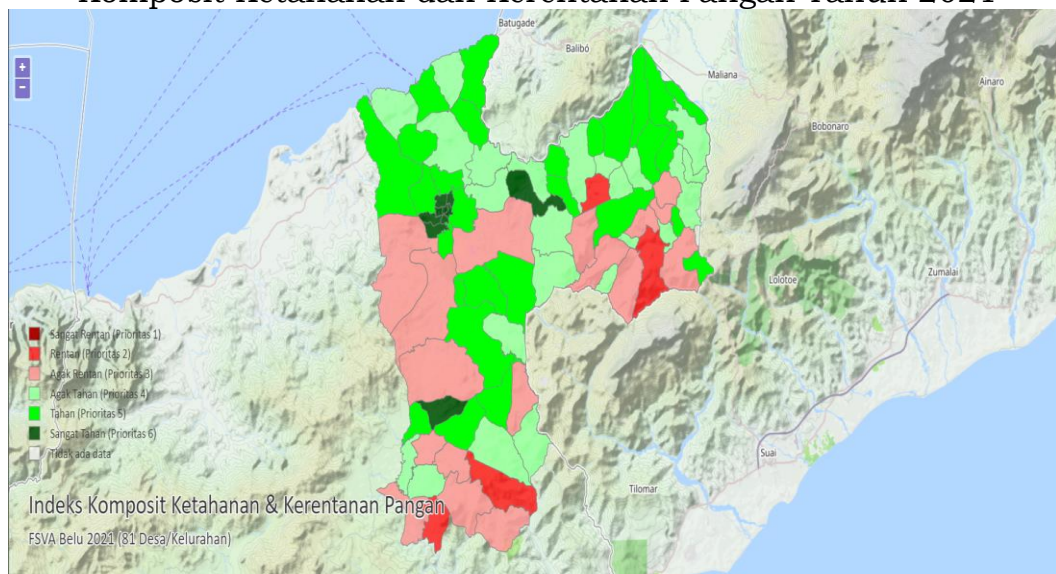
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Belu merupakan bagian dari perhitungan Indeks Risiko Bencana. IKD mencerminkan kemampuan daerah untuk menghadapi berbagai ancaman, termasuk bencana alam dan perubahan sosial ekonomi. (IKD). IKD dihitung berdasarkan 7 (tujuh) prioritas, yakni: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. IKD Kabupaten Belu menunjukkan tren yang tetap dalam kurung waktu 2020-2023 yaitu 0,37 dengan tingkat kapasitas daerah rendah dan meningkat 0,01 point di tahun 2024 menjadi 0,38 dengan tingkat kapasitas daerah rendah.



B. Kerentanan Mata Pencaharian Penduduk Belu Terhadap Perubahan Iklim

Kabupaten Belu merupakan salah satu wilayah yang paling terdampak perubahan iklim. Merujuk pada laporan analisis indeks komposit ketahanan pangan pada FSVA Tahun 2021 sebanyak 25,92% desa/kelurahan masuk kategori sangat rentan, rentan dan agak rentan dengan rincian 4 desa/kelurahan dengan kategori Rentan, serta 17 desa/ kelurahan dengan kategori Agak Rentan sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini. (Peta FSVA: Gambar 1).

Gambar 2.31
Jumlah Desa/ Kelurahan di Kabupaten Belu dengan kategori Sangat Rentan, Rentan dan Agak Rentan berdasarkan Indeks Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2021



Sumber: Badan Pangan Nasional, Tahun 2024

Perubahan iklim berpengaruh besar terhadap ketahanan dan produktivitas suatu mata pencaharian. Perubahan iklim berpengaruh besar terhadap ketahanan dan produktivitas suatu mata pencaharian. Berdasarkan hasil studi yang dilaksanakan oleh WFP pada Tahun 2024, jenis mata pencaharian utama di Kabupaten Belu Tahun 2021 antara lain Sawah/padi,



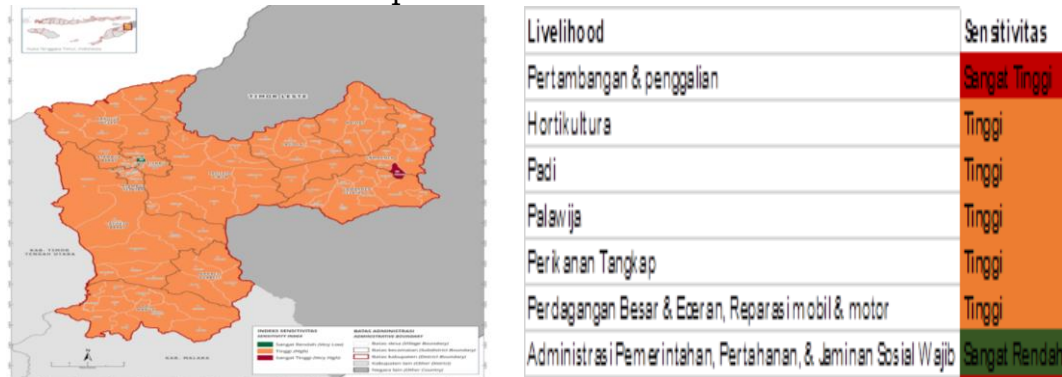
Pertambangan dan Penggalian, Perikanan Tangkap, Palwija, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Hortikultura, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial. Mata pencaharian alternatif masyarakat di Kabupaten Belu antara lain penyediaan akomodasi dan makan minum, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, supir/buruh, sawah/padi, peternakan, palawija, perikanan tangkap, serta jasa lainnya. Selain itu, mata pencaharian yang masuk dalam kategori mata pencaharian utama dan mata pencaharian alternatif antara lain sawah/padi, perikanan tangkap, palawija, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Laju perubahan iklim, ketahanan pangan dan mata pencaharian memiliki kaitan yang sangat erat. Hal ini dapat dilihat dari indeks sensitivitas yang menindikasikan tingkat kerentanan subjektif dari suatu kelompok mata pencaharian di suatu wilayah. Pada Tahun 2023 terdapat 1 jenis mata pencaharian dengan kategori Sensitivitas Sangat Tinggi (*very high sensitivity*) yaitu Pertambangan dan Penggalian, 5 mata pencaharian dengan kategori Sensitivitas Tinggi (*high sensitivity*) yaitu Hortikultura, Padi, Palawija, Perikanan Tangkap dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor, serta 1 mata pencaharian dengan kategori Sensitivitas Rendah (*low sensitivity*) yaitu Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. (Peta Sensitivitas Mata Pencaharian : Gambar 2.32).





Gambar 2.32
Indeks Sensitivitas Mata Pencanharian terhadap Perubahan Iklim di
Kabupaten Belu Tahun 2024



Sumber: Hasil Studi Analisis Ketahanan Pangan Melalui Pendekatan Mata Pencanharian Yang Responsif Terhadap Perubahan Iklim, WFP 2024

2.1.1.2 Aspek Demografi

A. Jumlah Penduduk dan Distribusi Penduduk

Perkembangan penduduk yang pesat tanpa diimbangi dengan persediaan sumber daya/sarana prasarana yang memadai, maka hanya akan menjadi beban bagi pembangunan. Sebaliknya, bila percepatan pertumbuhan penduduk jauh lebih lambat dari percepatan pertumbuhan sumber daya/sarana prasarana dan sumber dana yang ada, maka penduduk yang banyak dengan kualitas yang memadai akan menjadi modal pembangunan yang sangat berharga. Berdasarkan hal tersebut pemerintah dalam berbagai format perencanaan selalu menempatkan masalah kependudukan sebagai kerangka acuannya, karena penduduk dengan aspek kualitas dan kuantitasnya merupakan pelaku sentral sekaligus sebagai obyek yang menikmati hasil-hasil pembangunan secara lebih adil dan berperikemanusiaan.

Jumlah penduduk Kabupaten Belu sampai akhir Tahun 2024 sebanyak 232.788 jiwa.



Persebaran penduduk atau disebut juga distribusi penduduk menurut tempat tinggal dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu persebaran penduduk secara geografis dan persebaran penduduk secara administratif, di samping itu ada persebaran penduduk menurut klasifikasi tempat tinggal yakni desa dan kota. Secara geografis, penduduk Kabupaten Belu tersebar di 12 Kecamatan dengan pola relatif tidak merata. Jumlah penduduk terbanyak ada pada kecamatan Atambua yakni sebanyak 32.119 jiwa (13,79%) dan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Nanaet Duabesi sebanyak 5.441 jiwa (2,33%).

Tabel 2.23

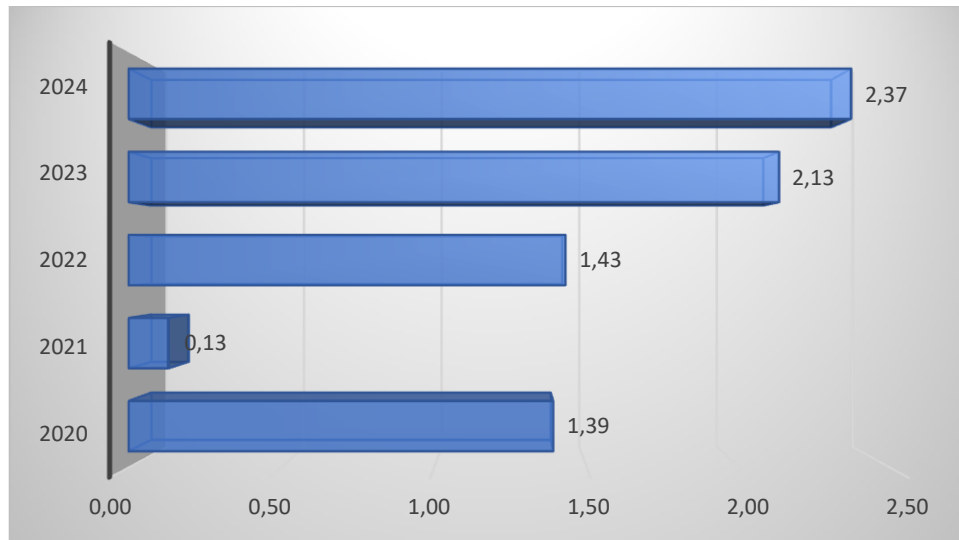
Jumlah Penduduk, Persentase Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2024

Kecamatan <i>District</i>	Penduduk (ribu) <i>Population (thousand)</i>	Persentase Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2021-2024 (%) <i>Annual Population Growth Rate 2021-2024</i>	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Raimanuk	19.281	8,28	5.75	107,46
Tasifeto Barat	27.892	11,98	5.33	124,41
Kakuluk Mesak	23.140	9,94	1.10	123,39
Nanaet Duabesi	5.441	2,34	4.78	90,31
Atambua	32.119	13,80	1.76	1289,92
Atambua Barat	23.440	10,07	-3.18	1507,40
Atambua Selatan	26.699	11,47	1.04	1697,33
Tasifeto Timur	27.979	12,02	3.23	132,37
Raihat	15.852	6,81	3.77	181,79
Lasiolat	7.863	3,38	3.20	121,94
Lamaknen	13.506	5,80	2.46	127,54
Lamaknen Selatan	9.576	4,11	3.78	88,33
Belu	232.788	100	2.37	181,17

Sumber: BPS Kabupaten Belu, 2025



Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan Penduduk Pertahun
Tahun 2021-2024



Sumber: BPS Kabupaten Belu, 2025

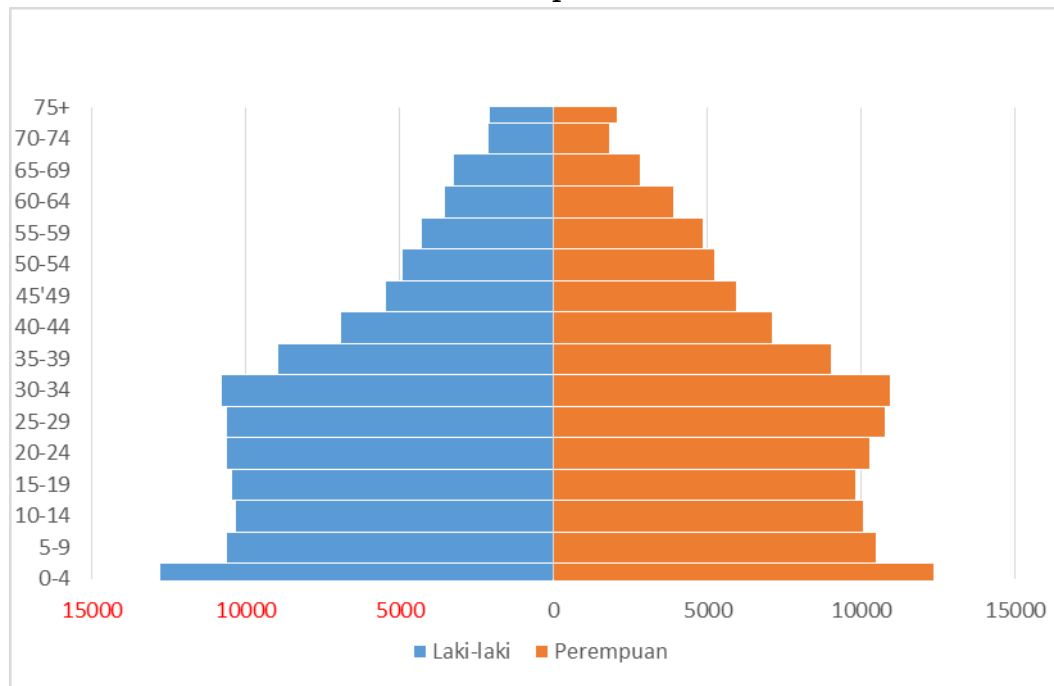
Grafik diatas menunjukkan adanya peningkatan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belu pada Tahun 2024 sebesar 0,24 poin dari 2,13 % di tahun 2023.

B. Struktur Penduduk

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk grafik. Grafik penduduk berwarna biru menggambarkan banyaknya penduduk berjenis kelamin laki-laki dan grafik orange menunjukkan banyaknya penduduk perempuan menurut kelompok umur seperti pada Grafik 2.3 di bawah.



Grafik 2.3
Piramida Penduduk Kabupaten Belu Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Belu, 2025

Pada grafik dapat dilihat bahwa penduduk usia produktif yaitu usia dari 15-64 tahun sebesar 65,63%. Pada dasar dan badan piramida yang cukup lebar menunjukkan kelompok penduduk ini memiliki angka rasio ketergantungan penduduk muda yang cukup tinggi sebesar 28,31%, sementara puncak piramida yang menciut tajam menunjukkan rendahnya angka rasio ketergantungan penduduk tua yaitu sebesar 6,04%.

Adapun Rasio jenis kelamin tahun 2024 adalah 99,40 yang berarti diantara 100 perempuan terdapat 99 sampai 100 penduduk laki-laki. Rasio penduduk sangat penting dalam berbagai bidang untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah serta dalam pengambilan kebijakan/keputusan ekonomi.

Proyeksi penduduk adalah perhitungan yang dilakukan berdasarkan komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk,



seperti kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk (migrasi). Penduduk Kabupaten Belu diproyeksi mengalami tren positif dari tahun 2025-2029 dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 1,8%.

Tabel 2.24

Proyeksi Penduduk Kabupaten Belu Menurut Kelompok Umur

Kelompok Usia/ Tahun	Tahun				
	2025	2026	2027	2028	2029
0-14	68,12	69,45	70,79	72,10	73,37
15-64	157,42	160,15	162,86	165,56	168,21
65+	14,86	15,45	16,02	16,60	17,19
Total	240,40	245,05	249,67	254,26	258,77

Sumber : BPS Kab. Belu, 2025

Penduduk suatu daerah dikatakan berstruktur muda apabila persentase penduduk kelompok umur 0-14 tahun lebih dari 40%. Pada tabel diatas tampak bahwa penduduk Kabupaten Belu tergolong berstruktur sedang, sebab besarnya persentase penduduk kelompok umur 0-14 tahun berada dibawah 40%. Selanjutnya struktur umur dapat digunakan untuk mengetahui angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) yaitu perbandingan antara jumlah penduduk yang secara ekonomis tidak produktif (usia 0-14 dan 65+) dengan penduduk usia produktif secara ekonomi (usia 15-64 tahun). Semakin besar persentase penduduk yang berusia non produktif, maka makin besar pula angka beban ketergantungannya.

Proyeksi penduduk sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan ditingkat nasional maupun daerah. Proyeksi ini membantu pemerintah dalam mengantisipasi perubahan jumlah dan struktur penduduk sehingga kebijakan dan program pembangunan dapat dirancang dan dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.

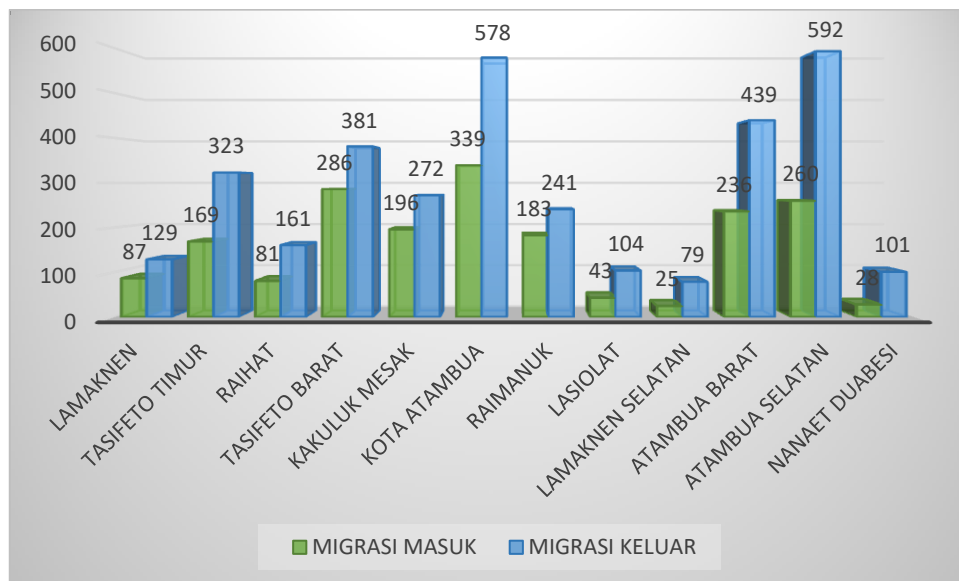


C. Kelahiran, Kematian, Datang dan Migrasi

Berdasarkan profil perkembangan kependudukan Kabupaten Belu Tahun 2024, angka kelahiran hidup bayi adalah 3.507 orang dengan jumlah angka kematian penduduk sebesar 973 orang. Angka kematian ini mencerminkan bahwa kondisi kesehatan lingkungan kurang baik dan langsung mempengaruhi tingkat kesehatan penduduk. Hal lain dipengaruhi oleh tingkat kecukupan gizi, tingginya prevalensi penyakit menular pada penduduk, atau kecelakaan yang terjadi di dalam atau di luar rumah.

Grafik 2.4

Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar Kabupaten Belu Tahun 2024



Sumber: Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Belu Tahun 2024

Jumlah penduduk yang datang (migrasi masuk) sebesar 1.933 orang pada Tahun 2024 karena hubungan keluarga ataupun karena urusan bisnis maupun sebagai pelancong untuk kegiatan pariwisata dengan rata-rata lama tinggal antara 1 hari dan selanjutnya akan pergi lagi. Sedangkan migrasi keluar



sebanyak 3.400 orang yang lebih dipengaruhi oleh kegiatan melanjutkan sekolah di luar wilayah maupun karena urusan sebagai tenaga kerja di tempat lain.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

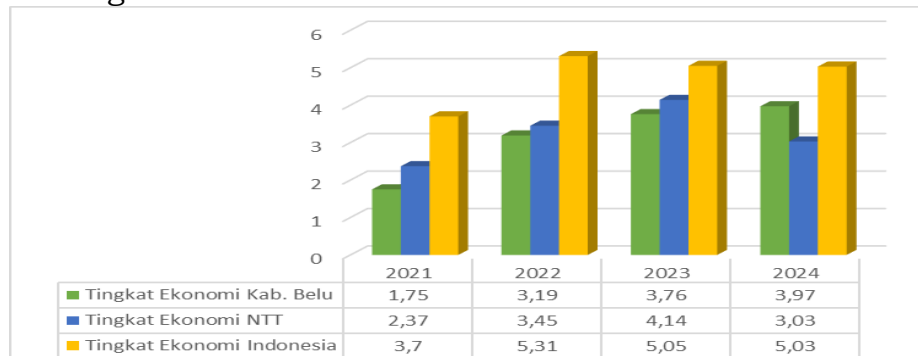
A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor ekonomi suatu daerah. Nilai tambah bruto disini mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tak langsung netto. Dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto.



Grafik 2.5
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belu
dengan Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2021-2024



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2025

BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan Grafik 2.5 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belu Tahun 2024 mengalami peningkatan sejak tahun 2021 yakni meningkat 2,22%. Hal ini tentu didukung dengan program-program peningkatan ekonomi yang telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah yang secara perlahan menunjukkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi selama tahun 2021 hingga 2024. Kebijakan maupun intervensi pemerintah terhadap program-program yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat perlu terus dilakukan. Stimulus-stimulus yang diberikan pemerintah melalui jaring pengaman sosial sebagai strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat dari waktu ke waktu akan terus memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Analisis PDRB dapat menjadi pertimbangan dalam kebijakan perencanaan daerah serta evaluasi hasil pembangunan.



Sumbangan terbesar untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Belu tahun 2024 adalah dari kategori A pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1.298,73 miliar rupiah atau 21,90 persen. Berikutnya adalah dari Kategori G sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 915,08 miliar rupiah atau 15,43 persen dan kategori P jasa pendidikan sebesar 866,59 miliar rupiah atau 14,61 persen. Sedangkan, capaian terendah pada tahun 2024 terdapat pada kategori E pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 1,39 miliar rupiah atau 0,02 persen. Lebih lanjut, kondisi ini dapat diamati pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Belu (miliar rupiah),
Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha / Industry		2020	2021	2022	2023	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	994,95	1.031,41	1.136,56	1.225,08	1.298,73
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	91,65	94,53	99,65	105,01	109,29
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	49,45	50,59	56,40	66,25	81,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	3,15	3,37	3,62	4,17	4,3
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	1,09	1,22	1,32	1,36	1,39
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	381,54	409,36	433,82	491,41	506,23
G	Pedagang Besar dan	627,42	671,64	742,62	839,55	915,08



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

	Eceran, Reparasi Mobil dan SepedaMotor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehides and Motorcycles</i>					
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	211,58	219,68	244,90	275,56	323,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	16,30	16,82	18,90	21,47	24,49
J	Informasi dan Komunikasi / <i>Information and Communication</i>	192,47	201,50	214,51	222,80	235,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	268,74	287,89	314,22	327,15	344,34
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	102,83	104,13	116,28	131,77	152,33
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	2,47	2,12	2,32	2,53	2,75
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	612,13	613,53	621,16	645,75	758,91
P	Jasa Pendidikan / <i>Education</i>	745,88	739,10	766,13	831,13	866,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	114,44	127,09	129,91	147,69	157,64
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	133,60	125,06	133,33	141,88	148,75
	Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	4.549,71	4.699,02	5.035,59	5.480,55	5.931,22

Sumber : BPS Kab.Belu, 2025



Berdasarkan tabel PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Belu dari tahun 2020 hingga 2024, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan dimana sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB, dengan nilai tertinggi sehingga sektor ini tetap menjadi pilar utama perekonomian daerah selama periode tersebut.

Tabel 2.26

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Belu (miliar rupiah),
Tahun 2020–2024

Lapangan Usaha / Industry		2020	2021	2022	2023	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	663,59	682,27	716,84	734,32	745,21
B	Pertambangan dan Penggalan/ <i>Mining and Quarrying</i>	61,20	62,40	63,74	65,59	68,28
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	32,09	32,37	35,09	37,89	42,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	2,16	2,28	2,32	2,59	2,69
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,66	0,73	0,77	0,79	0,81
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	222,94	234,60	233,54	252,52	257,25
G	Pedagang Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan SepedaMotor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	359,21	375,85	401,71	426,56	438,71
H	Transportasi dan	145,54	150,15	156,78	164,60	177,94



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

	Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>					
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	11,17	11,53	12,61	13,57	14,59
J	Informasi dan Komunikasi / <i>Information and Communication</i>	151,16	156,83	166,04	171,19	178,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	185,67	189,93	192,61	196,60	204,22
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	80,18	81,95	86,25	90,14	93,56
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	1,58	1,35	1,41	1,46	1,50
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	417,38	413,24	416,12	416,91	460,96
P	Jasa Pendidikan / <i>Education</i>	467,26	458,10	460,72	481,66	491,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	78,03	84,32	85,85	90,10	94,04
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	88,42	82,12	83,82	86,99	89,74
	Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product	2.968,23	3.020,03	3.116,22	3.233,47	3.361,74

Sumber : BPS Kab.Belu, 2025

PDRB ADHK menunjukkan peningkatan dari tahun 2021- 2024, yang menunjukkan bahwa produksi barang dan jasa telah mengalami peningkatan.

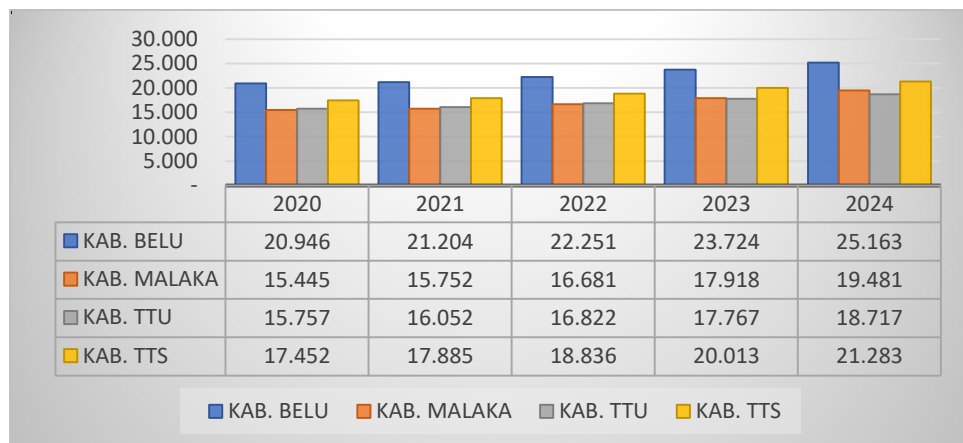


C. PDRB Per Kapita

Kesejahteraan masyarakat suatu wilayah dapat dianalisis melalui berbagai indikator, salah satunya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Indikator ini memberikan gambaran mengenai pendapatan rata-rata yang diterima oleh setiap individu dalam suatu populasi. PDRB per kapita mencerminkan daya beli masyarakat, yang merupakan indikator penting dalam menilai kesejahteraan ekonomi dan sosial di suatu wilayah. Dengan memahami PDRB per kapita, kita dapat mengevaluasi bagaimana perubahan ekonomi mempengaruhi standar hidup dan kualitas hidup masyarakat.

Grafik 2.6

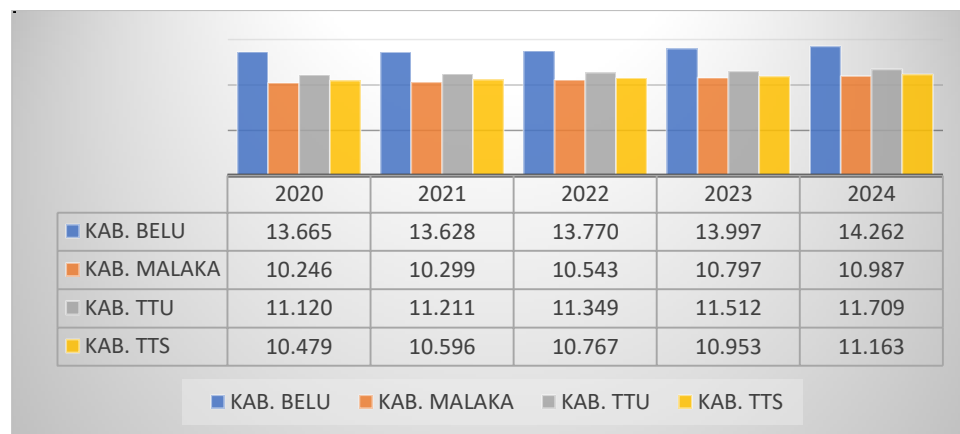
Perbandingan PDRB Per Kapita ADHB Kab.Belu, Kab. Malaka,
Kab. TTU dan Kab. TTS Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi NTT, 2025



Grafik 2.7
Perbandingan PDRB Per Kapita ADHK Kab.Belu, Kab. Malaka,
Kab. TTU dan Kab. TTS Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi NTT, 2025

Pada periode 2020-2024, PDRB per kapita Kabupaten Belu menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, PDRB per kapita Kabupaten Belu tercatat sebesar 25.163 juta rupiah jika dihitung berdasarkan harga berlaku, sedangkan pada harga konstan, angkanya mencapai 14.262 juta rupiah. Meskipun ada peningkatan, Kabupaten Belu masih perlu melakukan upaya signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

PDRB Per Kapita Kabupaten Belu untuk periode tahun 2020-2024, lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten sekitar (Kabupaten Malaka, Kabupaten TTU dan Kabupaten TTS). Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Belu memiliki potensi ekonomi yang lebih prospektif yang dapat dilihat dari pendapatan penduduk yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten sekitar sehingga masyarakat memiliki daya beli yang lebih kuat.

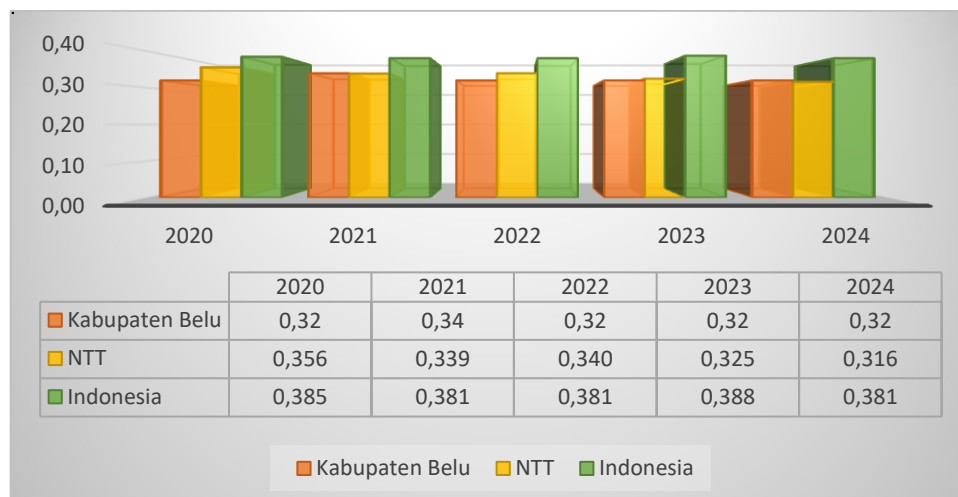
D. Indeks Gini

Indeks Gini Kabupaten Belu dari Tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan adanya fluktuatif pola ketimpangan



pendapatan dalam masyarakat Kabupaten Belu masih berada dalam kategori ketimpangan sedang dan nilai ketimpangan ini sama dengan nilai ketimpangan Provinsi NTT maupun secara nasional. Hal ini berarti pendapatan belum terdistribusi secara merata yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, kesenjangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan serta ketimpangan dalam kepemilikan aset.

Grafik 2.8
Perbandingan Indeks GINI Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, GINI Ratio Indonesia Tahun 2020-2025
Belu Dalam Angka Tahun 2020 - 2025
Hasil olah data BP4D berdasarkan Pengeluaran rata-rata per kapita
Data BPS

E. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai tukar petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Kabupaten Belu belum dapat memberikan gambaran Nilai Tukar Petani terhadap semua komoditas pertanian, hal ini dikarenakan belum ada lembaga yang melakukan penelitian terhadap semua



jenis komoditas pertanian. Pada tahun 2020 Kabupaten Belu melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu baru dapat melakukan Penelitian terhadap 1 (satu) Komoditas pertanian yakni Penelitian terhadap Nilai Tukar Tukar Bawang Putih dengan lokus kegiatan di 2 (dua Kecamatan) yakni Kecamatan Lamaknen dan Lamaknen Selatan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif rerata harga yang diterima petani mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2020. Peningkatan terjadi karena adanya kenaikan harga jual komoditas bawang putih setiap tahun.

Berikut Tabel 2.27 tentang Nilai Tukar Bawang Putih Varietas Lokal di Kabupaten Belu Tahun 2018 -2020.

Tabel 2.27
Nilai Tukar Bawang Putih Varietas Lokal
Kabupaten Belu Tahun 2018 -2020

Tahun	Index Harga yang dibayar (IB)	Index Harga Yang Diterima (IT)	NTP
2018	108,27	100,24	92,58709104
2019	106,23	103,20	97,14730347
2020	103.65	102,86	99,24636195

Sumber : data Diolah berdasarkan hasil isian Kuisioner, 2020

Tabel 2.26 dapat memberikan informasi tentang NTP atau kesejahteraan petani bawang putih varietas lokal di Kabupaten Belu selama 3 (tiga) tahun yang mengalami defisit. Artinya kenaikan harga jual bawang putih relatif lebih kecil dibandingkan dengan harga barang konsumsi ditandai dengan Nilai NTP yang kurang dari 100. Fenomena pergerakan nilai NTP bawang putih varietas Lokal dari tahun ke tahun sangat dipengaruhi oleh kondisi harga yang dibayarkan dan diterima oleh petani tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas mengenai data NTP bawang putih varietas local di Kabupaten Belu dapat diketahui bahwa harga



yang diterima petani bawang putih di Kabupaten Belu relative meningkat setiap tahun, meskipun dalam besaran yang kecil yaitu sebesar 0,13% Tahun 2018, 2,98% Tahun 2019, dan 2,79% Tahun 2020. Harga yang dibayar petani (IB) bawang putih varietas lokal relatif meningkat meningkat setiap tahun dengan peningkatan terbesar pada Tahun 2018 yaitu sebesar 8,3% jika dibandingkan dengan peningkatan harga yang dibayarkan pada Tahun 2019 sebesar 6,2% dan Tahun 2020 sebesar 3,6%.

Dalam rangka peningkatan NTP bawang putih lokal Belu dan komoditas lainya serta meningkatkan kesejahteraan petani lainnya maka perlu dilakukan langkah-langkah atau strategi sebagai berikut:

- a. Strategi peningkatan produksi dan produktifitas pertanian melalui kegiatan:
 1. Melakukan pemulihan bibit;
 2. Menumbuhkan penangkar-penangkar benih;
 3. Penerapan paket teknologi intensifikasi (Sapta Usaha Tani);
 4. Perluasan areal tanam dan peningkatan intensitas pertanaman;
 5. Penataan Pola Usaha Tani dan Pola Tanam;
 6. Pengembangan Usaha Tani Belu Organik;
 7. Peningkatan Kapasitas petani.
- b. Strategi Peningkatan Kapabilitas Petani melalui optimalisasi Sistem penyuluhan kelembagaan petani melalui kegiatan :
 1. Penumbuhan Petani Muda;
 2. Penumbuhan penyuluh Swadaya;
 3. Penumbuhan, penilaian dan peningkatan kelas kemampuan kelompok tani;
 4. Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN).



c. Strategi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dengan kegiatan:

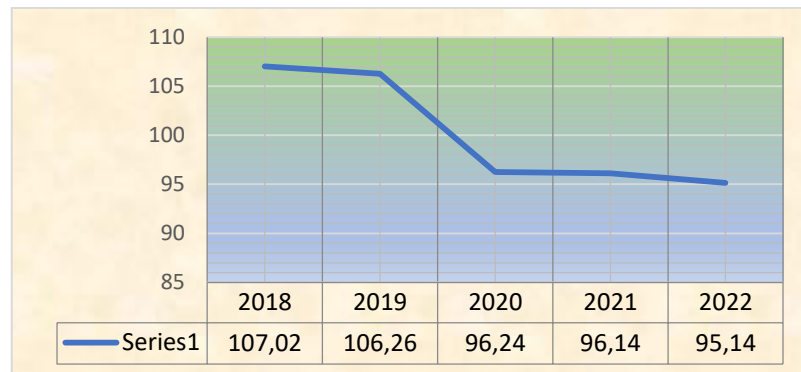
1. Penetapan Kawasan-kawasan sentra produksi meliputi lokasi Petani, Kelompok Tani pelaksana serta pola pemasaran;
2. Peningkatan skala ekonomi usaha petani dan kelompok tani;
3. Pengembangan system agribisnis hulu dan hilir;
4. Penumbuhan Koperasi kelompok tani;
5. Pengembangan agroindustry;
6. Pemberdayaan BUMDes sebagai ATM petani/kelompok tani.

Akan tetapi penelitian yang dilakukan pada komoditas Bawang putih ini merupakan satu dari sekian banyak komoditas yang berada di Kabupaten Belu sehingga tentunya tidak dapat mewakili semua komoditas, dengan demikian diharapkan kedepan akan dilakukan penelitian ilmiah di berbagai komoditas unggulan di kabupaten ini sehingga dapat memberikan gambaran yang pasti tentang kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani di Kabupaten Belu kedepan.

NTP Kabupaten Belu sampai dengan Tahun 2020 tidak dilakukan survei oleh BPS, sebagai data pembanding dalam dokumen ini diambil NTP Provinsi NTT.



Grafik 2.9
Perkembangan NTP Provinsi NTT Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi NTT Tahun 2023

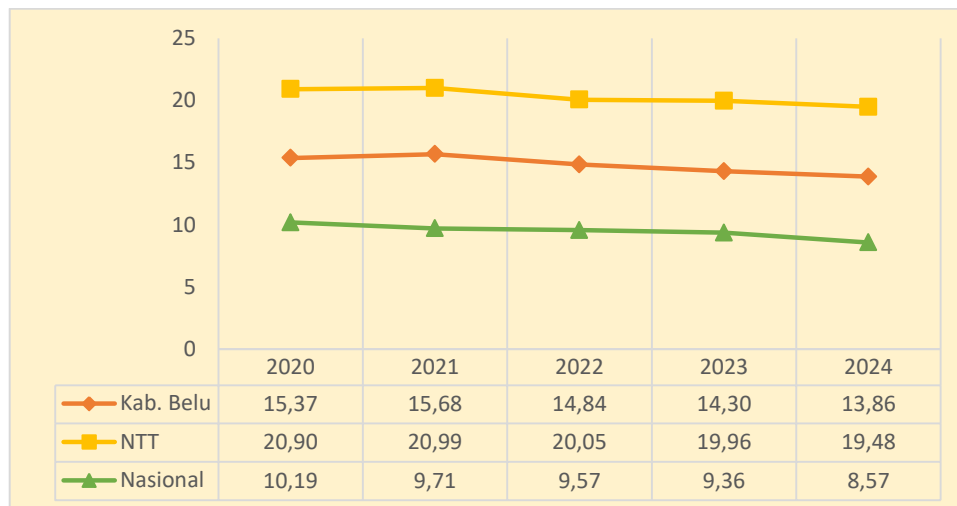
Grafik 2.9 memberikan gambaran bahwa tingkat kesejahteraan petani di NTT termasuk Kabupaten Belu masih rendah, karena nilai yang dikeluarkan petani masih lebih tinggi dari nilai yang diterima petani. Oleh karena itu, masih perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan dalam hal pengelolaan usaha tani yang digeluti petani yang meliputi penerapan teknologi tepat guna, dukungan perkuatan modal dan manajemen usaha tani.

F. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah ketidakmampuan rumah tangga atau individu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Belu pada Tahun 2020-2024 mengalami penurunan menjadi 13,86% pada Tahun 2024, dapat dilihat pada Grafik 2.10.



Grafik 2.10
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belu,
Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2025
BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2025
BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2025

Grafik 2.10 menunjukkan bahwa presentase penduduk miskin di Kabupaten Belu pada Tahun 2024 lebih rendah dari provinsi NTT, tetapi masih lebih tinggi dari persentase penduduk miskin nasional. Hal ini berarti, masih diperlukan perhatian yang serius untuk penanganan secara terintegrasi dan lintas program/kegiatan antar perangkat daerah.

G. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM merupakan salah satu data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah.

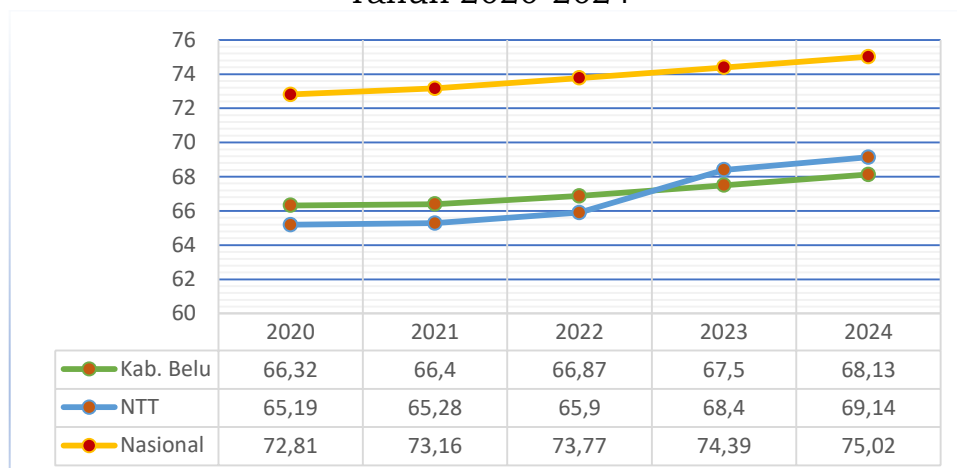
IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu: umur panjang dan hidup sehat (indikator kesehatan), pengetahuan



(indikator pendidikan) dan standar hidup layak (indikator ekonomi). Dimensi umur panjang dan hidup sehat, dihitung dari Angka Harapan Hidup yang merupakan representasi kualitas kesehatan penduduk, dimensi pengetahuan dihitung dari rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah yang memberikan gambaran kualitas pendidikan penduduk, sedangkan dimensi standar hidup dihitung dari pengeluaran riil per kapita yang digunakan untuk mengukur kemampuan ekonomi penduduk di suatu wilayah.

Grafik 2.11 menunjukkan bahwa kinerja sumber daya manusia Kabupaten Belu tahun 2024 mengalami peningkatan dilihat dari capaian angka di tahun 2024 yaitu sebesar 68,13% atau meningkat 0,63 point. Capaian IPM Kabupaten Belu ini masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi NTT dan masih jauh di bawah IPM Nasional.

Grafik 2.11
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional
Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2025
BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2025
BPS, Kabupaten Belu Dalam Angka Tahun 2025



H. Indeks Modal Manusia (IMM)

Indeks Modal Manusia (IMM) digunakan untuk mengukur kontribusi kesehatan dan pendidikan untuk produktivitas generasi berikutnya. Indeks ini dapat dijadikan acuan atau dasar bagi pemerintah dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ada 4 (empat) indikator pendukung atau pembentuk IMM.

Tabel 2.28

Indikator Pendukung/Pembentuk IMM

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Balita	0,58	0,69	0,32	17,6	7
2	Angka Rata-rata Harapan Lama Sekolah	12,27	12,28	12,30	12,31	12,32
3	Kualitas Pendidikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Anak Balita Tidak Stunting/Angka Balita Stunting	0	39,90	0	48,1	44,3

Sumber :Hasil Olahan BP4D, 2025

Berdasarkan Tabel 2.28 dapat diketahui bahwa dari 4 (empat) indikator pembentuk IMM, terdapat 3 (tiga) indikator yang mana pencapaiannya dapat berkontribusi untuk pencapaian IMM Provinsi NTT.



2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua

A. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Belu menunjukkan peningkatan secara konsisten selama periode tahun 2020-2024, yang mengindikasikan terjadinya perbaikan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berdasarkan data, AHH Kabupaten Belu pada tahun 2020 tercatat 64,61 tahun, kemudian meningkat menjadi 64,89 tahun pada 2021, berlanjut ke 65,28 tahun pada 2022, 65,68 tahun pada 2023, dan mencapai 65,93 tahun pada 2024. Tren positif ini mencerminkan keberhasilan pembangunan sektor kesehatan.

Tabel 2.29

Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Belu Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
UHH	64,61	64,89	65,28	65,63	65,93

Sumber: BPS NTT dan Dinas Kesehatan Kab. Belu, 2025

Peningkatan UHH Kabupaten Belu dari 64,61 tahun pada tahun 2020 menjadi 65,93 tahun pada tahun 2024 merepresentasikan penambahan sebesar 1,32 tahun dalam kurun waktu lima tahun. Capaian ini sangat signifikan mengingat karakteristik wilayah Kabupaten Belu yang memiliki tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan kesehatan di wilayah perbatasan Negara. Perbaikan UHH merupakan indikator komprehensif yang merefleksikan kemajuan dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan akses terhadap layanan dasar.



B. Indeks Keluarga Sehat

Berdasarkan Permenkes Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, yang dimaksud dengan Pendekatan Keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. 12 Indikator Keluarga Sehat menurut Kemenkes RI yaitu : keluarga mengikuti program keluarga berencana (KB), ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, bayi mendapat imunisasi dasar yang lengkap, bayi mendapat ASI eksklusif, balita mendapat pemantauan pertumbuhan, penderita TBC mendapat pengobatan sesuai standar, penderita hipertensi rutin menjalani pengobatan, penderita gangguan jiwa tidak terlantar dan mendapat pengobatan, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga merupakan anggota jaminan kesehatan nasional (JKN), keluarga memiliki akses ke sarana air bersih dan keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban bersih.

Tabel 2.30

Indikator Pendukung Indeks Keluarga Sehat

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1.	Keluarga Mengikuti Program Keluarga Berencana (KB)	%	24,92	39,71	20,369	20,369



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
2.	Ibu Melakukan Persalinan di Fasilitas Kesehatan	%	93,53	94,46	73,3	73,3
3.	Bayi Mendapat Imunisasi Dasar Yang Lengkap	%	7,07	89,90	81,1	81,1
4.	Bayi Mendapat ASI Eksklusif	%	9,46	98	89,5	89,5
5.	Balita Mendapat Pemantauan Pertumbuhan	%	94,11	94,62	32	32
6.	Penderita TBC Mendapat Pengobatan Sesuai Standar	orang	336	502	556	566
7.	Penderita Hipertensi Rutin Menjalani Pengobatan	%	12,01	17,78	4.859	4.859
8.	Penderita Gangguan Jiwa Tidak Terlantar Dan Mendapat Pengobatan	orang	229	275	182	182
9.	Keluarga Memiliki Akses Ke Sarana Air Bersih	%	84,26	87,31	99,14	99,14
10.	Keluarga Memiliki Akses Atau Menggunakan Jamban Bersih	%	83,7	88,6	89,12	89,12
11.	Anggota Keluarga Tidak Ada Yang Merokok	%	44,33	46,44	46,44	46,44
12.	Keluarga merupakan anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	34,95	48,31	48,31	48,31

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Belu, 2025



Berdasarkan data pendukung pada Tabel 2.30 dapat diketahui capaian Indeks Keluarga sehat tahun 2021-2024 yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.31
Capaian Indeks Keluarga Sehat Tahun 2021-2024

Uraian	Satuan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks	0,106	0,17	0,2	0,2

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Belu, 2025

Kategorisasi : Keluarga Sehat ($IKS \geq 0,800$), Keluarga Pra Sehat ($IKS = 0,500 - 0,800$), dan Keluarga Tidak Sehat ($IKS < 0,500$). Berdasarkan kategorisasi tersebut dapat diketahui bahwa capaian IKS di Kabupaten Belu tahun 2021-2024 termasuk dalam kategori Keluarga Tidak Sehat.

C. Prevalensi *Stunting*

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Seorang anak dianggap mengalami *stunting* jika tinggi badan mereka lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya (berdasarkan WHO-MGRS).

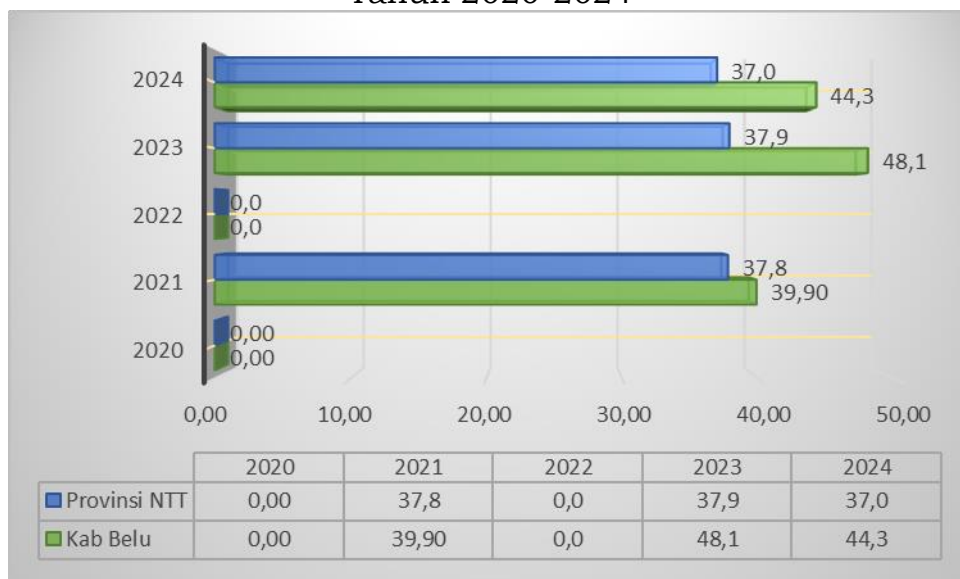
Penyebab utama *stunting* adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga periode awal kehidupan anak (1000 hari setelah lahir). Beberapa faktor masih tingginya kasus *stunting* diakibatkan kekurangan gizi kronis, antara lain: faktor gizi buruk yang dialami ibu hamil, bayi, balita dan juga remaja putri



(anemia), kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan, terbatasnya akses pelayanan kesehatan, termasuk layanan kehamilan dan *postnatal* (setelah melahirkan), kurangnya akses air bersih dan sanitasi, kurangnya akses makanan bergizi karena ketidakmampuan biaya. Hasil Kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belu bersama Pusat Studi Industri Farmasi dan Teknologi Kesehatan UGM (2023) juga menunjukkan faktor determinan masih tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Belu disebabkan oleh asupan gizi yang kurang mencukupi bagi balita, terbatasnya ketersediaan pangan sumber protein, masih tingginya kejadian penyakit infeksi pada balita, bias pengukuran tinggi badan dan berat badan dan koordinasi serta komunikasi yang terbatas (kurang aktif) pada level kecamatan dan desa.

Prevalensi *Stunting* di Kabupaten Belu Tahun 2020-2024 dapat dilihat Grafik 2.12 di bawah ini.

Grafik 2.12
Prevalensi Stunting Kabupaten Belu dan Provinsi NTT
Tahun 2020-2024



Sumber: SSGI, 2020- 2024



Grafik 2.12 menggambarkan capaian prevalensi *Stunting* Kabupaten Belu menurut data SSGI (Survei Status Gizi Indonesia). Berdasarkan data SSGI, prevalensi stunting Kabupaten Belu untuk tahun 2020 dan tahun 2022 tidak dilakukan survey, sedangkan pada tahun 2021 berada di angka 39,90%, mengalami peningkatan menjadi 44,3% di tahun 2024, dimana angka prevalensi stunting Kabupaten Belu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata prevalensi stunting di Provinsi NTT secara keseluruhan. Meskipun mengalami penurunan dari tahun 2023, namun angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka stunting di Kabupaten Belu secara umum meliputi :

1. Faktor ekonomi

Tingkat kemiskinan yang masih tinggi di daerah tersebut mempengaruhi kemampuan keluarga untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak.

2. Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan, khususnya pada ibu, juga menjadi faktor risiko karena kurangnya pengetahuan tentang gizi yang tepat.

3. Faktor kesehatan

Akses terhadap layanan kesehatan yang terbatas, termasuk sanitasi yang buruk juga berperan dalam tingginya angka stunting.

4. Faktor lingkungan.

Kondisi lingkungan yang kurang bersih dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan risiko infeksi pada anak-anak, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan.



Upaya penanganan stunting di Kabupaten Belu terus dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan, termasuk penyediaan makanan tambahan bagi bayi dan ibu hamil serta edukasi gizi kepada masyarakat.

D. Angka Kematian Ibu

Kematian Ibu didefinisikan sebagai semua kematian selama periode kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau insidental. Angka Kematian Ibu (AKI) adalah semua kematian dalam ruang lingkup tersebut di setiap 100.000 kelahiran hidup. Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Secara umum terjadi penurunan kematian ibu selama periode 1991-2015 dari 390 menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup. Walaupun terjadi kecenderungan penurunan angka kematian ibu, namun tidak berhasil mencapai target MDGs yang harus dicapai yaitu sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Gambaran kasus kematian ibu di Kabupaten Belu dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.32.

Tabel 2.32

Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Belu Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kasus Kematian Ibu	12	7	6	7	7

Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2020 dan 2024



Trend kematian ibu di Kabupaten Belu, dalam 5 tahun terakhir kasus kematian ibu mengalami penurunan, dimana tahun 2020 sebanyak 12 kasus menjadi 7 kasus pada tahun 2024.

E. Penderita TBC Mendapat Pengobatan Sesuai Standar

Angka penemuan kasus TBC di Kabupaten Belu terus meningkat setiap tahunnya dimana jumlah kasus yang ditemukan di tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33

Angka Penemuan (CNR) Semua Kasus TB di Kabupaten Belu
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Angka Penemuan (CNR) Semua Kasus TB	Cakupan Pengobatan Semua Kasus Tuberkolosis	Persentase (%)
1.	2020	398	336	84,42
2.	2021	336	335	99,7
3.	2022	502	178	35,45
4.	2023	556	504	90,65
5.	2024	551	534	94,7

Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2020 dan 2024

Jumlah semua kasus Tuberculosis di Kabupaten Belu Tahun 2024 sebesar 551 kasus dengan jumlah kasus Tuberculosis yang ditemukan dan diobati sebanyak 534 kasus. Angka pengobatan lengkap (*complete rate*) semua kasus TB sebanyak Angka keberhasilan (*succes rate/SR*) pengobatan semua kasus TB 94,7%.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

A. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang



ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan ketrampilan baik *hard skill* maupun *soft skill*. Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja ketrampilan tetapi juga kepribadian, karena ketrampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.

Tabel 2.34
Proporsi Jumlah Penduduk Kabupaten Belu Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2024

No	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		LK+PR	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1.	Tidak/Belum Sekolah	38.540	33,21	36.598	31,35	75.138	32,28
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	7.984	6,88	7.340	6,29	15.324	6,58
3.	Tamat SD/Sederajat	33.868	29,19	33.150	28,39	67.018	28,79
4.	SLTP/Sederajat	13.018	11,22	14.871	12,74	27.889	11,98
5.	SLTA/Sederajat	17.458	15,04	17.823	15,27	35.281	15,16
6.	Diploma I/II	258	0,22	452	0,39	710	0,69
7.	Akademisi/Diploma III/S.Muda	896	0,77	1.703	1,46	2.599	1,12
8.	Diploma IV/Strata I	3.863	3,33	4.716	4,04	8.579	3,69
9.	Strata II	149	0,13	91	0,08	240	0,10
10.	Strata III	7	0,01	3	0,00	10	0,004
	JUMLAH	116.041	100	116.747	100,00	232.788	100,00

Sumber: Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Belu, 2024

Persentase tertinggi Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Belu Tahun 2024 adalah pada tingkat tidak/belum sekolah dengan jumlah persentase sebesar 32,28%. Sedangkan persentase terendah adalah strata III sebesar 0,004%.



B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai sejumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah merupakan indikator pendidikan yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pengetahuan dan keterampilan secara umum yang dimiliki oleh penduduk. Populasi yang digunakan *United Nations Development Program* (UNDP) untuk penghitungan rata-rata lama sekolah dibatasi hanya pada penduduk berumur 15 Tahun ke atas. Batasan itu diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 Tahun sebagian besar masih dalam proses sekolah sehingga belum pantas dijadikan lokus.

Grafik 2.13
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Belu,
Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2024



Sumber : BPS 2021-2025.

Grafik 2.13 di atas menggambarkan capaian angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Belu menunjukkan trend yang meningkat. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Belu pada kisaran 7 tahun saja belum menyentuh 8 tahun sejauh ini. Masih lebih



rendah dibandingkan dengan Provinsi dan skala nasional. Oleh karena itu perlu melakukan upaya yang lebih giat untuk meningkatkan angka lama sekolah sebagaimana angka harapan lama sekolah sekitar 12 tahun.

C. Angka Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS)

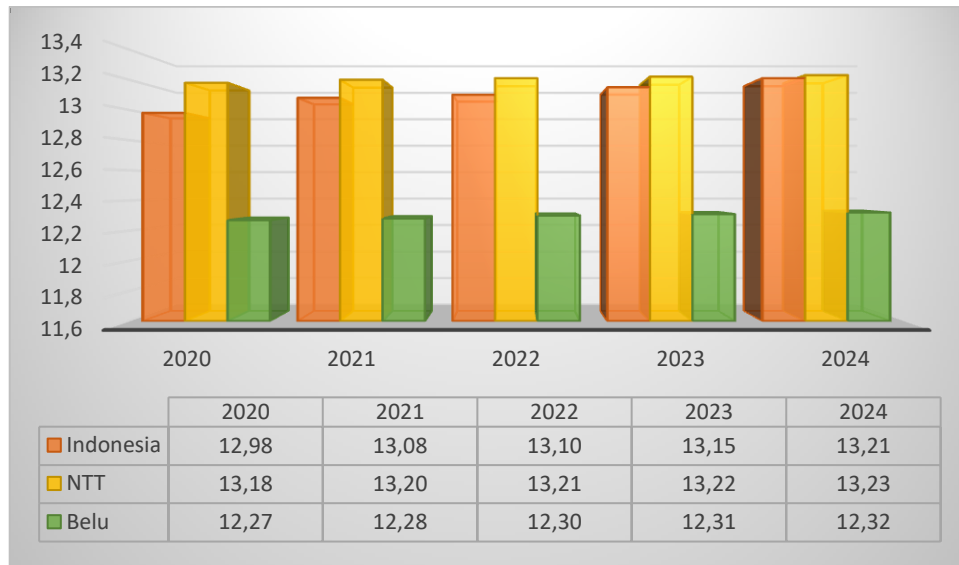
Harapan lama sekolah (HLS) merupakan gambaran persentase penduduk usia 7 Tahun ke atas yang disesuaikan dengan program wajib belajar 9 Tahun. HLS tidak mengkover anak sekolah yang masuk SD pada usia 5 atau 6 Tahun. Indikator HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak.

HLS menggambarkan persentase penduduk usia 7 Tahun ke atas, untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dengan ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan dalam tahun yang diharapkan dapat dicapai setiap anak. Perbandingan capaian HLS Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024 tergambar pada Grafik 2.14.





Grafik 2.14
Perbandingan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Belu,
Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2024



Sumber : BPS 2021-2025.

Kondisi Angka Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Belu tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 0,5 poin. Namun HLS Kabupaten Belu 2020-2024 lebih rendah dari capaian Provinsi NTT dan Indonesia.

D. Angka Literasi/Numerasi

Indeks pembangunan literasi masyarakat merupakan indikator yang menunjukkan tingkat literasi masyarakat di suatu daerah. Nilai 61,4600 menunjukkan bahwa Kabupaten Belu memiliki tingkat literasi yang cukup baik, tetapi masih ada ruang untuk peningkatan.



Tabel 2.35
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Tahun 2023-2024

No	Uraian	Tahun	
		2023	2024
1.	Kabupaten Belu	80,7800	61,4600
2.	NTT	60,5300	62,6200
3.	Indonesia	68,1900	73,5200

Sumber : BPS 2023-2024.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial merupakan upaya pemerintah guna mendukung masyarakat untuk dapat menghadapi berbagai kerentangan /guncangan disepanjang siklus kehidupan. Dalam masa kritis pemerintah memberikan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak terutama masyarakat miskin dan rentan. Perlindungan sosial yang diberikan melalui bantuan sosial, jaminan sosial dan program pemerintah lainnya. Perlindungan sosial bermanfaat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial, membangun SDM dan meningkatkan partisipasi tenaga kerja serta mempererat hubungan sosial.

Berdasarkan sumber data Dinas Sosial PMD Kabupaten Belu tahun 2025, jumlah penduduk penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapat bantuan sosial/ yang dilayani tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.36.





Tabel 2.36
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

No	Penduduk PMKS dan Layanan	Jumlah PMKS (orang) dan Target Layanan					Jumlah PMKS Yang di Layani (orang)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Anak Terlantar	559	178	240	221	409	0	0	0	0	0
2.	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	34	16	30	20	15	0	0	16	20	15
3.	Anak dengan Kedisabilitas	79	172	180	180	0	0	0	0	0	0
4.	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	15	116	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	3	116	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Lanjut Usia Terlantar	477	885	841	856	6195	70	10	30	372	32
7.	Penyandang Disabilitas	669	780	835	918	1263	60	18	30	218	66
8.	Gelandangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Orang Dengan HIV/AIDS	734	734	734	914	914	50	10	150	0	0
10.	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	895	992	1171	1171	1171	0	0	0	0	5
11.	Layanan Rujukan	0	0	0	0	25	0	0	0	0	25
12.	Layanan Data dan Pengaduan	0	0	0	0	200	0	0	0	0	15
13.	Penyediaan Sandang Untuk Anak Sekolah	0	0	0	0	60	0	0	0	0	2
14.	Reunifikasi	0	0	0	0	10	0	0	0	0	7

Sumber : Dinas Sosial PMD Kab.Belu,2025

Adapun rincian kegiatan yang dilaksanakan dari tahun 2020-2024 dengan sasaran PMKS dapat dilihat pada Tabel 2.37.



Tabel 2.37

Rincian Kegiatan Pelayanan PMKS Tahun 2020-2021

No	Kegiatan	Sasaran	Jumlah Penerima Bantuan (Orang)	Tahun
1.	Pelatihan Ikan Asap	Lanjut Usia	20	2020
2.	Bantuan Alat Bantu	Lanjut Usia	50	
3.	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Bagi Anak jalanan, Anak cacat, dan Anak Nakal	Disabilitas	10	
4.	Bantuan Alat Bantu	Disabilitas	50	
5.	Orang dengan HIV/AIDS	ODHA	50	
6.	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar bagi Disabilitas	Disabilitas	8	2021
7.	Bantuan Pemakaman Bagi ODHA yang Mendapat Pengobatan	ODHA	10	
8.	Bantuan Alat Bantu	Disabilitas	20	
9.	Layanan Rujukan	ODGJ Lansia Terlantar	15	2022
10.	Bantuan Alat Bantu	Lanjut Usia dan disabilitas	60	
11.	Bantuan Alat Bantu	ODHA	150	
12.	Bansos	Lanjut Usia, disabilitas, dan Anak Terlantar	625	2023
13.	Layanan Rujukan	Lanjut Usia dan ABH	60	
14.	Bantuan Pemakaman	Lanjut Usia dan disabilitas	75	2024
15.	Bantuan Alat Bantu	Lanjut Usia dan disabilitas	32	

Sumber : Dinas Sosial PMD Kab.Belu,2025



Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) mengalami penambahan selama kurung waktu lima tahun terakhir dimana pada tahun 2020 jumlah PMKS sebanyak 3.465 orang menjadi 9.967 orang di tahun 2024 dengan jumlah PMKS yang dilayani melalui kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 167 orang atau 1,6%. Artinya masih terdapat 9.800 orang atau 98,4% yang belum mendapat bantuan perlindungan sosial melalui program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Permasalahan sosial di suatu daerah secara umum dapat dilihat dari angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Terdapat lebih dari 26 item untuk penghitungan PMKS, misalnya anak terlantar, bekas penyandang narkoba, gelandangan, PSK, termasuk di dalamnya penduduk miskin. Data di Belu menunjukkan bahwa di luar penduduk miskin, terdapat 3 jenis PMKS yang cukup tinggi yakni lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program pemberian bantuan berupa uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah diwajibkan. Data penerima PKH Kabupaten Belu Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.38.





Tabel 2.38

Penerima PKH Kabupaten Belu Tahun 2021-2024

No	Tahun	Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM)	Jumlah Dana
1.	2021	12.002	Rp.35.912.850.000
2.	2022	11.569	Rp.43.386.175.000
3.	2023	12.166	Rp.34.287.172.315
4.	2024	12.510	Rp.38.456.009.516

Sumber: Dinas Sosial, PMD Kab.Belu, 2025

Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) merujuk pada partisipasi pekerja dalam program perlindungan sosial yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin dihadapi pekerja. Adapun data cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenaga kerjaan Kabupaten Belu Tahun 2023 sebanyak 54,95% (*sumber :BPJS Ketenagakerjaan, 2023*), yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah peserata BPJS aktif tahun 2023 (sebanyak: 69.684 orang) per jumlah usia produktif (umur 20-64 tahun) berdasarkan data penduduk BPJS (126.803 orang). Hal ini menunjukkan bahwa masih ada pekerja yang belum berpartisipasi dalam program perlindungan sosial.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

A. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks kerukunan umat beragama (IKUB) mengukur kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat. Indeks ini mencakup tiga indikator utama yaitu : toleransi, kesetaraan dan kerjasama.



Dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama di Kabupaten Belu, telah dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Kabupaten Belu dengan Keputusan Bupati Belu Nomor: 90/HK/2023 Tentang Penetapan Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beraga dan Dewan Penasehat Kabupaten Belu, sebagaimana telah diubah Keputusan Bupati Belu Nomor: 103/HK/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Belu Nomor: 90/HK/2023 Tentang Penetapan Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beraga dan Dewan Penasehat Kabupaten Belu. Indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Belu belum dapat dihitung namun kondisi secara umum kerukunan umat di Kabupaten Belu menunjukkan kondisi kerukunan yang baik.

B. Indeks Reformasi Hukum

Telah dilakukan penilaian atas indeks reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, dengan tujuan adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi. Penilaian juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belu. Berdasarkan penilaian yang dilakukan pada tahun 2023 dan 2024, hasil Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belu tahun 2023 adalah 56,22 dengan kategori CC (Cukup), mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 70,1. Pada tahun 2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *Leading Institutional* IRH di level meso memberikan apresiasi kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terhadap upaya dalam melaksanakan reformasi hukum, sehingga nilai akhir



IRH Kabupaten Belu tahun 2024 adalah 86,02 dengan kategori A (Sangat Baik).

C. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional. Terdapat 7 (tujuh) dimensi untuk menghitung IPK yaitu Dimensi Ekonomi Budaya; Dimensi Pendidikan; Dimensi Ketahanan Sosial Budaya; Dimensi Warisan Budaya; Dimensi Ekspresi Budaya; Dimensi Budaya Literasi; dan Dimensi Gender. Berikut capaian IPK Nasional dan Provinsi NTT.

Tabel 2.39

IPK Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai IPK Nasional	55.91	54.65	51.9	55.13	57,13
Nilai IPK Provinsi NTT	50.48	48.93	48.18	50.7	53,04

Sumber: ipk.kemdikbud.go.id

Pembangunan bidang seni dan budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan sasaran pembangunan bidang sosial budaya yaitu mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan beradab menuju masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Kondisi fasilitas



kesenian di Kabupaten Belu masih sangat terbatas, sehingga sebagai upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan dan dibenahi secara baik dengan kebijakan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas gedung kesenian maupun pembinaan terhadap sanggar/grup kesenian. Jumlah sanggar seni sebanyak 276 sanggar.

Nilai IPK Kabupaten/Kota seluruh Indonesia tidak dihitung. Kabupaten Belu termasuk kabupaten yang tidak diukur IPKnya sehingga data yang ditampilkan di sini adalah indikator pembentuk dari dimensi-dimensi perhitungan IPK yang datanya dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Belu.

Tabel 2.40

Indikator Pembentuk IPK Kabupaten Belu

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
a) Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran (%);	NA	NA	57,14%	37,71%	8,6%
b) Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan ekstrakurikuler kesenian;	100%	100%	100%	100%	100%
c) Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah;	0.02%	0.02%	0.06%	0.06%	0.02%

Sumber: SIPD, 2024

Dari Tabel 2.40 terlihat bahwa persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran merupakan indikator yang mengukur seberapa baik upaya pelestarian dan perlindungan cagar budaya dilakukan. Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa banyak objek penting telah diakui dan dilindungi. Pendaftaran objek diduga



cagar budaya, dilakukan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dengan uraian, bangunan, situs dan kawasan yang didaftar sebanyak 51 objek dan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya sebanyak 15 objek.

Cagar budaya yang telah dikelola secara terpadu sebanyak tiga yaitu, Kampung Adat Mata Besi (Cagar Budaya Peringkat Regional), Megalitik dan Rumah Adat Kewar (Cagar Budaya Peringkat Provinsi) dan Kampung Adat Duarato (Peringkat Kabupaten).

Indikator ke dua, yaitu Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan ekskul kesenian dengan Nilai Stabil pada 100%. Nilai ini menunjukkan bahwa Kabupaten Belu sangat konsisten dalam memastikan bahwa kurikulum pendidikan mencakup pembelajaran bahasa daerah dan kegiatan kesenian. Ini adalah indikator positif dari upaya pelestarian budaya dan pengembangan keterampilan seni di kalangan siswa. Dan indikator yang ke tiga Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah sangat rendah, berkisar antara 0.02% hingga 0.06% sepanjang periode 2019-2023. Rendahnya angka ini menunjukkan bahwa hanya sedikit penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah. Ini mencerminkan tantangan besar dalam akses pendidikan bagi anak-anak dengan disabilitas, karena keterbatasan fasilitas, dukungan, atau kesadaran di sekolah-sekolah.



2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

A. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran baku yang tepat untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Capaian IPA Provinsi NTT tahun 2019 sebesar 51,15 mengalami penurunan menjadi 48,12 di tahun 2021 dan berada pada posisi terbawah kedua setelah Papua. Mengalami penurunan capaian atau tidak lebih baik dibandingkan dengan Tahun 2020, disebabkan karena rendahnya persentase anak usia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat. Capaian IPA Provinsi NTT berada dibawah capaian Indonesia dimana pada tahun 2019 capaian IPA Indonesia sebesar 66,26 menjadi 61,38 di tahun 2021.

Capaian IPA Provinsi termasuk terendah yang mengindikasikan perlunya upaya peningkatan pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak, penyedia layanan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, maupun upaya perlindungan khusus anak. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui implementasi program maupun kebijakan perlindungan anak dengan melakukan koordinasi secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, sampai kabupaten/kota.

Sampai dengan tahun 2022, capaian IPA Kabupaten/Kota tidak dipublikasikan selain 10 besar hasil IPA tertinggi dan terendah. Hasil IPA Kabupaten Belu untuk tahun 2022 sebesar 50,91. Dengan rincian per klaster Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan sebesar 34,16; Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebesar 65,83; Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebesar 76,54; Klaster IV Pendidikan,



Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya sebesar 23,74; dan Klaster V Perlindungan Khusus sebesar 52,50. Dari 5 klaster pembentuk IPA yang memiliki nilai terendah adalah klaster 4 yang menunjukkan tantangan besar dalam bidang pendidikan dan kegiatan budaya di Kabupaten Belu. Ini mencerminkan masalah aksesibilitas pendidikan, kurangnya fasilitas untuk kegiatan rekreasi dan budaya, dan kualitas pendidikan yang perlu ditingkatkan.

B. Indeks Kualitas Keluarga

Dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, peningkatan kualitas keluarga menjadi salah satu syarat mutlak yang harus diwujudkan. Sebagai unit sosial terkecil di masyarakat, keluarga menjadi ruang pertama dan utama, yang turut menentukan kualitas hidup tiap-tiap anggota keluarganya. Melalui keluarga, nilai-nilai kesetaraan gender mulai dikenalkan, untuk kemudian diinternalisasikan dalam gerak tiap anggota keluarganya baik di rumah maupun di masyarakat. Melalui keluarga pula, pemenuhan hak dan perlindungan anak dioptimalisasikan guna mencetak generasi penerus yang unggul dan berkarakter. Terwujudnya kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, dan perlindungan anak akan mendorong peningkatan kualitas keluarga, yang pada akhirnya turut menciptakan ketahanan sosial di masyarakat, mendorong terwujudnya masyarakat yang inklusif, serta menjadi pilar penyangga pembangunan bangsa yang progresif.

Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa Indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan



pembangunan Kualitas Keluarga yaitu dengan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) yang terdiri dari 29 Indikator yang di bagi menjadi 5 (lima) dimensi. Kelima dimensi tersebut adalah (1) Kualitas Legalitas-Struktur (tiga indikator); (2) Kualitas Ketahanan Fisik (enam indikator); (3) Kualitas Ketahanan Ekonomi (delapan indikator); (4) Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (enam indikator) dan (5) Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (enam indikator).

Capaian IKK Indonesia mengalami peningkatan sebesar 2,50 menjadi lebih baik dari tahun 2020 yaitu 70,93, dan meningkat menjadi 73,43 di tahun 2021. Sedangkan capaian IKK Provinsi NTT mengalami peningkatan sebesar 3,05 menjadi lebih baik dari 64,57 pada tahun 2020 menjadi 67,62 pada tahun 2021. Untuk Kabupaten Belu sendiri tidak diukur IKKnya. Pengukuran IKK hanya pada level provinsi. Terdapat beberapa indikator pembentuk untuk perhitungan IKK yang datanya dimiliki oleh kabupaten yaitu persentase anak usia 0-18 yang memiliki akta kelahiran anak, persentase RT tidak miskin, persentase RT dengan kejadian kekerasan anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan /atau agresi psikologis dari pengasuhan selama 1 tahun terakhir dan persentase RT dengan anggota rumah tangga lansia (+60 Tahun).

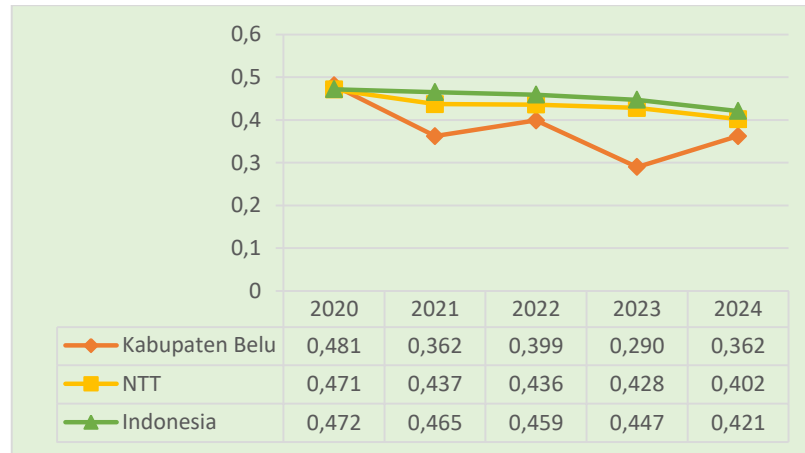
C. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimbangan Gender (IKG) adalah ukuran yang menunjukkan tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Semakin tinggi nilai IKG, semakin besar ketimpangan gender disuatu wilayah. IKG berkisar antara 0 hingga 1.





Grafik 2.15
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, 2025

IKG Kabupaten Belu selama periode 2020-2024 berfluktuatif cenderung menurun pada tahun 2024 sebesar 0,362, yang menunjukkan perbaikan dalam kesetaraan gender. IKG Kabupaten Belu masih berada dibawah Provinsi NTT dan Indonesia.

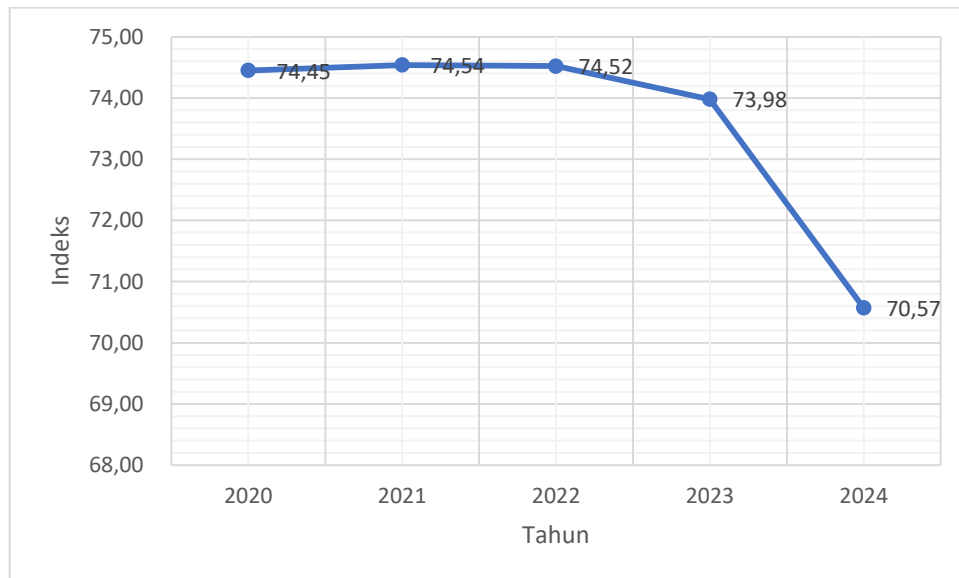
C. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan, serta mengukur apakah perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang. IDG merupakan bagian dari indikator pembangunan manusia yang lebih luas dan memberikan gambaran mengenai kesenjangan gender dalam pembangunan.





Grafik 2.16
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Belu
Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi NTT, 2025

Semakin tinggi IDG menunjukkan peningkatan pemberdayaan perempuan. IDG Belu selama tahun 2020-2024 mengalami penurunan dari 74,45 pada tahun 2020 menjadi 70,57 pada tahun 2024. Angka 70,57 ini menunjukkan bahwa perempuan di wilayah Kabupaten Belu memiliki pemberdayaan yang cukup baik, tetapi masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai kesetaraan penuh antara perempuan dan laki-laki. Jika dibanding dengan semua kabupaten/kota di NTT, IDG Kabupaten Belu masih lebih tinggi.

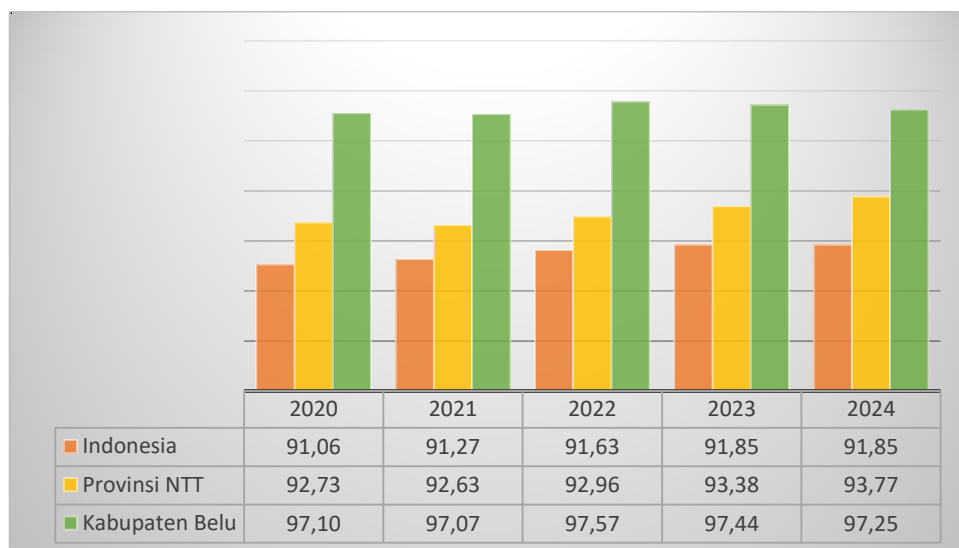
D. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu indeks untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender. IPG diperoleh melalui perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



perempuan terhadap IPM laki-laki. IPG dapat menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, semakin lebar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Angka IPG tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Grafik 2.17

Grafik 2.17
Angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, 2025

Angka IPG Kabupaten Belu pada tahun 2024 sebesar 97,25 Hal ini memberikan gambaran bahwa capaian pembangunan perempuan di Kabupaten Belu pada tahun 2024 masih berada dibawah laki-laki. Perkembangan IPG di Kabupaten Belu selama lima tahun terakhir mengalami tren yang fluktuatif. Dibandingkan dengan Provinsi NTT dan Nasional, angka IPG Kabupaten Belu masih lebih baik.



2.1.3 Aspek Daya Saing daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Angka Ketergantungan

Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun).

Tabel 2.41

Rasio Ketergantungan Tahun 2019-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio Ketergantungan	42,09%	N/A	51,13%	51,97%	52,36%

Sumber : Hasil Olahan BP4D, 2025

Rasio ketergantungan tahun 2024 mengalami peningkatan 0,39 poin. Rasio ketergantungan pada tahun 2024 sebesar 52,36 % artinya setiap 100 penduduk produktif harus mendukung $\pm$ 52 penduduk yang tidak produktif. Meningkatnya rasio ketergantungan dapat berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi karena semakin tinggi nilai rasio ketergantungan suatu daerah menggambarkan tingginya ketergantungan penduduk usia non produktif.

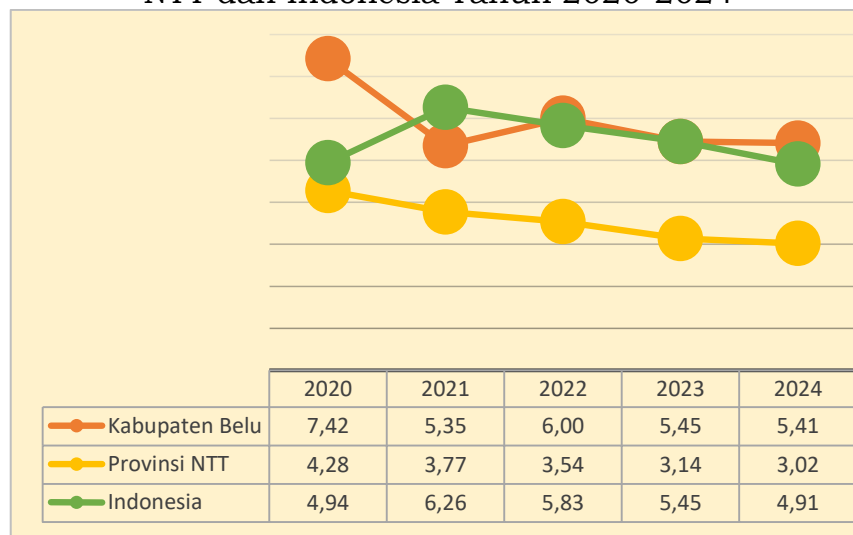
B. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk memantau



dan mengevaluasi perkembangan angka pengangguran, karena indikator tersebut merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Secara umum, dalam lima tahun terakhir, capaian TPT Kabupaten Belu menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun (membaik), yang ditunjukkan dengan Grafik 2.18.

Grafik 2.18
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belu, Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2020-2024



Sumber : BPS 2025

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Belu mengalami penurunan sebesar 2.01%. Dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2020 hingga 2024) namun TPT Kabupaten Belu lebih tinggi daripada Provinsi NTT dan Indonesia. TPT yang tinggi dapat berdampak pada permasalahan kemiskinan, kriminalitas dan keadaan ekonomi.



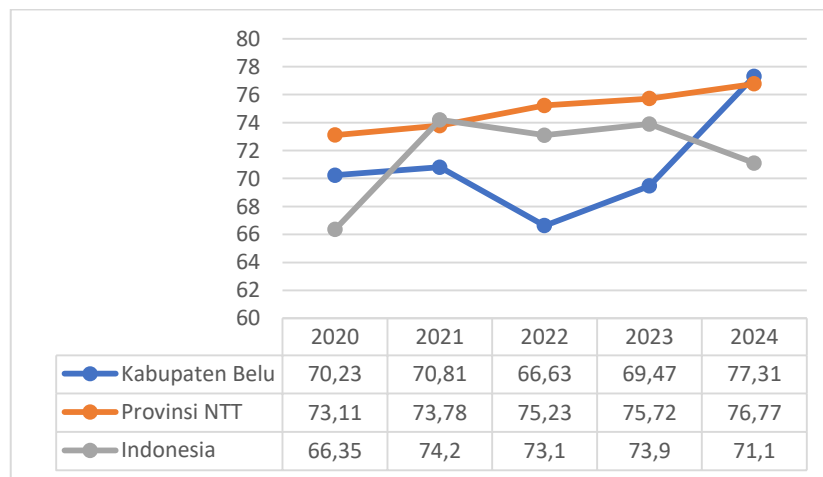
2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. TPAK ini merupakan indikator yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/provinsi/kabupaten/kota. Tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.19

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Belu pada tahun 2024 meningkat 7,08 poin dari tahun 2020. Capaian TPAK Kabupaten Belu berada diatas Provinsi NTT dan Indonesia.



2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

A. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau atau *Green Economy Index* (GEI) adalah wujud nyata Indonesia dalam mengukur efektivitas transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan rendah karbon dengan metodologi akurat. Prinsip utama Ekonomi Hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seiring mendorong kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan, dengan berfokus pada peningkatan investasi hijau, mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta memberdayakan sumber daya manusia.

Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara *tangible*, representatif, dan akurat. Indeks Ekonomi Hijau Daerah terdiri dari 16 indikator terpilih yang mewakili 3 (tiga) pilar *Sustainable Development*: ekonomi (6 indikator), sosial (4 indikator), dan lingkungan (6 indikator). Indikator ekonomi terdiri dari 6 (enam) indikator: intensitas emisi, intensitas energi, GNI per kapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja industri dan jasa. Indikator sosial terdiri dari 4 (empat) indikator: rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Indikator lingkungan terdiri dari 6 (enam) indikator: tutupan hutan, energi baru terbarukan, kualitas air permukaan, kualitas udara, penurunan emisi, dan lahan gambut terdegradasi.



Di Kabupaten Belu, Indeks Ekonomi Hijau merupakan hal baru dan belum pernah dihitung sebelumnya. Implementasi pilar ekonomi yang tergambar dari kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Belu, memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan perekonomian, pemenuhan penyediaan bahan pangan penduduk dan penyedia lapangan pekerjaan. Selain itu, kontribusi lainnya dari pertanian yaitu menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Berikut disajikan data perkembangan produksi pertanian di Kabupaten Belu yang dapat dilihat pada Tabel 2.42.



Tabel 2.42
Perkembangan Produksi Pertanian di Kabupaten Belu
Tahun 2020-2023

No	Uraian	2020			2021			2022			2023		
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Juta Rupiah)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Juta Rupiah)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Juta Rupiah)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Juta Rupiah)
1.	Tanaman Pangan												
	- Padi	2.908	8.808,33	Rp.44.041.650.000	6.714	25.417,44	Rp.127.087.200.000	6.815	25.882,63	Rp.86.430.490.000	6.042	23.533,94	Rp.117.664.690.000
	- Jagung	17.057	49.605,72	Rp.347.240.040.000	12.689	49.096,31	Rp.490.963.070.000	16.432	54.598,51	Rp.304.533.535.000	10.117	33.258	Rp.432.353.012.000
	- Kacang Tanah	516	658	Rp.16.450.000.000	1.166	1.626,70	Rp.39.582.491.100	808	1.118,35	Rp.16.775.250.000	279	377,01	Rp.5.655.120.000
	- Kacang Hijau	1.399	955,30	Rp.21.494.250.000	1.293	1.060,98	Rp.26.524.450.000	1.601	1.402,15	Rp.31.548.375.000	1.271	1.047,37	Rp.23.565.892.500
	- Ubi Kayu	2.715	10.086,3	Rp.100.863.000.000	2.930	10.086,30	Rp.121.035.600.000	2.512	9.404,45	Rp.94.044.500.000	2.110	7.988,75	Rp.79.887.460.000
	- Ubi Jalar	148	268,5	Rp.2.685.000.000	135	251,20	Rp.2.512.000.000	134	264,13	Rp.2.641.300.000	55	108,56	Rp.1.085.600.000
2.	Tanaman Hortikultura												
	- Bawang merah	99	362,14	Rp.9.424.054.740	46	179	Rp.3.580.000.000	32	133,42	Rp.4.936.540.000	41	207,71	Rp.8.369.680.680
	- Bawang putih	90	347,31	Rp.13.637.716.080	31	123,44	Rp.3.086.000.000	15	60,96	Rp.1.828.800.000	5	20,21	Rp.1.021.817.660
	- Cabai	287	646,47	Rp.16.175.560.000	211	688,57	Rp.16.812.813.690	270	898,73	Rp.28.579.614.000	339	1.027,66	Rp.59.946.490.780
	- Pisang	115,76	1.147,99	Rp.13.930.480.000	114,45	1.128,42	Rp.22.568.400.000	115,1	1.133,99	Rp.17.009.849.085	114,76	1.130,16	Rp.16.952.329.515
	- Tomat	109	400,90	Rp.3.009.320.700	97	363,88	Rp.5.458.200.000	149	563,58	Rp.8.453.700.000	196	1.961,29	Rp.16.810.233.732



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

	- Sayuran	532	1.628,37	Rp.36.167.244.330	475	1.865,45	Rp.29.337.932.150	377	1.492,73	Rp.14.927.300.000	495	2.365,74	Rp.28.388.880.000
3.	Tanaman Perkebunan												
	- Kapuk	92	37	Rp.38.860.000	56	21,2	Rp.25.440.000	120	17,7	Rp.177.000.000	84	51,6	Rp.619.200.000
	- Kemiri	742	527,5	Rp.2.110.000.000	673	469,9	Rp.2.349.5000.000	959	469,9	Rp.7.988.3000.000	673	470,4	Rp 9.721.756.800
	- Kelapa	526	379	Rp.1.850.000.000	478	370	Rp.370.000.0000	1.505	370	Rp.1.850.000.0000	482	370	Rp.1.850.000.0000
	- Kopi	213	96	Rp.2.112.000.000	203	91,8	Rp.1.973.700.000	320	91,8	Rp.1.560.600.000	203	89,8	Rp.2.653.141.000
	- Jambu Mete	1.179	542	Rp.11.914.000.000	1.132	512,20	Rp.11.524.500.000	2.286	487,3	Rp.7.309.500.000	1.103	487,3	Rp.7.309.500.000
	- Pinang	71	29	Rp.725.000.000	70	28,9	Rp.867.000.000	115,07	1.133,99	Rp.17.009.849.085	71	25,9	Rp.1.554.000.000

Sumber : Profil Kab. Belu, 2021-2024



Sebagai roda penggerak perekonomian, sektor pertanian di Kabupaten Belu menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir dan merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB, dengan nilai tertinggi.

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 472/Kpts/RC.040/6/2018 Tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional, menjelaskan bahwa kawasan pertanian nasional dikembangkan untuk komoditas prioritas sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan sesuai dengan arah dan kebijakan Kementerian Pertanian. Kabupaten Belu termasuk salah satu lokasi kawasan pertanian nasional untuk komoditas prioritas tanaman pangan-jagung. Sebagai salah satu daerah kawasan pertanian nasional, dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian, mendukung ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan. Kawasan pertanian yang dikembangkan juga bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mendorong pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Ekonomi hijau tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga tentang menciptakan nilai sosial yang positif dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan lingkungan dalam kebijakan ekonomi, dapat mencapai pembangunan berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Transisi menuju ekonomi hijau di wilayah Kabupaten Belu membutuhkan pendekatan sistemik dengan mempertimbangkan karakteristik geografis dan sosio-kultural spesifik wilayah.

B. Indeks Ekonomi Biru

Indeks Ekonomi Biru Indonesia menghitung kontribusi sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap kemajuan ekonomi biru. Skor indeks akhir berkisar dari nol hingga seratus dan mengukur kondisi terkini ekonomi biru secara holistik. IBEI disusun dari



beberapa indikator perekonomian makro, yang dapat mencerminkan perkembangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang terkait dengan sektor Ekonomi Biru. IBEI juga dapat digunakan untuk memprediksi kondisi ekonomi biru di masa depan, sesuai dengan asumsi-asumsi yang ditentukan.

Indeks ekonomi biru diukur melalui beberapa komponen utama:

1. Pilar Ekonomi: Terdiri dari tiga subsektor yaitu: (1) Perikanan tangkap dan budidaya, (2) Manufaktur berbasis kelautan, (3) Pariwisata berbasis kelautan.
2. Pilar Sosial: Dibangun dari tiga subsektor yaitu: (1) Ketenagakerjaan, (2) Kesehatan, (3) R&D dan Pendidikan
3. Pilar Lingkungan: Mencakup dua subsektor yaitu: (1) Kualitas sumber daya dan konservasi laut dan (2) Energi terbarukan

Secara umum, IBEI yang tinggi menunjukkan bahwa suatu wilayah telah berhasil dalam mengelola sumber daya lautnya dengan baik sehingga menghasilkan keuntungan ekonomi dan pemberdayaan manusia tanpa mengesampingkan kelestarian lingkungan hidup. Sama halnya dengan Indeks Ekonomi Hijau, Indeks Ekonomi Biru merupakan hal baru di Kabupaten Belu dan belum pernah dihitung sebelumnya. Dari tiga pilar yang merupakan komponen utama, hanya pilar pertama subsektor pertama yang bisa disediakan datanya, sebagai berikut.

Tabel 2.43
Produksi Perikanan Berdasarkan Sub Sektor di Kabupaten Belu
Tahun 2021-2023

No	Sub Sektor Perikanan	Jumlah Produksi (Ton)			Nilai Produksi (Rp)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Perikanan Tangkap di Laut	1.620,83	1.620,14	1.567,28	Rp 56.729.050.000	Rp 58.874.900.000	Rp 58.854.660.000
2.	Perikanan Budidaya	75,8	79,05	56,57	Rp 4.345.000.000	Rp 4.532.700.000	Rp 3.243.900.000
	a. Air Tawar	20,3	21,03	15,03	Rp 1.015.000.000	Rp 1.015.500.000	Rp 751.5000.000
	1). Ikan Nila	7,5	15,42	7,88	Rp 375.000.000	Rp 771.000.000	Rp 394.000.000



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

	2). Ikan Mas/Karper	3,1	0,11	0,06	Rp 155.000.000	Rp 5.500.000	Rp 3.000.000
	3). Ikan Lele	9,7	5,5	6,81	Rp 485.000.000	Rp 2.750.000.000	Rp 340.500.000
	4). Ikan Patin	0	0	0,26	Rp -	Rp -	Rp 13.000.000
	5). Ikan Gabus	0	0	0,02	Rp -	Rp -	Rp 1.000.000
	a. Air Payau	55,5	58,02	41,54	Rp 3.330.000.000	Rp 3.481.200.000	Rp 2.492.400.000
	1). Bandeng	55,5	58,02	41,54	Rp 3.330.000.000	Rp 3.481.200.000	Rp 2.492.400.000
3	Perairan Umum	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -
	Danau	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -
	Rawa	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -
	Sungai dan Lain-lain	0	0	0	Rp -	Rp -	Rp -
	TOTAL	1.848,23	1.799,27	1.680,42	Rp 69.764.050.000	Rp 71.466.800.000	Rp 63.834.860.000

Sumber: SIPD, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu 2024

2.1.3.4 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi baik domestik maupun global memiliki keterkaitan dengan pembentuk modal tetap bruto (PMTB) dan ekspor barang dan jasa. PMTB yang tinggi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing sehingga memperkuat integrasi ekonomi. PMTB merupakan salah satu komponen utama dalam menghitung PDRB yang menggambarkan tingkat investasi perekonomian suatu daerah.

PMTB Kabupaten Belu dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana sampai dengan tahun 2024 PMTB tercatat sebesar Rp.2,234.98 (Milyar). Peningkatan PMTB menunjukkan peningkatan investasi yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, peningkatan produktivitas, peningkatan lapangan kerja.



Tabel 2.44
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Belu Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2020–2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,084.35	3,152.00	3,416.29	3,628.81	3,888.35
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	91.07	93.69	101.45	114.18	128.78
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,108.12	1,093.06	1,077.05	1,126.84	1,254.58
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,808.10	1,899.76	1,984.50	2,174.19	2,234.98
5.	Perubahan Inventori	101.89	110.27	110.55	107.08	115.37
6.	Net Ekspor Barang dan Jasa	-1,643.82	-1,649.75	-1,654.24	-1,670.59	-1,690.84
Produk Domestik Regional Bruto		4,549.71	4,699.02	5,035.59	5,480.52	5,931.22

Sumber: BPS, 2025

Integritas ekonomi domestik dan global memainkan peran penting dalam meningkatkan ekspor barang dan jasa. Berdasarkan Tabel 2.44 diatas diketahui, neto ekspor barang dan jasa dari tahun 2020-2024 yang negatif (defisit perdagangan) dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.3.5 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan

A. Indeks Layanan Infrastruktur Kewenangan Kabupaten

Indeks Layanan Infrastruktur Kewenangan Kabupaten adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pembangunnn dan pelayanan infrastruktur dasar di tingkat kabupaten. Indeks ini dihitung dengan mengukur tingkat ketidakpuasan atau kepuasan yang dirasakan pengguna terhadap layanan yang tersedia. Pengguna layanan (masyarakat) disurvei untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan mereka dengan layanan infrastruktur yang tersedia. Hasil survei



kemudian diproses untuk menghitung Indeks Layanan Infrastruktur Kewenangan Kabupaten. Indeks ini berguna untuk membantu pemerintah dan organisasi lainnya dalam mengidentifikasi tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Infrastruktur dasar di Kabupaten. Indeks ini juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin ada dalam layanan infrastruktur yang tersedia, dan untuk memberi saran bagaimana layanan dapat diperbaiki.

Indeks Layanan Infrastruktur Kewenangan Kabupaten merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Kabupaten Belu. Indeks Layanan Infrastruktur Kewenangan Kabupaten disusun sebagai salah satu dasar untuk mengukur pencapaian sasaran dalam misi ketiga RPJMD 2025-2029.

Tujuan Penyusunan Indeks Layanan Infrastruktur Kewenangan Kabupaten ini adalah sebagai berikut:

- a) Mengetahui secara obyektif persepsi masyarakat terhadap kinerja pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten, meliputi beberapa atribut yang langsung dirasakan oleh masyarakat, yang bermuara pada tingkat kepuasan atas pembangunan infrastruktur;
- b) Membangun sebuah model indikator pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur. Hasil pengukuran dan analisisnya akan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan menyusun program/kegiatan tahun selanjutnya.

Indeks ini juga diharapkan menjadi suatu *tools* yang menghasilkan gambaran untuk mengetahui perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif, dan kredibel baik pembangunan fisik maupun aspek manfaat (*outcome*). Pengukuran akan dilakukan secara agregat per-jenis infrastruktur sehingga



kelemahan maupun kelebihan suatu Program/Kegiatan dapat diidentifikasi.

Peningkatan ekonomi masyarakat tidak bisa terlepas dari proses berlangsungnya transportasi. Dalam kerangka makro ekonomi, transportasi merupakan tulang punggung perekonomian suatu wilayah. Transportasi memudahkan manusia untuk beraktivitas sehingga lebih efisien waktu, tenaga dan biaya. Jalan dan jembatan merupakan salah satu infrastruktur vital bagi pembangunan suatu wilayah. Untuk kemudahan akses, pemerintah telah membangun jalan dan jembatan. Jalan di kabupaten Belu terdiri dari jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Pada tahun 2024 Panjang jalan di Kabupaten Belu sebesar 483,665 km. Berdasarkan tipe permukaan jalan 355,275 Km berupa aspal dan 128,39 Km berupa kerikill. Berdasarkan kondisi jalan 293,542 km kondisi baik, 42,25 km kondisi sedang, 25,854 km kondisi rusak ringan, dan 122,019 rusak berat.

Tabel 2.45
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan
di Kabupaten Belu Tahun 2022-2024

No	Status Jalan	2022	2023	2024
1	Jalan Kabupaten (Km)			
	1. Kondisi Baik	293,542	293,542	293,542
	2. Kondisi Sedang	42,25	42,25	42,25
	3. Kondisi Rusak Ringan	25,854	25,854	25,854
	4. Kondisi Rusak Berat	122,019	122,019	122,019

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2024

Kondisi panjang bentangan jembatan di Kabupaten Belu ditahun 2023 adalah 1.060,8 m sedangkan untuk jembatan pada jalan desa mengalami peningkatan 103,9 m atau masih sama dengan kondisi tahun 2022. Rinciannya dapat dilihat pada Tabel 2.46.



Tabel 2.46

Panjang Bentangan Jembatan Terbangun Berdasarkan Status Jalan
Kabupaten dan Jalan Desa di Kabupaten Belu Tahun 2019-2023

No	Status Jalan	Panjang Bentangan Jembatan Terbangun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jalan Kabupaten	1.054	1.060,8	1.060,8	1.060,8	1.060,8
2	Jalan Desa (m)	88	103,9	103,9	103,9	103,9
Jumlah		1.142	1.164,7	1.164,7	1.164,7	1.164,7

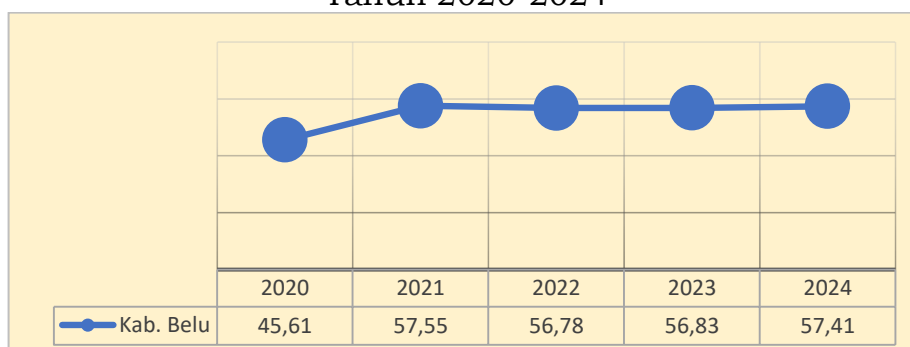
Sumber: SIPD, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

Pada masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan prasarana dan sarana di wilayah Kabupaten Belu adalah mengembangkan dan memperbaiki kualitas jalan dan jembatan dengan tetap melakukan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan termasuk peningkatan jalan lingkungan.

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi mentransformasi masyarakat dengan pertumbuhan jumlah informasi dan sejumlah perangkat yang terus berkembang. Dalam konteks ini, akses TIK menjadi alat pembangunan vital dan telah menjadi salah satu indikator kemajuan suatu bangsa. Salah satu indikator perkembangan TIK adalah jumlah penduduk yang menggunakan Handphone (HP). Perkembangan persentase penduduk Kabupaten Belu 2020-2024 dapat dilihat pada Grafik 2.20.



Grafik 2.20
Persentase Penduduk Menggunakan HP di Kabupaten Belu
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2025

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Listrik adalah sumber penerangan yang dikelola oleh PLN. Listrik non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN).

Data mengenai listrik di Kabupaten Belu diambil menurut sumber penerangan yaitu bersumber dari PLN, Non PLN dan bukan listrik dapat dilihat pada Tabel 2.47.

Tabel 2.47
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Penerangan Rumah
di Kabupaten Belu Tahun 2019 – 2023

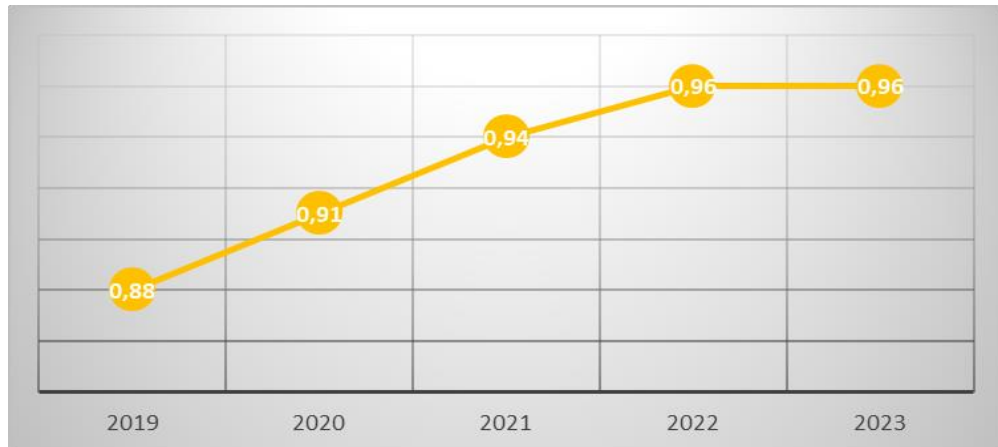
No	Jenis Penerangan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	PLN (%)	86,43	89,77	92,92	95,96	96,27
2	Non PLN (%)	2,06	0,75	1,12	0,18	0,28
3	Bukan Listrik (%)	11,51	9,47	5,95	3,86	3,45
4	Rasio Elektrifitas	0,88	0,91	0,94	0,96	0,96

Sumber: BPS, Provinsi NTT Dalam Angka Tahun 2024

Adapun gambaran rasio elektrifikasi di Kabupaten Belu tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Grafik 2.21.



Grafik 2.21
Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Belu Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi NTT, 2023

Grafik 2.21 menggambarkan rasio elektrifikasi Kabupaten Belu tahun 2019-2023 yang mengalami peningkatan 0,08 poin. Rasio elektrifikasi Kabupaten Belu menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Belu sudah menikmati akses listrik, walaupun beberapa daerah masih ada yang belum teraliri listrik.

Rasio elektrifikasi menjadi salah satu indikator penting dalam menyusun kebijakan terkait penyediaan energi listrik dan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan komponen pembentuk Indeks Layanan Infrastruktur Kewenangan Kabupaten diatas dapat diketahui realisasi Indeks Layanan Infrastruktur Kewenangan Kabupaten tahun 2024 yaitu 53,36 angka.

B. Persentase Desa Mandiri

Pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa dilihat dari penilaian Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. IDM memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta



Pendamping Desa. Klasifikasi status desa dihasilkan berdasarkan IDM dengan status kemajuan dan kemandirian desa dari tahun 2020-2024 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48
Indeks Desa Membangun Kabupaten Belu Tahun 2020-2024

No.	Status IDM	Tahun									
		2020		2021		2022		2023		2024	
1.	Desa Mandiri	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	Desa Maju	2	2,89%	5	7,24%	6	8,70%	9	11,59%	10	14,49%
	Desa Berkembang	37	53,62%	39	56,52%	42	60,87%	49	71,01%	54	78,26%
	Desa Tertinggal	28	40,57%	24	34,78%	21	30,43%	11	17,39%	5	7,24%
	Desa Sangat Tertinggal	2	2,89%	1	1,44%	0	0%	0	0%	0	0%
	Jumlah Desa	69	100%	69	100%	69	100%	69	100%	69	100%

Sumber: SIPD Dinas Sosial dan PMD, 2025

IDM Kabupaten Belu pada tahun 2020-2024 selalu mengalami peningkatan. Kemajuan IDM merupakan tolak ukur dari kesuksesan pelaksanaan dana desa di desa. Status desa sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan, status desa maju adalah 14,49% dan pada status desa berkembang 78,26%. Sedangkan status desa tertinggal mengalami penurunan setiap tahun dengan presentase tahun 2024 sebesar 7,24%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan status desa di Kabupaten Belu dalam rentang waktu lima tahun terakhir.

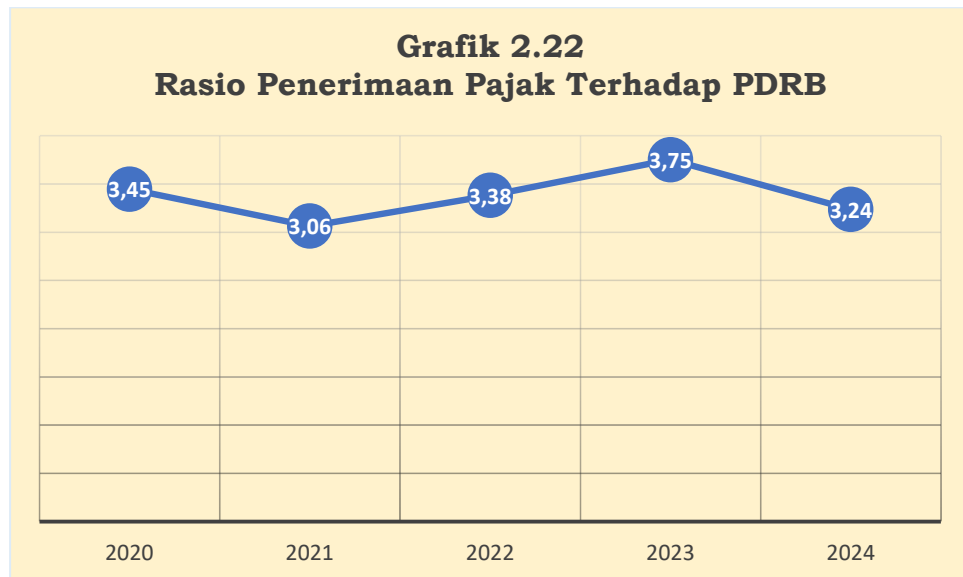
2.1.3.6 Stabilitas Ekonomi Makro

A. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.



Rasio pajak daerah terhadap PDRB yaitu Jumlah penerimaan pajak daerah /jumlah PDRB ADHB x 100%. Rasio pajak daerah terhadap PDRB tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik 2.22.



Sumber : BPS 2025, dan olahan BP4D 2025

Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB Kabupaten Belu tahun 2020-2024 menunjukkan trend yang fluktuatif cenderung menurun. Tahun 2024 rasio penerimaan pajak terhadap PDRB sebesar 3,24 % yang artinya penerimaan pajak daerah menyumbang 3,24% dari total PDRB. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggali potensi pajak daerah sehingga penerimaan pajak meningkat yang pada akhirnya dapat mendukung stabilitas ekonomi makro.

B. Laju Inflasi

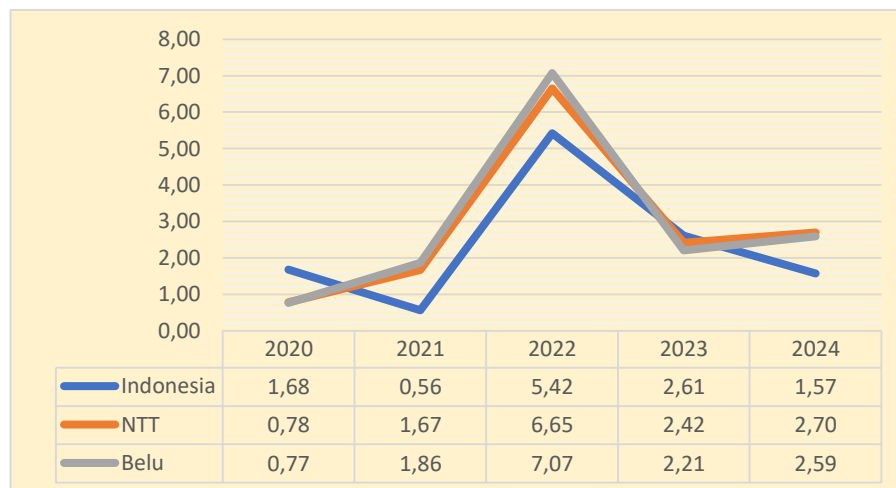
Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, serta adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Kabupaten Belu tidak termasuk Kota/Kabupaten di Provinsi NTT yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik (BPS) karena tidak



merupakan kota inflasi, maka untuk data inflasi Kabupaten Belu dihitung dengan menggunakan pendekatan laju inflasi Kota Kupang, yang dapat dilihat pada Grafik 2.23.

Grafik 2.23
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Belu dengan Provinsi NTT
dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2024; BPS, Provinsi NTT

Inflasi di Kabupaten Belu termasuk inflasi yang terkendali (berada sekitar 2-3%) Hal ini menunjukkan bahwa harga barang dan jasa meningkat dengan stabil, tetapi tidak terlalu cepat sehingga tidak mengikis daya beli masyarakat secara signifikan.

Kondisi inflasi Kabupaten Belu berada diatas Indonesia dan dibawah Provinsi NTT. Hal ini disebabkan oleh kondisi yang sedikit berbeda dengan nasional yang dipengaruhi oleh musim. Musim angin kencang yang terjadi menyebabkan kenaikan harga khususnya sektor bahan makanan dan perikanan.

2.1.4 Aspek Pelayananan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

A. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

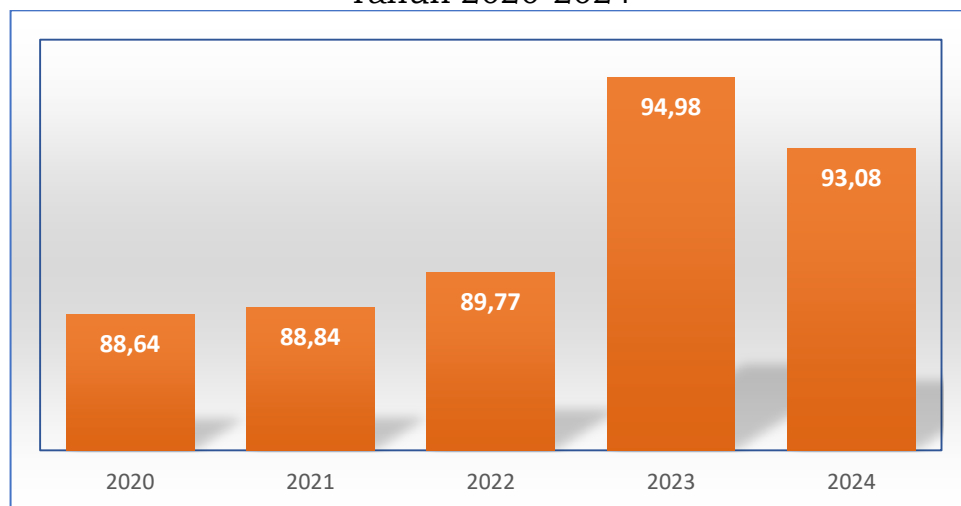
Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi



tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Belu dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum di sini menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari OPD Kabupaten Belu.

Kualitas pelayanan pemerintah Kabupaten Belu diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan data dan informasi menurut pendapat masyarakat secara kuantitatif maupun kualitatif yang mengonfirmasi tentang tingkat kepuasan pelayanan. Nilai IKM ini merepresentase kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap unit pelayanan publik dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belu setiap tahun terhadap SKPD pelayanan. Hasil survei kepuasan masyarakat tercermin dari indeks kepuasan masyarakat yang tersaji pada Grafik 2.24.

Grafik 2.24
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Belu
Tahun 2020-2024



Sumber: SIPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Belu Tahun 2025

Perkembangan IKM di Kabupaten Belu Tahun 2020-2024 mempunyai tren fluktuatif, dengan capaian total konversi layanan Tahun 2024 sebesar 93,08 (mutu layanan A/sangat baik), namun menurun 1,9 poin dari tahun 2023.



B. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Belu berdasarkan 6 aspek yaitu :

- 1) kebijakan pelayanan,
- 2) Profesionalisme SDM
- 3) Sarana prasarana
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)
- 5) Konsultasi dan Pengaduan
- 6) Inovasi Pelayanan

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 659 tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024, dapat diketahui Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Belu Tahun 2024 yaitu 1,84 masuk dalam kategori D masih dibawah nilai Provinsi NTT.

Tabel 2.49
Hasil Nilai PEKPP Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan
Kabupaten Belu Tahun 2024

No.	Uraian	IPP Dinas Sosial	IPP RSUD	IPP DISDUKCAPIL	IPP Kabupaten	Kategori
1.	Provinsi NTT	3,33	4,07	3,28	3,56	B
2.	Kabupaten Belu	1,01	3,48	1,04	1,84	D

Sumber : Kepmen PANRB Nomor 659 Tahun 2024

C. *Monitoring Center For Prevention (MCP)*

Monitoring Center For Prevention (MCP) atau Pusat Pemantauan Pencegahan yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), digunakan untuk memantau dan mengevaluasi penerapan program pencegahan korupsi diberbagai sektor pemerintahan di tingkat daerah. Tujuan MCP adalah untuk mendorong upaya



pengecahan korupsi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

Fungsi MCP KPK yaitu :

- Pemantauan

MCP berfungsi sebagai platform pemantauan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program pencegahan korupsi.

- Identifikasi Risiko

MCP membantu mengidentifikasi area-area rawan korupsi dan potensi inefektivitas anggaran

- Peningkatan Tata Kelola

Dengan MCP, diharapkan terjadinya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik

- Evaluasi

MCP digunakan untuk mengevaluasi efektivitas upaya pencegahan korupsi dan memberikan masukan perbaikan

MCP memiliki indikator-indikator yang mencakup berbagai aspek, antara lain :

- a) Perencanaan dan Penganggaran APBD
- b) Pengadaan Barang dan Jasa
- c) Perizinan
- d) Pengawasan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)
- e) Manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara)
- f) Optimalisasi Pajak Daerah
- g) Manajemen Aset Daerah
- h) Tata Kelola Dana Desa/Kelurahan.

Pencapaian MCP Kabupaten Belu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.50.



Tabel 2.50

Pencapaian MCP Kabupaten Belu tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	MCP	68%	70%	86%	83%	73,54%

Sumber : Inspektorat Kab. Belu Tahun 2025

D. Indek Reformasi Birokrasi (IRB)

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari indeks reformasi birokrasi (IRB). IRB merupakan persentase capaian pelaksanaan reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Evaluator Nasional telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Belu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Adapun perubahan mendasar dari pedoman tersebut yaitu penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran “Terciptanya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang professional. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan sasaran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu. Capaian IRB Kabupaten Belu tersaji pada Tabel 2.51.



Tabel 2.51
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belu Tahun 2020-2024

NO	Uraian		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	N/A (Tidak Laksanakan Evaluasi RB)	44,52	43,24	50,7	62,70
		Kategori		C / Kurang	C / Kurang	C /cukup (memadai)	B / Cukup Baik

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Belu, 2024

Tabel 2.51 menunjukkan bahwa hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Belu mengalami kenaikan, di tahun 2024 Capaian IRB Pemerintah Kabupaten Belu sebesar 62,70 dengan kategori cukup baik.

a. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan bagian penting dalam upaya pemerintah daerah untuk memastikan layanan dasar yang wajib diterima oleh masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Data caaian SPM Kabupaten Belu Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52
Capain SMP Kabupaten Belu Tahun 2022-2024

No	BIDANG	STATUS PENCAPAIAN		
		2022	2023	2024
1	BIDANG PENDIDIKAN	0%	92,91%	68,38% (TUNTAS MUDA)
2	BIDANG KESEHATAN	54%	82,90% (TUNTAS MADYA)	83.53% (TUNTAS MADYA)
3	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	34%	100% (TUNTAS PARIPURNA)	100% (TUNTAS PARIPURNA)



4	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	0%	100% (TUNTAS PARIPURNA)	100% (TUNTAS PARIPURNA)
5	BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3%	70,33 % (TUNTAS PRATAMA)	95,6% (TUNTAS UTAMA)
6	BIDANG SOSIAL	20%	93,18%	97% (TUNTAS UTAMA)

Sumber: LPPD KAB.BELU, 2022-2024

Capaian SPM TAHUN 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan pada bidang Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), serta Sosial. Sedangkan pada bidang pendidikan mengalami penurunan 24,53 point dari tahun 2023.

Meskipun realisasi anggaran di sebagian besar bidang telah mencapai angka yang cukup tinggi, masih terdapat beberapa bidang yang memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan capaian target sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Upaya peningkatan kualitas penginputan data, efektivitas pelaksanaan program, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran perlu terus dilakukan agar semua bidang dapat mencapai tingkat pelayanan yang maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



2.1.4.2 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar

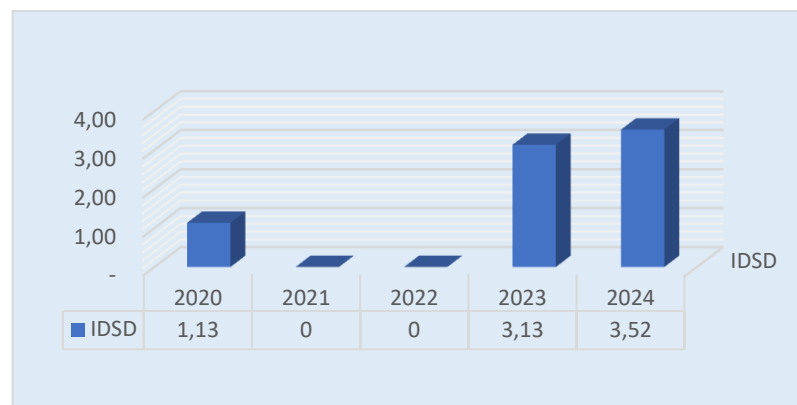
Kawasan

A. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks daya saing daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Grafik 2.25.

Grafik 2.25

Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020 – 2024



Sumber : BRIDA, 2025

IDSD Kabupaten Belu Tahun 2021 tidak dilakukan penilaian. Sedangkan Pengukuran IDSD 2022 mencakup 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia, dimana Kabupaten Belu tidak dapat menampilkan skor karena datanya tidak lengkap untuk indikator pada pilar 1. IDSD Kabupaten belu Tahun 2020 sebesar 1,13 (kategori rendah) meningkat di tahun 2024 sebesar 2,39 point menjadi 3,52 (kategori tinggi).

2.1.4.3 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan merujuk pada hasil kerja pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam urusan pemerintahan yang



menjadi kewenangannya. Capaian ini meliputi kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pemerintah daerah Kabupaten Belu pada tahun 2021 menetapkan sebanyak 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yakni: 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 2. Pertumbuhan Ekonomi; 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 4. Persentase Penduduk Miskin; 5. Persentase Stunting; 6. Inflasi; 7. Indeks Gini; 8. Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak; 9. Indeks Kualitas Lingkungan; 10. Indeks Reformasi Birokrasi; 11. Indeks Kepuasan Masyarakat; 12. Persentase PAD terhadap total pendapatan; 13. Persentase Desa Berkembang.

Adapun capaian kinerja IKU daerah Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53
Capaian IKU Daerah Tahun 2021-2024

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAERAH	SATUAN	REALISASI TAHUN			
			2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	66,4	66,87	67,5	68,13
2.	Pertumbuhan Ekonomi	%	1,75	3,19	3,76	3,97
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,35	6,00	5,45	5,41
4.	Persentase Penduduk Miskin	%	15,68	14,84	14,30	13,86
5.	Persentase Stunting	%	39,90	0	48,1	44,3
6.	Inflasi	Angka	1,86	7,07	2,21	2,59
7.	Indeks Gini	Indeks	0,34	0,32	0,32	0,32
8.	Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak	%	30,73	31,19	32,68	39,24
9.	Indeks Kualitas Lingkungan	Indeks	67,70	68,82	67,83	68,41
10.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	44,52	43,24	50,7	62,70
11.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,84	89,77	94,98	93,08
12.	Persentase PAD terhadap total pendapatan	%	8,45	8,18	11,77	9,01
13.	Persentase Desa Berkembang	%	56,52	60,87	71,01	78,26

Sumber : Olahan BP4D, 2025



Berdasarkan Tabel 2.51 dapat diketahui hasil pencapaian IKU selama kurun waktu kurang-lebih 4 (empat) tahun ini. Secara umum IKU Kabupaten Belu mengalami pencapaian yang baik walaupun belum maksimal ke titik capaian tertinggi 100%.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Capaian IKK Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.54.



Tabel 2.54
Capaian IKK Tahun 2021-2024

No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	OPD PENANGGUNG JAWAB
I.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
A.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar										
a.	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial										
	Persentase Penduduk Miskin	persen	15,37	15,68	15,28	14,84	15,07	14,3	14,94	13,86	BPS
	Meningkatnya PMKS yang diberdayakan	persen	15,26	123,00	15,5	142,86	16	N/A	16,5	51,34	Dinas Sosial
	Persentase kepesertaan jaminan perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin	persen	75,78	62,03	76	N/A	76,5	N/A	77	66,84	Dinas Sosial
B.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar										
a.	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga kerja										
	TPT	Persen	7,42	5,35	6	6	5	5,45	4	5,41	BPS



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

	Persentase Tenaga Kerja Yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	persen	2,4	1,51	3,1	8,66	3,9	N/A	4,8	4,8	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
b.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
	Gender Vocal Point	persen	0	0	20		40	50	60	N/A	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
c.	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan										
	Skor PPH	angka	84,5	84,58	84,7	84,7	84,9	N/A	85,1	N/A	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
d.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa										
	Persentase Desa Berkembang	persen	56,52	56,52	63,76	60,86	66,66	71,01	69,56	78,26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase BUMDES yang aktif	persen	56,52	56,52	65,22		73,91	71,01	82,61	N/A	
e.	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian penduduk dan keluarga berencana										
	Total Fertility Rate (Rate)	angka	2,98	2,96	2,9		2,83	2,83	2,77	N/A	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB



C.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan										
a.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan										
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	62,68	66,4	63,23	66,87	63,67	67,50	64,08	68,13	BPS
	Pengeluaran Riil per Kapita	Juta Rp	7,479	7,431	7,712	7,593	7,813	N/A	7,877	8,159	BPS
	Pertumbuhan Ekonomi	persen	0,4	1,75	1,25	3,19	2,45	3,76	3,65	3,97	BPS
	Inflasi	angka	1,14	1,86	1,08	7,07	1,03	2,21	0,98	2,59	BPS
	Indeks GINI	indeks	0,32	0,34	0,34	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	BPS
II.	ASPEK PELAYANAN UMUM										
A	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar										
a.	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan										
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	62,68	66,4	63,23	66,87	63,67	67,50	64,08	68,13	BPS
	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,35	7,36	7,37	7,38	7,37	7,39	7,52	7,50	BPS
	Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	12,27	12,28	12,36	12,3	12,36	12,31	12,40	12,32	BPS
b.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan										
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	62,68	66,4	63,23	66,87	63,67	67,50	64,08	68,13	BPS
	Angka Harapan Hidup	tahun	64,61	64,89	65	73,58	65,43	73,9	65,80	67,50	BPS
	Persentase Stunting	persen	21,2	39,90	21	0	20	48,1	19	44,3	Dinas Kesehatan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

	Menurunnya Persentase Balita Gizi Buruk	persen	12,24	11,8	0	1,2	0	1,3	0	1,3	Dinas Kesehatan
c.	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat										
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	persen	40	22,98	40	20,88	60	20,88	80	60	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Desa Tangguh Bencana	persen	3,7	3,7	7,41	3,7	11,11	3,70	14,81	17,28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
B.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar										
a.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan hidup										
	Indeks Kualitas Lingkungan	indeks	71,40	67,70	72,22	68,82	72,88	67,83	72,88	68.41	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Air	angka	58,67	50	59,35	52	59,69	51,25	59,69	53,75	
	Indeks Kualitas Udara	angka	92,88	93,36	93,1	94,19	93,21	92,82	93,21	91,85	
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	angka	53,56	50,63	55,73	50,75	57,93	50,09	57,93	50,25	
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	17,81	17,55	18,63	16,10	19,02	24,10	19,02	13,03	
b.	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
	Cakupan pengelolaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan pada Desa/Kelurahan (%)	persen	4,9	7,4	7,41	N/A	14,81	7,41	24,69	N/A	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



c.	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika										
	SPBE	angka	0,0	0,0	1,5	1,92	2,2	2,29	2,3	2,47	Dinas Komunikasi dan Informatika
d.	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, usaha kecil, dan menengah										
	Persentase UMKM Aktif	persen	76,0	89,3	79,82	92,85	83,82	103	88,04	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
e.	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman modal										
	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rp	469,0	7,9	569,03		694,03	32,751	844,03	N/A	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio	15,0	7,0	15,19		15,37	2,78	15,54	94,75	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
C.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan										
a.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan										



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	88,6	88,84	88,73	89,77	88,82	94,98	88,91	93,08	Kecamatan & Dinas PMPTSP
	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	indeks	48,8	44,52 / C (Cukup)	50	43,24/ C (Cukup)	56	50,7 C (Cukup Memadai)	58	62,70/B (Cukup Baik)	Sekretariat Daerah
	Nilai SAKIP	predikat/ angka	CC/51,5	CC/51,60	CC/52	51,78	CC/54	52,27	CC/56	60,54	Sekretariat Daerah
	LPPD	angka	2,6	2,03	2,65	2,1588	2,7	N/A (Sementara a dievaluasi)	2,75	N/A (Sementara a dievaluasi)	Sekretariat Daerah
	Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	persen	25,0	12,5	37,5	25	51,79	39,28	67,86	62,5	Sekretariat Daerah
b.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan										
	Maturitas SPIP	angka	2,9	2,57	2,9	2,95	3	2,82	3	2,899	Inspektorat
c.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan										
	Persentase kesesuaian program dalam RKPD dengan RPJMD	persen	100,0	85,5	100	97,91	100	99,49	100	99,49	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Persentase capaian kinerja program	persen	100,0	87,0	100	54,06	100	91,53	100	88,70	
D.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan										
	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	persen	9,1	8,45	9,11	8,18	9,57	11,77	10,04	9,01	BPKAD



	Opini atas Audit BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sementara dievaluasi	BPKAD
E.	Kepegawaian										
	Persentase Penataan Sistem Manejemen SDM ASN	Persen	35,0	37,5	37,84		46,82	50,96	55,14	59,26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
f.	Penelitian dan Pengembangan										
	Indeks Government Award (IGA)	Kategori	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Kategori Kab. Terinovatif se-Indonesia Kategori Daerah Tertinggal dan Wilayah Perbatasan	Sangat Inovatif	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Skor	60,1	54,0	70	46,08	75	54,76	80	-	
		Persen	0,0	0,0	20	0	38,46	0	50	0	
III .	ASPEK DAYA SAING DAERAH										
A.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar										



A	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang										
	Rumah Tangga dengan akses terhadap air minum layak	persen	30,2	30,73	31,96	31,19	33,72	32,4	35,48	39,24	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	persen	60,6	62,8	61,99	54,15	63,4	69,99	66,23	40,32	
	Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	persen	37,9	38,9	38,83	38,83	39,78	42,56	40,72	82,57	
	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	68,8	69,1	68,96	64,7	69,14	74,71	69,33	64,71	
	Rasio Jaringan Irigasi	angka	16,2	21,0	18,53	0	19,3	30,97	20,52	30,9	
	Persentase Dokumen Rencana Rinci	persen	0,0	0,0	0	0	14,29	20	14,29	14,29	
B	Urusan Pemerintah Pilihan										
a.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian										
	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Miliar Rp	993,19	1031,73	1067,86	1136,23	1115,96	1,255	1159,74	1298,73	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
b.	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata										
	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Miliar Rp	16,52	17,181	19,26		19,71	1,915	20,06	5,480	Dinas Pariwisata



	Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif	angka	90	82	115	94	140	110	165	N/A	
c.	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan										
	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Miliar Rp	627,42	671,45	680,63	737,6	724,99	839,6	763,91	915,08	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
d.	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian										
	Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB	Miliar Rp	32,11	50,628	32,65	56,40	33,11	66,2	33,60	81,29	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Sumber : Olahan BP4D, 2025

Pencapaian target Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari 57 (lima puluh tujuh) indikator yang terbagi dalam 3 (tiga) aspek yaitu, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing, secara rata-rata cukup baik. Namun, perangkat daerah wajib memberikan perhatian penuh dalam manajemen untuk menuntaskan target yang direncanakan sehingga dapat memberikan perubahan positif bagi pembangunan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan.



2.2 Gambaran Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi: a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga; c. Penerimaan Daerah; d. Pengeluaran Daerah; e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan fungsi pemerintahan termasuk kegiatan pembangunan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

Pengelolaan keuangan daerah berkaitan erat dengan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan ruang



lingkup meliputi kebijakan keuangan daerah pada pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah dan pengelolaan pembiayaan daerah sehingga dapat membiayai strategi pembangunan melalui program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

2.2.1 Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2020-2024

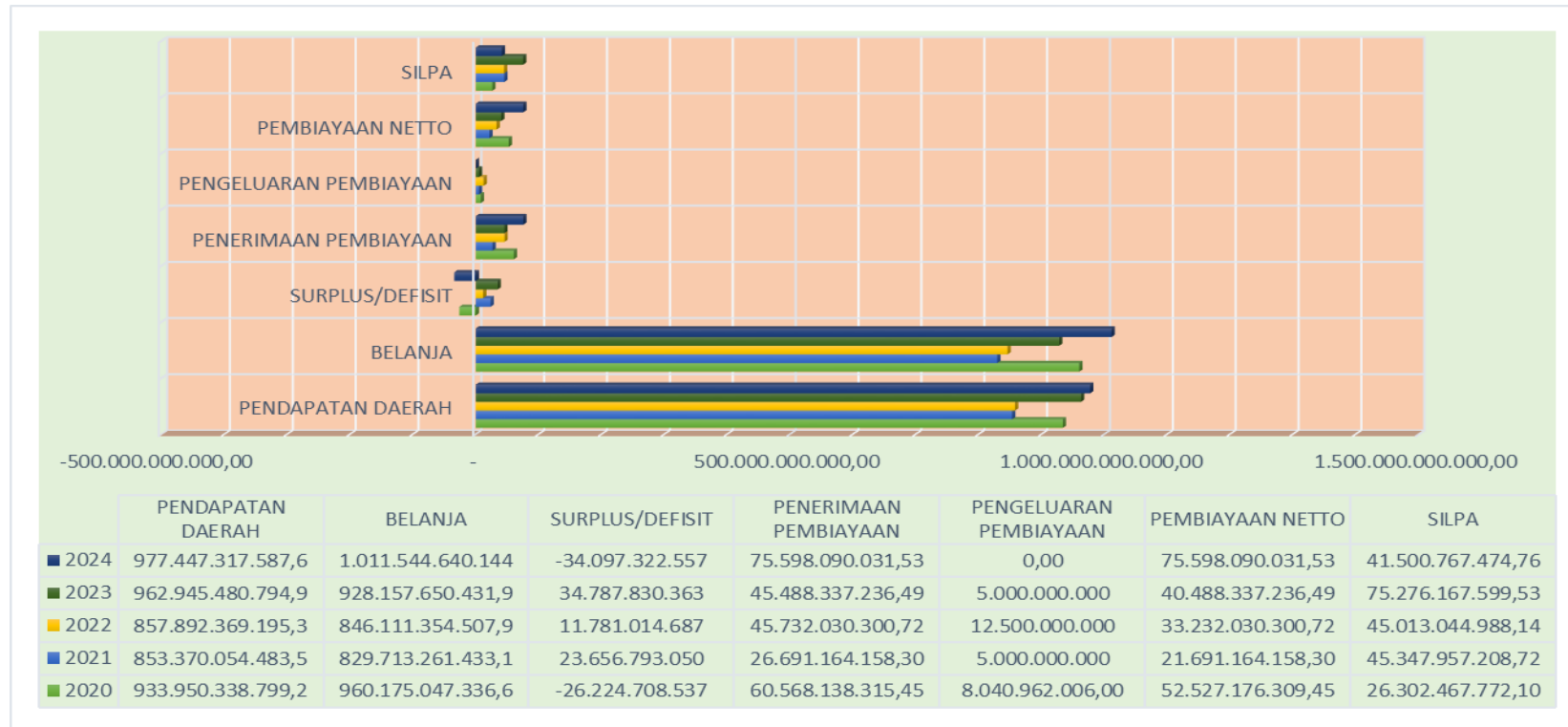
Kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kondisi keuangan dimasa lalu. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya. Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah yang termuat dalam PERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2020-2024.



2.2.1.1 Realisasi APBD Tahun 2020-2024

Grafik 2.26

Perkembangan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020-2024



Sumber: BPKAD Kab.Belu, 2025



Tabel. 2.55
Realisasi APBD Tahun 2020-2024

No	Uraian	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	PENDAPATAN DAERAH	933.950.338.799,25	853.370.054.483,52	857.892.369.195,37	962.945.480.794,95	977.447.317.587,66
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	85.079.640.923,64	72.104.344.504,52	70.137.377.456,37	113.324.789.735,64	88.070.633.275,28
4.1.01	Pajak Daerah	15.678.984.321,00	14.389.504.845,00	17.028.865.762,00	20.563.777.908,00	19.194.087.650,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.218.328.239,00	5.066.281.436,00	5.411.699.234,00	5.112.694.483,00	4.934.589.739,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.441.724.012,23	6.238.725.900,00	3.734.076.759,00	6.529.604.943,00	3.480.688.664,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	57.740.604.351,41	46.409.832.323,52	43.962.735.701,37	81.118.712.401,64	60.461.267.222,28
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	691.721.784.477,61	647.711.388.425	677.514.144.277	749.960.574.512,31	877.295.842.987,30
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	670.079.457.573,00	629.790.242.687	653.361.240.396	718.478.962.836,31	842.871.067.818,30
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	21.642.326.904,61	17.921.145.738	24.152.903.881	31.481.611.676,00	34.424.775.169,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	157.148.913.398	133.554.321.554	110.240.847.462	99.660.116.547,00	12.080.841.325,08
	Pendapatan Hibah	30.501.564.896	21.253.304.700	1.768.093.900	2.977.700.415	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	126.647.348.502	112.301.016.854	108.472.753.562	96.682.416.132	12.080.841.325
5	BELANJA	960.175.047.336,60	829.713.261.433,10	846.111.354.507,95	928.157.650.431,91	1.011.544.640.144,43
5.1	BELANJA OPERASI	625.092.402.094,60	598.569.271.204,52	615.454.586.297,06	648.780.235.375,59	746.040.947.554,11
5.1.01	Belanja Pegawai	306.363.164.235,00	325.123.780.892,00	344.932.201.446,00	347.841.205.142,00	393.788.645.206,30
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.831.045.859,60	258.933.328.188,52	256.869.629.283,06	281.186.397.065,59	301.201.258.829,81
5.1.05	Belanja Hibah	38.278.192.000,00	7.510.762.124,00	12.137.755.568,00	19.516.633.168,00	51.036.043.518,00
5.1.	Belanja Bantuan Sosial	4.620.000.000	7.001.400.000,00	1.515.000.000,00	236.000.000,00	15.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	177.100.438.621,00	93.601.753.487,58	106.053.182.858,89	160.068.785.414,32	144.760.748.226,32
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	-	0,00	393.232.906,00	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.571.956.125,00	31.288.119.775,00	34.782.790.934,00	32.106.879.252,55	20.865.441.803,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.408.923.765,00	23.383.178.239,58	18.404.302.509,00	40.690.822.560,19	57.919.660.357,02
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.434.967.131,00	34.282.396.552,00	51.499.646.315,89	85.083.708.055,58	63.698.929.366,30
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.684.591.600,00	4.648.058.921,00	1.366.443.100,00	1.794.142.640,00	2.276.716.700,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	-	0,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	19.814.407.858	925.724.000,00	0,00	2.566.815.117	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

5.3.01	Belanja Tidak Terduga	19.814.407.858	925.724.000,00	0,00	2.566.815.117,00	0
5.4	BELANJA TRANSFER	138.167.798.763	136.616.512.741	124.603.585.352	116.741.814.525	120.742.944.364
5.4.01	Belanja bagi Hasil	1.089.400.000	136.616.512.741	124.603.585.352	116.741.814.525	120.742.944.364
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	137.078.398.763	-	-	-	
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	60.568.138.315,45	26.691.164.158,30	45.732.030.300,72	45.488.337.236,49	75.598.102.873,01
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	60.345.168.939,45	26.267.741.170	45.347.957.208,72	45.017.835.220,49	75.276.180.441,01
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	222.869.376	420.975.488	383.830.592,00	470.502.016,00	321.922.432,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	100.000	2.447.500	242.500,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.040.962.006,00	5.000.000.000	12.500.000.000	5.000.000.000	0,00
	Penyertaan Modal Daerah	6.220.862.006,00	5.000.000.000	12.500.000.000,00	5.000.000.000	0,00
	Pemberian Pinjaman Daerah	1.820.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	52.527.176.309,45	21.691.164.158,30	33.232.030.300,72	40.488.337.236,49	75.598.102.873,01
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	26.302.467.772,10	45.347.957.208,72	45.013.044.988,14	75.276.167.599,53	41.500.780.316,24

Sumber : BPKAD Kab.Belu, 2025



A. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam 5 tahun terakhir (2020 s/d 2024), PAD Kabupaten Belu mengalami fluktuasi dengan kontribusi per jenis pendapatan asli daerah yang dapat dilihat pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56

Proporsi Per Jenis PAD Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	RATA-RATA
Pajak Daerah	18,43	19,96	24,28	18,15	21,79	20,52
Retribusi Daerah	6,13	7,03	7,72	4,51	5,60	6,20
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,57	8,65	5,32	5,76	3,95	6,25
Lain-lain PAD yang Sah	67,87	64,36	62,68	71,58	68,65	67,03

Sumber : Data Olahan BP4D Kab.Belu, 2025

Selama kurun waktu 2020-2024, pendapatan asli daerah Kabupaten Belu didominasi oleh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terutama didukung oleh pendapatan BLUD Rumah Sakit, disusul pendapatan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan terakhir retribusi daerah.

Berdasarkan data pendapatan daerah dari tahun 2020-2024 dapat diketahui rasio kemandirian daerah. Rasio kemandirian daerah menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Dengan demikian, rasio kemandirian Kabupaten Belu dari tahun 2020-2024 menunjukkan angka sebesar 9,11% pada tahun 2020 menurun menjadi 9,01% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Belu masih dalam kategori rendah.



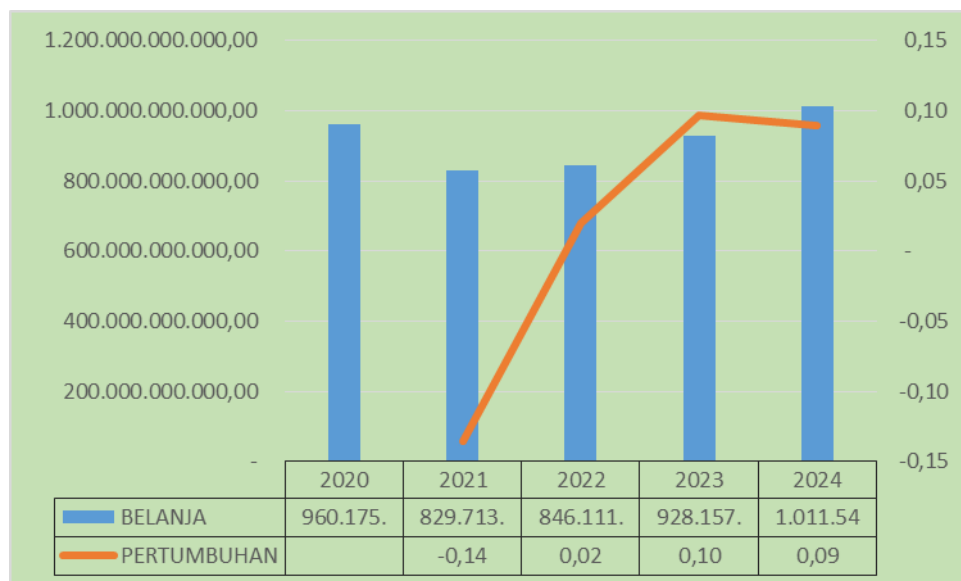
B. BELANJA DAERAH

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja Daerah terdiri atas: a.) belanja operasi; b.) belanja modal; c.) belanja tidak terduga; dan d.) belanja transfer, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tren pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Belu selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 2.27.

Grafik 2.27

Pertumbuhan Belanja Kabupaten Belu Tahun 2019-2024



Sumber: data olahan BP4D, 2025

Grafik 2.27 menunjukkan dengan jelas bahwa anggaran belanja daerah Kabupaten Belu selama lima tahun sejak tahun 2020-2024 sangat fluktuatif cenderung meningkat, dengan anggaran belanja tertinggi terjadi pada tahun 2024 dengan total belanja daerah



sebesar Rp. 83.386.989.712,52 atau meningkat 8,24% dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.57

Proporsi Realisasi Belanja per Kelompok Belanja Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	RATA-RATA
Belanja Operasi	65,10	72,14	72,74	69,90	73,75	70,73
Belanja Modal	18,44	11,28	12,53	17,25	14,31	14,76
Belanja Tidak Terduga	2,06	0,11	0,00	0,28	0,00	0,49
Belanja Transfer	14,39	16,47	14,73	12,58	11,94	14,02

Sumber: data olahan BP4D, 2025

Tabel 2.57 tentang Proporsi Realisasi Belanja per Kelompok Belanja Tahun 2020-2024, terlihat jelas bahwa komposisi realisasi belanja Kabupaten Belu selama kurun 2020-2024 masih di dominasi oleh Belanja Operasi. Rata-rata proporsi realisasi belanja operasi selama lima tahun sejak tahun 2020-2024 berada pada angka 70,73% dibandingkan dengan total realisasi belanja daerah. Disusul berikutnya belanja modal dengan rata-rata proporsi realisasi belanja 14,76%, belanja transfer dengan rata-rata proporsi realisasi belanja 14,02% serta belanja tidak terduga dengan rata-rata proporsi realisasi belanja 0,49%.

Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian serius ke depan, untuk mengupayakan strategi yang tepat meningkatkan proporsi belanja modal, sehingga lebih optimal. Semakin sedikit porsi belanja operasi yang digunakan untuk belanja aparatur maka dapat dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik seperti belanja modal untuk pembangunan fasilitas masyarakat atau untuk mendukung belanja yang efektif mendorong roda perekonomian daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu.



Persentase belanja pegawai terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belu Tahun 2020-2024 dapat digambarkan pada Tabel 2.58.

Tabel 2.58

Persentase Realisasi Belanja Pegawai Terhadap Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Total Realisasi Belanja Daerah	Total Realisasi Belanja Pegawai	Persentase
1	2020	960.175.047.336,60	306.363.164.235,00	31,91
2	2021	829.713.261.433,10	325.123.780.892,00	39,19
3	2022	846.111.354.507,95	344.932.201.446,00	40,77
4	2023	928.157.650.431,91	347.841.205.142,00	37,48
5	2024	1.011.544.640.144,43	393.788.645.206,30	38,93

Sumber: data olahan BP4D, 2025

Berdasarkan Tabel 2.58 dapat diketahui bahwa realisasi belanja pegawai tahun 2020-2024 berada diatas 30% (tiga puluh persen) sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian porsi belanja pegawai.

Dengan kemampuan fiskal daerah yang rendah, tentunya strategi yang dapat ditempuh adalah bagaimana memperkecil porsi belanja pegawai dalam komponen belanja operasi, optimalisasi dan revitalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, serta membuka peluang pembiayaan baru yang dapat mendorong belanja-belanja langsung yang produktif.

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.



Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari: (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SiLPA), (b) Pencairan dana cadangan (c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, (d) penerimaan pinjaman daerah, dan/atau (f) penerimaan pembiayaan lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan (a) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, (b) penyertaan modal daerah, (c) pembentukan dana cadangan, (d) pemberian pinjaman daerah, dan/atau (e) pengeluaran pembiayaan lainnya. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Penerimaan pembiayaan yaitu Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah yang merupakan penerimaan kembali piutang atas pemberian pinjaman kepada pimpinan DPRD Kabupaten Belu untuk pengadaan kendaraan dinas operasional dengan jumlah anggaran awal sebesar Rp. 1.820.100.000,00.- yang direalisasikan pada tahun 2019. Atas pelaksanaan perjanjian tersebut timbul kewajiban untuk melakukan penyetoran kembali ke kas selama 5 tahun (tahun 2020-2024) dan telah dilunasi seluruhnya pada tahun 2024. Untuk Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah tahun 2020-2022 merupakan dana bergulir Dinas Koperasi dan Nakertrans, dan Dinas DP3AP2KB.

Dari sisi pengeluaran pembiayaan, dalam kurun waktu 2020-2023 untuk penyertaan modal ke Bank NTT. Secara umum penyertaan modal dilakukan dalam rangka pengembangan usaha serta penugasan untuk mendukung program pemerintah kepada BUMD.

2.2.1.2 Neraca daerah Tahun 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Daerah merupakan salah satu unsur dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh



Pemerintah Daerah. Neraca Daerah sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, karena dapat memberikan informasi kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas dan fleksibilitas keuangan daerah. Neraca daerah dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif, serta dapat mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Secara lebih detail perkembangan neraca dapat dilihat pada Tabel 2.59.



Tabel 2.59
Neraca Daerah Tahun 2020-2024

No.	Uraian	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ASET					
	A. ASET LANCAR	55.431.055.712,00	77.360.691.361,62	105.175.482.775,22	123.111.843.610,17	124.322.800.658,46
	B. INVENTASI JANGKA PANJANG	63.382.991.218,87	64.914.842.011,87	72.884.417.228,87	74.252.466.616,87	73.871.722.006,00
	C. ASET TETAP	1.478.738.674.664,14	1.420.805.847.754,07	1.645.732.222.080,62	1.394.553.672.606,05	1.561.493.271.351,15
2	D. PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00	0,00	27.939.053.514	27.236.291.698
	E. ASET LAINYA	49.922.895.167,63	45.598.621.884,85	53.113.340.563,45	58.012.187.541,02	26.627.186.359,58
	JUMLAH ASET	1.647.475.616.762,64	1.608.680.003.012,41	1.876.905.462.648,16	1.677.869.223.887,93	1.813.551.272.072,70
	KEWAJIBAN					
	A. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	18.700.698.862,63	35.651.168.459,56	27.270.148.803,60	18.618.235.597,04	27.931.499.529,24
	B. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



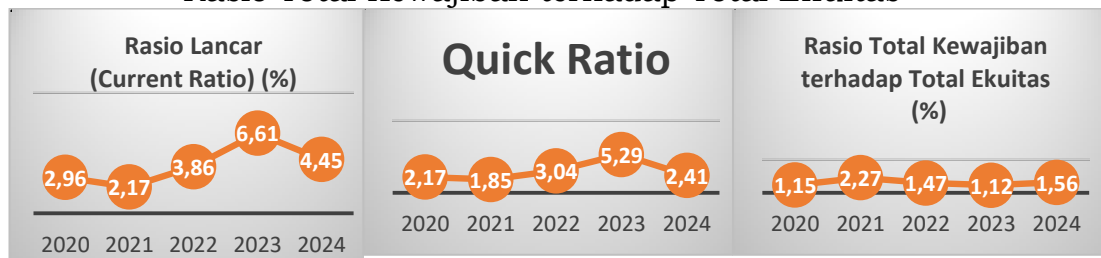
3	JUMLAH KEWAJIBAN	18.700.698.862,63	35.651.168.459,56	27.270.148.803,60	18.618.235.597,04	27.931.499.529,24
	EKUITAS					
	EKUITAS	1.628.774.917.900,01	1.573.028.834.552,85	1.849.635.313.844,56	1.659.250.988.290,89	1.785.619.772.543,46
	JUMLAH EKUITAS	1.628.774.917.900,01	1.573.028.834.552,85	1.849.635.313.844,56	1.659.250.988.290,89	1.785.619.772.543,46
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.647.475.616.762,64	1.608.680.003.012,41	1.876.905.462.648,16	1.677.869.223.887,93	1.813.551.272.072,70

Sumber : BPKAD Kab.Belu, 2025

Tabel 2.59 menunjukkan bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir, jumlah aset lancar mengalami peningkatan. Sampai dengan akhir Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Belu masih memiliki kewajiban jangka pendek (berupa utang perhitungan pihak ketiga (PFK), utang belanja dan utang jangka pendek lainnya) sebesar Rp. 27.931.499.529,24. Terhadap kewajiban jangka pendek tersebut, Pemerintah Daerah sangat mampu untuk memenuhinya dengan kemampuan keuangan daerah yang ada.



Grafik 2.28
Rasio Lancar, Quick Ratio, dan
Rasio Total Kewajiban terhadap Total Ekuitas



Sumber: Data Olahan BP4D Kab. Belu (2025)

- 1) Rasio Lancar termasuk dalam kategori tinggi (lebih dari 2,0). Ini menunjukkan aset lancar yang berlebihan dalam bentuk persediaan, dan modal yang kurang dimanfaatkan.
- 2) Quick Ratio mengukur kemampuan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang paling likuid. Nilai quick ratio berkisar antara 1,85-5,29 atau lebih dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki lebih banyak aset likuid daripada kewajiban jangka pendeknya, yang menandakan kondisi keuangan yang sehat.
- 3) Rasio Total Kewajiban terhadap total ekuitas menunjukkan rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak mengandalkan utang untuk membiayai operasionalnya tetapi juga dapat meningkatkan risiko.

Berdasarkan dari analisis atas Rasio Lancar, Rasio Quick, dan Rasio Total Kewajiban terhadap Total Ekuitas dapat dilihat bahwa keuangan daerah tidak terbebani oleh kewajiban yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah

Dalam menentukan proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah, selain berdasarkan hasil analisis atas gambaran keuangan pada periode sebelumnya perlu mempertimbangkan beberapa asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pokok-pokok kebijakan fiskal serta potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten



Belu. Proyeksi keuangan daerah tahun 2026-2030 yaitu sebagai berikut.

A. Proyeksi Pendapatan Daerah

Selama kurun waktu 2020-2024, proporsi pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer, diikuti pendapatan asli daerah dan lain-lain PAD yang sah. Hal ini menunjukkan kemandirian fiskal Pemerintah Kabupaten Belu masih rendah. Melihat bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Belu masih rendah, kedepan perlu upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2026-2030 mengalami kenaikan dari Rp.953.630.958.669 pada tahun 2026 menjadi Rp.967.076.275.459 pada tahun 2030 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar $\pm 0,35$ % per tahun. Pendapatan daerah Kabupaten Belu sebagian besar bersumber dari pendapatan transfer. Pendapatan diproyeksikan naik namun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan potensi masing-masing komponennya, yaitu:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pajak dan Retribusi

Proyeksi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi, mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah yang meliputi, struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan daya saing daerah dan potensi pajak dan retribusi.

Adanya perubahan Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dimana Kabupaten Belu sudah menerapkan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di tahun 2025 dengan target Rp.19.000.000.000,00.- (sembilan belas milyar).

Optimalisasi pungutan PAD melalui perbaikan tatakelola dan administrasi PAD. Sumber-sumber PAD terus digali untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah, melalui beberapa inovasi yang dilakukan seperti :

- Peningkatan retribusi parkir dengan pendekatan perhitungan menggunakan total kendaraan yang taat membayar pajak. Dimana perlu adanya kebijakan yang dikeluarkan pada saat membayar PKB diikuti dengan pembayaran parkir perkendaraan dengan asumsi 1 (satu) kendaraan, setiap bulannya wajib membayar parkir sebanyak 4 (empat) kali.
- Peningkatan retribusi sampah dengan pendekatan perhitungan melalui jumlah penduduk kota di kenakan Rp.1.000/orang, dimana setiap orang menghasilkan sampah setiap harinya, sehingga setiap orang wajib membayar sampah.
- Kerjasama dengan stakeholder dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.
- Peningkatan layanan pembayaran pajak dengan kemudahan berbasis teknologi informasi serta pengembangan titik layanan.
- Intensifikasi melalui penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan retribusi daerah.
- Pengembangan dan peningkatan realisasi investasi yang menyerap banyak tenaga kerja melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan investasi



melalui perangkat daerah yang menangani pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);

- b. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, diproyeksi berdasarkan pendapatan dari deviden BUMD (Bank NTT) dengan kenaikan 30% (tiga puluh persen) per tahun. Optimalisasi pengelolaan BUMD dalam rangka peningkatan deviden atas laba yang dicapai, sebagai kontribusi pada pendapatan asli daerah;
- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, diproyeksi berdasarkan pendapatan BLUD. Selama kurun waktu 2020-2024, rata-rata pertumbuhan sebesar 0,06% dimana pada tahun 2023 terjadi peningkatan 45,80% dibanding tahun sebelumnya karena ada pembayaran hutang BPJS oleh Kabupaten Malaka, sehingga rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu lima tahun (2020-2024) tidak dapat dijadikan proyeksi pertahun.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Pendapatan transfer pusat terdiri dari : dana perimbangan (dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK)), dana desa dan dana transfer pemerintah pusat lainnya (dana insentif fiskal dan dana insentif daerah).

3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang sah terdiri dari Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat diproyeksikan sama dengan tahun 2025. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan terikat dan harus dibelanjakan sesuai dengan jumlah pendapatannya sehingga tidak mempengaruhi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.



B. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan : kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berbasis kinerja. Proyeksi belanja daerah dilakukan dengan asumsi belanja daerah sama dengan pendapatan daerah. Selain itu belanja daerah disusun dengan memperhatikan :

1. Belanja pegawai daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
2. Belanja infrastruktur pelayanan publik yang dialokasikan paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD.
3. Belanja daerah diproyeksi berdasarkan prioritas pembangunan daerah dengan pembagian proporsi belanja berdasarkan rata-rata realisasi belanja per kelompok belanja Tahun 2020-2024.
4. Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Sedangkan belanja daerah untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan Urusan pilihan dialokasikan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
5. Belanja daerah akan difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Belu untuk tahun 2026-2030 disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan asumsi yang relevan, memastikan bahwa rencana tersebut realistis dan adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Proyeksi anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Belu Tahun 2026-2030 dapat dilihat dalam Tabel 2.60.



Tabel 2.60
Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

No	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	PENDAPATAN DAERAH						
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	88.070.633.275	124.630.958.669	126.216.480.859	131.213.919.059	136.210.637.259	138.076.275.459
4.2	Pendapatan Transfer	877.295.842.987	828.400.000.000	829.000.000.000	829.000.000.000	829.000.000.000	829.000.000.000
4.3	Lain-Lain PAD Yang Sah	12.080.841.325	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	977.447.317.588	953.030.958.669	955.216.480.859	960.213.919.059	965.210.637.259	967.076.275.459
5	BELANJA						
5.1	Belanja Operasi	746.040.947.554	773.191.462.136	772.224.230.727	773.512.302.437	774.889.654.146	776.075.925.855
5.2	Belanja Modal	144.760.748.226	55.913.457.530	60.301.079.207	64.010.445.697	67.629.812.188	68.309.178.679
5.3	Belanja Tidak Terduga	-	3.234.868.078	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
5.4	Belanja Transfer	138.167.798.763	120.691.170.925	120.691.170.925	120.691.170.925	120.691.170.925	120.691.170.925



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

	JUMLAH BELANJA	1.028.969.494.543	953.030.958.669	955.216.480.859	960.213.919.059	965.210.637.259	967.076.275.459
	SURPLUS/DEFISIT	-	-	0	-	0	-
		51.522.176.956					
6	PEMBIAYAAN DAERAH						
6.1	Penerimaan Pembiayaan	75.276.167.600					
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	321.922.432					
	Pengeluaran Pembiayaan	-					
	PEMBIAYAAN NETTO	75.598.090.032					

Sumber : diolah BP4D Kab.Belu, 2025



C. Alternatif Sumber Pembiayaan Lainnya

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembangunan dibutuhkan adanya peningkatan pendapatan daerah serta alternatif pendanaan lainnya seperti penguatan pembiayaan melalui pendanaan inovatif yang dapat dipenuhi dari sumber dana non pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah daerah dituntut untuk dapat berinovasi dalam pemenuhan potensi pendanaan dan pembiayaan alternatif selain dari APBD dan APBN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang mengamanatkan implementasi Sinergi Pendanaan serta Pembiayaan Utang Daerah melalui pemanfaatan pinjaman daerah, obligasi daerah dan dana cadangan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam penyediaan infrastruktur.

Adapun beberapa skema pendanaan yang dapat dimanfaatkan diantaranya hibah, pinjaman daerah, BUMD, BLUD, CSR dan skema pendanaan lainnya. Penggunaan dana alternatif pada pemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pendanaan daerah dalam mengelola pelayanan publik, meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah, serta meningkatkan potensi pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan jangka menengah yang terjadi di Kabupaten Belu merupakan pernyataan kondisi (realita) yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Sedangkan isu strategis merupakan permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap.



2.3.1 Permasalahan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.

Kabupaten Belu menghadapi sejumlah tantangan struktural yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan data yang tersaji dalam pembahasan aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum, permasalahan utama yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

A. Aspek Geografis dan Demografis

- a) Posisi geografis wilayah Kabupaten Belu yang berbatasan dengan Negara RDTL dapat menjadi suatu ancaman keamanan maupun sosial, jika upaya pemerataan dan peningkatan pembangunan belum secara baik dilaksanakan.
- b) Klimatologi dimana daerah Kabupaten Belu lebih didominasi dengan musim kemarau dan musim hujan yang singkat
- c) Tutupan lahan didominasi oleh semak belukar dan hutan lahan kering. Potensi lahan kering yang masih didominasi oleh ketersediaan lahan tidur yang belum dimanfaatkan dengan baik akan menyebabkan turunnya produktivitas hasil pertanian secara umum dan sebagai ancaman untuk ketahanan pangan wilayah.
- d) Menurunnya nilai indeks kualitas air menunjukkan terjadinya penurunan kualitas air sebagai akibat dari menurunnya indeks tutupan lahan. Tutupan vegetasi merupakan bagian penting dalam menjaga, memelihara dan menjamin ketersediaan air baku. Tutupan vegetasi diukur dengan indeks kualitas lahan



(IKL), yang besarnya mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir.

- e) Kabupaten Belu merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana beragam dan ancaman bencana di Kabupaten Belu termasuk dalam kategori kelas risiko tinggi. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana masih belum optimal, serta infrastruktur penanggulangan bencana masih kurang memadai. Dokumen pendukung dan sarana prasarana penanganan bencana diperlukan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.
- f) Menurunnya indeks ketahanan pangan di Kabupaten Belu akibat dari perubahan iklim dapat memicu kenaikan harga pangan yang pada gilirannya menurunkan daya beli masyarakat dan meningkatkan risiko kelaparan mengikat Kabupaten Belu merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.
- g) Masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki akses air minum layak.
- h) Menurunnya penanganan sampah Kabupaten Belu
- i) Rendahnya presentase keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi aman.
- j) Persebaran penduduk berdasarkan tempat tinggal relatif tidak merata. Jumlah penduduk terbanyak ada pada kecamatan Atambua dan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Nanaet Duabesi.

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan ekonomi, kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, perlindungan sosial yang adaptif dan kesejahteraan sosial budaya. Untuk itu, dalam kaitannya dengan masalah belum optimalnya aspek kesejahteraan masyarakat, dapat tergambar melalui kondisi permasalahan antara lain sebagai berikut:



- a) Capaian Indeks Gini Kabupaten Belu masih lebih rendah dibandingkan dengan Nasional. Hal ini menggambarkan bahwa ketimpangan di Kabupaten Belu belum menurun secara baik, tetapi masih berada dalam kategori ketimpangan sedang.
- b) Rendahnya tingkat kesejahteraan Kabupaten Belu, karena nilai yang dikeluarkan petani masih lebih tinggi dari nilai yang diterima petani.
- c) Masih ada penduduk miskin di Kabupaten Belu.
- d) Kabupaten Belu termasuk dalam kategori Keluarga tidak sehat
- e) Capaian Indeks Pembangunan Manusia, nilainya masih dibawah capaian Provinsi NTT dan Nasional.
- f) Prevelensi stunting Kabupaten Belu masih termasuk dalam kategori tinggi
- g) Banyaknya PMKS yang belum mendapat bantuan perlindungan sosial dan masih terdapat pekerja yang belum berpartisipasi dalam program perlindungan sosial.
- h) Masih terdapat ketimpangan gender di Kabupaten Belu.
- i) Pembangunan perempuan di Kabupaten Belu masih berada dibawah laki-laki yang dilihat dari capaian Angka Indeks Pembangunan Gender (IPG).
- j) Indeks Pembangunan Anak (IPA) di Kabupaten Belu termasuk dalam kategori rendah.
- k) Rendahnya rasio penerimaan pajak terhadap PDRB
- l) Rendahnya persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan
- m) Terbatasnya fasilitas kesenian

C. Aspek Daya Saing

Aspek daya saing terdiri dari daya saing SDM, iptek, inovasi dan produktifitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau dan biru, integrasi ekonomi domestik dan global, perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi makro.



Belum optimalnya aspek daya saing daerah ditandai dengan beberapa keadaan, antara lain sebagai berikut:

- a) Meningkatnya rasio ketergantungan yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi.
- b) Tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Belu.
- c) Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB
- d) Neto ekspor barang dan jasa yang negatif (defisit perdagangan)
- e) Belum ada desa di Kabupaten Belu dengan status Desa Mandiri.

D. Aspek Pelayanan Umum

Belum optimalnya Aspek Pelayanan Umum di Kabupaten Belu terlihat melalui beberapa hal antara lain belum optimalnya pelayanan publik, belum optimalnya digitalisasi pemerintahan di level kabupaten, dan masih lemahnya implementasi Reformasi Birokrasi pada pemerintah daerah Kabupaten/ Belu, akuntabilitas keuangan belum disertai kemandirian keuangan daerah, menurunnya indeks pelayanan public serta pencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang masih rendah.

2.3.2 Isu Strategis

Berdasarkan analisis terhadap data capaian kinerja periode 2019-2023, Isu Global dan Nasional yang berkaitan Kabupaten Belu, Rancangan Teknokratik RPJPN 2025-2029, dan Rancangan Teknokratik Provinsi NTT, serta dokumen perencanaan terkait lainnya, telah teridentifikasi sejumlah isu yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan ke depan. Isu-isu ini, mencakup aspek ekonomi, sosial budaya, daya saing, dan pelayanan umum, mengarah pada beberapa isu strategis yang perlu menjadi fokus dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Belu 2025-2029. Isu-isu strategis ini mencerminkan tantangan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Belu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.



A. Isu KLHS

Terdapat 7 (tujuh) isu strategis/isu utama pembangunan berkelanjutan yang perlu diantisipasi/ditanggulangi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Belu tahun 2025-2029, agar upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi optimal, yaitu:

- 1) Kesenjangan Sosial
- 2) Transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan
- 3) Akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman
- 4) Pencemaran dan kerusakan lingkungan
- 5) Ketahanan dan keamanan pangan serta kualitas gizi
- 6) Ketahanan bencana dan perubahan iklim
- 7) *Good governance* dan akses pelayanan publik yang belum optimal

B. Isu Global

Beberapa isu strategis yang saat ini sedang dihadapi oleh penduduk global yang menjadi tantangan dalam pembangunan jangka menengah kedepannya yaitu :

- 1) Perubahan Iklim:
 - a. Peningkatan suhu global 1,1°C sejak era pra-industri;
 - b. Proyeksi kenaikan suhu 1,5°C dalam dua dekade mendatang;
 - c. Potensi kenaikan suhu hingga 4,4°C pada akhir abad ini;
 - d. Konsekuensi: kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, hilangnya keanekaragaman hayati
- 2) Ketimpangan Ekonomi Global:
 - a. populasi terkaya menguasai 45% kekayaan global;
 - b. 50% populasi termiskin memiliki kurang dari 1% kekayaan global;
 - c. Ratusan juta orang jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem akibat pandemic
- 3) Keamanan Siber dan Privasi Data:
 - a. Peningkatan serangan siber 600% selama pandemik;



- b. Ancaman terhadap keamanan infrastruktur kritis, privasi data, dan integritas sistem demokrasi
- 4) Ancaman dan Krisis Air Global;
 - a. proyeksi 52% populasi dunia akan menghadapi kelangkaan air pada 2050;
 - b. 2,2 miliar orang tidak memiliki akses ke air minum yang aman;
 - c. 4,2 miliar orang tidak memiliki akses ke sanitasi yang memadai;
 - d. Potensi konflik atas sumber daya air di berbagai wilayah
- 5) Degradasi Lingkungan dan Hilangnya Keanekaragaman Hayati:
 - a. 1 juta spesies terancam punah dalam beberapa dekade mendatang;
 - b. Laju kepunahan 100-1000 kali lebih cepat dari laju alami; 5
 - c. Faktor pendorong: deforestasi, polusi, dan perubahan iklim
- 6) Urbanisasi dan Pertumbuhan Kota:
 - a. Proyeksi 68% populasi dunia akan tinggal di daerah perkotaan pada 2050;
 - b. Peningkatan dari 55% populasi perkotaan saat ini;
 - c. Tantangan, infrastruktur, layanan dasar, dan keberlanjutan lingkungan
- 7) Transformasi Digital dan Masa Depan Pekerjaan:
 - a. Proyeksi 85 juta pekerjaan mungkin tergantikan oleh mesin pada 2025;
 - b. Potensi munculnya 97 juta pekerjaan baru;
 - c. Risiko memperburuk ketimpangan jika tidak dikelola dengan baik.
- 8) Kebutuhan Respons Global:
 - a. Kerjasama internasional yang erat;
 - b. Inovasi teknologi;
 - c. Reformasi kebijakan;
 - d. Perubahan perilaku individual dan kolektif;
 - e. Pendekatan holistik dan kolaboratif untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil

C. Isu Nasional

Pada RPJMN Tahun 2025-2029, dirumuskan 5 (lima) isu strategis. **Isu strategis pertama** yakni transformasi sosial,



dijabarkan dalam isu: kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, perlindungan sosial yang adaptif. **Isu strategis kedua** yakni transformasi ekonomi, dijabarkan pada beberapa isu: industri, produktivitas tenaga kerja, pertanian, ekonomi biru, ekonomi kreatif, umkm dan koperasi, pekerjaan hijau, percepatan transisi energi, pengelolaan hutan lestari, digital, badan usaha milik negara, pariwisata, integrasi ekonomi domestik dan global, serta perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. **Isu strategis ketiga** yakni transformasi tata kelola dapat dijelaskan dalam beberapa isu: Integritas partai politik, transformasi dan digitalisasi pelayanan publik, sistem anti korupsi dan akuntabilitas pembangunan, sistem penggajian tunggal, kualitas regulasi, manajemen talenta, integrasi proses bisnis. Sementara itu, **isu strategis keempat** yakni supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dijabarkan dalam beberapa isu: stabilitas makro, politik luar negeri, keamanan, demokrasi, hukum, dan pertahanan. Terakhir, **isu strategis kelima** yakni ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, dapat dijabarkan pada beberapa isu: keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif, kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, budaya, pangan, energi, dan bencana dan perubahan iklim.

Adapun isu nasional terkait Wilayah Nusa Tenggara dimana di dalamnya termasuk Kabupaten Belu sebagaimana tertera dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- A. Sektor pariwisata belum inklusif dan berkualitas karena belum optimalnya pengembangan *quality tourism* serta masih rendahnya kompetensi SDM Pariwisata
- B. Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan
- C. Kualitas dan daya saing SDM masih rendah dimana capaian IPM masih dibawah rata-rata nasional
- D. Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja akibat rendahnya *link and matc* dengan lapangan kerja



- E. Rendahnya diverifikasi ekonomi dan belum optimalnya pengembangan sektor unggulan, seperti sektor pertambangan dan sektor pertanian.
- F. Belum optimalnya infrastruktur dasar, transportasi dan telekomunikasi dalam mendukung konektivitas antar wilayah dan antar pulau.

D. Isu Provinsi NTT

Isu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana terangkum dalam dokumen RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas hidup manusia pada seluruh siklus hidup manusia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan kohesif.
2. Peningkatan produksi dan produktifitas sektor primer untuk mendukung hilirisasi.
3. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif.
4. Peningkatan pemanfaatan EBT sebagai sumber energi.
5. Peningkatan efektifitas, akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan birokrasi melalui penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan.
6. Peningkatan stabilitas makro dalam mewujudkan kesinambungan fiskal dan kemampuan serta stabilitas ekonomi daerah.
7. Peningkatan ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang bertumpu pada keseimbangan alam dan lingkungan.

2.3.3 Perumusan Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah dirumuskan dan disimpulkan dari identifikasi potensi daerah, identifikasi permasalahan, isu dalam



laporan KLHS, dan isu lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional/provinsi) yang dapat mempengaruhi daerah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Identifikasi potensi merujuk pada hal-hal yang dapat mendukung pembangunan daerah kabupaten dan dikembangkan. Salah satu potensi Kabupaten Belu dilihat dari aspek geografis yaitu Kabupaten Belu sebagai daerah perbatasan memiliki potensi atau peluang yang dapat dikembangkan seperti potensi ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu terdapat aturan yang mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Belu seperti, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Atambua di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dipertegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2020-2040.

Isu strategis Kabupaten Belu yaitu sebagai berikut :

1) Kesenjangan Sosial

Isu ini mencakup pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia Belu, terutama dalam hal perluasan layanan pendidikan, Kesehatan yang bermutu dan berkeadilan dan kesejahteraan sosial adaptif, yang ditujukan untuk pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial, perempuan dan pemuda.

2) Transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan

Isu ini diarahkan untuk meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah dengan fokus pada peningkatan perekonomian daerah melalui pemanfaatan sumber daya alam yang tersedian dan peningkatan kesempatan kerja.

3) Akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman

Isu ini mencakup peningkatan pembangunan infrastruktur dan lingkungan berbasis tata ruang dengan fokus pada penyediaan infrastruktur penunjang perekonomian daerah.



4) Pencemaran dan kerusakan lingkungan

Pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat berdampak terhadap kualitas hidup, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Isu ini diarahkan dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan berbasis tata ruang dengan fokus pada peningkatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.

5) Ketahanan dan keamanan pangan serta kualitas gizi

Isu ini menekankan pentingnya ketahanan dan keamanan pangan serta kualitas gizi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

6) Ketahanan bencana dan perubahan iklim

Perubahan iklim dapat menyebabkan berbagai dampak negative termasuk bencana alam. Isu ini menekankan pentingnya kesiapan dan penanganan bencana baik bencana alam maupun bencana non alam, dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan berbasis tata ruang dengan fokus pada peningkatan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim.

7) *Good governance* dan akses pelayanan publik yang belum optimal

Isu ini menekankan pada penataan birokrasi daerah dengan berkomitmen pada kepatuhan regulasi dalam mewujudkan pemerintah yang bersih, berwibawa dan tidak korupsi melalui terwujudnya *good governance*.

8) Ketahanan budaya

Isu ini menekankan pemajuan kebudayaan daerah yang difokus pada pengembangan dan pelestarian budaya serta kearifan lokal secara berkelanjutan melalui terwujudnya identitas budaya daerah.



BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Visi dan misi di dalam dokumen dokumen RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 ini merupakan hasil pembahasan teknokratik yang secara substansi merujuk pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati Belu hasil pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024, sekaligus merupakan turunan dari rumusan visi dan misi yang tertuang dalam dokumen RPJPD 2025-2045. Visi dan misi ini dijadikan sebagai landasan untuk merumuskan tujuan dan sasaran yang telah disesuaikan dengan prinsip perencanaan yakni memperhatikan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Provinsi NTT dan RPJMN Tahun 2025-2029 serta RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2025-2045.

Sesuai dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang telah disusun melalui Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belu Tahun 2025-2045, telah ditetapkan visi pembangunan daerah Kabupaten Belu adalah ***“RAI BELU ITAKAN UMA (INKLUSIF, TANGGUH, BERKELANJUTAN DAN MAJU)”***. Visi tersebut mencerminkan cita-cita bahwa selama 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2025 hingga 2045 Kabupaten Belu berproses untuk membangun sebuah masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan secara menyeluruh, dengan memperhatikan kebutuhan generasi masa kini dan masa depan. Lebih lanjut visi ini adalah cermin dari tekad dan impian masyarakat Belu untuk mengubah keadaan mereka menjadi lebih baik. Sebagai sebuah kabupaten yang terletak di



perbatasan, Belu memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tergarap.

Rumusan visi Kabupaten Belu sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD 2025-2029 Kabupaten Belu diharapkan dapat mendukung perwujudan visi jangka panjang Provinsi NTT yaitu Nusa Tenggara Timur Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan guna Mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045 dan visi Indonesia Emas 2045 yang dijabarkan dalam RPJPN 2025-2045 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Dalam rangka pencapaian visi 20 tahun tersebut, kerangka kerja pembangunan jangka panjang tersebut dijabarkan dalam empat tahapan arah kebijakan lima tahunan guna pencapaian visi dan misi jangka panjang daerah. Kebijakan pembangunan daerah lima tahunan diarahkan pada program-program prioritas pembangunan daerah secara berkelanjutan antara satu periode dengan periode berikutnya seperti yang ditunjukkan dalam gambar 3.1.



Gambar 3.1 Tahapan RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2025-2045 Periode RPJMD Kabupaten Belu



Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama dari RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2025-2045. Pada tahapan ini difokuskan pada langkah pemantapan fondasi dengan fokus pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan tata kelola pemerintahan. Pemantapan SPM meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Sedangkan pemantapan tata kelola pemerintah melalui penguatan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang dinamis dan kolaboratif.

3.1 VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah dan bersifat dinamis. Dalam konteks RPJMD, visi adalah sebuah gambaran arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai 5 (lima) tahun ke depan, dan bersifat dinamis untuk pencapaian visi pada tahapan pembangunan daerah berikutnya. Visi RPJMD memiliki hubungan pemaknaan yang kuat dengan Visi Kepala daerah terpilih yang akan dikomunikasikan dan diwujudkan oleh semua pelaku pembangunan sebagai perwujudan cita – cita bersama.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 adalah "**Belu yang Berkualitas, Mandiri, Harmonis, Demokratis dan Berbudaya**". Rumusan ini sebagai pemandu gerak bersama antara pemerintah dan segenap komponen masyarakat untuk membangun Kabupaten Belu lima tahun mendatang. Adapun pemaknaan dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



Berkualitas: Memiliki sumber daya manusia, pelayanan publik, infrastruktur, lingkungan hidup, dan ekonomi yang bermutu baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan daya saing daerah. Kualitas yang dimaksud tidak hanya mencerminkan standar pelayanan atau hasil pembangunan yang tinggi, tetapi juga menyangkut kemampuan daerah untuk beradaptasi, berinovasi, dan berkembang secara berkelanjutan. Pembangunan yang berkualitas akan menjadi fondasi penting bagi percepatan kemajuan daerah dengan menghadirkan sistem pendidikan yang mendorong SDM unggul, layanan publik yang responsif, infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi, serta tata kelola lingkungan yang menjamin keberlangsungan hidup masyarakat. Dengan demikian, kualitas yang dibangun di setiap sektor akan mendorong akselerasi kemajuan daerah menuju kemandirian, modernisasi, dan peningkatan posisi Belu dalam konteks regional maupun nasional.

Mandiri: Mampu berkembang sendiri secara berkelanjutan dengan mengandalkan dan mengoptimalkan potensi lokal menuju ketahanan ekonomi dan pangan di daerah perbatasan negara. Kemandirian tidak hanya berarti terbebas dari ketergantungan eksternal, tetapi juga mencerminkan kapasitas daerah untuk mengelola sumber dayanya sendiri secara efisien, efektif dan inovatif. Daerah yang mandiri mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat, memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, serta membangun kelembagaan lokal yang responsif dan tangguh. Kemandirian ini menjadi motor penggerak bagi kemajuan daerah, karena membuka ruang bagi



inovasi lokal, mendorong investasi yang berbasis potensi wilayah, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam konteks ini, pembangunan Kabupaten Belu diarahkan untuk menjadi daerah yang mampu menghasilkan nilai tambah dari sumber dayanya sendiri, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan, sehingga kemajuan daerah tidak terlalu bergantung pada intervensi luar, tetapi tumbuh dari kekuatan internal yang terorganisir dan terus berkembang. Kemandirian menunjukkan martabat masyarakat Kabupaten Belu dan menerima kerjasama dengan pihak eksternal dalam prinsip mutualistik dan setara.

Harmonis: Keselarasan dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta keselarasan agenda pembangunan antar-pemerintah pusat dan daerah dalam berbagai aspek kehidupan. Keharmonisan ini mencerminkan komitmen untuk membangun daerah secara terpadu, adil, dan berimbang yang mendorong sinergi antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan sosial dan pelestarian lingkungan, sehingga memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Lebih dari itu, keharmonisan menjadi kunci utama dalam menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara pemangku kepentingan lokal, memperkuat keberlanjutan pembangunan melalui pengambilan kebijakan yang selaras, integratif, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Dalam semangat harmonis inilah Kabupaten Belu diarahkan untuk tumbuh secara berkelanjutan dan berkeadilan.



Demokratis: Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan mengedepankan aspek keterbukaan, kesetaraan, keadilan, serta akuntabilitas. Demokrasi dalam konteks pembangunan daerah bukan hanya tentang proses politik yang terbuka, tetapi juga tentang keterlibatan aktif warga dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Ketika seluruh elemen masyarakat termasuk kelompok rentan dan marjinal dilibatkan secara bermakna, maka pembangunan menjadi lebih responsif, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan nyata. Keterbukaan informasi, transparansi kebijakan, dan ruang dialog yang sehat akan memperkuat kepercayaan publik serta mempercepat terciptanya solusi-solusi inovatif yang lahir dari inisiatif warga. Dengan menjadikan demokrasi sebagai landasan, pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Pada akhirnya, semangat demokratis ini akan menjadi kekuatan sosial yang mendorong kemajuan daerah, karena masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi subjek utama yang mendorong perubahan, inovasi, dan transformasi yang berkelanjutan.

Berbudaya: Masyarakat Belu yang berbudaya mampu menjaga dan mengembangkan keunikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat untuk ketahanan budaya yang handal ditengah-tengah arus perubahan sosial/budaya yang cepat secara global. Ancaman paling nyata dan berbahaya adalah revoulsi digital yang dapat melemahkan sendi-sendi kebudayaan. Kebudayaan bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga fondasi moral, sosial, dan spiritual yang



membentuk karakter dan identitas masyarakat dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai lokal, seperti gotong royong, toleransi, penghargaan terhadap alam, dan kearifan hidup komunitas adat, masyarakat Belu memiliki kekuatan sosial yang kokoh dalam mendukung proses pembangunan. Penguatan identitas budaya akan memperkuat kohesi sosial, memperkuat jati diri daerah, dan mencegah disorientasi dalam menghadapi arus modernisasi. Selain itu, pelestarian dan pengembangan budaya yang dilakukan secara aktif dan dinamis akan membuka peluang baru dalam bidang ekonomi kreatif, pariwisata budaya, serta pendidikan karakter generasi muda. Dengan demikian, budaya bukan hanya dijaga, tetapi juga dihidupkan dan dimajukan sebagai pilar penting dalam pembangunan yang berkelanjutan—yang berakar kuat pada nilai lokal, namun tetap terbuka terhadap kemajuan global.

Belu yang Berkualitas, Mandiri, Harmonis, Demokratis, dan Berbudaya menggambarkan cita-cita pembangunan daerah yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan dengan peningkatan kualitas hidup, pelayanan publik, infrastruktur, dan ekonomi yang unggul dengan merawat kelestarian sumber daya alam, agar menjamin masa depan generasi yang akan datang. Pembangunan Kabupaten Belu diarahkan untuk mengandalkan potensi lokal daerah guna mewujudkan kemandirian di bidang ekonomi dan ketahanan pangan. Sebagai daerah perbatasan negara yang strategis, Kabupaten Belu memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan wilayah, memperkuat hubungan sosial-budaya lintas batas, serta menjadi beranda depan Indonesia yang mencerminkan kemajuan dan keterbukaan. Pembangunan Belu diarahkan



untuk memperkuat konektivitas wilayah, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal, serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar yang menjangkau hingga wilayah terpencil dan kawasan perbatasan. Lebih lanjut pembangunan daerah dilaksanakan secara selaras antara pusat dan regional, menciptakan keseimbangan antarwilayah dan antar sektor. Masyarakat Belu diharapkan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dengan menjunjung tinggi nilai keterbukaan, keadilan, kesetaraan dan akuntabilitas. Selain itu, identitas budaya dan adat istiadat dijaga dan dikembangkan sebagai fondasi yang kokoh untuk ketahanan sosial dan jati diri daerah.

3.2 MISI

Misi merupakan upaya umum tentang bagaimana cara terbaik mewujudkan Visi. Misi Pembangunan Daerah disusun secara teknokratis dengan tetap menjaga janji politik sebagaimana tertuang dalam misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sekaligus untuk menjawab permasalahan dan Isu Strategis Daerah dengan rumusan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Belu melalui perluasan layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan serta pelayanan sosial yang adaptif dan inklusif;
2. Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan berbasis tata ruang;
4. Penataan birokrasi daerah dengan berkomitmen pada kepatuhan regulasi untuk mewujudkan mutu pelayanan publik dan pemerintah yang bersih, berwibawa, tidak korupsi dan demokratis;





5. Pengembangan dan pelestarian budaya serta kearifan lokal secara berkelanjutan.

Tabel 3.1

Keterkaitan Misi dengan Kata Kunci Visi RPJMD Kabupaten Belu 2025-2029

Misi	Kata Kunci Visi
MISI 1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Belu melalui perluasan layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan serta pelayanan sosial yang adaptif dan inklusif;	Berkualitas, Mandiri, Harmonis, Demokratis dan Berbudaya
MISI 2 Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah;	Berkualitas, Mandiri dan Harmonis
MISI 3 Mewujudkan Pembangunan infrastruktur dan lingkungan berbasis tata ruang;	Berkualitas dan Harmonis
MISI 4 Penataan birokrasi daerah dengan berkomitmen pada kepatuhan regulasi untuk mewujudkan mutu pelayanan publik dan pemerintah yang bersih, berwibawa, tidak korupsi dan demokratis	Berkualitas, Mandiri, Harmonis, Demokratis dan Berbudaya
MISI 5 Pengembangan dan Pelestarian budaya serta kearifan lokal secara berkelanjutan.	Berkualitas, Harmonis dan Berbudaya

Adapun penjelasan dari masing-masing misi adalah sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Belu melalui perluasan layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan serta pelayanan sosial yang adaptif dan inklusif.

Misi ini diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan manusia di Kabupaten Belu, yang merupakan inti dari pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan dan



kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan merata (*inclusif*) merupakan instrumen utama dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, sehat, dan produktif. Misi ini mendorong pemenuhan hak dasar setiap warga dengan memberikan layanan di bidang pendidikan dan kesehatan yang adil, tidak diskriminatif, serta responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia.

Misi 1 memperkuat pencapaian visi Belu yang berkualitas melalui peningkatan kapasitas dan daya saing sumber daya manusianya. Kemandirian masyarakat juga akan terbangun ketika setiap individu memiliki tingkat pendidikan yang memadai, kecakapan hidup, derajat kesehatan yang baik, serta akses terhadap layanan sosial yang bersifat inklusif. Di sisi lain, sistem pendidikan dan pelayanan sosial yang inklusif menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, berkeadilan, menjunjung tinggi demokrasi dengan membentuk warga yang sadar hak dan kewajiban, serta memperkuat karakter berbudaya melalui pengarusutamaan nilai-nilai lokal dalam proses pendidikan.

Misi 2: Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah

Pembangunan ekonomi daerah diarahkan pada penguatan sektor-sektor unggulan yang menjadi potensi khas Kabupaten Belu, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan perdagangan lintas batas. Peningkatan nilai tambah dari sektor-sektor ini, melalui inovasi, teknologi, serta dukungan infrastruktur dan kelembagaan, diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif. Kebijakan hilirisasi ekonomi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan



nilai tambah berbagai komoditas, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Misi ini berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi Belu yang berkualitas, melalui peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Potensi lokal yang dikelola secara berkelanjutan akan menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi, tidak tergantung pada bantuan eksternal, serta mampu mengelola kekayaan daerah secara optimal. Ekonomi daerah yang tumbuh secara kuat melalui pemanfaatan sumberdaya lokal akan memperkuat kehidupan sosial yang harmonis, dengan mengurangi kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok.

Misi 3: Mewujudkan Pembangunan infrastruktur dan lingkungan berbasis tata ruang

Pembangunan infrastruktur tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan fisik masyarakat, tetapi juga sebagai alat transformasi dan akselerasi ekonomi dan sosial. Dalam misi ini, pembangunan dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan spasial, konektivitas antarwilayah, keberlanjutan lingkungan, serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. Fokus diarahkan pada infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, irigasi, air bersih, sanitasi, perumahan, listrik, dan telekomunikasi.

Ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang baik akan meningkatkan mutu layanan publik dan mendukung berbagai sektor pembangunan, yang pada akhirnya mewujudkan Belu yang berkualitas dan mandiri. Sementara itu, pembangunan yang berbasis tata ruang dan ramah lingkungan menjaga keseimbangan antara kebutuhan



manusia antar generasi dan kelestarian alam, sehingga memperkuat kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan. Infrastruktur yang terencana juga menjadi penopang bagi sektor budaya dan ekonomi kreatif, serta memperkuat konektivitas antarwilayah dan antarbangsa.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memegang peranan penting dalam menavigasi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang yang efisien dan berkelanjutan. Dengan implementasi RTRW yang konsisten dan optimal, maka tujuan untuk mewujudkan kawasan permukiman yang tertata, bersih, nyaman, serta aman dari bencana akan lebih mudah dicapai. Pembangunan infrastruktur bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, tetapi juga memerlukan sinergitas dan harmonisasi dengan pemerintah provinsi, pusat, serta dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Oleh sebab itu, upaya membangun jejaring kerja lintas sektor dan lintas wilayah secara berkelanjutan menjadi kunci penting dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang tangguh, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Misi 4: Penataan birokrasi daerah dengan berkomitmen pada kepatuhan regulasi untuk mewujudkan mutu pelayanan publik dan pemerintah yang bersih, berwibawa, tidak korupsi dan demokratis.

Misi ini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan lokal yang baik (*good local governance*). Penataan birokrasi dilakukan melalui reformasi kelembagaan, peningkatan kompetensi aparatur, digitalisasi layanan, serta penguatan sistem pengawasan dan



akuntabilitas publik. Seluruh proses pemerintahan didorong untuk mematuhi regulasi, menjunjung nilai integritas, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai melalui birokrasi yang efektif, efisien, dan profesional, sehingga secara langsung mendukung visi Belu yang berkualitas. Birokrasi yang tidak korup, berwibawa, dan responsif juga mencerminkan kepemimpinan publik yang berorientasi kuat pada rakyat dan kematangan demokrasi di tingkat lokal. Format birokrasi pemerintah yang bersih dan berpihak pada rakyat, memicu tercipta suasana harmonis yang membangun dan menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara dan pemerintah. Selain itu, etika birokrasi yang menjunjung nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal turut memperkuat karakter birokrasi yang berbudaya dan mengokohkan kemandirian pemerintahan daerah dalam menjalankan pembangunan.

Misi 5: Pengembangan dan Pelestarian budaya serta kearifan lokal secara berkelanjutan

Budaya dan kearifan lokal merupakan kekayaan tak ternilai sekaligus identitas yang membedakan masyarakat Belu dari daerah lain. Dalam rangka mewujudkan Belu yang berbudaya, pembangunan diarahkan untuk memperkuat ketahanan budaya melalui pemulihan, pelestarian dan pengembangan tradisi serta pengarusutamaan nilai-nilai lokal dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Upaya pelestarian budaya tidak hanya difokuskan pada kegiatan seremonial atau pelestarian fisik artefak warisan budaya, tetapi juga pada upaya membangkitkan kembali peran dan nilai-nilai budaya yang penting dalam kehidupan masyarakat. Upaya ini



mencakup perlindungan hak-hak masyarakat adat, pendokumentasian dan pewarisan bahasa dan cerita rakyat, serta pemberdayaan komunitas seni dan budaya lokal. Pembangunan yang berorientasi pada budaya juga perlu mendorong integrasi nilai-nilai lokal dalam sistem pendidikan, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan ekonomi.

Selain itu, partisipasi aktif generasi muda dalam pelestarian budaya menjadi kunci keberlanjutan. Maka dari itu, penting untuk menciptakan ruang-ruang ekspresi budaya, dukungan terhadap inovasi budaya, serta kolaborasi antara seniman, tokoh adat, pemerintah, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, budaya dan kearifan lokal tidak hanya akan bertahan, tetapi juga menjadi kekuatan strategis dalam memperkuat hubungan sosial, menjaga keberagaman dalam harmoni, serta mendorong kemajuan Kabupaten Belu yang tetap berpijak kuat pada akar budayanya dan karakteristik lokal sebagai bagian dari identitas kolektif.

Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 yang sudah dijelaskan di atas perlu memperhatikan keselarasan dengan visi misi RPJMN dan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029. Keselaran tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2:



Tabel 3.2
Persandingan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025- 2029 dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029

VISI DAN MISI NASIONAL	VISI DAN MISI KABUPATEN BELU	VISI DAN MISI PROPINSI NTT
BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045	BELU YANG BERKUALITAS, MANDIRI, HARMONIS, DEMOKRATIS DAN BERBUDAYA	NTT MAJU, SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Belu melalui perluasan layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan serta pelayanan sosial yang adaptif dan inklusif	Memastikan infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah	Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang inklusif, terjangkau dan mudah diakses
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Mewujudkan Pembangunan infrastruktur dan lingkungan berbasis tata ruang	Menghadirkan Pendidikan yang berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Penataan birokrasi daerah dengan berkomitmen pada kepatuhan regulasi untuk mewujudkan mutu pelayanan publik dan pemerintah yang bersih, berwibawa, tidak korupsi dan demokratis	Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan dan Pelestarian budaya serta kearifan lokal secara berkelanjutan.	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan serta pemenuhan HAM untuk melanjutkan masa depan yang inklusif
Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.		
Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.		
Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur		

3.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah rumusan tentang kondisi yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan melalui berbagai program pembangunan yang dilakukan sesuai misi yang diemban, guna pencapaian visi pembangunan daerah. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan merupakan dampak (*impact*)



keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Perumusan Tujuan dari Visi RPJMD juga menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan yang diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Tujuan yang diformulasikan secara terukur, jelas, mudah dipahami, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.



Tabel 3.3
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025–2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	Target Tahun						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
VISI : BELU BERKUALITAS , MANDIRI, HARMONIS, DEMOKRATIS DAN BERBUDAYA												
MISI 1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Belu melalui perluasan layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan serta pelayanan sosial yang adaptif dan inklusif.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Belu		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68.13	68.46	68.93	69.4	69.88	70.35	70.82	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi dan Numerasi									
			i) Literasi									
			SD	Persen	41,01	43,51	46,01	48,51	51,01	53,51	56,01	
			SMP	Persen	59,66	60,76	61,96	62,96	64,06	65,16	66,26	
			ii) Numerasi									
			SD	Persen	39,62	42,52	45,42	48,32	51,22	54,12	57,02	
			SMP	Persen	55,53	57,03	58,53	60,03	61,53	63,03	64,53	
			Harapan lama sekolah	Tahun	12.32	13.83	13.95	14.08	14.2	14.33	14.45	
			Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7.5	7.5	7.68	7.86	8.05	8.24	8.44	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	65,93	66,33	66,63	67,03	67,33	67,73	68,03	
			Prevalensi Stunting	Persen	44,3	42,60	41	39,50	37,80	36,40	34,80	
			Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	Target Tahun						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Angka Kematian Ibu	Angka	7	0	0	0	0	0	0	
			Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	Persen	94,7	90	90	90	90	90	90	
		Meningkatnya pelayanan sosial yang adaptif dan inklusif	Indeks Gini	Angka	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	
			Persentase PPKS Yang Mandiri	Persen			10.69	11.60	12.00	12.20	12.50	
		Meningkatnya kualitas sumber daya perempuan dan anak serta pemuda	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,85	92,02	92.1	92,18	92,26	92,34	92,34	
			Indeks Perlindungan Anak	Indeks	70,19	71,47	72,75	74,03	75,29	75,29	75,29	
			Jumlah Perolehan Medali pada event Olahraga Nasional/ Internasional	Medali	10	20	25	30	35	40	40	
MISI 2 Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah.	Meningkatnya Perekonomian Daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,97	4	4,4	4,74	5,09	5,44	5,84	
			Tingkat Kemiskinan	Persen	13.86	13.72	12.76	11.87	11.04	10.27	9.56	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.41	5.49	5.33	5.17	5.02	4.87	4.73	
			Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4.21	4.24	4.25	4.27	4.28	4.30	4.30	
		Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam yang Tersedia	Kontribusi Persektor Terhadap PDRB									



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	Target Tahun						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	1.37	1.44	1.51	1.58	1.65	1.72	1.79	
			Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	21.90	22.06	22.22	22.38	22.54	22.70	22.86	
		Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	77.31	79.08	80.85	82.62	84.39	86.16	87.93	
			Pengeluaran Per Kapita	Juta Rupiah	7672	7729	7786	7843	7900	7957	8014	
MISI 3 Mewujudkan Pembangunan infrastruktur dan lingkungan berbasis tata ruang.	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur dan lingkungan berbasis tata ruang		Indeks Layanan Infrastruktur Kewenangan Kabupaten	Angka	53,36	53,36	53,80	64,31	69,23	72,97	76,89	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68,41	78.17	78.34	78.51	78.68	78.85	79.02	
		Tersedianya Infrastruktur Penunjang Perekonomian Daerah	Rumah Tangga dengan akses terhadap Air bersih Perpipaan	Persen	35.48	39.01	40.89	42.86	44.93	47.09	49.36	
			Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	64.71	66.88	67.66	68.45	69.25	70.05	70.87	
			Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	40.32	43.92	47.51	51.11	54.70	58.30	61.89	
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	Indeks	91,85	89.36	89.56	89.76	89.96	90.16	90.36	
			Indeks Kualitas Air	Indeks	53,75	74.19	74.39	74.59	74.79	74.99	75.19	
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	50,25	64.30	64.36	64.43	64.50	64.57	64.64	
			Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	13,03	19,4	19,76	20	20,55	21	21,75	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	Target Tahun						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	55	60	65	70	75	80	85	
		Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,38	0,42	0,43	0,45	0,47	0,48	0,50	
MISI 4 Penataan birokrasi daerah dengan berkomitmen pada kepatuhan regulasi untuk mewujudkan mutu pelayanan publik dan pemerintah yang bersih, berwibawa, tidak korupsi dan demokratis.	Terwujudnya Pemerintah Yang bersih , berwibawa dan tidak korupsi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,70	66.52	72.94	79.36	85.78	92.20	98.62	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	1.84	2.55	3.00	3.50	4.00	4.25	4,50	
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2.47	2.74	3.01	3.28	3.55	3.82	4.09	
		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	SAKIP	Angka	60.54	63.52	66.5	69.48	72.46	75.44	78.42	
		Terwujudnya Budaya Bebas Korupsi	SPIP	Angka	2.89	2.89	2.92	2.95	2.97	2.99	3	
			Nilai MCP KPK	Angka	73	74,30	74,50	74,55	74,65	74,66	75	
			Opini Laporan Keuangan BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
		Terwujudnya reformasi regulasi di daerah	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	70,01	75,5	77	79	81	83	85	
MISI 5 Pengembangan dan Pelestarian budaya serta kearifan lokal secara berkelanjutan.	Terwujudnya Penguatan Identitas Budaya Daerah		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	0	51,06	51,09	51,11	51,20	51,25	51,3	
		Meningkatnya pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Persen	19	20	20,14	40,28	60,12	80,03	100	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Baseline 2024	Target Tahun						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya Promosi Budaya Daerah	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (domestik dan mancanegara)	Persen	64,729	69	70	72	74	75	76	



3.4 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang memuat langkah-langkah komprehensif dan terarah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Belu untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, serta target kinerja RPJMD selama periode 5 tahun ke depan. Dalam kerangka arsitektur perencanaan pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan dibangun melalui dua pendekatan utama: 1) Perencanaan Strategis, yang menitikberatkan pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah; dan 2) Perencanaan Operasional, yang difokuskan pada pencapaian kinerja layanan publik dalam setiap urusan pemerintahan daerah.

Strategi pembangunan dirumuskan sebagai alat untuk mengarahkan intervensi pembangunan terhadap isu-isu utama daerah, sekaligus menjadi pedoman dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang disusun secara tepat mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memahami permasalahan pembangunan serta komitmennya untuk memecahkan masalah dalam berbagai pelayanan masyarakat. Strategi yang efektif dan efisien akan menghasilkan nilai tambah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, baik dari segi capaian *output* dan *outcome* maupun peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Strategi ini selanjutnya dijabarkan ke dalam arah kebijakan yang menjadi pedoman dalam penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas secara lebih fokus, sinergis, dan terukur. Arah kebijakan



dirancang untuk memastikan keterpaduan antara tujuan dan sasaran pembangunan dengan implementasi program prioritas, sehingga pelaksanaan misi pembangunan Kabupaten Belu dapat berlangsung secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan sepanjang periode RPJMD Tahun 2025–2029.

3.4.1 STRATEGI

Strategi merupakan rencana tindakan terpadu yang dirancang secara sistematis untuk menjawab dinamika lingkungan melalui serangkaian intervensi pembangunan. Strategi mencakup serangkaian upaya dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya, penahapan pelaksanaan, penetapan wilayah prioritas, serta seleksi program prioritas yang diarahkan untuk menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Strategi pembangunan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025–2029 diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan daerah secara adaptif dan berkelanjutan. Strategi disusun untuk mendukung lima tujuan utama pembangunan daerah yang meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perekonomian daerah, peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan berbasis tata ruang, perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta penguatan identitas budaya daerah.

Sebagai kabupaten perbatasan yang strategis dan berperan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seluruh strategi sektoral dan lintas sektor diarahkan pula untuk memperkuat posisi Kabupaten Belu sebagai pusat interaksi sosial, ekonomi, dan budaya lintas negara, sekaligus memperkuat ketahanan nasional dan daya



saing kawasan perbatasan. Berikut strategi pembangunan yang mendukung pencapaian visi Kabupaten Belu lima tahun ke depan.

Tabel 3.4
Strategi Pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2025–2029

SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	1. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 2. Percepatan wajib belajar 13 tahun 3. Optimalisasi akses dan partisipasi pendidikan (SD, SMP/Sederajat) 4. Peningkatan mutu layanan dan infrastruktur pendidikan (termasuk internet) 5. Pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran online 6. Penguatan manajemen mutu pendidikan dan tata kelola 7. Pemerataan akses pendidikan di wilayah terpencil/perbatasan 8. Penguatan pendidikan karakter kebangsaan di kawasan strategis nasional 9. Kolaborasi pendidikan vokasional dengan pendekatan lintas batas (Bahasa Portugis dan Inggris)
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	1. Pelayanan kesehatan primer di puskesmas dan posyandu 2. Peningkatan kesehatan ibu dan anak 3. Percepatan penurunan stunting melalui jaminan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan dan peningkatan sanitasi lingkungan 4. Percepatan pelaksanaan perbaikan gizi masyarakat 5. Penguatan pelayanan kegawat-daruratan neonatal, bayi dan balita di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. 6. Pemberdayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 7. Penguatan jaminan kesehatan melalui peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional 8. Penyediaan layanan rujukan dan dasar termasuk RS Internasional Perbatasan 9. Penguatan perlindungan kesehatan dan penanganan penyakit menular lintas negara 10. Penguatan sistem kesehatan untuk wilayah terpencil dan kawasan perbatasan



SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya pelayanan sosial yang adaptif dan inklusif	1. Penguatan integrasi perlindungan sosial, bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat 2. Peningkatan proporsi masyarakat yang terlayani jaminan sosial untuk menurunkan tingkat kerentanan sosial. 3. Peningkatan dan perluasan bantuan sosial sebagai stimulus ekonomi khususnya pada kelompok rentan (penyandang disabilitas dan usia lanjut) 4. Peningkatan ketahanan sosial terhadap mobilitas lintas batas 5. Penguatan komunitas dalam menghadapi perdagangan ilegal, trafficking, dan lain-lain 6. Peningtegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM Sosial kewenangan kabupaten
Meningkatnya kualitas sumber daya perempuan dan anak serta pemuda	1. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan 2. Pengembangan Kecakapan Pemuda 3. Penyediaan Sarana Prasarana Olahraga yang berstandar nasional dan internasional dalam mendukung penyelenggaraan PON dan <i>event</i> olahraga lainnya 4. Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga yang rutin 5. Pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan di perbatasan 6. Peningkatan ketahanan sosial terhadap mobilitas lintas batas 7. Perlindungan perempuan dan anak 8. Penguatan komunitas dalam menghadapi perdagangan ilegal, <i>trafficking</i>, dll
Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam yang Tersedia	1. Mendorong perwujudan investasi hijau 2. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan secara berkelanjutan 3. Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan berbasis masyarakat 4. Peningkatan praktik keberlanjutan pada industri pengolahan 5. Pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan produktivitas serta ketahanan ekonomi perdesaan 6. Pengembangan kawasan ekonomi perbatasan 7. Memajukan ekonomi desa melalui Koperasi Merah Putih dan One Village One Product



SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya Kesempatan Kerja	1. Penciptaan dan perluasan lapangan kerja yang layak 2. Literasi dan inklusi keuangan untuk menciptakan kemudahan akses kredit UMKM dan peningkatan kemitraan UMKM, perbaikan iklim usaha dan investasi yang semakin kondusif melalui: a) Perbaikan sistem dan layanan perizinan yang mudah, cepat, dan tepat; b) Pengembangan promosi secara digital 3. Pengembangan wirausaha pemuda dalam e-commerce 4. Pengembangan Kecakapan Bisnis Pemuda 5. Promosi investasi di sektor industri kecil perbatasan 6. Penumbuhan sentra distribusi logistik di PLBN
Tersedianya Infrastruktur Penunjang Perekonomian Daerah	1. Pengembangan dan pengelolaan SPAM 2. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan air minum 3. Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sumber daya air 4. Pengembangan infrastruktur permukiman 5. Pengembangan perumahan 6. Pengaturan pemanfaatan sumber air CAT (Cekungan Air Tanah) 7. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan 8. Penyediaan air baku dan sarana energi di kawasan perbatasan 9. Peningtegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM PUPR kewenangan kabupaten
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan SDA serta lingkungan hidup 2. Perlindungan keanekaragaman hayati 3. Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah cair 4. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) 5. Peningkatan kinerja pengelolaan sampah dengan pendekatan ekonomi sirkular 6. Pembangunan sistem pemanenan dan pengolahan air hujan skala rumah tangga dan/atau komunal 7. Edukasi dan penguatan kesadaran lingkungan masyarakat
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang	1. Peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan agar konsisten terhadap berbagai dokumen tata ruang 2. Peningkatan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang



SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam manajemen bencana terkait mitigasi, adaptasi dan pengurangan dampak negatif berbagai bencana, termasuk perubahan iklim. 2. Peningkatan ketahanan iklim melalui perlindungan ketahanan air, ketahanan pangan, perlindungan kesehatan masyarakat dan lingkungan 3. Penyusunan rencana strategi penanggulangan dampak perubahan iklim. 4. Peningtegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM TRANTIBUMAS kewenangan kabupaten
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	1. Penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan menuju <i>good local governance</i> 2. Reformasi birokrasi tematik dan penguatan tata Kelola pelayanan publik 3. Penyederhanaan struktur dan regulasi berbasis teknologi informasi 4. Penguatan kapasitas dan partisipasi masyarakat 5. Pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi. 6. Penguatan tata kelola kependudukan melalui percepatan cakupan administrasi kependudukan 7. Perluasan basis pajak eksisting dan inovasi skema pembiayaan sebagai sumber pendapatan baru.
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1. Peningkatan manajemen perencanaan kinerja pemerintah daerah. 2. Peningkatan manajemen pengukuran kinerja pemerintah daerah. 3. Peningkatan manajemen pelaporan kinerja pemerintah daerah. 4. Peningkatan manajemen pengawasan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pemerintah daerah.
Terwujudnya Budaya Bebas Korupsi	1. Penguatan sistem anti-korupsi dan penegakan hukum 2. Peningkatan upaya pencegahan korupsi
Terwujudnya Reformasi Regulasi di Daerah	1. Penyederhanaan dan Harmonisasi Regulasi 2. Penguatan Kapasitas Aparatur
Meningkatnya pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal	1. Mengidentifikasi dan mendokumentasi budaya dan kearifan lokal 2. Mengintegrasikan budaya lokal ke dalam kurikulum pendidikan 3. Penggunaan media promosi budaya 4. Pengembangan kapasitas pelaku budaya 5. Mendorong kolaborasi antara pemerintah dan tokoh budaya.



SASARAN	STRATEGI
	6. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Budaya Lokal 7. Diplomasi budaya di wilayah perbatasan
Meningkatnya Promosi Budaya Daerah	1. Penyelenggaraan festival budaya lintas negara 2. Penyelenggaraan pameran kebudayaan di dalam dan luar negeri 3. Penggunaan teknologi informasi untuk pemasaran budaya daerah 4. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya

3.4.2 PENAHAPAN PEMBANGUNAN

Penahapan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 merupakan bentuk strategi dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Penahapan merupakan bentuk prioritas tahunan untuk mencapai tujuan RPJMD yang dijabarkan dalam tabel 3.4.

Tabel 3.5

Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Belu 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan ekonomi masyarakat melalui ketahanan pangan yang berkelanjutan yang didukung peningkatan kualitas SDM, infrastruktur, Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Pengembangan Budaya.	Peningkatan pelayanan dasar dan kualitas sumber daya manusia yang didukung peningkatan infrastruktur, Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik , Pengembangan Budaya dan Peningkatan Ekonomi	Peningkatan mutu infrastruktur dan pelestarian budaya yang mendukung perekonomian daerah yang didukung peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik , Peningkatan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas SDM	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan mutu pelayanan publik daerah yang didukung pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Kualitas SDM, Peningkatan Infrastruktur dan lingkungan serta Peningkatan budaya	Pemantapan sektor-sektor pembangunan untuk mewujudkan misi pembangunan menuju pencapaian visi “Belu yang Berkualitas, Mandiri, Harmonis, Demokratis dan Berbudaya”



3.4.3 LOKUS PEMBANGUNAN

Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025–2029, implementasi strategi pembangunan akan diarahkan berdasarkan pemanfaatan ruang dan pola struktur ruang sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belu Tahun 2020–2040.

Lokus pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat- pusat pertumbuhan lama dan baru, yakni Kawasan Perkotaan Atambua sebagai pusat kegiatan wilayah, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, dan perdagangan, serta sebagai motor penggerak pertumbuhan wilayah sekitarnya. Di samping itu, pengembangan juga difokuskan pada kawasan-kawasan strategis lain seperti Kawasan Perbatasan Motaain, yang menjadi beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta kawasan agropolitan yang mendukung penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan, seperti wilayah Raihat dan Kakuluk Mesak.

Dalam sektor ekonomi, pengembangan diarahkan pada kawasan sentra produksi pertanian, peternakan, dan perikanan, serta kawasan industri kecil dan menengah yang tersebar di wilayah- wilayah strategis, termasuk kawasan yang ditetapkan dalam sistem jaringan transportasi dan infrastruktur pelayanan dasar. Untuk mendukung konektivitas, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan jaringan air bersih akan difokuskan pada penguatan hubungan antarwilayah, terutama konektivitas antar pusat kegiatan lokal (PKL), desa-desa potensial, serta akses menuju



perbatasan negara.

Pada sektor sosial, pengembangan pendidikan dan kesehatan akan diprioritaskan di pusat-pusat permukiman yang memiliki daya dukung dan daya tampung tinggi, khususnya di kawasan perkotaan dan permukiman prioritas. Penyediaan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan juga diarahkan untuk memperkuat aksesibilitas pelayanan dasar di wilayah perdesaan terpencil, perbatasan, dan daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, pembangunan diarahkan pada kawasan lindung dan konservasi sumber daya alam yang telah ditetapkan dalam RTRW, seperti kawasan hutan lindung, kawasan sempadan sungai, dan kawasan rawan bencana. Program pengendalian perubahan iklim, rehabilitasi lahan kritis, serta konservasi air dan keanekaragaman hayati akan difokuskan pada kawasan-kawasan ini untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Selain itu, pengembangan pariwisata akan difokuskan pada kawasan-kawasan potensial berbasis budaya dan alam, seperti kawasan wisata religi di Atambua, Lahurus dan Teluk Gurita, wisata alam di wilayah pegunungan Lamaknen dan sepanjang pantai utara Kakuluk Mesak, serta destinasi berbasis budaya lokal di seluruh kecamatan. Pengembangan sektor ini diarahkan secara terpadu dengan penguatan infrastruktur pendukung, promosi, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, implementasi strategi pembangunan di Kabupaten Belu Tahun 2025–2029 mengacu pada pendekatan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan potensi lokal, daya dukung lingkungan, konektivitas antarwilayah, serta fungsi strategis kawasan dan



kawasan perbatasan, sehingga pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaya saing dapat diwujudkan secara optimal.

3.4.4 ARAH KEBIJAKAN

Untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Belu Tahun 2025–2029, telah dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang meliputi berbagai bidang strategis yang dapat dilihat pada tabel 3.5. Keseluruhan arah kebijakan ini disusun secara terintegrasi dan sinergis untuk mendukung terwujudnya pembangunan Kabupaten Belu yang berkualitas, mandiri, harmonis, demokratis dan berbudaya.

Tabel 3.6
Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025–2029

MISI	ARAH KEBIJAKAN
MISI I Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Belu melalui perluasan layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Bermutu dan Berkeadilan.	1) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 2) Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkualitas 3) Penguatan sistem tata kelola pendidikan 4) Penguatan Budaya Literasi untuk kreativitas dan Inovasi 5) Pemenuhan SPM Pendidikan kewenangan daerah kabupaten 6) Peningkatan Kesehatan dan Gizi masyarakat 7) Pengendalian penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat 8) Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan 9) Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola 10) Pembangunan Rumah Sakit Internasional Perbatasan 11) Pemenuhan SPM Kesehatan kewenangan daerah kabupaten 12) Penguatan layanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk penempatan nakes berbasis digital di desa terpencil 13) Peningkatan Kualitas PMKS 14) Pemenuhan SPM Sosial kewenangan daerah kabupaten



MISI	ARAH KEBIJAKAN
	15) Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja 16) Peningkatan Kualitas Pemuda 17) Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana olahraga sesuai standar nasional/internasional dalam mendukung penyelenggaraan PON 18) Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga 19) Pengembangan Pembudayaan Olahraga yang Inklusif 20) Peningkatan akses dan mutu pendidikan formal menengah dan tinggi, vokasi, serta beasiswa afirmatif untuk pelajar dari kawasan adat dan tertinggal dengan kolaborasi bersama pemerintah provinsi dan nasional
	21) Pembangunan sekolah unggul perbatasan dan boarding school (SUPERA) berbasis karakter budaya local 22) Pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang 23) Peningkatan kualitas anak melalui pemenuhan hak-hak dasarnya 24) Pelayanan sosial yang inklusif bagi kelompok rentan melalui pendekatan integratif lintas sektor
MISI 2 Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah.	1) Percepatan pengembangan Industri berbasis SDA Unggulan 2) Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Porang dan Sengon) 3) Penguatan Kapasitas dan Daya Saing UMKM 4) Peningkatan Investasi dari Penanaman Modal Daerah 5) Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja 6) Peningkatan Kualitas Pemuda 7) Transformasi ekonomi lokal melalui program ketahanan pangan 8) Penguatan UMKM, Koperasi dan BUMDes melalui pembiayaan, pendampingan usaha, serta digitalisasi pemasaran 9) Penciptaan lapangan kerja melalui Zona Industri Mikro (ZIMKA), padat karya infrastruktur, dan pengembangan desa wisata produktif 10) Pemberdayaan kawasan tertinggal dan adat berbasis klaster ekonomi, budaya, dan logistik mikro
MISI 3 Mewujudkan Pembangunan infrastruktur dan	1) Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman 2) Penyediaan Air Baku



MISI	ARAH KEBIJAKAN
lingkungan berbasis tata ruang.	3) Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Air yang berkelanjutan, 4) Penyelenggaraan jalan (pembangunan, peningkatan dan rehab). 5) Pengelolaan keanekaragamanhayati, 6) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, 7) Reformasi sampah (dari pembuangan sampah ke pengelolaan sampah), 8) Peningkatan kualitas tata ruang 9) Pembangunan berketahanan iklim, 10) Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna 11) Pemanfaatan energi terbarukan (PLTS, PLTMH, biogas) dalam infrastruktur desa 12) Pengembangan sistem informasi spasial dan pemetaan berbasis digital untuk perencanaan dan konservasi sumber daya 13) Pembangunan infrastruktur dasar terintegrasi RTRW dan mendukung konektivitas wilayah 14) Penataan wilayah berbasis kelestarian lingkungan dan mitigasi risiko bencana 15) Pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan kewenangan daerah kabupaten
MISI 4 Penataan birokrasi daerah dengan berkomitmen pada kepatuhan regulasi untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, berwibawa, dan tidak korupsi.	1) Pemantapan SPM dan Tata Kelola Pemerintah 2) Peningkatan manajemen kinerja pemerintah daerah, 3) Penerapan reformasi manajemen ASN melalui merit sistem, 4) Pencegahan dan pemberantasan korupsi 5) Kolaborasi pembentukan satuan pertahanan sipil dan forum komunikasi intelejen daerah khusus perbatasan serta integrasi teknologi pengawasan sederhana di daerah perbatasan 6) Penguatan SPIP dan pengawasan internal melalui revitalisasi UPID dan penyusunan peta risiko OPD 7) Pembangunan Zona Integritas dan kampanye antikorupsi melibatkan sekolah, pemuda, dan masyarakat 8) Sistem whistleblowing daerah yang aman dan ditindaklanjuti secara transparan 9) Penerapan asa pembentukan perundang- undangan 10) Evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan



MISI	ARAH KEBIJAKAN
	11) Penguatan Harmonisasi dan Sinergi
MISI 5 Pengembangan dan Pelestarian budaya serta kearifan lokal secara berkelanjutan.	1) Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan 2) Penciptaan ruang ekspresi budaya melalui festival 3) Integrasi budaya lokal dalam pendidikan melalui kurikulum muatan lokal dan program “Guru Budaya” 4) Pengembangan ekonomi berbasis budaya dengan fasilitasi UMKM kerajinan, sertifikasi budaya, dan kampung budaya 5) Diplomasi budaya lintas negara melalui Festival Timor Internasional dan pertukaran pelajar lintas batas 6) Penetapan dan pengembangan desa budaya sebagai destinasi wisata edukatif dan identitas Kabupaten Belu

3.4.5 PROGRAM PRIORITAS

Untuk mewujudkan pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Belu menetapkan sepuluh program prioritas yang menjadi pendorong utama dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2025–2029. Program-program ini disusun berdasarkan analisis isu strategis, kebutuhan masyarakat, dan arah pembangunan jangka menengah yang selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi.

Sepuluh program prioritas tersebut adalah:

- (1) Revolusi pertanian menuju tani mandiri;
- (2) Perluasan akses berusaha bagi UMKM melalui penyediaan ekosistem pembiayaan daerah;
- (3) Fasilitasi angkatan kerja melalui perluasan akses ke pasar kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja;
- (4) Peningkatan kualitas pendidikan pada jenjang pendidikan dasar;



- (5) Pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar kesehatan;
- (6) Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu;
- (7) Penyediaan air baku untuk pemenuhan kebutuhan Masyarakat;
- (8) Digitalisasi layanan pemerintahan menuju smart governance;
- (9) Pemberian tambahan penghasilan bagi ASN termasuk guru dan tenaga kesehatan secara proposional; dan
- (10) Perwujudan Atambua sebagai *Central Festival of Timor* (Pusat Festival Pulau Timor).

Penyusunan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 juga harus mendukung dan diselaraskan dengan Visi Presiden Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Dokumen RPJMN 2025-2029, yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 8 Asta Cita sebagai berikut:

- Asta Cita 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
- Asta Cita 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
- Asta Cita 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
- Asta Cita 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan,



Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;

Asta Cita 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;

Asta Cita 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;

Asta Cita 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;

Asta Cita 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 juga mendukung Visi dan Misi Gubernur Provinsi NTT terpilih yang tercantum dalam Dokumen RPJMD Provinsi NTT 2025-2029, yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 10 program prioritas daerah yang disebut sebagai “Dasa Cita” sebagai berikut:

1. Dari Ladang dan Laut ke Pasar: Efisien, Modern dan Aman;
2. Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal;
3. Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal;
4. Kesejahteraan Bersama: Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk Masyarakat;
5. Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting;
6. Sekolah vokasi unggulan Berbasis Potensi unggulan;
7. Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni: Mewujudkan NTT



yang Sejahtera;

8. Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin;
9. Membangun NTT Digital: Akses Merata, Komunikasi Lancar;
10. Ayo Bangun NTT, Kolaborasi Bersama.

Pemerintah Kabupaten Belu dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 telah menetapkan arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas yang selaras dengan visi pembangunan nasional dan daerah Provinsi NTT yang akan menjadi rujukan penyusunan dokumen perencanaan tahunan. Program-program ini disusun berdasarkan analisis isu strategis, kebutuhan masyarakat, dan arah pembangunan jangka menengah yang selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi, sebagai berikut:

Pertama, peningkatan kualitas pendidikan pada jenjang pendidikan dasar menjadi program prioritas utama. Program ini bertujuan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan merata. Upaya ini mencakup peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta penguatan tata kelola satuan pendidikan.

Kedua, pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar kesehatan diarahkan untuk menjamin akses layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Program ini mendukung penguatan layanan kesehatan primer, pencegahan stunting, peningkatan gizi masyarakat, serta layanan rujukan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kesehatan.



Ketiga, sektor pertanian diarahkan pada pelaksanaan revolusi pertanian menuju kemandirian petani dan kemandirian pangan. Program ini mencakup peningkatan kapasitas petani, perluasan akses terhadap input pertanian dan teknologi, serta penguatan rantai pasok dan pasar hasil pertanian guna mendorong ketahanan dan kedaulatan pangan lokal.

Keempat, perluasan akses berusaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi fokus utama dalam penguatan ekonomi kerakyatan. Hal ini dilakukan melalui pengembangan ekosistem pembiayaan daerah, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta fasilitasi akses permodalan dan pasar yang lebih luas.

Kelima, fasilitasi angkatan kerja melalui perluasan akses ke pasar kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi prioritas untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya saing SDM. Program ini mencakup pelatihan vokasi, bimbingan kerja, sertifikasi kompetensi, dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyerapan tenaga kerja. Termasuk di dalamnya dukungan fasilitasi perizinan kerja seperti pembuatan SIM C bagi pengemudi ojek dalam rangka peningkatan akses kerja sektor informal. Fasilitasi pembuatan SIM C bagi pengemudi ojek merupakan bagian dari upaya memperluas akses pasar kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja, khususnya di sektor informal. SIM C adalah syarat legal utama untuk bekerja sebagai ojek, sehingga bantuan ini membantu mengatasi hambatan administratif dan meningkatkan keterlibatan tenaga kerja dalam aktivitas ekonomi yang aman dan sah. Program ini juga mendukung profesionalisme dan perlindungan kerja bagi angkatan kerja lokal.



Keenam, penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu yang diarahkan untuk menjamin kebutuhan dasar akan hunian yang aman, sehat, murah dan layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kelompok rentan. Program ini juga berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan multidimensi.

Ketujuh, penyediaan air baku untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi program penting dalam menjamin hak dasar masyarakat atas air bersih. Fokus diarahkan pada peningkatan kapasitas infrastruktur air bersih, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, dan perluasan cakupan layanan air bersih di perkotaan dan pedesaan.

Kedelapan, digitalisasi layanan pemerintahan menuju *good local governance* menjadi prioritas dalam meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik. Program ini mencakup pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pelayanan digital terpadu, serta penguatan kapasitas SDM aparatur dalam pengelolaan teknologi informasi.

Kesembilan, pemberian tambahan penghasilan bagi ASN termasuk guru dan tenaga kesehatan secara proporsional diarahkan untuk meningkatkan motivasi, kinerja, dan kesejahteraan aparatur, khususnya yang bertugas di daerah-daerah sulit, terpencil, atau dengan beban kerja tinggi.

Kesepuluh, sebagai program unggulan daerah berbasis budaya, Pemerintah Kabupaten Belu juga mendorong perwujudan Atambua sebagai *Central Festival of Timor* (Pusat Festival Pulau Timor). Program ini ditujukan untuk mengangkat peran strategis Kabupaten Belu sebagai simpul budaya dan pariwisata kawasan perbatasan serta memperkuat



diplomasi budaya lintas negara.

Melalui pendekatan kolaboratif antar-pemerintah dan pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, Kabupaten Belu siap menjadi aktor strategis dalam orkestrasi pembangunan Provinsi NTT dan Nasional. Seluruh program prioritas daerah kemudian diterjemahkan secara sistematis ke dalam nomenklatur program berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sebagaimana termuat dalam Tabel 3.4. Nomenklatur ini menjadi instrumen utama dalam pencapaian target pembangunan daerah dan menjadi fondasi dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Belu, yaitu: **"Belu yang Berkualitas, Mandiri, Harmonis, Demokratis, dan Berbudaya."**



Tabel 3.7
Program prioritas RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025–2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
VISI : BELU BERKUALITAS , MANDIRI, HARMONIS, DEMOKRATIS DAN BERBUDAYA					
MISI 1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Belu melalui perluasan layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan serta pelayanan sosial yang adaptif dan inklusif	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Belu			Indeks Pembangunan Manusia	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi dan Numerasi	
				i) Literasi	
				SD	
				SMP	
				ii) Numerasi	
				SD	
				SMP	
				Harapan lama sekolah	
				Rata-Rata Lama Sekolah	
			Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Angka partisipasi sekolah (5-6 tahun)	Program Pengelolaan Pendidikan



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Angka Partisipasi Sekolah (7-15 tahun)	
				Persentase Satuan Pendidikan Yang Menyelenggarakan PAUD Holistik Integratif	
				Iklim Inklusifitas SD	
				Iklim Inklusifitas SMP	
				Iklim Keamanan SD	
				Iklim Keamanan SMP	
				Iklim Kebinekaan SD	
				Iklim Kebinekaan SMP	
				Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Dengan Kualifikasi S1/DIV	
				Angka Partisipasi Sekolah (7-18 tahun) Kesetaraan	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan		Usia Harapan Hidup	
				Prevalensi Stunting	
				Cakupan kepesertaan JKN	
				Angka Kematian Ibu	
				Insidensi TBC	
			Tercapainya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	
				Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
				Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai standar	
				Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia produktif sesuai standar	
				Persentase Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	
				Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
				Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJB) sesuai standar	
				Persentase Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) sesuai standar	
				Persentase Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK	
				Persentase Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrien Supplementation (MMS)	
				Persentase Ibu Hamil Mengonsumsi Makanan Beragam	
				Persentase Pemeriksaan Kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan	
				Persentase Praktik Inisiasi Menyusu Dini	
				Persentase Bayi Usia 0-5 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	
				Persentase Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) beragam setelah 6 bulan	
				Persentase Pemberian ASI Eksklusif sampai 6 bulan, dilanjutkan sampai 2 tahun	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Persentase BADUTA gizi Buruk yang mendapat pelayanan tata laksana Gizi Buruk	
				Persentase BADUTA yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	
				Persentase BADUTA gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	
				Persentase BADUTA mendapatkan imunisasi rutin lengkap	
				Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada BADUTA	
				Persentase Pemberian Obat cacing pada anak BADUTA (0- 24 Bulan)	
				Persentase Tatalaksana BALITA yang bermasalah gizi	
				Persentase Stimulasi dan pemantauan perkembangan pada BALITA	
				Persentase Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	
				Persentase Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 24-59 bulan	
				Persentase Penemuan kasus pneumonia balita	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Persentase Pemberian obat cacing pada anak BALITA (1-4 Thn)	
				Persentase Remaja putri yang mengkonsumsi TTD	
				Persentase Remaja putri yang diskriminasi anemia	
				Persentase Akses terhadap air minum aman	
				Persentase Akses terhadap sanitasi aman	
				Jumlah Kasus Kematian Bayi	
				Persentase lanjut usia yang mandiri	
				Cakupan penemuan kasus TB	
				Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 Tahun	
				Prevalensi Obesitas > 18 Tahun	
				Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	
				Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	
				Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	
				Persentase ODHA menjalani terapi ARV	
				Kasus Indigenous	
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		Meningkatnya pelayanan sosial yang adaptif dan inklusif		Indeks Gini	
				Persentase PPKS Yang Mandiri	
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Program Pemberdayaan Sosial
		Meningkatnya kualitas sumber daya perempuan dan anak serta		Indeks Pembangunan Gender	
			Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
				Indeks Perlindungan Anak	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		pemuda	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Program Pemenuhan Hak Anak
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan kekerasan eksploitasi perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Program Perlindungan Khusus Anak
				Persentase Perolehan Medali pada event Olahraga Nasional/Internasional	
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga melalui Jumlah Perolehan Medali pada event Olahraga Nasional/Internasional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
MISI 2 Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah	Meningkatnya Perekonomian Daerah			Laju Pertumbuhan Ekonomi	
				Tingkat Kemiskinan	
				Tingkat Pengangguran Terbuka	
		Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam yang Tersedia		Kontribusi Persektor Terhadap PDRB	
				Rasio PDRB Industri Pengolahan	
				Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Padi dan Jagung	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Meningkatnya Populasi Ternak Sapi/Babi/Kambing	Presentase Peningkatan Populasi Ternak Sapi, Babi dan Kambing	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Meningkatnya Populasi Ternak Sapi/Babi/Kambing	Presentase Peningkatan Populasi Ternak Sapi, Babi dan Kambing	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Meningkatnya Kesempatan Kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	
				Peningkatan Pendapatan Per Kapita	
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Program Pemberdayaan Sosial
			Meningkatnya Kapasitas daya saing kepemudaan	Rasio wirausaha pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang di tempatkan di dalam negeri	Program Penempatan Tenaga Kerja



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya perijinan berusaha berbasis resiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
			Meningkatnya kualitas dan efektifitas kegiatan pemberdayaan di kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah, kesejahteraan rakyat, dan kualitas produk hukum yang dihasilkan	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
				Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	
				Presentase produk hukum yang dihasilkan	
MISI 3 Mewujudkan Pembangunan infrastruktur dan lingkungan berbasis tata ruang	Terwujudnya Pembangunan infrastruktur dan lingkungan berbasis tata ruang			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah	
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
		Tersedianya Infrastruktur Penunjang Perekonomian Daerah		Rumah Tangga dengan akses terhadap Air bersih Perpipaan	
				Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	
				Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	Program Penyelenggaraan Jalan;
			Meningkatnya penanganan terhadap rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni Yang Tertangani	Program Kawasan Permukiman;
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
			Meningkatnya kualitas dan efektifitas kegiatan pemberdayaan di kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Udara	
				Indeks Kualitas Air	
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	
				Cakupan Pengelolaan Sampah Perkotaan	
				- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	
				- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	
			Menurunnya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten/Kota untuk mendukung kualitas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan	Persentase parameter pengukuran air yang memenuhi baku mutu yang ditetapkan dibandingkan dengan parameter pengukuran secara keseluruhan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Cakupan Pengelolaan Taman Kehati dan Ruang Terbuka Hijau yang berada di dalam kewenangan pengelolaan Kabupaten Belu	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan /atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Cakupan Pengelolaan Taman Kehati dan Ruang Terbuka Hijau yang berada di dalam kewenangan pengelolaan Kabupaten Belu	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Presentase volume sampah yang berhasil dikurangi melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycle) per tahun	Program Pengelolaan Persampahan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Ruang		Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
			Meningkatnya Keptuhan Masyarakat terhadap PERDA dan PERKADA	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
			Meningkatnya Penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	
			Meningkatnya Perlindungan terhadap Masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	
			Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	
		Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Indeks Ketahanan Daerah	
		Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana
				Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Persentase Penanganan Pasca Bencana	
MISI 4 Penataan birokrasi daerah dengan berkomitmen pada kepatuhan regulasi untuk mewujudkan mutu pelayanan publik dan pemerintah yang bersih, berwibawa, tidak korupsi dan demokratis	Terwujudnya Pemerintah Yang bersih , berwibawa dan tidak korupsi			Indeks Reformasi Birokrasi	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik	
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
			Tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat,
				Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang ada di UPTD RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD	
				Angka Penggunaan Tempat Tidur (Bed Occupancy Ratio)	
				Rata-rata Lamanya Pasien di Rawat (Average Length of Stay)	
				Tenggang Perputaran Tempat Tidur (Turn Over Interval)	
				Angka Kematian 48 Jam (Net Death Rate)	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Angka Kematian Umum (Gross Death Rate) (	
				Angka Perputaran Tempat Tidur (Bed Turn Over) (	
			Meningkatnya perijinan berusaha berbasis resiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal,
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
			Meningkatkan Kualitas layanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Program Pendaftaran Penduduk
			Meningkatkan Kualitas layanan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah kecamatan	Persentase Kinerja Terpadu Pelayanan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
			Meningkatnya Alat Ukur Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	Persentase Alat Ukur Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Tera Sah dan Berlaku	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
			Meningkatnya layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya PD yang terhubung dengan akses Internet yang disediakan Oleh Dinas Kominfo	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	
		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah		SAKIP	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan tata kelola organisasi pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Indeks kematangan organisasi	
			Meningkatnya sasaran penyebaran informasi publik kepada masyarakat untuk mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
				SPIP	
		Terwujudnya Budaya Bebas Korupsi		Nilai MCP KPK	
				Opini Laporan Keuangan BPK	
			Peningkatan Akuntabilitas, Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Serta Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan
			Meningkatnya Tata kelola Anggaran, Tata Kelola	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Keuangan Daerah



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Perbendaharaan dan Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan wajib Pelayanan Dasar	
				Persentase Penurunan Silpa (%)	
		Terwujudnya reformasi regulasi di daerah		Indeks Reformasi Hukum	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah, kesejahteraan rakyat, dan kualitas produk hukum yang dihasilkan	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
				Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	
				Presentase produk hukum yang dihasilkan	
MISI 5 Pengembangan dan Pelestarian budaya serta kearifan lokal secara berkelanjutan	Terwujudnya Penguatan Identitas Budaya Daerah			Indeks Pembangunan Kebudayaan	
		Meningkatnya pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal		Persentase warisan budaya yang dilestarikan	
			Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan
			Meningkatnya cagar budaya	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Implementasi Pembangunan Daerah Berdasarkan Hasil Kelitbangan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah Yang dijadikan sebagai landasan Dalam Implementasi Pembangunan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Meningkatnya Promosi Budaya Daerah		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (domestik dan mancanegara)	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dua hal yang saling berkaitan erat dalam konteks otonomi daerah. Program Perangkat Daerah adalah rencana kegiatan yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sementara itu, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah hasil kerja dari pelaksanaan program-program tersebut yang diukur dan dievaluasi untuk melihat sejauh mana tujuan pembangunan daerah telah tercapai.

4.1 RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program pembangunan daerah Kabupaten Belu merupakan upaya terencana untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang dikemas secara bijak oleh pemerintah daerah Kabupaten Belu untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Sebagai bentuk perwujudan dari rumusan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan, perumusan program pembangunan daerah mengambil peran sebagai instrument akhir dalam merealisasikan impian kepala daerah secara efektif dan efisien. Melihat periodisasi RPJMD berlangsung dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sedangkan program perangkat daerah direncanakan sampai dengan tahun 2030, ini merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu sebagai pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Secara lebih detail Program Pembangunan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025-2030 yang diimplementasikan melalui rencana program perangkat daerah tergambar pada tabel berikut.



Tabel 4.1
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					276.040.984.623, 00		286.729.959.638, 00		286.836.288.110, 00		286.942.601.263, 00		286.982.295.693, 00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					189.387.719.373, 00		207.509.239.750, 00		207.509.239.750, 00		207.509.239.750, 00		207.509.239.750, 00	
Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	66	66	67	189.387.719.373, 00	68	207.509.239.750, 00	69	207.509.239.750, 00	70	207.509.239.750, 00	71	207.509.239.750, 00	1.01.2.19.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					86.119.717.250,0 0		78.534.171.888,0 0		78.640.500.360,0 0		78.746.813.513,0 0		78.786.507.943,0 0	
Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi siswa														
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Angka partisipasi sekolah (5-6 tahun) (%)	62,71	65,38	68,05	86.119.717.250,0 0	70,72	78.534.171.888,0 0	73,39	78.640.500.360,0 0	76,07	78.746.813.513,0 0	78,74	78.786.507.943,0 0	1.01.2.19.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
	Angka Partisipasi Sekolah (7-15 tahun) (%)	95,89	96,20	96,50		96,80		97,10		97,41		97,71		1.01.2.19.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
	Persentase Satuan Pendidikan Yang Menyelenggarakan PAUD Holistik Integratif (%)	35,00	50,00	60,00		70,00		80,00		90,00		100,00		1.01.2.19.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
	Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	51,78	54,28	56,78		59,28		61,78		64,28		66,78		1.01.2.19.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
	Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	54,00	56,40	58,80		61,20		63,60		66,00		68,40		1.01.2.19.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Iklm Keamanan SD (Nilai)	64,37	65,27	66,17		67,07		67,97		68,87		69,77		1.01.2.19.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
	Iklm Keamanan SMP (Nilai)	66,34	67,84	69,34		70,84		72,34		73,84		75,34		1.01.2.19.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
	Iklm Kebhinekaan SD (Nilai)	67,32	68,32	69,32		70,32		71,32		72,32		73,32		1.01.2.19.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Dengan Kualifikasi S1/DIV (%)	25,92	29,48	33,04		36,60		40,16		43,72		48,12		1.01.2.19.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
	Iklm Kebinekaan SMP (Nilai)	69,20	70,20	71,20		72,20		73,20		74,20		75,20		1.01.2.19.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
	Angka Partisipasi Sekolah (7-18 tahun) Kesetaraan (%)	13,77	14,89	16,02		17,14		18,26		19,38		20,50		1.01.2.19.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					330.500.000,00		395.500.000,00		395.500.000,00		395.500.000,00		395.500.000,00	
Meningkatnya Pengembangam Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	0	0	75	330.500.000,00	80	395.500.000,00	85	395.500.000,00	90	395.500.000,00	100	395.500.000,00	1.01.2.19.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					153.048.000,00		184.048.000,00		184.048.000,00		184.048.000,00		184.048.000,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase guru bersertifikat pendidik (%)	0	44,33	55,46	153.048.000,00	66,59	184.048.000,00	77,72	184.048.000,00	88,85	184.048.000,00	99,98	184.048.000,00	1.01.2.19.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					50.000.000,00		107.000.000,00		107.000.000,00		107.000.000,00		107.000.000,00	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pengendalian Perizinan Pendidikan	Jumlah Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Dokumen)	10	12	14	50.000.000,00	16	107.000.000,00	18	107.000.000,00	20	107.000.000,00	22	107.000.000,00	1.01.2.19.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					194.101.486.579,00		194.337.555.609,00		194.550.212.553,00		194.762.838.859,00		194.842.227.719,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					123.008.386.739,00		127.098.477.204,00		127.183.850.858,00		127.271.166.984,00		127.290.861.414,00	
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	72	78	78	40.940.904.650,00	79	45.030.995.115,00	80	45.030.995.115,00	81	45.030.995.115,00	82	45.030.995.115,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	66	67	68	82.067.482.089,00	69	82.067.482.089,00	70	82.152.855.743,00	70	82.240.171.869,00	71	82.259.866.299,00	1.02.0.00.0.00.02.00 00 - RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					62.411.279.840,00		58.562.033.781,00		58.566.488.599,00		58.585.485.626,00		58.605.485.626,00	
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat														
Tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit (%)	81	85	85	2.547.313.640,00	90	2.563.813.640,00	90	2.461.939.986,00	95	2.374.623.860,00	100	2.354.929.430,00	1.02.0.00.0.00.02.00 00 - RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD
	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang ada di UPTD RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD (%)	80	83	85		88		90		93		95		1.02.0.00.0.00.02.00 00 - RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD
	Angka Penggunaan Tempat Tidur (Bed Occupancy Ratio) (%)	74	80	80		80		85		85		85		1.02.0.00.0.00.02.00 00 - RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Rata-rata Lamanya Pasien di Rawat (Average Length of Stay) (Hari)	3	6	6		5		5		4		4		1.02.0.00.0.00.02.00 00 - RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD
	Tenggang Perputaran Tempat Tidur (Turn Over Interval) (Hari)	1	2	2		2		2		2		2		1.02.0.00.0.00.02.00 00 - RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD
	Angka Kematian 48 Jam (Net Death Rate) (Per 1000)	17	25	24		23		22		21		20		1.02.0.00.0.00.02.00 00 - RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD
	Angka Kematian Umum (Gross Death Rate) (Per 1000)	24	45	44		43		42		41		40		1.02.0.00.0.00.02.00 00 - RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD
	Angka Perputaran Tempat Tidur (Bed Turn Over) (Kali)	92	50	49		48		47		46		45		1.02.0.00.0.00.02.00 00 - RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD
TERCAPAINYA UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	91,05	100	100	59.863.966.200,00	100	55.998.220.141,00	100	56.104.548.613,00	100	56.210.861.766,00	100	56.250.556.196,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	77,79	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	73,52	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar (%)	98,74	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanelayan an kesehatan sesuai standar (%)	96,65	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai standar (%)	81,28	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai standar (%)	92,85	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	92,85	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus sesuai standar (%)	98,73	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJB) sesuai standar (%)	51,65	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar (%)	76,64	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	70,14	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK (%)	0	48	51		54		57		60		63		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrien Supplementation (MMS) (%)	0	82	84		86		88		90		92		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase Ibu Hamil Mengkonsumsi Makanan Beragam (%)	0	62	64		66		68		70		72		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase Pemeriksaan Kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan (%)	0	72	74		76		78		80		82		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase Praktik Inisiasi Menyusu Dini (%)	0	81	82		83		84		85		86		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Bayi Usia 0-5 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif (%)	0	74	75		76		77		78		79		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) beragam setelah 6 bulan (%)	0	71	72		73		74		75		76		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase Pemberian ASI Eksklusif sampai 6 bulan, dilanjutkan sampai 2 tahun (%)	0	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase BADUTA gizi Buruk yang mendapat pelayanan tata laksana Gizi Buruk (%)	0	67	68		69		70		71		72		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase BADUTA gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi (%)	0	45	48		51		54		57		60		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase BADUTA yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%)	0	62	64		66		68		70		72		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase BADUTA mendapatkan imunisasi rutin lengkap (%)	0	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada BADUTA (%)	0	80	90		95		96		98		100		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase Pemberian Obat cacing pada anak BADUTA (0-24 Bulan) (%)	0	75	75		75		75		75		75		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase Tatalaksana BALITA yang bermasalah gizi (%)	0	84	86		88		90		90		90		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase Stimulasi dan pemantauan perkembangan pada BALITA (%)	0	62	64		66		68		70		72		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi (%)	0	45	48		51		54		55		56		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 24-59 bulan (%)	0	80	90		95		96		98		100		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase Penemuan kasus pneumonia balita (%)	0	25	30		34		36		38		40		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase Pemberian obat cacing pada anak BALITA (1-4 Thn) (%)	0	75	78		80		83		85		87		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase Remaja putri yang mengkonsumsi TTD (%)	0	76	78		80		82		84		86		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase Remaja putri yang diskriming anemia (%)	0	56	57		60		63		65		67		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase Akses terhadap air minum aman (%)	0	65	67		70		72		75		78		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase Akses terhadap sanitasi aman (%)	0	7	8		9		10		11		12		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 Tahun (%)	0	0,1	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	0	13,3	13,3		13,3		13,3		13,3		13,3		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	0	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	0	76,6	76,6		76,6		76,6		76,6		76,6		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	0	65	67		69		71		73		75		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	0	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	0	70,5	70,5		70,5		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	0	60	60,5		61		61,5		62		62,5		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	0	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Cakupan penemuan kasus TB (%)	64,7	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase ODHA menjalani terapi ARV (%)	81	95	95		95		95		95		95		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Kasus Indigenous (Kasus)	0	0	0		0		0		0		0		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					6.987.300.000,00		6.762.772.624,00		6.885.601.096,00		6.991.914.249,00		7.031.608.679,00	
Meningkatnya Pelatihan wajib yang dilaksanakan rumah sakit	Persentase pelatihan wajib yang dilaksanakan rumah sakit (%)	80	100	100	2.040.000.000,00	100	2.057.234.515,00	100	2.180.062.987,00	100	2.286.376.140,00	100	2.326.070.570,00	1.02.0.00.0.00.02.00 00 - RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD
TERCAPAINYA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio)	0:0	4.8:1000	4.8:1000	4.947.300.000,00	4.8:1000	4.705.538.109,00	4.8:1000	4.705.538.109,00	4.9:1000	4.705.538.109,00	5.0:1000	4.705.538.109,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	0	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan		
	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)	0	90	90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan		
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					512.420.000,00		598.862.000,00		598.862.000,00		598.862.000,00		598.862.000,00	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
TERCAPAINYA SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP IRT sesuai standar (%)	0	100	100	512.420.000,00	100	598.862.000,00	100	598.862.000,00	100	598.862.000,00	100	598.862.000,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
	Persentase pangan industri rumah tangan aman dan bermutu (%)	0	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan		
	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	0	75	75		75		80		80		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan		
	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	0	100	100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan		
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	0	75	75		75		75		75		1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan		
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1.182.100.000,00		1.315.410.000,00		1.315.410.000,00		1.315.410.000,00		1.315.410.000,00	
TERCAPAINYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10- 21 Tahun (Persentase)	0	10,5	10,2	1.182.100.000,00	10	1.315.410.000,00	9,8	1.315.410.000,00	9,5	1.315.410.000,00	9,2	1.315.410.000,00	1.02.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					46.310.596.991,0 0		45.967.998.967,0 0		46.183.059.978,0 0		45.614.006.550,0 0		45.614.006.550,0 0	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.325.733.111,00		7.373.652.111,00		7.373.652.111,00		7.373.652.111,00		7.373.652.111,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	66	66	67	7.325.733.111,00	68	7.373.652.111,00	69	7.373.652.111,00	70	7.373.652.111,00	71	7.373.652.111,00	1.03.1.04.2.10.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					1.668.641.000,00		1.568.641.000,00		1.568.641.000,00		1.568.641.000,00		1.568.641.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten (%)	64,93	64,93	64,63	1.668.641.000,00	72,60	1.568.641.000,00	82,36	1.568.641.000,00	86,33	1.568.641.000,00	88,19	1.568.641.000,00	1.03.1.04.2.10.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					10.729.224.250,0 0		10.729.224.250,0 0		10.975.600.390,0 0		10.729.224.250,0 0		10.729.224.250,0 0	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	32,40	33,40	34,41	10.729.224.250,0 0	35,42	10.729.224.250,0 0	36,43	10.975.600.390,0 0	37,40	10.729.224.250,0 0	37,40	10.729.224.250,0 0	1.03.1.04.2.10.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00	
Meningkatnya ketersediaan sarana pendukung TPA/TPST/SPA/TP S-3R/TPS	Persentase peningkatan sarana pendukung TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS (%)	69	70	71	550.000.000,00	72	550.000.000,00	73	550.000.000,00	74	550.000.000,00	74	550.000.000,00	1.03.1.04.2.10.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					4.972.992.000,00		3.972.992.000,00		3.972.992.000,00		3.972.992.000,00		3.972.992.000,00	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	81,47	82,00	82,50	4.972.992.000,00	83,00	3.972.992.000,00	83,50	3.972.992.000,00	84,00	3.972.992.000,00	84,50	3.972.992.000,00	1.03.1.04.2.10.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					0,00		4.500.000.000,00		4.500.000.000,00		286.070.570,00		286.070.570,00	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	50,1	49,01	50,21	0,00	50,31	4.500.000.000,00	50,41	4.500.000.000,00	50,51	286.070.570,00	50,61	286.070.570,00	1.03.1.04.2.10.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					49.040.000,00		49.040.000,00		49.040.000,00		49.040.000,00		49.040.000,00	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase kepatuhan PBG dan SLF kabupaten (%)	100	100	100	49.040.000,00	100	49.040.000,00	100	49.040.000,00	100	49.040.000,00	100	49.040.000,00	1.03.1.04.2.10.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					100.000.000,00		500.000.000,00		0,00		0,00		0,00	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Kawasan Yang Ditata (%)	86,80	86,87	86,88	100.000.000,00	86,89	500.000.000,00	86,90	0,00	87,01	0,00	87,70	0,00	1.03.1.04.2.10.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN					20.157.149.430,00		15.786.632.406,00		16.255.317.277,00		20.146.569.419,00		20.146.569.419,00	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (%)	40	47	54	20.157.149.430,00	63	15.786.632.406,00	72	16.255.317.277,00	83	20.146.569.419,00	83	20.146.569.419,00	1.03.1.04.2.10.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					0,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	2	2	2	0,00	2	180.000.000,00	2	180.000.000,00	2	180.000.000,00	2	180.000.000,00	1.03.1.04.2.10.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAA N PENATAAN RUANG					757.817.200,00		757.817.200,00		757.817.200,00		757.817.200,00		757.817.200,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang (%)	75	76	78	757.817.200,00	79	757.817.200,00	80	757.817.200,00	82	757.817.200,00	85	757.817.200,00	1.03.1.04.2.10.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					1.868.946.011,00		1.977.678.550,00		1.868.946.011,00		2.544.312.592,00		2.584.007.022,00	
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					873.885.000,00		873.885.000,00		873.885.000,00		1.549.251.581,00		1.588.946.011,00	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	0,76	7,47	8,62	873.885.000,00	11,49	873.885.000,00	14,37	873.885.000,00	17,24	1.549.251.581,00	20,11	1.588.946.011,00	1.03.1.04.2.10.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					995.061.011,00		1.103.793.550,00		995.061.011,00		995.061.011,00		995.061.011,00	
Meningkatnya penanganan terhadap rumah layak huni	Persentase Rumah Layak Huni Yang Tertangani (%)	35,13	35,42	40	995.061.011,00	60	1.103.793.550,00	80	995.061.011,00	90	995.061.011,00	100	995.061.011,00	1.03.1.04.2.10.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					10.390.789.973,0 0		10.477.459.003,0 0		10.690.115.947,0 0		10.902.742.253,0 0		10.982.131.113,0 0	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.665.993.293,00		7.694.163.309,00		7.648.991.780,00		7.925.304.933,00		7.678.204.593,00	





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	0	60	62	2.723.408.675,00	64	2.723.408.676,00	66	2.727.908.675,00	68	2.816.908.675,00	70	2.727.908.675,00	1.05.0.00.0.00.04.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	56	56	80	4.942.584.618,00	85	4.970.754.633,00	90	4.921.083.105,00	95	5.108.396.258,00	100	4.950.295.918,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					615.935.500,00		683.500.000,00		763.500.000,00		733.500.000,00		956.294.770,00	
1. . Meningkatkan Keptuhan Masyarakat terhadap PERDA dan PERKADA, 2. Meningkatkan Penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, 3.Meningkatnya Perlindungan terhadap Masyarakat, dan 4. Meningkatkan Kapasitas SDM PPNS	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	615.935.500,00	100	683.500.000,00	100	763.500.000,00	100	733.500.000,00	100	956.294.770,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (%)	100	100	100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.01.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja		
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	100	100	100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.01.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja		
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.01.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja		
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGA N BENCANA					1.458.861.180,00		1.499.795.694,00		1.601.624.167,00		1.618.937.320,00		1.747.631.750,00	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	0	100	100	1.458.861.180,00	100	1.499.795.694,00	100	1.601.624.167,00	100	1.618.937.320,00	100	1.747.631.750,00	1.05.0.00.0.00.04.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	0	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.04.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.04.00 00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGA N, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					650.000.000,00		600.000.000,00		676.000.000,00		625.000.000,00		600.000.000,00	
Meningkatnya lanyanan pencegahan Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	100	100	100	650.000.000,00	100	600.000.000,00	100	676.000.000,00	100	625.000.000,00	100	600.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.00 00 - Satuan Polisi Pamong Praja
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					7.176.450.000,00		7.188.350.000,00		7.232.250.000,00		7.267.600.000,00		7.303.058.430,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.752.350.000,00		5.752.350.000,00		5.826.100.000,00		5.828.975.000,00		5.828.070.000,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	60,54	70	80	5.752.350.000,00	85	5.752.350.000,00	90	5.826.100.000,00	95	5.828.975.000,00	100	5.828.070.000,00	1.06.2.13.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					78.100.000,00		80.000.000,00		90.350.000,00		92.625.000,00		93.720.000,00	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) (%)	5,9	5,9	6,0	78.100.000,00	7,5	80.000.000,00	10	90.350.000,00	12,5	92.625.000,00	14,00	93.720.000,00	1.06.2.13.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					400.000.000,00		400.000.000,00		387.400.000,00		396.000.000,00		435.888.430,00	
Persentase Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	97	97	98	400.000.000,00	99	400.000.000,00	100	387.400.000,00	100	396.000.000,00	100	435.888.430,00	1.06.2.13.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		1.06.2.13.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
	Persentase Lanjut Usia Yang Terpenuhi Kebutunan Dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		1.06.2.13.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
	Persentase Gelandangan dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	85	85	86		87		88		89		100		1.06.2.13.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					336.000.000,00		336.000.000,00		319.400.000,00		339.000.000,00		334.380.000,00	
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	66,84	71,00	71,50	336.000.000,00	72,00	336.000.000,00	73,50	319.400.000,00	75,00	339.000.000,00	76,50	334.380.000,00	1.06.2.13.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					550.000.000,00		560.000.000,00		559.000.000,00		560.000.000,00		560.000.000,00	





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	550.000.000,00	100	560.000.000,00	100	559.000.000,00	100	560.000.000,00	100	560.000.000,00	1.06.2.13.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					60.000.000,00		60.000.000,00		50.000.000,00		51.000.000,00		51.000.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan (Persentase)	9,00	9,00	10,00	60.000.000,00	10,50	60.000.000,00	11,00	50.000.000,00	11,50	51.000.000,00	12,00	51.000.000,00	1.06.2.13.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					4.308.616.156,00		4.313.150.671,00		4.369.479.143,00		4.475.792.296,00		4.515.486.726,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.547.464.856,00		3.530.975.756,00		3.523.182.756,00		3.554.182.756,00		3.524.682.756,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	0	70	79,99	3.547.464.856,00	80	3.530.975.756,00	89,99	3.523.182.756,00	90	3.554.182.756,00	91,5	3.524.682.756,00	2.17.2.07.3.32.01.00 00 - Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
SDM yang efisien, kompeten dan siap secara strategis untuk mendukung pertumbuhan dan berkelanjutan organisasi	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	0	1	3	0,00	5	10.000.000,00	8	10.000.000,00	12	10.000.000,00	16	10.000.000,00	2.17.2.07.3.32.01.00 00 - Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					711.755.950,00		478.305.215,00		530.796.387,00		471.109.540,00		672.303.970,00	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya proses pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	0	30	38	711.755.950,00	45	478.305.215,00	53	530.796.387,00	59	471.109.540,00	64	672.303.970,00	2.17.2.07.3.32.01.00 00 - Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					15.000.000,00		32.295.000,00		41.000.000,00		176.000.000,00		41.000.000,00	
Terfasilitasinya penempatan tenaga kerja yang dilindungi	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	0	20	25	15.000.000,00	30	32.295.000,00	35	41.000.000,00	40	176.000.000,00	45	41.000.000,00	2.17.2.07.3.32.01.00 00 - Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					34.395.350,00		261.574.700,00		264.500.000,00		264.500.000,00		267.500.000,00	
Terlaksananya organisasi yang untung, inovatif, dan bertanggungjawab yang terjamin eksistensinya dalam jangka panjang	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Hubungan Industrial Yang Layak (%)	0	40	45	34.395.350,00	50	261.574.700,00	55	264.500.000,00	60	264.500.000,00	65	267.500.000,00	2.17.2.07.3.32.01.00 00 - Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Persentase Tenaga Kerja Informal Yang Terlindungi (%)	0	25	30		35		40		45		50		2.17.2.07.3.32.01.00 00 - Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					4.445.962.386,00		4.527.117.701,00		4.602.527.861,00		4.677.569.726,00		4.704.297.330,00	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.738.243.886,00		3.763.675.701,00		3.802.713.661,00		3.856.585.793,00		3.861.413.756,00	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	60	66	67	3.738.243.886,00	68	3.763.675.701,00	69	3.802.713.661,00	70	3.856.585.793,00	71	3.861.413.756,00	2.08.2.14.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					163.541.000,00		169.720.000,00		173.500.000,00		176.872.021,00		179.800.000,00	
Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	11,2	11,2	12,4	163.541.000,00	13,6	169.720.000,00	14,8	173.500.000,00	16	176.872.021,00	16	179.800.000,00	2.08.2.14.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					206.398.000,00		211.264.800,00		213.311.280,00		215.770.450,00		221.323.574,00	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	206.398.000,00	100	211.264.800,00	100	213.311.280,00	100	215.770.450,00	100	221.323.574,00	2.08.2.14.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					16.500.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		21.500.000,00		22.500.000,00	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak	Cakupan Layanan Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Desa/Kelurahan Rawan Kekerasan Anak dan Perempuan (Persentase)	2	2	20	16.500.000,00	44	18.000.000,00	60	20.000.000,00	80	21.500.000,00	100	22.500.000,00	2.08.2.14.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN					10.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
SISTEM DATA GENDER DAN ANAK														
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	11.000.000,00	100	12.000.000,00	100	13.000.000,00	2.08.2.14.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					96.479.500,00		107.500.000,00		109.500.000,00		110.500.000,00		111.500.000,00	
Terjaminnya pemenuhan hak anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	65,58	67,57	68,91	96.479.500,00	70,25	107.500.000,00	71,59	109.500.000,00	72,91	110.500.000,00	72,91	111.500.000,00	2.08.2.14.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					214.800.000,00		246.957.200,00		272.502.920,00		284.341.462,00		294.760.000,00	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan kekerasan exploitasi perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	79,91	81,44	82,69	214.800.000,00	83,94	246.957.200,00	85,19	272.502.920,00	86,44	284.341.462,00	86,44	294.760.000,00	2.08.2.14.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					29.175.400,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00	
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					2.190.150,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	0	85,36	85,79	2.190.150,00	86,23	50.000.000,00	86,66	50.000.000,00	87,10	50.000.000,00	87,52	50.000.000,00	3.27.2.09.0.00.01.00 00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					26.985.250,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00	
Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	0	22,22	6,17	26.985.250,00	4,94	60.000.000,00	3,7	60.000.000,00	2,47	60.000.000,00	1,23	60.000.000,00	3.27.2.09.0.00.01.00 00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	100	100	100	0,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	3.27.2.09.0.00.01.00 00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					612.600.000,00		612.600.000,00		612.600.000,00		612.600.000,00		612.600.000,00	
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					512.600.000,00		412.600.000,00		412.600.000,00		412.600.000,00		412.600.000,00	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (%)	100	100	100	512.600.000,00	100	412.600.000,00	100	412.600.000,00	100	412.600.000,00	100	412.600.000,00	1.03.1.04.2.10.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Pengelolaan Tanah Kosong (%)	37,46	37,46	37,46	100.000.000,00	40	200.000.000,00	50	200.000.000,00	60	200.000.000,00	70	200.000.000,00	1.03.1.04.2.10.01.00 00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					8.242.826.473,00		8.284.394.388,00		8.390.615.860,00		8.496.929.013,00		8.515.079.443,00	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.196.143.273,00		6.300.491.236,00		6.309.902.109,00		6.288.768.098,00		6.298.444.820,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	60	65	67	6.196.143.273,00	70	6.300.491.236,00	74	6.309.902.109,00	78	6.288.768.098,00	80	6.298.444.820,00	2.11.2.15.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					418.154.000,00		324.000.000,00		276.500.000,00		471.500.000,00		278.500.000,00	
Meningkatnya integrasi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD RTRW, dan RDTR) yang memuat aspek lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian RPPLH, KLHS dan DDDTLH (%)	100	75	75	418.154.000,00	75	324.000.000,00	100	276.500.000,00	100	471.500.000,00	100	278.500.000,00	2.11.2.15.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					247.697.600,00		232.935.000,00		294.935.000,00		224.935.000,00		300.935.000,00	
Menurunnya tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten/Kota untuk mendukung kualitas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan	Persentase parameter pengukuran air yang memenuhi baku mutu yang ditetapan dibandingkan dengan parameter pengukuran secara keseluruhan (%)	90,23	91,41	92,58	247.697.600,00	93,36	232.935.000,00	94,14	294.935.000,00	95,31	224.935.000,00	96,48	300.935.000,00	2.11.2.15.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)					128.688.800,00		134.300.352,00		139.515.370,00		141.705.677,00		156.173.904,00	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Cakupan Pengelolaan Taman Kehati dan Ruang Terbuka Hijau yang berada di dalam kewenangan pengelolaan Kabupaten Belu (%)	1,46	1,46	1,46	128.688.800,00	1,46	134.300.352,00	1,46	139.515.370,00	1,46	141.705.677,00	1,46	156.173.904,00	2.11.2.15.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					0,00		15.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		15.000.000,00	
Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase Jumlah limbah B3 yang terkelola (%)	0	29,41	29,41	0,00	35,29	15.000.000,00	41,18	25.000.000,00	47,06	25.000.000,00	52,94	15.000.000,00	2.11.2.15.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					32.830.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten (%)	0	83,33	83,33	32.830.000,00	88,89	20.000.000,00	88,89	20.000.000,00	94,44	20.000.000,00	100	20.000.000,00	2.11.2.15.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK					0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH														
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokak, pengetahuan tradisional dan HAK MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	18,75	18,75	0,00	37,5	10.000.000,00	56,25	10.000.000,00	75	10.000.000,00	100	10.000.000,00	2.11.2.15.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase peserta pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup yang mengalami peningkatan skor pemahaman dan keterampilan dibandingkan sebelum mengikuti kegiatan (%)	0	83,33	91,67	0,00	96,67	5.000.000,00	96,67	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	2.11.2.15.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase penerima penghargaan lingkungan hidup yang melanjutkan dan/atau mengembangkan kegiatan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan setelah menerima penghargaan (%)	0	20	40	0,00	60	10.000.000,00	80	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	2.11.2.15.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai prosedur dan waktu yang telah ditetapkan (%)	0	10,33	22,83	0,00	38,04	5.000.000,00	55,98	5.000.000,00	76,63	5.000.000,00	100	5.000.000,00	2.11.2.15.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					1.219.312.800,00		1.227.667.800,00		1.294.763.381,00		1.295.020.238,00		1.416.025.719,00	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Presentase volume sampah yang berhasil dikurangi melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycle) per tahun (%)	13,03	0,05	0,07	1.219.312.800,00	0,09	1.227.667.800,00	0,11	1.294.763.381,00	0,13	1.295.020.238,00	0,15	1.416.025.719,00	2.11.2.15.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					3.917.720.330,00		3.971.254.845,00		4.077.583.317,00		4.183.896.470,00		4.223.590.900,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.431.054.780,00		3.450.854.780,00		3.576.186.088,00		3.583.595.250,00		3.724.399.100,00	
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	60,54	70,00	75,50	3.431.054.780,00	80	3.450.854.780,00	90	3.576.186.088,00	95	3.583.595.250,00	100	3.724.399.100,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					217.950.250,00		251.684.765,00		158.681.929,00		250.850.000,00		133.476.500,00	
Meningkatkan Kualitas layanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk (%)	47,72	51,85	58,29	217.950.250,00	59,19	251.684.765,00	60,99	158.681.929,00	61,24	250.850.000,00	62,64	133.476.500,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					167.737.500,00		167.737.500,00		188.737.500,00		188.737.500,00		211.737.500,00	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatkan Kualitas layanan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (%)	79,15	80,15	81,15	167.737.500,00	82,39	167.737.500,00	83,62	188.737.500,00	84,85	188.737.500,00	85,09	211.737.500,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					90.997.800,00		90.997.800,00		143.997.800,00		149.735.720,00		143.997.800,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang di manfaatkan (%)	100	100	100	90.997.800,00	100	90.997.800,00	100	143.997.800,00	100	149.735.720,00	100	143.997.800,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					9.980.000,00		9.980.000,00		9.980.000,00		10.978.000,00		9.980.000,00	
Meningkatnya Kualitas Data Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	100	100	100	9.980.000,00	100	9.980.000,00	100	9.980.000,00	100	10.978.000,00	100	9.980.000,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					1.236.260.527,00		1.282.095.042,00		1.344.523.514,00		1.415.486.667,00		1.419.722.667,00	
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					151.265.485,00		170.000.000,00		122.000.000,00		124.300.000,00		124.300.000,00	
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	69	100	100	151.265.485,00	100	170.000.000,00	100	122.000.000,00	100	124.300.000,00	100	124.300.000,00	1.06.2.13.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					65.000.000,00		70.000.000,00		97.500.000,00		100.000.000,00		104.000.000,00	
Meningkatnya Efektifitas Kerjasama Desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (Persentase)	0	2,89	2,89	65.000.000,00	4,34	70.000.000,00	5,79	97.500.000,00	7,24	100.000.000,00	8,69	104.000.000,00	1.06.2.13.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					504.625.065,00		514.625.065,00		573.500.000,00		594.122.667,00		594.122.667,00	





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DESA														
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	71,01	72,69	75,36	504.625.065,00	78,26	514.625.065,00	81,15	573.500.000,00	84,05	594.122.667,00	86,95	594.122.667,00	1.06.2.13.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					515.369.977,00		527.469.977,00		551.523.514,00		597.064.000,00		597.300.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarkat Hukum adat dalam Pembangunan (%)	16,66	16,66	33,33	515.369.977,00	50	527.469.977,00	66,66	551.523.514,00	83,33	597.064.000,00	100	597.300.000,00	1.06.2.13.0.00.01.00 00 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					3.515.921.000,00		3.487.700.200,00		3.518.618.512,00		3.549.889.800,00		3.562.856.626,00	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					178.200.000,00		183.500.000,00		187.020.000,00		190.540.000,00		196.620.000,00	
Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/(TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	2,14	2,12	2,11	178.200.000,00	2,11	183.500.000,00	2,11	187.020.000,00	2,10	190.540.000,00	2,10	196.620.000,00	2.08.2.14.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	19,40	19.40-19.40	19-19		18.60-18.60		18.20-18.20		17.80-17.80		17.80-17.80		2.08.2.14.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					2.183.161.000,00		2.149.640.200,00		2.177.038.512,00		2.204.789.800,00		2.211.676.626,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR (%))	51	54	57	2.183.161.000,00	60	2.149.640.200,00	63	2.177.038.512,00	66	2.204.789.800,00	69	2.211.676.626,00	2.08.2.14.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	61,80	61,80	61,90		62,00		62,10		62,20		62,20		
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	10,50	10,50	9,50		9,00		8,00		8,50		8,50		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.154.560.000,00		1.154.560.000,00		1.154.560.000,00		1.154.560.000,00		1.154.560.000,00	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	55	60	65	1.154.560.000,00	70	1.154.560.000,00	75	1.154.560.000,00	80	1.154.560.000,00	80	1.154.560.000,00	2.08.2.14.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber KB (%)	50	55	60		65		70		75		80		2.08.2.14.0.00.01.00 00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					701.132.400,00		714.899.000,00		715.006.000,00		715.006.000,00		736.550.000,00	
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					701.132.400,00		714.899.000,00		715.006.000,00		715.006.000,00		736.550.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase realisasi retribusi parkir terhadap potensi retribusi (%)	0	12,5	15	701.132.400,00	16,25	714.899.000,00	17,5	715.006.000,00	18,75	715.006.000,00	20	736.550.000,00	2.11.2.15.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					3.022.692.261,00		2.337.546.776,00		2.443.375.248,00		2.548.188.401,00		2.587.882.831,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.102.101.741,00		2.067.661.737,00		2.068.161.737,00		2.083.161.737,00		2.083.161.737,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	60	65	70	2.102.101.741,00	75	2.067.661.737,00	80	2.068.161.737,00	85	2.083.161.737,00	90	2.083.161.737,00	2.16.2.20.2.21.01.00 00 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI					246.500.000,00		140.000.000,00		172.000.000,00		200.000.000,00		212.000.000,00	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PUBLIK														
Meningkatnya sasaran penyebaran informasi publik kepada masyarakat untuk mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	65	70	75	246.500.000,00	80	140.000.000,00	85	172.000.000,00	90	200.000.000,00	100	212.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.00 00 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					674.090.520,00		129.885.039,00		203.213.511,00		265.026.664,00		292.721.094,00	
Meningkatnya layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	0	70	75	303.060.000,00	80	7.500.000,00	85	28.000.000,00	90	28.500.000,00	100	30.500.000,00	2.16.2.20.2.21.01.00 00 - Dinas Komunikasi dan Informatika
Meningkatnya PD yang terhubung dengan akses Internet yang disediakan Oleh Dinas Kominfo	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	0	80	85	371.030.520,00	90	122.385.039,00	95	175.213.511,00	100	236.526.664,00	100	262.221.094,00	2.16.2.20.2.21.01.00 00 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					139.561.000,00		119.561.000,00		169.561.000,00		169.561.000,00		169.561.000,00	
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya usaha simpan pinjam yang memiliki izin akan tunduk pada ketentuan pengawasan dan pelaporan berkala yang bertujuan melindungi kepentingan anggota	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	0	10	15	0,00	20	10.000.000,00	25	10.000.000,00	30	10.000.000,00	35	10.000.000,00	2.17.2.07.3.32.01.00 00 - Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOOPERASI					30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya kinerja pengelola koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	0	55	60	30.000.000,00	65	50.000.000,00	70	50.000.000,00	75	50.000.000,00	80	50.000.000,00	2.17.2.07.3.32.01.00 00 - Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOOPERASI					23.846.500,00		23.846.500,00		23.846.500,00		23.846.500,00		23.846.500,00	
Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten/kota	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	0	55	60	23.846.500,00	65	23.846.500,00	70	23.846.500,00	75	23.846.500,00	80	23.846.500,00	2.17.2.07.3.32.01.00 00 - Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOOPERASIAN					19.515.000,00		19.515.000,00		19.515.000,00		19.515.000,00		19.515.000,00	
Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	0	30	35	19.515.000,00	40	19.515.000,00	45	19.515.000,00	50	19.515.000,00	55	19.515.000,00	2.17.2.07.3.32.01.00 00 - Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					66.199.500,00		16.199.500,00		66.199.500,00		66.199.500,00		66.199.500,00	
Terfasilitasinya pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Persentase UMKM yang Bertransformasi dari informal ke formal (%)	0	25	30	66.199.500,00	35	16.199.500,00	50	66.199.500,00	55	66.199.500,00	60	66.199.500,00	2.17.2.07.3.32.01.00 00 - Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					3.678.205.553,00		3.666.340.068,00		3.772.668.540,00		3.878.981.693,00		3.918.676.123,00	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.376.745.053,00		3.483.340.068,00		3.569.168.540,00		3.659.981.693,00		3.679.676.123,00	
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	0	63	64	3.376.745.053,00	65	3.483.340.068,00	66	3.569.168.540,00	67	3.659.981.693,00	68	3.679.676.123,00	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					230.800.000,00		90.000.000,00		101.000.000,00		91.000.000,00		86.000.000,00	
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Persentase Realisasi Investasi terhadap pendapatan (%)	0	0	100	230.800.000,00	100	90.000.000,00	100	101.000.000,00	100	91.000.000,00	100	86.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					5.060.500,00		8.000.000,00		12.500.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal (%)	0	0	100	5.060.500,00	100	8.000.000,00	100	12.500.000,00	100	8.000.000,00	100	8.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					41.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		100.000.000,00		125.000.000,00	
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (%)	0	0	100	41.000.000,00	100	65.000.000,00	100	65.000.000,00	100	100.000.000,00	100	125.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					24.600.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terkendalinya Pelaksanaan Penanamn Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	0	0	100	24.600.000,00	100	15.000.000,00	100	20.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Data & Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal Yang Terintegrasi Secara Elektronik (%)	0	0	100	0,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					18.265.002.250,00		7.484.361.750,00		7.484.361.750,00		7.484.361.750,00		7.484.361.750,00	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					3.767.239.250,00		1.700.598.750,00		1.700.598.750,00		1.700.598.750,00		1.700.598.750,00	
Meningkatnya Kapasitas daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	0	0,10	0,15	3.767.239.250,00	0,20	1.700.598.750,00	0,25	1.700.598.750,00	0,30	1.700.598.750,00	0,35	1.700.598.750,00	1.01.2.19.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					14.497.763.000,00		5.663.763.000,00		5.663.763.000,00		5.663.763.000,00		5.663.763.000,00	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Peningkatan Prestasi Olahraga melalui Jumlah Perolehan Medali pada event Olahraga Nasional/ Internasional (Medali)	11	20	25	14.497.763.000,00	30	5.663.763.000,00	35	5.663.763.000,00	40	5.663.763.000,00	50	5.663.763.000,00	1.01.2.19.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					0,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00	





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	0	20	25	0,00	30	120.000.000,00	35	120.000.000,00	40	120.000.000,00	50	120.000.000,00	1.01.2.19.0.00.01.00 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					10.700.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					10.700.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	
Meningkatnya Persentase PD yang menggunakan data statistic dalam Menyusun perencanaan dan evaluasi Pembangunan daerah	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	55	55	60	10.700.000,00	70	6.000.000,00	80	6.000.000,00	90	6.000.000,00	100	6.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.00 - Dinas Komunikasi dan Informatika
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	45	45	60		70		80		90		100		2.16.2.20.2.21.01.00 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					7.500.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					7.500.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Meningkatnya keamanan informasi pemerintah	Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah (%)	13,5	35	50	7.500.000,00	60	3.000.000,00	70	3.500.000,00	80	5.000.000,00	90	5.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.00 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					4.213.532.514,00		4.228.170.138,00		4.290.704.201,00		4.327.204.201,00		4.427.460.912,00	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					3.239.610.246,00		3.336.696.594,00		3.397.674.444,00		3.434.174.444,00		3.421.858.144,00	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	65	66	67	3.239.610.246,00	68	3.336.696.594,00	69	3.397.674.444,00	70	3.434.174.444,00	70	3.421.858.144,00	3.26.2.22.0.00.01.00 00 - Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					870.261.718,00		672.379.394,00		683.543.657,00		683.543.657,00		794.116.668,00	
Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	19,00	20,00	20,14	870.261.718,00	40,28	672.379.394,00	60,12	683.543.657,00	80,03	683.543.657,00	100	794.116.668,00	3.26.2.22.0.00.01.00 00 - Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					103.660.550,00		209.094.150,00		199.486.100,00		199.486.100,00		201.486.100,00	
Meningkatnya cagar budaya	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	19,00	20,00	21,09	103.660.550,00	40,18	209.094.150,00	59,04	199.486.100,00	79,47	199.486.100,00	100,00	201.486.100,00	3.26.2.22.0.00.01.00 00 - Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan Museum	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Museum (%)	0	0	0	0,00	40	10.000.000,00	60	10.000.000,00	80	10.000.000,00	100	10.000.000,00	3.26.2.22.0.00.01.00 00 - Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					2.793.336.075,00		2.718.691.090,00		2.812.019.562,00		2.918.332.715,00		2.958.027.145,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.559.504.025,00		2.407.064.040,00		2.491.392.512,00		2.597.392.665,00		2.633.114.145,00	
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	60	65	68	2.559.504.025,00	70	2.407.064.040,00	73	2.491.392.512,00	75	2.597.392.665,00	80	2.633.114.145,00	2.23.2.24.0.00.01.00 00 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					233.832.050,00		311.627.050,00		320.627.050,00		320.940.050,00		324.913.000,00	
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standard nasional perpustakaan	Tingkat Kepuasan Pengguna Perpustakaan (%)	0	100	100	233.832.050,00	100	311.627.050,00	100	320.627.050,00	100	320.940.050,00	100	324.913.000,00	2.23.2.24.0.00.01.00 00 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					30.920.000,00		158.499.500,00		171.499.500,00		171.499.500,00		171.499.500,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					30.920.000,00		143.499.500,00		156.499.500,00		156.499.500,00		156.499.500,00	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Presentase Arsip yang Dimasukkan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) (%)	0	17,39	34,78	30.920.000,00	52,17	143.499.500,00	69,56	156.499.500,00	86,95	156.499.500,00	100	156.499.500,00	2.23.2.24.0.00.01.00 00 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Meningkatnya pelayanan kearsipan dan dokumen	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	0	100	100	0,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	2.23.2.24.0.00.01.00 00 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					7.501.050.349,00		7.525.326.164,00		7.538.678.636,00		7.556.581.789,00		7.567.686.219,00	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.591.098.349,00		6.651.024.164,00		6.705.672.636,00		6.706.025.789,00		6.706.030.219,00	
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	66	66	67	6.591.098.349,00	68	6.651.024.164,00	69	6.705.672.636,00	70	6.706.025.789,00	71	6.706.030.219,00	3.27.3.25.0.00.08.00 00 - Dinas Pernakan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					204.090.000,00		186.040.000,00		171.040.000,00		183.540.000,00		184.040.000,00	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap (%)	0	1,12	1,13	204.090.000,00	1,14	186.040.000,00	1,15	171.040.000,00	1,16	183.540.000,00	1,17	184.040.000,00	3.27.3.25.0.00.08.00 00 - Dinas Pernakan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					667.372.000,00		644.272.000,00		617.976.000,00		620.976.000,00		631.576.000,00	
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	0	1,02	1,03	667.372.000,00	1,04	644.272.000,00	1,05	617.976.000,00	1,06	620.976.000,00	1,07	631.576.000,00	3.27.3.25.0.00.08.00 00 - Dinas Pernakan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					0,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00	
MENINGKATNYA KELESTARIAN LAUT DAN KEANEKARAGAMA N HAYATI	Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap (%)	0	1,12	1,13	0,00	1,14	4.000.000,00	1,15	4.000.000,00	1,16	4.000.000,00	1,17	4.000.000,00	3.27.3.25.0.00.08.00 00 - Dinas Pernakan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					38.490.000,00		39.990.000,00		39.990.000,00		42.040.000,00		42.040.000,00	
MENINGKATNYA KONSUMSI IKAN OLEH MASYARAKAT	Cakupan Bina Kelompok Perikanan (Kelompok)	52	30	35	38.490.000,00	40	39.990.000,00	45	39.990.000,00	50	42.040.000,00	55	42.040.000,00	3.27.3.25.0.00.08.00 00 - Dinas Pernakan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					846.188.200,00		884.485.091,00		928.279.500,00		998.092.653,00		937.530.372,00	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					250.736.450,00		147.642.500,00		156.142.500,00		171.979.153,00		150.642.500,00	
Meningkatnya Lama Kunjungan Wisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	64,72	69	70	250.736.450,00	72	147.642.500,00	74	156.142.500,00	75	171.979.153,00	76	150.642.500,00	3.26.2.22.0.00.01.00 00 - Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					254.610.750,00		242.950.000,00		242.950.000,00		242.950.000,00		242.950.000,00	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	18,20	19,00	19,45	254.610.750,00	40,24	242.950.000,00	59,98	242.950.000,00	80,25	242.950.000,00	100,00	242.950.000,00	3.26.2.22.0.00.01.00 00 - Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					150.000.000,00		228.687.000,00		228.687.000,00		272.663.500,00		215.139.000,00	
Meningkatnya Jumlah Hak Kekayaan Intelektua	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	3,00	4,00	5,00	150.000.000,00	7,25	228.687.000,00	12,25	228.687.000,00	15,45	272.663.500,00	25,50	215.139.000,00	3.26.2.22.0.00.01.00 00 - Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					190.841.000,00		265.205.591,00		300.500.000,00		310.500.000,00		328.798.872,00	
Meningkatnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	9,00	9,45	10,00	190.841.000,00	15,00	265.205.591,00	17,50	300.500.000,00	20,00	310.500.000,00	25,00	328.798.872,00	3.26.2.22.0.00.01.00 00 - Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					21.550.987.746,0 0		21.519.356.361,0 0		21.718.660.833,0 0		21.913.383.986,0 0		21.981.668.416,0 0	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.650.383.096,0 0		11.349.111.861,0 0		11.355.440.333,0 0		11.361.753.486,0 0		11.401.447.916,0 0	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	0	66	67	11.650.383.096,0 0	68	11.349.111.861,0 0	69	11.355.440.333,0 0	70	11.361.753.486,0 0	70	11.401.447.916,0 0	3.27.2.09.0.00.01.00 00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					4.035.878.900,00		4.145.000.000,00		4.045.350.000,00		4.182.010.000,00		4.395.600.000,00	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Padi (Ton)	20.159	20.159,39	21.167,36	1.369.962.600,00	22.225,73	1.700.000.000,00	23.337	1.500.000.000,00	24.503,86	1.550.000.000,00	25.729,05	1.750.000.000,00	3.27.2.09.0.00.01.00 00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Jumlah Produksi Jagung (Ton)	36.409,03	36.409,03	38.229,48		40.140,96		42.148		48.470,20		48.954,90		3.27.2.09.0.00.01.00 00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Meningkatnya Populasi Ternak Sapi/Babi/Kambing	Persentase Peningkatan Populasi Sapi (%)	0	1,01	1,02	2.665.916.300,00	1,03	2.445.000.000,00	1,05	2.545.350.000,00	1,06	2.632.010.000,00	1,07	2.645.600.000,00	3.27.3.25.0.00.08.00 00 - Dinas Pernakan Dan Perikanan
	Persentase Peningkatan populasi babi (%)	0	1,2	1,4		1,5		1,6		1,8		2		3.27.3.25.0.00.08.00 00 - Dinas Pernakan Dan Perikanan
	Persentase Peningkatan populasi kambing (%)	0	1,02	1,03		1,04		1,05		1,06		1,07		3.27.3.25.0.00.08.00 00 - Dinas Pernakan Dan Perikanan
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					3.982.750.000,00		4.017.400.000,00		4.283.550.000,00		4.334.300.000,00		4.134.300.000,00	
Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	0	0	0	3.970.000.000,00	0	3.885.000.000,00	5.000	4.185.000.000,00	0	4.235.000.000,00	0	4.035.000.000,00	3.27.2.09.0.00.01.00 00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Meningkatnya Populasi Ternak Sapi/Babi/Kambing	Persentase Peningkatan Populasi Sapi (%)	0	1,01	102	12.750.000,00	1,03	132.400.000,00	1,05	98.550.000,00	1,06	99.300.000,00	1,07	99.300.000,00	3.27.3.25.0.00.08.00 00 - Dinas Pernakan Dan Perikanan
	Persentase Peningkatan populasi babi (%)	0	1,2	1,4		1,5		1,6		1,8		2		3.27.3.25.0.00.08.00 00 - Dinas Pernakan Dan Perikanan
	Persentase Peningkatan populasi kambing (%)	0	1,02	1,03		1,04		1,05		1,06		1,07		3.27.3.25.0.00.08.00 00 - Dinas Pernakan Dan Perikanan
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT					1.543.119.500,00		1.677.844.500,00		1.699.820.500,00		1.700.820.500,00		1.715.820.500,00	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
VETERINER														
Meningkatnya Populasi Ternak Sapi/Babi/Kambing	Persentase Peningkatan Populasi Sapi (%)	0	1,01	1,02	1.543.119.500,00	1,03	1.677.844.500,00	1,05	1.699.820.500,00	1,06	1.700.820.500,00	1,07	1.715.820.500,00	3.27.3.25.0.00.08.00 00 - Dinas Pernakan Dan Perikanan
	Persentase Peningkatan populasi babi (%)	0	1,2	1,4		1,5		1,6		1,8		2		3.27.3.25.0.00.08.00 00 - Dinas Pernakan Dan Perikanan
	Persentase Peningkatan populasi kambing (%)	0	1,02	1,03		1,04		1,05		1,06		1,07		3.27.3.25.0.00.08.00 00 - Dinas Pernakan Dan Perikanan
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGA N BENCANA PERTANIAN					80.000.000,00		80.000.000,00		81.000.000,00		81.000.000,00		81.000.000,00	
Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	0	100	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	3.27.2.09.0.00.01.00 00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		3.27.2.09.0.00.01.00 00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Meningkatnya Populasi Ternak Sapi/Babi/Kambing	Persentase Peningkatan Populasi Sapi (%)	0	1,01	1,02	0,00	1,03	0,00	1,05	1.000.000,00	1,06	1.000.000,00	1,07	1.000.000,00	3.27.3.25.0.00.08.00 00 - Dinas Pernakan Dan Perikanan
	Persentase Peningkatan populasi babi (%)	0	1,2	1,4		1,5		1,6		1,8		2		3.27.3.25.0.00.08.00 00 - Dinas Pernakan Dan Perikanan
	Persentase Peningkatan populasi kambing (%)	0	1,02	1,03		1,04		1,05		1,06		1,07		3.27.3.25.0.00.08.00 00 - Dinas Pernakan Dan Perikanan
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					0,00		0,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Populasi Ternak Sapi/Babi/Kambing	Persentase Peningkatan populasi babi (%)	0	1,2	1,4	0,00	1,5	0,00	1,6	3.500.000,00	1,8	3.500.000,00	2	3.500.000,00	3.27.3.25.0.00.08.00 00 - Dinas Pernakan Dan Perikanan
	Persentase Peningkatan Populasi Sapi (%)	0	1,01	1,02		1,03		1,05		1,06		1,07		3.27.3.25.0.00.08.00 00 - Dinas Pernakan Dan Perikanan
	Persentase Peningkatan populasi kambing (%)	0	1,02	1,03		1,04		1,05		1,06		1,07		3.27.3.25.0.00.08.00 00 - Dinas Pernakan Dan Perikanan
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					258.856.250,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	0	6,90	10,34	258.856.250,00	17,24	250.000.000,00	20,69	250.000.000,00	24,14	250.000.000,00	27,59	250.000.000,00	3.27.2.09.0.00.01.00 00 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					3.802.054.609,00		3.640.039.759,00		3.802.467.059,00		3.850.789.059,00		3.897.789.059,00	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.371.298.509,00		3.385.461.759,00		3.507.889.059,00		3.491.189.059,00		3.538.189.059,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	56	66	67	3.371.298.509,00	68	3.385.461.759,00	69	3.507.889.059,00	70	3.491.189.059,00	70	3.538.189.059,00	3.31.3.30.0.00.02.00 00 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					265.778.100,00		54.600.000,00		94.600.000,00		129.600.000,00		129.600.000,00	
Meningkatnya Penerimaan Retribusi Pasar	Nilai Penerimaan Retribusi Pasar (Milyar Rupiah)	1,80	2,65	2,65	265.778.100,00	2,75	54.600.000,00	2,80	94.600.000,00	2,90	129.600.000,00	3	129.600.000,00	3.31.3.30.0.00.02.00 00 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN					0,00		35.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
BARANG PENTING														
Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	0	0	0	0,00	5,88	35.000.000,00	8,82	35.000.000,00	11,76	40.000.000,00	14,71	40.000.000,00	3.31.3.30.0.00.02.00 00 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					72.007.500,00		72.007.500,00		72.007.500,00		85.000.000,00		85.000.000,00	
Meningkatnya Ekspor Bersih Perdagangan	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Milyar Rupiah)	204,486	211,163	214,629	72.007.500,00	215,386	72.007.500,00	219,694	72.007.500,00	224,088	85.000.000,00	228,570	85.000.000,00	3.31.3.30.0.00.02.00 00 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					92.970.500,00		92.970.500,00		92.970.500,00		105.000.000,00		105.000.000,00	
Meningkatnya Alat Ukur Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	Persentase Alat Ukur Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang Bertanda Tera Sah dan Berlaku (%)	0	70,56	73,77	92.970.500,00	76,97	92.970.500,00	80,18	92.970.500,00	83,39	105.000.000,00	89,80	105.000.000,00	3.31.3.30.0.00.02.00 00 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.693.560.000,00		1.901.309.365,00		1.845.210.537,00		1.903.201.690,00		1.895.896.120,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.693.560.000,00		1.776.309.365,00		1.750.210.537,00		1.808.201.690,00		1.800.896.120,00	
Meningkatnya Industri Kecil Menengah	Persentase Meningkatnya IKM (%)	17	8	10	1.693.560.000,00	12	1.776.309.365,00	13	1.750.210.537,00	15	1.808.201.690,00	17	1.800.896.120,00	3.31.3.30.0.00.02.00 00 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					0,00		75.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya IKM yang memiliki izin usaha	Persentase Meningkatnya IKM yang Memiliki Ijin Usaha (%)	0	0	0	0,00	16	75.000.000,00	18	50.000.000,00	21	50.000.000,00	22	50.000.000,00	3.31.3.30.0.00.02.00 00 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					0,00		50.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00	
Meningkatnya IKM yang mendaftarkan SIINAS	Persentase Meningkatnya IKM yang Mendaftarkan SINNAS (%)	0	0	0	0,00	6,90	50.000.000,00	9,20	45.000.000,00	20,34	45.000.000,00	11,49	45.000.000,00	3.31.3.30.0.00.02.00 00 - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					130.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00	
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					0,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
Tersedianya Rencana KawasanTransmigrasi yang komprehensif dan legal.	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi (Persentase)	0	0	3	0,00	3	80.000.000,00	5	80.000.000,00	5	80.000.000,00	5	80.000.000,00	2.17.2.07.3.32.01.00 00 - Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					130.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
Terlaksananya pembinaan satuan permukiman yang dikembangkan	Persentase Transmigran yang dibina dan diberdayakan (%)	0	28	28	130.000.000,00	28	80.000.000,00	28	80.000.000,00	28	80.000.000,00	28	80.000.000,00	2.17.2.07.3.32.01.00 00 - Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					23.080.837.441,00		21.982.248.074,00		22.939.204.325,00		23.896.022.703,00		24.253.272.571,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					19.841.628.541,00		20.100.069.359,00		20.489.375.709,00		20.386.761.709,00		20.885.620.357,00	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan tata kelola organisasi pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	0	0	80	19.841.628.541,0 0	85	20.100.069.359,0 0	90	20.489.375.709,0 0	95	20.386.761.709,0 0	100	20.885.620.357,0 0	4.01.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat Daerah
	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	0	0	40		46		50		53		55		4.01.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					2.957.103.400,00		1.554.263.215,00		1.977.803.041,00		2.890.031.833,00		2.733.478.596,00	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Produk Hukum yang Dihasilkan	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	0	75	80	2.957.103.400,00	85	1.554.263.215,00	90	1.977.803.041,00	95	2.890.031.833,00	100	2.733.478.596,00	4.01.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat Daerah
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	0	0	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat Daerah
	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					282.105.500,00		327.915.500,00		472.025.575,00		619.229.161,00		634.173.618,00	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan, Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dan Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	0	0	100	282.105.500,00	100	327.915.500,00	100	472.025.575,00	100	619.229.161,00	100	634.173.618,00	4.01.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat Daerah
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks)	0	41	45		50		65		70		81		4.01.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat Daerah





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	0	0	100		100		100		100		100		4.01.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					21.050.670.111,0 0		19.956.164.626,0 0		20.062.493.098,0 0		20.168.806.251,0 0		20.208.500.681,0 0	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.318.002.111,0 0		17.831.596.626,0 0		17.837.925.098,0 0		17.923.238.251,0 0		17.923.238.251,0 0	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	0	75	80	18.318.002.111,0 0	85	17.831.596.626,0 0	90	17.837.925.098,0 0	95	17.923.238.251,0 0	100	17.923.238.251,0 0	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					2.732.668.000,00		2.124.568.000,00		2.224.568.000,00		2.245.568.000,00		2.285.262.430,00	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan dan Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	2.732.668.000,00		2.124.568.000,00	100	2.224.568.000,00	100	2.245.568.000,00	100	2.285.262.430,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	100	100	100				100				100		4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	0	0	100				100				100		4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					5.165.554.853,00		4.592.141.983,00		4.693.341.983,00		4.792.341.983,00		4.792.341.983,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.073.849.853,00		3.645.956.983,00		3.646.956.983,00		3.744.956.983,00		3.744.956.983,00	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	70,05	75,00	79,99	4.073.849.853,00	80	3.645.956.983,00	89. 99	3.646.956.983,00	90. 00	3.744.956.983,00	91,5	3.744.956.983,00	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					745.425.000,00		596.905.000,00		697.105.000,00		698.105.000,00		698.105.000,00	
Meningkatnya Keselarasan Program Prioritas Daerah dan Nasional	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah (%)	0	100	100	745.425.000,00	100	596.905.000,00	100	697.105.000,00	100	698.105.000,00	100	698.105.000,00	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					346.280.000,00		349.280.000,00		349.280.000,00		349.280.000,00		349.280.000,00	
Meningkatnya Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	0	100	100	346.280.000,00	100	349.280.000,00	100	349.280.000,00	100	349.280.000,00	100	349.280.000,00	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.02 - KEUANGAN					144.872.191.701, 00		144.989.460.718, 00		145.202.117.675, 00		145.414.743.989, 00		145.494.132.841, 00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					140.589.569.916, 00		140.147.162.295, 00		140.561.525.798, 00		140.674.598.436, 00		140.751.219.283, 00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	0	60	60	4.114.666.957,00	61	4.039.480.145,00	62	4.069.997.852,00	63	4.103.567.330,00	64	4.140.493.754,00	5.02.0.00.0.00.03.00 00 - Badan Pendapatan Daerah



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya nilai Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	54	58	60	136.474.902.959,00	66	136.107.682.150,00	67	136.491.527.946,00	68	136.571.031.106,00	69	136.610.725.529,00	5.02.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Nilai SAKIP (Angka)	60,54	63,52	66,5		69,48		72,46		75,44		78,42		5.02.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					2.307.261.000,00		2.435.299.000,00		2.435.299.000,00		2.406.939.000,00		2.406.939.000,00	
Meningkatnya Tata kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan dan Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	40	40	40	2.307.261.000,00	40	2.435.299.000,00	40	2.435.299.000,00	40	2.406.939.000,00	40	2.406.939.000,00	5.02.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (%)	30	30	30		30		30		30		30		5.02.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan wajib Pelayanan Dasar (%)	79,09	85,00	85,00		90,00		93,35		93,35		96,26		5.02.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Penurunan Silpa (%)	44,80	35,89	35,65		34,09		36,00		36,00		36,00		5.02.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					537.690.000,00		830.407.311,00		552.890.000,00		608.060.000,00		608.060.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	9,50	9,50	40,50	537.690.000,00	40,50	830.407.311,00	40,50	552.890.000,00	40,50	608.060.000,00	40,50	608.060.000,00	5.02.0.00.0.00.02.00 00 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.437.670.785,00		1.576.592.112,00		1.652.402.877,00		1.725.146.553,00		1.727.914.558,00	
Meningkatnya Persentase PAD Terhadap Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	10,04	10,55	2,09	1.437.670.785,00	2,3	1.576.592.112,00	2,53	1.652.402.877,00	2,78	1.725.146.553,00	3,06	1.727.914.558,00	5.02.0.00.0.00.03.00 00 - Badan Pendapatan Daerah





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.03 - KEPEGAWAIAN					76.084.392.275,0 0		72.984.731.790,0 0		73.641.060.262,0 0		73.547.373.415,0 0		73.287.067.845,0 0	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					74.687.998.775,0 0		68.587.158.725,0 0		69.198.658.725,0 0		68.231.158.725,0 0		68.187.078.725,0 0	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	71,0	71,0	71,5	74.687.998.775,0 0	75,5	68.587.158.725,0 0	81,5	69.198.658.725,0 0	82,5	68.231.158.725,0 0	82,5	68.187.078.725,0 0	5.03.5.04.0.00.01.00 00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.396.393.500,00		4.397.573.065,00		4.442.401.537,00		5.316.214.690,00		5.099.989.120,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Nilai Sistem Merit Aspek Kepegawaian (Poin)	170,5	229,5	250,0	1.396.393.500,00	279,5	4.397.573.065,00	302,5	4.442.401.537,00	312,5	5.316.214.690,00	312,5	5.099.989.120,00	5.03.5.04.0.00.01.00 00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) (Rasio)	62,24	62,32	62,68		63,05		63,42		63,78		63,78		5.03.5.04.0.00.01.00 00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) (Rasio)	18,40	19,43	20,16		20,89		21,99		23,09		23,09		5.03.5.04.0.00.01.00 00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					870.365.000,00		7.150.000.000,00		6.600.000.000,00		6.800.000.000,00		7.100.000.000,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					870.365.000,00		7.150.000.000,00		6.600.000.000,00		6.800.000.000,00		7.100.000.000,00	
Meningkatnya Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Nilai Sistem Merit Aspek Pengembangan Sumber Daya Manusia (Poin)	14,0	26,5	26,5	870.365.000,00	33,5	7.150.000.000,00	38,5	6.600.000.000,00	43,5	6.800.000.000,00	43,5	7.100.000.000,00	5.03.5.04.0.00.01.00 00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	2,30	2,99	6,09		9,31		12,76		16,32		16,32		5.03.5.04.0.00.01.00 00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%)	20,67	22,25	25,62		28,99		33,48		37,98		37,98		5.03.5.04.0.00.01.00 00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) (Rasio)	11,95	13,94	17,93		21,91		27,89		35,86		35,86		5.03.5.04.0.00.01.00 00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					53.500.000,00		676.247.385,00		681.375.857,00		688.689.010,00		728.383.440,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					53.500.000,00		576.247.385,00		581.375.857,00		588.689.010,00		300.000.000,00	
Meningkatnya Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Implementasi Pembangunan Daerah Berdasarkan Hasil Kelitbangan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	0	100	100	53.500.000,00	100	576.247.385,00	100	581.375.857,00	100	588.689.010,00	100	300.000.000,00	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		428.383.440,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Produk Inovasi	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	0	100	100	0,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	428.383.440,00	5.01.5.05.0.00.02.00 00 - Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN					2.188.215.683,00		2.231.550.198,00		2.337.878.670,00		2.444.191.823,00		2.483.886.253,00	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.046.720.083,00		2.124.763.198,00		2.100.820.083,00		2.180.820.083,00		2.100.820.083,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	55	60	65	2.046.720.083,00	70	2.124.763.198,00	75	2.100.820.083,00	80	2.180.820.083,00	85	2.100.820.083,00	5.06.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN					106.921.100,00		43.212.500,00		113.712.500,00		122.212.500,00		195.066.170,00	
Meningkatnya pengelolaan kawasan perbatasan daerah	Persentase Pengelolaan Kawasan Perbatasan Daerah (%)	72	74	75	106.921.100,00	76	43.212.500,00	77	113.712.500,00	78	122.212.500,00	79	195.066.170,00	5.06.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5.06.03 - PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA					34.574.500,00		63.574.500,00		123.346.087,00		141.159.240,00		188.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan kawasan perbatasan negara	Persentase Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (%)	75	76	77	34.574.500,00	78	63.574.500,00	79	123.346.087,00	80	141.159.240,00	80	188.000.000,00	5.06.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Pengelola Perbatasan Daerah
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					5.510.854.560,00		5.564.389.075,00		5.670.717.547,00		5.777.030.700,00		5.816.725.130,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.484.111.760,00		4.487.246.275,00		4.512.974.747,00		4.539.287.900,00		4.539.287.900,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	66	67	70	4.484.111.760,00	75	4.487.246.275,00	76	4.512.974.747,00	79	4.539.287.900,00	80	4.539.287.900,00	6.01.0.00.0.00.01.00 00 - Inspektorat
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN					823.930.000,00		854.330.000,00		894.930.000,00		934.930.000,00		954.624.430,00	
Peningkatan Akuntabilitas, Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Serta Peningkatan Kualitas Aparat	Tindakanj Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	83,94	84,75	84,95	823.930.000,00	85,00	854.330.000,00	85,25	894.930.000,00	85,65	934.930.000,00	86,00	954.624.430,00	6.01.0.00.0.00.01.00 00 - Inspektorat





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pengawasan Internal Pemerintah														
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					202.812.800,00		222.812.800,00		262.812.800,00		302.812.800,00		322.812.800,00	
Peningkatan Akuntabilitas, Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Serta Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Terintegra si (Integrated)	Terintegra si (Integrated)	Terintegra si (Integrated)	202.812.800,00	Terintegra si (Integrated)	222.812.800,00	Terintegra si (Integrated)	262.812.800,00	Terintegra si (Integrated)	302.812.800,00	Terintegra si (Integrated)	322.812.800,00	6.01.0.00.0.00.01.00 00 - Inspektorat
7.01 - KECAMATAN					38.752.080.820,0 0		39.862.575.000,0 0		41.138.516.664,0 0		42.414.274.500,0 0		42.890.607.660,0 0	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					27.933.693.470,0 0		27.917.540.935,0 0		28.720.403.058,0 0		29.472.697.170,0 0		29.646.863.967,0 0	
Meningkatnya Akuntabilitas, Kinerja Pemerintahan dan Kepercayaan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	66	66	67	1.820.556.134,00	68	1.841.024.049,00	69	1.929.248.521,00	70	2.018.361.674,00	71	2.041.456.104,00	7.01.0.00.0.00.02.00 00 - Kecamatan Tasifeto Barat
Meningkatnya Akuntabilitas, Kinerja Pemerintahan dan Kepercayaan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	0	58	60	2.003.139.314,00	62	2.017.923.229,00	64	2.123.125.454,00	66	2.218.164.854,00	68	2.243.859.284,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - Kecamatan Tasifeto Timur
Meningkatnya Akuntabilitas, Kinerja Pemerintahan dan Kepercayaan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	66	67	68	1.407.998.090,00	69	1.407.998.090,00	70	1.548.061.077,00	71	1.577.998.090,00	72	1.557.998.090,00	7.01.0.00.0.00.04.00 00 - Kecamatan Raihat
Meningkatnya Akuntabilitas, Kinerja Pemerintahan dan Kepercayaan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	58	58	60	1.438.376.075,00	62	1.441.376.075,00	64	1.473.439.062,00	66	1.473.752.215,00	68	1.473.796.645,00	7.01.0.00.0.00.05.00 00 - Kecamatan Lamaknen
Meningkatnya Akuntabilitas, Kinerja Pemerintahan dan Kepercayaan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	0	58	60	2.357.033.660,00	62	2.377.868.175,00	64	2.436.696.647,00	66	2.505.009.800,00	68	2.524.204.230,00	7.01.0.00.0.00.06.00 00 - Kecamatan Kakuluk Mesak





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Akuntabilitas, Kinerja Pemerintahan dan Kepercayaan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	65	65	70	1.961.903.718,00	75	1.969.568.233,00	80	2.020.846.705,00	80	2.122.159.858,00	90	2.161.854.288,00	7.01.0.00.0.00.07.00 00 - Kecamatan Raimanuk
Meningkatnya Akuntabilitas, Kinerja Pemerintahan dan Kepercayaan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	66	66	67	1.612.214.522,00	68	1.305.189.037,00	69	1.303.517.509,00	70	1.409.830.662,00	70	1.424.525.092,00	7.01.0.00.0.00.08.00 00 - Kecamatan Lasiolat
Meningkatnya Akuntabilitas, Kinerja Pemerintahan dan Kepercayaan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	56	60	62	4.525.284.012,00	64	4.538.374.677,00	66	4.617.003.149,00	68	4.617.003.149,00	70	4.617.003.149,00	7.01.0.00.0.00.09.00 00 - Kecamatan Atambua Selatan
Meningkatnya Akuntabilitas, Kinerja Pemerintahan dan Kepercayaan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	0	60	65	1.751.537.481,00	70	1.757.091.996,00	75	1.830.920.468,00	80	1.937.233.621,00	85	1.976.928.051,00	7.01.0.00.0.00.11.00 00 - Kecamatan Lamaknen Selatan
Meningkatnya akuntabilitas, kinerja pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	0	58	60	4.439.721.467,00	63	4.439.721.467,00	66	4.439.721.467,00	69	4.439.721.467,00	70	4.439.701.467,00	7.01.0.00.0.00.01.00 00 - Kecamatan Kota Atambua
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	0	58	62	3.320.455.830,00	64	3.525.438.225,00	66	3.592.349.832,00	68	3.662.988.613,00	70	3.690.064.400,00	7.01.0.00.0.00.10.00 00 - Kecamatan Atambua Barat
Meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	66	67	68	1.295.473.167,00	69	1.295.967.682,00	70	1.405.473.167,00	71	1.490.473.167,00	72	1.495.473.167,00	7.01.0.00.0.00.12.00 00 - Kecamatan Nanaet Duabesi
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					130.550.400,00		227.608.100,00		301.055.557,00		365.569.241,00		432.056.203,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanana publik di wilayah kecamatan	Persentase Kinerja Terpadu Pelayanan (%)	0	72,8	72,8	9.000.000,00	77,7	10.500.000,00	84	15.000.000,00	93,7	15.000.000,00	100	15.000.000,00	7.01.0.00.0.00.11.00 00 - Kecamatan Lamaknen Selatan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Public Di Wilayah Kecamatan	Persentase Kinerja Terpadu Pelayanan (%)	0	60	70	15.600.000,00	80	24.000.000,00	90	44.000.000,00	100	49.000.000,00	100	52.000.000,00	7.01.0.00.0.00.06.00 00 - Kecamatan Kakuluk Mesak



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Persentase Kinerja Terpadu Pelayanan (%)	0	75	80	0,00	85	11.200.000,00	90	11.200.000,00	95	11.200.000,00	100	11.200.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 00 - Kecamatan Kota Atambua
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Persentase Kinerja Terpadu Pelayanan (%)	89	89	89,09	4.960.000,00	89,18	13.156.000,00	89,27	15.400.000,00	89,36	18.600.000,00	89,45	21.800.000,00	7.01.0.00.0.00.02.00 00 - Kecamatan Tasifeto Barat
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Persentase Kinerja Terpadu Pelayanan (%)	82	82	82	5.630.000,00	86	15.630.000,00	88	5.630.000,00	90	15.630.000,00	100	35.630.000,00	7.01.0.00.0.00.04.00 00 - Kecamatan Raihat
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Persentase Kinerja Terpadu Pelayanan (%)	0	72,8	72,8	5.000.000,00	77,7	12.000.000,00	84	30.000.000,00	93,7	65.000.000,00	100	80.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05.00 00 - Kecamatan Lamaknen
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Persentase Kinerja Terpadu Pelayanan (%)	0	0	56	4.700.000,00	67	12.150.000,00	78	25.500.000,00	89	25.500.000,00	100	25.500.000,00	7.01.0.00.0.00.07.00 00 - Kecamatan Raimanuk
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Persentase Kinerja Terpadu Pelayanan (%)	0	60	60	19.940.000,00	70	35.000.000,00	80	35.000.000,00	90	35.000.000,00	100	45.000.000,00	7.01.0.00.0.00.08.00 00 - Kecamatan Lasiolat
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Persentase Kinerja Terpadu Pelayanan (%)	0	0	73	4.556.000,00	76	42.300.000,00	79	58.000.000,00	80	58.000.000,00	83	58.000.000,00	7.01.0.00.0.00.09.00 00 - Kecamatan Atambua Selatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Persentase Kinerja Terpadu Pelayanan (%)	0	0	20	20.855.000,00	40	21.272.100,00	60	23.399.310,00	80	25.739.241,00	100	27.026.203,00	7.01.0.00.0.00.10.00 00 - Kecamatan Atambua Barat
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Kecamatan	Persentase Kinerja Terpadu Pelayanan (%)	72,8	72,8	72,8	13.900.000,00	77,7	23.900.000,00	84	33.900.000,00	93,7	43.900.000,00	100	43.900.000,00	7.01.0.00.0.00.12.00 00 - Kecamatan Nanaet Duabesi





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan	Persentase Kinerja Terpadu Pelayanan (%)	0	60	70	26.409.400,00	80	6.500.000,00	90	4.026.247,00	100	3.000.000,00	100	17.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - Kecamatan Tasifeto Timur
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					10.595.878.850,00		11.313.054.735,00		11.560.180.862,00		11.916.807.409,00		12.037.369.416,00	
Meningkatnya kualitas dan efektifitas kegiatan pemberdayaan di Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan (%)	82	82	82	6.316.000,00	84	16.316.000,00	86	6.316.000,00	90	26.316.000,00	100	26.316.000,00	7.01.0.00.0.00.04.00 00 - Kecamatan Raihat
Meningkatnya kualitas dan efektifitas kegiatan pemberdayaan di Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan (%)	80	80	80	7.500.000,00	85	14.500.000,00	90	40.000.000,00	95	103.000.000,00	100	120.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05.00 00 - Kecamatan Lamaknen
Meningkatnya kualitas dan efektifitas kegiatan pemberdayaan di Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan (%)	0	60	60	11.300.000,00	70	151.000.000,00	80	200.000.000,00	90	200.000.000,00	100	200.000.000,00	7.01.0.00.0.00.08.00 00 - Kecamatan Lasiolat
Meningkatnya kualitas dan efektifitas kegiatan pemberdayaan di Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan (%)	0	0	64,5	6.000.000,00	70,8	16.500.000,00	79,1	28.000.000,00	91,6	28.000.000,00	100	28.000.000,00	7.01.0.00.0.00.11.00 00 - Kecamatan Lamaknen Selatan
Meningkatnya Kualitas Dan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Di Desa Dan Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan (%)	0	40	50	0,00	60	21.760.000,00	70	21.760.000,00	80	21.760.000,00	90	21.760.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - Kecamatan Tasifeto Timur
Meningkatnya Kualitas Dan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Di Desa Dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan (%)	0	40	50	16.000.000,00	60	14.000.000,00	70	17.000.000,00	80	30.000.000,00	90	35.000.000,00	7.01.0.00.0.00.06.00 00 - Kecamatan Kakuluk Mesak
Meningkatnya kualitas dan efektifitas kegiatan pemberdayaan di desa/kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan (%)	84	84	84	6.700.000,00	88	8.220.000,00	92	14.200.000,00	96	18.200.000,00	100	21.600.000,00	7.01.0.00.0.00.02.00 00 - Kecamatan Tasifeto Barat
Meningkatnya kualitas dan efektifitas kegiatan pemberdayaan di kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan (%)	0	0	80	9.400.000,00	85	16.850.000,00	90	32.500.000,00	95	32.500.000,00	100	32.500.000,00	7.01.0.00.0.00.07.00 00 - Kecamatan Raimanuk



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas kegiatan pemberdayaan di kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan (%)	70	75	80	3.907.685.000,00	85	3.972.979.515,00	90	4.079.307.987,00	95	4.185.621.140,00	100	4.225.335.570,00	7.01.0.00.0.00.01.00 00 - Kecamatan Kota Atambua
Meningkatnya kualitas dan efektivitas kegiatan pemberdayaan di kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan (%)	76	80	84	3.489.177.850,00	88	3.778.014.200,00	92	3.784.014.200,00	96	3.890.327.353,00	100	3.930.021.783,00	7.01.0.00.0.00.09.00 00 - Kecamatan Atambua Selatan
Meningkatnya kualitas dan efektivitas kegiatan pemberdayaan di kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan (%)	0	25	44,17	3.127.500.000,00	58,11	3.289.615.020,00	62,57	3.325.782.675,00	79,6	3.358.782.916,00	100	3.368.536.063,00	7.01.0.00.0.00.10.00 00 - Kecamatan Atambua Barat
Meningkatnya kualitas dan efektivitas kegiatan pemberdayaan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan (%)	84	84	84	8.300.000,00	86	13.300.000,00	88	11.300.000,00	90	22.300.000,00	92	28.300.000,00	7.01.0.00.0.00.12.00 00 - Kecamatan Nanaet Duabesi
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					30.296.500,00		162.639.030,00		208.592.000,00		236.976.200,00		262.054.734,00	
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Penanganan Kejadian gangguan TRANSTIB dan Pelanggaran PERDA/PERBUP (%)	0	75	80	560.000,00	85	6.000.000,00	90	6.000.000,00	95	6.000.000,00	100	6.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.00 00 - Kecamatan Kota Atambua
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Penanganan Kejadian gangguan TRANSTIB dan Pelanggaran PERDA/PERBUP (%)	0	0,42	0,45	0,00	0,47	6.000.000,00	0,48	7.450.000,00	0,49	11.000.000,00	0,50	11.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - Kecamatan Tasifeto Timur
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Penanganan Kejadian gangguan TRANSTIB dan Pelanggaran PERDA/PERBUP (%)	82	82	82	5.000.000,00	86	18.734.515,00	88	5.000.000,00	90	15.000.000,00	100	25.000.000,00	7.01.0.00.0.00.04.00 00 - Kecamatan Raihat
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Penanganan Kejadian gangguan TRANSTIB dan Pelanggaran PERDA/PERBUP (%)	0	0	60	0,00	70	13.234.515,00	80	24.000.000,00	90	24.000.000,00	100	24.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05.00 00 - Kecamatan Lamaknen
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat di	Persentase Koordinasi Penanganan Kejadian gangguan TRANSTIB dan Pelanggaran PERDA/PERBUP (%)	0	0	0	0,00	67	7.450.000,00	78	11.000.000,00	89	11.000.000,00	100	11.000.000,00	7.01.0.00.0.00.07.00 00 - Kecamatan Raimanuk





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
wilayah kecamatan														
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Penanganan Kejadian gangguan TRANTIB dan Pelanggaran PERDA/PERBUP (%)	0	60	60	9.000.000,00	70	70.000.000,00	80	90.000.000,00	90	90.000.000,00	100	90.000.000,00	7.01.0.00.0.00.08.00 00 - Kecamatan Lasiolat
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Penanganan Kejadian gangguan TRANTIB dan Pelanggaran PERDA/PERBUP (%)	0	0	80	936.500,00	85	6.000.000,00	90	12.000.000,00	95	12.000.000,00	100	12.000.000,00	7.01.0.00.0.00.09.00 00 - Kecamatan Atambua Selatan
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Penanganan Kejadian gangguan TRANTIB dan Pelanggaran PERDA/PERBUP (%)	0	0	20	11.000.000,00	40	11.220.000,00	60	12.342.000,00	80	12.676.200,00	100	14.254.734,00	7.01.0.00.0.00.10.00 00 - Kecamatan Atambua Barat
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Penanganan Kejadian gangguan TRANTIB dan Pelanggaran PERDA/PERBUP (%)	0	0	60	0,00	70	10.000.000,00	80	16.000.000,00	90	16.000.000,00	100	16.000.000,00	7.01.0.00.0.00.11.00 00 - Kecamatan Lamaknen Selatan
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan (%)	84	84	84	1.800.000,00	86	6.800.000,00	88	4.800.000,00	90	6.800.000,00	92	11.800.000,00	7.01.0.00.0.00.12.00 00 - Kecamatan Nanaet Duabesi
Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Penanganan Kejadian gangguan TRANTIB dan Pelanggaran PERDA/PERBUP (%)	0	50	60	2.000.000,00	75	4.000.000,00	80	15.000.000,00	90	25.000.000,00	100	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.06.00 00 - Kecamatan Kakuluk Mesak
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	Persentase Koordinasi Penanganan Kejadian gangguan TRANTIB dan Pelanggaran PERDA/PERBUP (%)	84	84	84	0,00	88	3.200.000,00	92	5.000.000,00	96	7.500.000,00	100	11.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.00 00 - Kecamatan Tasifeto Barat
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					11.757.200,00		64.957.200,00		96.230.187,00		139.293.340,00		187.157.200,00	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	70	70	70	2.000.000,00	80	2.200.000,00	90	5.000.000,00	100	7.000.000,00	100	10.500.000,00	7.01.0.00.0.00.02.00 00 - Kecamatan Tasifeto Barat
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	60	65	0,00	75	3.100.000,00	80	5.250.000,00	90	14.000.000,00	100	14.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - Kecamatan Tasifeto Timur
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	82	82	82	4.957.200,00	84	4.957.200,00	88	4.957.200,00	90	24.957.200,00	100	54.957.200,00	7.01.0.00.0.00.04.00 00 - Kecamatan Raihat
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	80	80	82	2.500.000,00	84	6.000.000,00	86	12.000.000,00	88	20.000.000,00	90	26.000.000,00	7.01.0.00.0.00.05.00 00 - Kecamatan Lamaknen
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	65	75	0,00	80	2.500.000,00	85	5.000.000,00	90	5.000.000,00	100	7.500.000,00	7.01.0.00.0.00.06.00 00 - Kecamatan Kakuluk Mesak
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	0	56	1.100.000,00	67	5.500.000,00	78	14.000.000,00	89	17.000.000,00	100	17.000.000,00	7.01.0.00.0.00.07.00 00 - Kecamatan Raimanuk
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	60	60	0,00	70	31.000.000,00	80	40.000.000,00	90	40.000.000,00	100	40.000.000,00	7.01.0.00.0.00.08.00 00 - Kecamatan Lasiolat
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	0	50	0,00	60	3.500.000,00	80	6.000.000,00	90	6.000.000,00	100	6.000.000,00	7.01.0.00.0.00.11.00 00 - Kecamatan Lamaknen Selatan
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	82	82	82	1.200.000,00	84	6.200.000,00	85	4.022.987,00	86	5.336.140,00	90	11.200.000,00	7.01.0.00.0.00.12.00 00 - Kecamatan Nanaet Duabesi





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					49.904.400,00		176.775.000,00		252.055.000,00		282.931.140,00		325.106.140,00	
Meningkatnya Efektifitas Pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Persentase Efektivitas Pembinaan dan Pengawsan Terhadap Pemerintahan Desa (%)	80	8	80	4.049.400,00	85	5.520.000,00	90	10.800.000,00	95	16.300.000,00	100	19.300.000,00	7.01.0.00.0.00.02.00 00 - Kecamatan Tasifeto Barat
Meningkatnya Efektifitas Pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Persentase Efektivitas Pembinaan dan Pengawsan Terhadap Pemerintahan Desa (%)	0	50	60	0,00	70	9.000.000,00	80	9.000.000,00	90	9.000.000,00	100	9.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.00 00 - Kecamatan Tasifeto Timur
Meningkatnya Efektifitas Pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Persentase Efektivitas Pembinaan dan Pengawsan Terhadap Pemerintahan Desa (%)	82	82	82	11.155.000,00	86	11.155.000,00	88	11.155.000,00	90	27.531.140,00	100	27.225.570,00	7.01.0.00.0.00.04.00 00 - Kecamatan Raihat
Meningkatnya Efektifitas Pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Persentase Efektivitas Pembinaan dan Pengawsan Terhadap Pemerintahan Desa (%)	80	80	80	8.000.000,00	85	11.000.000,00	87	25.000.000,00	89	25.000.000,00	90	26.650.000,00	7.01.0.00.0.00.05.00 00 - Kecamatan Lamaknen
Meningkatnya Efektifitas Pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Persentase Efektivitas Pembinaan dan Pengawsan Terhadap Pemerintahan Desa (%)	0	0	56	3.600.000,00	67	6.000.000,00	78	20.000.000,00	89	22.000.000,00	100	22.000.000,00	7.01.0.00.0.00.07.00 00 - Kecamatan Raimanuk
Meningkatnya Efektifitas Pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Persentase Efektivitas Pembinaan dan Pengawsan Terhadap Pemerintahan Desa (%)	0	60	60	10.000.000,00	70	105.000.000,00	80	135.000.000,00	90	135.000.000,00	100	150.000.000,00	7.01.0.00.0.00.08.00 00 - Kecamatan Lasiolat
Meningkatnya Efektifitas Pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Persentase Efektivitas Pembinaan dan Pengawsan Terhadap Pemerintahan Desa (%)	0	50	60	9.000.000,00	70	13.000.000,00	80	21.000.000,00	90	21.000.000,00	100	21.000.000,00	7.01.0.00.0.00.11.00 00 - Kecamatan Lamaknen Selatan
Meningkatnya Efektifitas Pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Persentase Efektivitas Pembinaan dan Pengawsan Terhadap Pemerintahan Desa (%)	82	82	82	2.100.000,00	84	12.100.000,00	85	5.100.000,00	90	2.100.000,00	100	19.930.570,00	7.01.0.00.0.00.12.00 00 - Kecamatan Nanaet Duabesi





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Efektifitas Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa	Persentase Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa (%)	0	50	60	2.000.000,00	70	4.000.000,00	80	15.000.000,00	90	25.000.000,00	100	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.06.00 00 - Kecamatan Kakuluk Mesak
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					4.817.536.819,00		4.862.071.334,00		4.968.399.806,00		5.074.712.959,00		5.114.407.389,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.339.359.089,00		2.397.001.204,00		2.353.095.489,00		2.387.976.149,00		2.418.529.619,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Predikat)	0	75	80	2.339.359.089,00	85	2.397.001.204,00	90	2.353.095.489,00	95	2.387.976.149,00	100	2.418.529.619,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					822.264.400,00		835.289.400,00		830.865.000,00		849.865.000,00		848.365.000,00	
Meningkatnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kepada Masyarakat	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kepada Masyarakat (%)	0	100	100	822.264.400,00	100	835.289.400,00	100	830.865.000,00	100	849.865.000,00	100	848.365.000,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					638.352.630,00		605.990.030,00		657.631.030,00		726.410.710,00		762.570.370,00	
Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	0	100	100	638.352.630,00	100	605.990.030,00	100	657.631.030,00	100	726.410.710,00	100	762.570.370,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

IDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					24.700.000,00		24.880.000,00		31.985.145,00		31.915.000,00		33.447.400,00	
Peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	0	100	100	24.700.000,00	100	24.880.000,00	100	31.985.145,00	100	31.915.000,00	100	33.447.400,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					75.346.500,00		81.396.500,00		119.771.942,00		134.494.900,00		133.980.800,00	
Peningkatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	0	100	100	75.346.500,00	100	81.396.500,00	100	119.771.942,00	100	134.494.900,00	100	133.980.800,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					917.514.200,00		917.514.200,00		975.051.200,00		944.051.200,00		917.514.200,00	
Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	0	100	100	917.514.200,00	100	917.514.200,00	100	975.051.200,00	100	944.051.200,00	100	917.514.200,00	8.01.0.00.0.00.01.00 00 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					953,030,958,669		955,216,480,859		960,213,919,059		965,210,637,259		967,076,275,459	

Sumber: SIPD Tahun 2025



4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Ketercapaian visi dan misi daerah yang merupakan keberhasilan kepala daerah diukur juga melalui seberapa baik kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Baik tidaknya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah mencakup diukur melalui tercapai tidaknya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Uraian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	67	71	80	85	90	100
2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	68,46	68,93	69,40	69,88	70,35	70,82
3.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	51,06	51,09	51,11	51,20	51,25	51,3
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	78,17	78,34	78,51	78,68	78,85	79,03
5.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4	4,4	4,74	5,09	5,44	5,84
6.	Indeks Layanan Infrastruktur Kewenangan Kabupaten	Angka	53,36	53,80	64,31	69,23	72,97	76,89
7.	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4,24	4,25	4,27	4,28	4,30	4,30

Sumber: SIPD Tahun 2025



Tabel 4.3
INDIKATOR KINERJA DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	68,13	74,64	74,99	75,34	75,69	76,05	76,4
2	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	40	0,42	0,43	0,45	0,47	0,48	0,50
3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	91,85	89,36	89,56	89,76	89,96	90,16	90,36
4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	44,3	42,60	41	39,50	37,80	36,40	34,80
5	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	97,26	97,39	97,52	97,65	97,78	97,71	98,04
6	Indeks Kualitas Air	Indeks	53,75	74,19	74,39	74,59	74,49	74,99	75,19
7	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	7	0	0	0	0	0	0
8	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	50,25	64,30	64,36	64,43	64,50	64,57	65,64
9	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	94,7	90	90	90	90	90	90



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	13,03	19,4	19,76	20	20,55	21	21,75
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	0	0	78,34	78,51	78,68	78,85	79,02
II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Rasio Gini	Indeks	0,32	0,33	0,32	0,32	0,32	0,31	0,31
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	1,37	1,44	1,51	1,58	1,65	1,72	1,79
3	Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	21,90	22,06	22,22	22,38	22,54	22,70	22,86
4	Pengeluaran Per Kapita	Juta Rupiah	7.672	7.729	7.786	7.843	7.900	7.957	8.014
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	77,31	79,08	80,85	82,62	84,39	86,16	87,93
6	Persentase Penduduk Miskin	%	13,86	13,72	12,76	11,87	11,04	10,27	9,56
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	0	0	4,4	4,74	5,09	5,44	5,84
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,41	5,49	5,33	5,17	5,02	4,87	4,73
9	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	44,3	42,6	41	39,5	37,8	36,4	34,8



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	94,7	90	90	90	90	90	90
III ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,32	13,83	13,95	14,08	14,2	14,33	14,45
2	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	19	20	20,14	40,28	60,12	80,03	100
3	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	64,72	69	70	72	74	75	76
4	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,5	7,5	7,68	7,86	8,05	8,24	8,44
5	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SD	%	41,01	43,51	46,01	48,51	51,01	53,51	56,01



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SMP	%	59,66	60,76	61,96	62,96	64,06	65,16	66,26
7	Jumlah Perolehan Medali Pada Event Olahraga Nasional/Internasional	Medali	10	20	25	30	35	40	40
8	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SD	%	39,62	42,52	45,42	48,32	51,22	54,12	57,02



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SMP	%	55,53	57,03	58,53	60,03	61,53	63,03	64,53
10	Tingkat Inflasi	%	0	0	0	0	0	0	0
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Maturitas SPIP	Angka	2,89	2,89	2,92	2,95	2,97	2,99	3
2	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	1,84	2,55	3	3,5	4	4,25	4,5
3	Nilai SAKIP	Angka	60,54	63,52	66,5	69,48	72,46	75,44	78,42
4	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	70,10	75,50	77	79	81	83	85
5	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	55	60	65	70	75	80	85
6	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian
7	Akses Rumah Tangga terhadap Air bersih Perpipaan	%	35,48	39,01	40,89	42,86	44,93	47,09	49,36



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	%	0	0	10,69	11,60	12	12,20	12,50
9	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,47	2,74	3,01	3,28	3,55	3,82	4,09
10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,85	92,02	92,1	92,18	92,26	92,34	92,34
11	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	%	40,32	43,92	47,51	51,11	54,70	58,30	61,89
12	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	64,71	66,88	67,66	68,45	69,25	70,05	70,87
13	Nilai MCP KPK	Angka	74	74,30	74,50	74,55	74,65	74,66	75
14	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	70,19	71,47	72,75	74,03	75,29	75,29	75,29
15	SPBE	Angka	0	0	0	0	0	0	0
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	0	3,65	3,70	3,75	3,80	3,85	3,90
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	59,66	60,76	61,86	62,96	64,06	65,16	66,26
2	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	55,53	57,73	58,73	60,03	61,53	63,03	64,53
3	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	47,49	48,27	49,28	51,22	59,06	68,46	77,86
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	66	66	67	68	69	70	71
5	Persentase guru bersertifikat pendidik	%	0	44,33	55,46	66,59	77,72	88,85	99,98
6	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	0	0	75	80	85	90	100
7	Angka Partisipasi Sekolah (7-15 tahun)	%	95,89	96,20	96,50	96,80	97,10	97,41	97,71



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	Angka partisipasi sekolah (5-6 tahun)	%	62,71	65,38	68,05	70,72	73,39	76,07	78,74
9	Persentase Satuan Pendidikan Yang Menyelenggarakan PAUD Holistik Integratif	%	35,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00
10	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	51,78	54,28	56,78	59,28	61,78	64,28	66,78
11	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	54,00	56,40	58,80	61,20	63,60	66,00	68,40
12	Iklim Keamanan SD	Nilai	64,37	65,27	66,17	67,07	67,97	68,87	69,77
13	Jumlah Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	Dokumen	10	12	14	16	18	20	22
14	Iklim Keamanan SMP	Nilai	66,34	67,84	69,34	70,84	72,34	73,84	75,34
15	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Dengan Kualifikasi S1/DIV	%	25,92	29,48	33,04	36,60	40,16	43,72	48,12
16	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	67,32	68,32	69,32	70,32	71,32	72,32	73,32
17	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	69,20	70,20	71,20	72,20	73,20	74,20	75,20
18	Angka Partisipasi Sekolah (7-18 tahun) Kesetaraan	%	13,77	14,89	16,02	17,14	18,26	19,38	20,50



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
AB	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80	83	85	88	90	93	95
2	Jumlah Kematian ibu	Angka	7	0	0	0	0	0	0
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	72	78	78	79	80	81	82
4	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Rasio	0:0	4.8:1000	4.8:1000	4.8:1000	4.8:1000	4.9:1000	5.0:1000
5	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP IRT sesuai standar	%	0	100	100	100	100	100	100
6	Persentase pelatihan wajib yang dilaksanakan rumah sakit	%	80	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	%	81	85	85	90	90	95	100
8	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	Persentase	0	10,5	10,2	10	9,8	9,5	9,2



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	91,05	100	100	100	100	100	100
10	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	66	67	68	69	70	70	71
11	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%	0	100	100	100	100	100	100
12	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	77,79	100	100	100	100	100	100
13	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	0	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang ada di UPTD RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD	%	80	83	85	88	90	93	95



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
15	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	73,52	100	100	100	100	100	100
16	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	0	90	90	90	90	90	90
17	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	0	75	75	75	80	80	80
18	Angka Penggunaan Tempat Tidur (Bed Occupancy Ratio)	%	74	80	80	80	85	85	85
19	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	%	98,74	100	100	100	100	100	100
20	Rata-rata Lamanya Pasien di Rawat (Average Length of Stay)	Hari	3	6	6	5	5	4	4



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
21	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	0	100	100	100	100	100	100
22	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	96,65	100	100	100	100	100	100
23	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	0	75	75	75	75	75	75
24	Tenggang Perputaran Tempat Tidur (Turn Over Interval)	Hari	1	2	2	2	2	2	2
25	Angka Kematian 48 Jam (Net Death Rate)	Per 1000	17	25	24	23	22	21	20



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
26	Persentase Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai standar	%	81,28	100	100	100	100	100	100
27	Angka Kematian Umum (Gross Death Rate)	Per 1000	24	45	44	43	42	41	40
28	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai standar	%	92,85	100	100	100	100	100	100
29	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	92,85	100	100	100	100	100	100
30	Angka Perputaran Tempat Tidur (Bed Turn Over)	Kali	92	50	49	48	47	46	45
31	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus sesuai standar	%	98,73	100	100	100	100	100	100



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
32	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJB) sesuai standar	%	51,65	100	100	100	100	100	100
33	Persentase Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	%	76,64	100	100	100	100	100	100
34	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	70,14	100	100	100	100	100	100
35	Persentase Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK	%	0	48	51	54	57	60	63



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
36	Persentase Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrien Supplementation (MMS)	%	0	82	84	86	88	90	92
37	Persentase Ibu Hamil Mengkonsumsi Makanan Beragam	%	0	62	64	66	68	70	72
38	Persentase Pemeriksaan Kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan	%	0	72	74	76	78	80	82
39	Persentase Praktik Inisiasi Menyusu Dini	%	0	81	82	83	84	85	86
40	Persentase Bayi Usia 0-5 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	%	0	74	75	76	77	78	79
41	Persentase Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) beragam setelah 6 bulan	%	0	71	72	73	74	75	76



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
42	Persentase Pemberian ASI Eksklusif sampai 6 bulan, dilanjutkan sampai 2 tahun	%	0	90	90	90	90	90	90
43	Persentase BADUTA gizi Buruk yang mendapat pelayanan tata laksana Gizi Buruk	%	0	67	68	69	70	71	72
44	Persentase BADUTA yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	%	0	62	64	66	68	70	72
45	Persentase BADUTA gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	%	0	45	48	51	54	57	60
46	Persentase BADUTA mendapatkan imunisasi rutin lengkap	%	0	90	90	90	90	90	90
47	Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada BADUTA	%	0	80	90	95	96	98	100



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
48	Persentase Pemberian Obat cacing pada anak BADUTA (0-24 Bulan)	%	0	75	75	75	75	75	75
49	Persentase Tatalaksana BALITA yang bermasalah gizi	%	0	84	86	88	90	90	90
50	Persentase Stimulasi dan pemantauan perkembangan pada BALITA	%	0	62	64	66	68	70	72
51	Persentase Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	%	0	45	48	51	54	55	56
52	Persentase Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 24-59 bulan	%	0	80	90	95	96	98	100
53	Persentase Penemuan kasus pneumonia balita	%	0	25	30	34	36	38	40



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
54	Persentase Pemberian obat cacing pada anak BALITA (1-4 Thn)	%	0	75	78	80	83	85	87
55	Persentase Remaja putri yang mengkonsumsi TTD	%	0	76	78	80	82	84	86
56	Persentase Remaja putri yang diskriming anemia	%	0	56	57	60	63	65	67
57	Persentase Akses terhadap air minum aman	%	0	65	67	70	72	75	78
58	Persentase Akses terhadap sanitasi aman	%	0	7	8	9	10	11	12
59	Prevalensi Depresi pada usia >= 15 Tahun	%	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
60	Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
61	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%	0	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
62	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	0	100	100	100	100	100	100
63	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	0	76,6	76,6	76,6	76,6	76,6	76,6
64	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	0	65	67	69	71	73	75
65	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	0	100	100	100	100	100	100
66	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	%	0	70,5	70,5	70,5	100	100	100
67	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	0	60	60,5	61	61,5	62	62,5
68	Presentase lanjut usia yang mandiri	%	0	100	100	100	100	100	100
69	Cakupan penemuan kasus TB	%	64,7	90	90	90	90	90	90



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
70	Persentase ODHA menjalani terapi ARV	%	81	95	95	95	95	95	95
71	Kasus Indigenous	Kasus	0	0	0	0	0	0	0
AC	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	75	76	78	79	80	82	85
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	66	66	67	68	69	70	71
3	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten	%	64,93	64,93	64,63	72,60	82,36	86,33	88,19
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	32,40	33,40	34,41	35,42	36,43	37,40	37,40



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Persentase	81,47	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50
6	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	50,1	49,01	50,21	50,31	50,41	50,51	50,61
7	Persentase kepatuhan PBG dan SLF kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Kawasan Yang Ditata	%	86,80	86,87	86,88	86,89	86,90	87,01	87,70
9	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	%	40	47	54	63	72	83	83
AD	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Persentase Rumah Layak Huni Yang Tertangani	%	35,13	35,42	40	60	80	90	100



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0,76	7,47	8,62	11,49	14,37	17,24	20,11
AE	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15	15
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	0	100	100	100	100	100	100
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	56	56	80	85	90	95	100



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	0	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	0	100	100	100	100	100	100
10	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase penanganan pasca bencana	%	0	16,66	33,32	49,98	66,64	83,30	99,96
AF	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	60,54	70	80	85	90	95	100
3	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	Persentase	9,00	9,00	10,00	10,50	11,00	11,50	12,00
4	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	97	97	98	99	100	100	100
5	Persentase Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	%	5,9	5,9	6,0	7,5	10	12,5	14,00
6	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	66,84	71,00	71,50	72,00	73,50	75,00	76,50



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Lanjut Usia Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Gelandangan dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	85	85	86	87	88	89	100
AG	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
1	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Hubungan Industrial Yang Layak	%	30	40	45	50	55	60	65
2	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	%	20	30	35	40	45	50	55



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persentase	0	20	25	30	35	40	45
4	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	0	1	3	5	8	12	16
5	Persentase Tenaga Kerja Informal Yang Terlindungi	%	0	25	30	35	40	45	50
AH	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Cakupan Layanan Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Desa/Kelurahan Rawan Kekerasan Anak dan Perempuan	Persentase	2	2	20	44	60	80	100
2	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	11,2	11,2	12,4	13,6	14,8	16	16
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	79,91	81,44	82,69	83,94	85,19	86,44	86,44
6	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	65,58	67,57	68,91	70,25	71,59	72,91	72,91
7	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	60	66	67	68	69	70	71
AI	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
1	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
2	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	0	85,36	85,79	86,23	86,66	87,10	87,52
3	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	0	24,27	37,12	44,57	52,82	60,67	68,52



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	0	22,22	6,17	4,94	3,7	2,47	1,23
AJ	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
1	Persentase Pengelolaan Tanah Kosong	%	37,46	37,46	37,46	40	50	60	70
AK	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
1	Persentase parameter pengukuran air yang memenuhi baku mutu yang ditetapkan dibandingkan dengan parameter pengukuran secara keseluruhan	%	90,23	91,41	92,58	93,36	94,14	95,31	96,48
2	Persentase Jumlah limbah B3 yang terkelola	%	0	29,41	29,41	35,29	41,18	47,06	52,94
3	Presentase volume sampah yang berhasil dikurangi melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycle) per tahun	%	13,03	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,15



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	60	65	67	70	74	78	80
5	Persentase dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD RTRW, dan RDTR) yang memuat aspek lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian RPPLH, KLHS dan DDDTLH	%	100	75	75	75	100	100	100
6	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	0	18,75	18,75	37,5	56,25	75	100
7	Persentase peserta pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup yang mengalami peningkatan skor pemahaman dan keterampilan dibandingkan sebelum mengikuti kegiatan	%	0	83,33	91,67	96,67	96,67	100	100



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	Persentase penerima penghargaan lingkungan hidup yang melanjutkan dan/atau mengembangkan kegiatan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan setelah menerima penghargaan	%	0	20	40	60	80	100	100
9	Cakupan Pengelolaan Taman Kehati dan Ruang Terbuka Hijau yang berada di dalam kewenangan pengelolaan Kabupaten Belu	%	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	%	0	83,33	83,33	88,89	88,89	94,44	100
11	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai prosedur dan waktu yang telah ditetapkan	%	0	10,33	22,83	38,04	55,98	76,63	100
AL	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL								
1	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	79,15	80,15	81,15	82,39	83,62	84,85	85,09
2	Persentase Informasi Kependudukan yang di manfaatkan	%	100	100	100	100	100	100	100



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	47,72	51,85	58,29	59,19	60,99	61,24	62,64
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	60,54	70,00	75,50	80	90	95	100
5	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100
AM	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persentase	0	2,89	2,89	4,34	5,79	7,24	8,69
2	Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum adat dalam Pembangunan	%	16,66	16,66	33,33	50	66,66	83,33	100



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persentase	69	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	71,01	72,69	75,36	78,26	81,15	84,05	86,95
AN	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase	55	60	65	70	75	80	80
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR	%	51	54	57	60	63	66	69
3	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,14	2,12	2,11	2,11	2,11	2,10	2,10



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	61,80	61,80	61,90	62,00	62,10	62,20	62,20
5	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	19,40	19.40-19.40	19-19	18.60-18.60	18.20-18.20	17.80-17.80	17.80-17.80
6	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber KB	%	50	55	60	65	70	75	80
7	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	10,50	10,50	9,50	9,00	8,00	8,50	8,50
AO	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
1	Persentase realisasi retribusi parkir terhadap potensi retribusi	%	0	12,5	15	16,25	17,5	18,75	20
AP	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	0	70	75	80	85	90	100
2	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	65	70	75	80	85	90	100
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	0	80	85	90	95	100	100
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	60	65	70	75	80	85	90
AQ	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	46	50	55	60	65	70	75
2	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	0	55	60	65	70	75	80
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	0	70	79,99	80	89,99	90	91,5
4	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase	0	10	15	20	25	30	35
5	Persentase UMKM yang Bertransformasi dari informal ke formal	%	0	25	30	35	50	55	60
6	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	0	55	60	65	70	75	80
7	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persentase	0	30	35	40	45	50	55
AR	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Jumlah Izin dan Non Izin yang Diterbitkan	Dokumen	1.300	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	TOE/Milyar Rupiah	844.032.000.000	51.500.000.000	53.045.000.000	54.636.000.000	56.275.000.000	57.963.000.000	59.702.000.000
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	89,60	95,55	96,55	97,55	98,55	99,55	99,56
4	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	0	3	3	3	3	3	3
AS	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA								
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	51,45	51,47	51,49	51,51	51,53	51,55	51,57
2	Peningkatan Prestasi Olahraga melalui Jumlah Perolehan Medali pada event Olahraga Nasional/ Internasional	Medali	11	20	25	30	35	40	50
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persentase	0	20	25	30	35	40	50
4	Rasio Wirausaha Pemuda	Persentase	0	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
AT	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
1	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	55	55	60	70	80	90	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	45	45	60	70	80	90	100
AU	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
1	Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	%	13,5	35	50	60	70	80	90
AV	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
1	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase	19,00	20,00	21,09	40,18	59,04	79,47	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	65	66	67	68	69	70	70
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase	19,00	20,00	20,14	40,28	60,12	80,03	100
4	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Museum	%	0	0	0	40	60	80	100
AW	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
1	Tingkat Kepuasan Pengguna Perpustakaan	%	0	100	100	100	100	100	100
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	60	65	68	70	73	75	80
AX	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
1	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase	0	100	100	100	100	100	100



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Presentase Arsip yang Dimasukkan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)	%	0	17,39	34,78	52,17	69,56	86,95	100
AY	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	0	1,02	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07
AZ	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
1	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan (Domestik dan Mancanegara)	%	64,729	69	70	72	74	75	76
2	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	0	51,06	51,09	51,11	51,20	51,25	51,30
3	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata Terhadap Total PAD Kabupaten	%	0,299	0,314	0,330	0,347	0,364	0,382	0,401
4	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	3,00	4,00	5,00	7,25	12,25	15,45	25,50



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase	18,20	19,00	19,45	40,24	59,98	80,25	100,00
6	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase	9,00	9,45	10,00	15,00	17,50	20,00	25,00
BA	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	66	66	67	68	69	70	71
2	Jumlah Produksi Padi	Ton	20.159	20.159,39	21.167,36	22.225,73	23.337	24.503,86	25.729,05
3	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persentase	0	100	100	100	100	100	100
4	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persentase	0	6,90	10,34	17,24	20,69	24,14	27,59
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	0	66	67	68	69	70	70
6	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persentase	0	100	100	100	100	100	100



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Jumlah Produksi Jagung	Ton	36.409,03	36.409,03	38.229,48	40.140,96	42.148	48.470,20	48.954,90
8	Peningkatan Produksi Tanaman Cabai	Ton	0	1.127,037	1.160,848	1.195,674	1.231,54	1.268,49	1.306,5448
9	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	0	0	0	0	5.000	0	0
10	Peningkatan Produksi Tanaman Bawang Merah	Ton	0	224,492	231,2268	238,1636	245,308	252,6677	260,24776
11	Peningkatan Produksi Tanaman Bawang Putih	Ton	0	113,158	114,8554	116,5782	117,744	118,9214	120,11064
12	Peningkatan Produksi Tanaman Tomat	Ton	0	1.148,93	1.171,905	1.195,343	1.219,25	1.243,634	1.268,5071
BB	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
1	Nilai Penerimaan Retribusi Pasar	Milyar Rupiah	1,80	2,65	2,65	2,75	2,80	2,90	3,00
2	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	Persentase	76,00	70,56	73,77	76,97	80,18	83,39	89,80



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase	0	0	0	5,88	8,82	11,76	14,71
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	56	66	67	68	69	70	70
BC	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
1	Persentase Meningkatnya IKM	%	17	8	10	12	13	15	17
BD	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
1	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	Persentase	0	0	3	3	5	5	5
2	Persentase Transmigran yang dibina dan diberdayakan	%	0	28	28	28	28	28	28
BE	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH								
1	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	0	75	80	85	90	95	100



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	0	0	80	85	90	95	100
3	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase	0	0	100	100	100	100	100
4	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	0	41	45	50	65	70	81
5	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	0	0	40	46	50	53	55
6	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase	0	0	100	100	100	100	100
7	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase	0	0	100	100	100	100	100
8	Persentase Produk Hukum yang Dihilaskan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
BF	4.02 - SEKRETARIAT DPRD								
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	0	75	80	85	90	95	100



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	0	0	100	100	100	100	100
BG	5.01 - PERENCANAAN								
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	96,84	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	0	100	100	100	100	100	100
BH	5.02 - KEUANGAN								
1	Persentase Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang Dikelola Terhadap Total Pendapatan	%	1,90	2,09	2,30	2,53	2,78	3,06	3,37



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Cakupan Jumlah Pengguna Layanan Unggulan	Orang	850	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000	2.250
3	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	54	58	60	66	67	68	69
5	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	9,50	9,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50
6	Persentase Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	%	30	30	30	30	30	30	30
7	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	40	40	40	40	40	40	40
8	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan wajib Pelayanan Dasar	%	79,09	85,00	85,00	90,00	93,35	93,35	96,26



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Persentase Penurunan Silpa	%	44,80	35,89	35,65	34,09	36,00	36,00	36,00
BI	5.03 - KEPEGAWAIAN								
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	71,0	71,0	71,5	75,5	81,5	82,5	82,5
2	Nilai Sistem Merit Aspek Kepegawaian	Poin	170,5	229,5	250,0	279,5	302,5	312,5	312,5
3	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Rasio	62,24	62,32	62,68	63,05	63,42	63,78	63,78
4	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Rasio	18,40	19,43	20,16	20,89	21,99	23,09	23,09
BJ	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	2,30	2,99	6,09	9,31	12,76	16,32	16,32



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Persentase Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	20,67	22,25	25,62	28,99	33,48	37,98	37,98
3	Nilai Sistem Merit Aspek Pengembangan Sumber Daya Manusia	Poin	14,0	26,5	26,5	33,5	38,5	43,5	43,5
4	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Rasio	11,95	13,94	17,93	21,91	27,89	35,86	35,86
BK	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
BL	5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN								
1	Persentase Pengelolaan Kawasan Perbatasan	%	75	76	77	78	79	80	80
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	55	60	65	70	75	80	85
3	Persentase Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara	%	75	76	77	78	79	80	80
4	Persentase Pengelolaan Kawasan Perbatasan Daerah	%	72	74	75	76	77	78	79
BM	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH								
1	Tindaklanjuti Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	83,94	84,75	84,95	85,00	85,25	85,65	86,00
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	66	67	70	75	76	79	80



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)
BN	7.01 - KECAMATAN								
1	Persentase Pencapaian Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	%	60,00	65,50	70,00	70,50	80,00	90,00	100
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	66	66	67	68	69	70	71
3	Persentase Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa	%	0	60	60	70	80	90	100
4	Persentase Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa	%	82	82	82	84	85	90	100



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Persentase Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa	%	0	50	60	70	80	90	100
6	Persentase Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa	%	82	82	82	86	88	90	100
7	Persentase Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa	%	0	50	60	70	80	90	100
8	Persentase Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa	%	0	0	56	67	78	89	100



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Persentase Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa	%	80	8	80	85	90	95	100
10	Persentase Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa	%	80	80	80	85	87	89	90
11	Persentase Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa	%	0	50	60	70	80	90	100
12	Persentase Koordinasi Penanganan Kejadian gangguan TRANTIB dan Pelanggaran PERDA/PERBUP	%	0	60	60	70	80	90	100
13	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	58	58	60	62	64	66	68



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
14	Persentase Koordinasi Penanganan Kejadian gangguan TRANTIB dan Pelanggaran PERDA/PERBUP	%	0	0	60	70	80	90	100
15	Persentase Koordinasi Penanganan Kejadian gangguan TRANTIB dan Pelanggaran PERDA/PERBUP	%	0	50	60	75	80	90	100
16	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	65	65	70	75	80	80	90
17	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	0	58	60	62	64	66	68
18	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	56	60	62	64	66	68	70
19	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	66	67	68	69	70	71	72
20	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	0	58	62	64	66	68	70



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
21	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	0	58	60	63	66	69	70
22	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	0	58	60	62	64	66	68
23	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	66	67	68	69	70	71	72
24	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	0	60	65	70	75	80	85
25	Persentase Koordinasi Penanganan Kejadian gangguan TRANTIB dan Pelanggaran PERDA/PERBUP	%	0	0	80	85	90	95	100
26	Persentase Koordinasi Penanganan Kejadian gangguan TRANTIB dan Pelanggaran PERDA/PERBUP	%	0	0	20	40	60	80	100
27	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	66	66	67	68	69	70	70



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
28	Persentase Koordinasi Penanganan Kejadian gangguan TRANTIB dan Pelanggaran PERDA/PERBUP	%	0	0,42	0,45	0,47	0,48	0,49	0,50
29	Persentase Koordinasi Penanganan Kejadian gangguan TRANTIB dan Pelanggaran PERDA/PERBUP	%	0	0	0	67	78	89	100
30	Persentase Koordinasi Penanganan Kejadian gangguan TRANTIB dan Pelanggaran PERDA/PERBUP	%	82	82	82	86	88	90	100
31	Persentase Koordinasi Penanganan Kejadian gangguan TRANTIB dan Pelanggaran PERDA/PERBUP	%	0	75	80	85	90	95	100



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
32	Persentase Koordinasi Penanganan Kejadian gangguan TRANTIB dan Pelanggaran PERDA/PERBUP	%	84	84	84	88	92	96	100
33	Persentase Koordinasi Penanganan Kejadian gangguan TRANTIB dan Pelanggaran PERDA/PERBUP	%	0	0	60	70	80	90	100
34	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	%	0	60	60	70	80	90	100
35	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	%	84	84	84	86	88	90	92
36	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	%	0	0	64,5	70,8	79,1	91,6	100



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
37	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	%	70	75	80	85	90	95	100
38	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	%	0	40	50	60	70	80	90
39	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	%	76	80	84	88	92	96	100
40	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	%	0	40	50	60	70	80	90
41	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	%	0	25	44,17	58,11	62,57	79,6	100
42	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	%	82	82	82	84	86	90	100
43	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	%	84	84	84	88	92	96	100



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
44	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	80	80	82	84	86	88	90
45	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	%	80	80	80	85	90	95	100
46	Persentase Kinerja Terpadu Pelayanan	%	0	60	60	70	80	90	100
47	Persentase Kinerja Terpadu Pelayanan	%	0	0	20	40	60	80	100
48	Persentase Kinerja Terpadu Pelayanan	%	82	82	82	86	88	90	100
49	Persentase Kinerja Terpadu Pelayanan	%	72,8	72,8	72,8	77,7	84	93,7	100
50	Persentase Kinerja Terpadu Pelayanan	%	0	72,8	72,8	77,7	84	93,7	100
51	Persentase Kinerja Terpadu Pelayanan	%	0	60	70	80	90	100	100
52	Persentase Kinerja Terpadu Pelayanan	%	0	60	70	80	90	100	100
53	Persentase Kinerja Terpadu Pelayanan	%	89	89	89,09	89,18	89,27	89,36	89,45
54	Persentase Kinerja Terpadu Pelayanan	%	0	0	56	67	78	89	100



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
55	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	0	65	75	80	85	90	100
56	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	0	60	65	75	80	90	100
57	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	70	70	70	80	90	100	100
58	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	0	0	56	67	78	89	100
59	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	82	82	82	84	85	86	90



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
60	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	82	82	82	84	88	90	100
61	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	0	0	50	60	80	90	100
62	Persentase Kinerja Terpadu Pelayanan	%	0	75	80	85	90	95	100
63	Persentase Kinerja Terpadu Pelayanan	%	0	0	73	76	79	80	83
64	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	0	60	60	70	80	90	100
65	Persentase Kinerja Terpadu Pelayanan	%	0	72,8	72,8	77,7	84	93,7	100
66	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	0	60	60,50	70	80	90	100
BO	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	0	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	0	100	100	100	100	100	100
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat	0	75	80	85	90	95	100
4	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	0	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kepada Masyarakat	%	0	100	100	100	100	100	100



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	0	100	100	100	100	100	100

Sumber: SIPD Tahun 2025.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 yang berisi visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah merupakan pedoman bagi segenap perangkat daerah dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah Kabupaten Belu selama kurun waktu lima tahun ke depan.

Dokumen RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 ini juga menjadi acuan dan pedoman:

1. penyusunan RKPD dan Dokumen Perencanaan sektoral dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belu;
2. menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintah daerah;
3. mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi misi nasional dan daerah;
4. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan; dan
6. memastikan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan, pelaksanaan, maupun hasil capaian pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Belu.

Keberhasilan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Belu dalam mewujudkan visi “**BELU YANG BERKUALITAS, MANDIRI, HARMONIS,**



DEMOKRATIS DAN BERBUDAYA” perlu didukung oleh peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Belu dan komitmen untuk menjaga keseimbangan pembangunan serta kesinambungan perencanaan.

5.2 Kerangka Pengendalian

RPJMD sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan jabarkan lebih lanjut dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan (RKPD) selama 5 tahun kepemimpinan Kepala Daerah, yang akan dikendalikan secara simultan dan berkesinambungan, sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah 2025-2029. Pengendalian pembangunan tahunan juga dilakukan terhadap kemungkinan risiko-risiko yang akan terjadi dalam upaya untuk mencapai target tujuan dan target sasaran yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemerintahan daerah, tujuan pemerintah daerah secara jelas tertuang antara lain dalam dokumen perencanaan daerah. Penyusunan dokumen ini idealnya dengan memperhatikan dokumen perencanaan nasional (RPJMN) dan dokumen perencanaan daerah Provinsi (RPJMD Provinsi NTT).

Pengendalian pada tahapan pelaksanaan RPJMD bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi ini mencakup:

- a. Pemantauan terhadap prioritas pembangunan daerah;
- b. Pemantauan terhadap mitigasi risiko dalam pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang



dilakukan;

- c. Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah; dan
- d. Evaluasi pencapaian sasaran Indikator Kinerja Arah Pembangunan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

5.3 Reviu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

Inspektorat Daerah Kabupaten Belu adalah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah telah melakukan reviu atas Dokumen RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 berupa pengujian terbatas terhadap penyajian bab-bab dalam dokumen RPJMD Tahun 2025- 2029 mulai dari tahap penyusunan rancangan awal dokumen sampai dengan siap ditetapkan oleh Kepala Daerah. Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen RPJMD serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan kepada Kepala Daerah sehingga dapat menghasilkan dokumen RPJMD yang berkualitas. Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji proses penyusunan penyajian bab-bab dalam dokumen RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

Dokumen RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 264 Ayat (5) dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 ayat (1) huruf c



dan ayat (3) disebutkan RPJPD, RPJMD dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/ ada perubahan kebijakan nasional. Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen RPJMD Perubahan serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan kepada Kepala Daerah sehingga dapat menghasilkan dokumen RPJMD yang berkualitas. RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025- 2029 dilaksanakan juga untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan juga sebagai upaya menelaah kembali tahapan pembangunan yang dibutuhkan untuk mewujudkan target-target yang belum tercapai.

Berikut uraian hasil reviu APIP atas Rancangan Akhir RPJMD

Kabupaten Belu Tahun 2025-2029:

1. Pengujian atas Keterhubungan dan Kesesuaian visi/misi dengan tujuan dan sasaran dalam rankhir RPJMD tahun 2025-2029: Berdasarkan Hasil Reviu dapat disimpulkan bahwa: Penetapan tujuan dan sasaran dalam RPJMD tahun 2025 - 2029 telah sesuai / mengacu pada visi dan misi.

Pengujian atas Keterhubungan dan kesesuaian program dengan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan strategi dalam dokumen RPJMD: Berdasarkan Hasil Reviu dapat disimpulkan bahwa : a. Rumusan program dalam rancangan akhir RPJMD telah mendukung pencapaian sasaran RPJMD, terlihat dari adanya kesesuaian



rumusan program dan keterhubungan kuat antara indikator program dengan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi. b. Indikator sasaran nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK data baseline tahun 2024, yang seharusnya sebesar 73% sedangkan dalam RPJMD 83%.

2. Pengujian atas Keselarasan Keterhubungan dan kesesuaian program- program prioritas dengan tujuan dan sasaran dalam rankhir RPJMD tahun 2025-2029: Berdasarkan Hasil Reviu dapat disimpulkan bahwa: Program-program prioritas dengan Tujuan dan Sasaran dalam Rankhir RPJMD Tahun 2025-2029 memiliki Keterhubungan yang kuat dan nomenklatur Program Perangkat Daerah sudah sesuai dengan Program Prioritas pada RPJMD Tahun 2025-2029.
3. Pengujian atas Konsistensi antar bab dalam dokumen RPJMD: Berdasarkan Hasil Reviu dapat disimpulkan bahwa: a. Terdapat inkonsistensi antar BAB terhadap indikator outcome program pada BAB III dan BAB IV; b. Terdapat Indikator Program belum bersifat outcome (Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dan Program Penanggulangan Bencana).
4. Pengujian atas Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN: Berdasarkan Hasil Reviu dapat disimpulkan bahwa: a. Tujuan dan sasaran pada RPJMD Kab. Belu, sudah mengakomodir sasaran yang dijabarkan pada RPJMN Tahun 2025 sd 2029; b. Strategi arah kebijakan pada dokumen RPJMD, telah memiliki kesesuaian dengan agenda pembangunan nasional; c. Program yang tercantum dalam RPJMD telah mendukung Prioritas Pembangunan untuk



masing-masing wilayah.

5. Pengujian atas Keselarasan antara dokumen RPJMD daerah Kabupaten/Kota dengan dokumen RPJMD Provinsi tahun 2025-2029 untuk reviu atas RPJMD Kabupaten/Kota: Berdasarkan Hasil Reviu dapat disimpulkan bahwa: a. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Belu dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi telah selaras; b. Sasaran RPJMD Kabupaten Belu dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi telah selaras.

Berdasarkan hasil reviu terhadap rancangan akhir RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 disarankan kepada Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Belu untuk melakukan penyesuaian terhadap beberapa catatan hasil reviu sebagai berikut: 1. Melengkapi Dokumen Evaluasi RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026 Tanggal Maret 2025, yang di tandatangani oleh Kepala BP4D Kabupaten Belu; 2. Memperbaiki Berita Acara hasil Musrembang agar menyajikan kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah sesuai pada Bab II dokumen RPJMD; 3. Mengisi target pada KLHS yang belum ada dalam RPJMD; 4. Menyesuaikan program dalam KLHS yang tidak termuat dalam RPJMD; 5. Memperbaiki perbedaan kata dalam nama program pada KLHS dengan RPJMD; 6. Memperbaiki indikator outcome program pada BAB III dan BAB IV; 7. Memperbaiki Indikator sasaran nilai MCP KPK data baseline 2024 dengan nilai 73% target tahun 2026 74%, dst naik 1% setiap tahun

Berdasarkan dari hasil reviu tersebut Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025- 2029 telah berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan



terhadap beberapa catatan hasil reviu RPJMD oleh Tim Reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Belu dengan tanggapan dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Terkait kesimpulan hasil Reviu huruf A dapat dijelaskan bahwa dokumen dimaksud akan ditandatangani oleh Kepala BP4D Kabupaten Belu; 2. Terkait hasil reviu huruf D point b, akan di sesuaikan sebagaimana mestinya; 3. Terkait hasil reviu huruf F point a, akan disesuaikan sebagaimana mestinya; 4. Terkait hasil reviu huruf F point b, akan disesuaikan sebagaimana mestinya; 5. Terkait hasil reviu huruf G point c, akan disesuaikan sebagaimana mestinya; 6. Terkait hasil reviu hutuf J poin a dan b, dapat dijelaskan bahwa Tim penyusun telah merumuskan seluruh target dan program dalam RPJMD sesuai dengan kajian analisis berdasarkan kondisi daerah sehingga programdan target tersebut dalam KLHS tidak harus seluruhnya ditempatkan dalam dokumen RPJMD.

5.4 Penyelarasan RPJMD Terhadap RPJPD Tahun 2025-2045 Dan RPJMN Tahun 2025-2029

5.4.1 Periodisasi

Periodisasi RPJMD Kabupaten Belu mengikuti periodisasi RPJMN dan RPJMD Provinsi NTT yaitu Tahun 2025-2029. Hal ini untuk mengurangi tumpang tindih program dan kegiatan pembangunan; pemborosan sumber daya karena tidak adanya prioritas yang jelas; pencapaian tujuan pembangunan nasional yang terhambat; dan potensi konflik kepentingan antara pusat dan daerah; serta untuk memastikan:

1. Sinkronisasi dan Kesiambungan Pembangunan: RPJMD



- harus selaras dengan RPJMN agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal di daerah;
2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya: Penyelarasan ini membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya daerah dan pusat, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif;
 3. Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional: RPJMD yang selaras dengan RPJMN akan memastikan bahwa program-program daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional;
 4. Harmonisasi Hubungan Pusat dan Daerah: Penyelarasan ini juga berkontribusi pada harmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah; dan
 5. Peningkatan Efektivitas Pembangunan: Dengan adanya keselarasan, pembangunan daerah dapat lebih terarah, terencana, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5.4.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Penyelarasan strategi dan arah kebijakan antara RPJMN Tahun 2025–2029 dan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025–2029 merupakan proses sistematis untuk memastikan bahwa rencana pembangunan daerah bergerak sejalan dengan kebijakan, prioritas, serta arah pembangunan nasional. Melalui penyelarasan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Belu mengintegrasikan isu strategis, sasaran pokok, dan prioritas nasional ke dalam perencanaan daerah, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan di tingkat lokal dapat memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Tujuan utama penyelarasan ini adalah memperkuat



konsistensi perencanaan, mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan sinergi antara pusat dan daerah dalam mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan daya saing wilayah. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Belu tidak hanya menjawab kebutuhan dan tantangan lokal, tetapi juga berperan signifikan dalam mendukung pencapaian target RPJMN 2025-2029 secara menyeluruh.

5.4.3 Indikator Utama Pembangunan

Penyelarasan indikator utama dalam RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2025-2045 dengan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 adalah proses memastikan bahwa tujuan dan prioritas pembangunan lima tahunan yang dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Belu memiliki keseragaman dengan apa yang sudah direncanakan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Belu 20 tahun ke depan. Penyelarasan indikator utama pembangunan RPJPD dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan RPJPD dan IKD RPJMD

Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2025-2045	Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2030
Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
Kesehatan Ibu dan Anak:	Indeks Kualitas Udara
a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Indeks Kualitas Air



Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2025-2045	Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2030
b) Angka Kematian Bayi/balita	Indeks Kualitas Tutupan Lahan
c) Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Penanganan Tuberkulosis:	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	Rasio PDRB Industri Pengolahan
b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	Rasio Gini
c) Insidensi Tuberkulosis per 100 ribu Penduduk	Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Pengeluaran Per Kapita
Hasil Pembelajaran:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	Laju Pertumbuhan Ekonomi
i) Literasi Membaca	Usia Harapan Hidup (UHH)
SD	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita
SMP	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)
ii) Numerasi	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)
SD	ASPEK DAYA SAING DAERAH
SMP	Harapan Lama Sekolah
b) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah
c) Harapan Lama Sekolah (tahun)	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SD



Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2025-2045	Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2030
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SMP
Tingkat Kemiskinan (%)	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SD
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	Jumlah Perolehan Medali Pada Event Olahraga Nasional/Internasional
Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SMP
Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Tingkat Inflasi
Pengembangan Pariwisata	ASPEK PELAYANAN UMUM
a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	Indeks Reformasi Hukum
b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang)	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
Jumlah Usaha Ekonomi Kreatif di Kabupaten Belu (Unit Usaha)	Indeks Ketahanan Daerah
Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD	Akses Rumah Tangga terhadap Air bersih Perpipaan
a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri
b) Jumlah Usaha Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)
d) <i>Return on Aset</i> (ROA) BUMD (%)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Indeks Perlindungan Anak (IPA)



Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2025-2045	Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2030
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah
Indeks Government Award (Indeks)	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau	SPBE
a) Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Indeks)	Nilai SAKIP
- Indeks Kualitas Air	Indeks Pelayanan Publik.
- Indeks Kualitas Udara	Indeks Kepuasan Masyarakat
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan	
b) Tingkat Kemiskinan (%)	
c) PDRB Harga Konstan (IDR Miliar)	
Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	
Tingkat Inflasi (%)	
Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	
Ekspor Barang dan Jasa:	
a) Nilai Ekspor lewat pintu batas PLBN Motaain (USD)	
b) Nilai Ekspor Antar Pulau Komoditi Peternakan/Pertanian (IDR)	
b) Nilai Ekspor Antar Pulau Komoditi Perikanan (IDR)	
Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan	
a) Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Kabupaten terhadap Provinsi (%)	



Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2025-2045	Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2030
b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	
c) Persentase Desa Mandiri (%)	
Indeks Reformasi Birokrasi	
a) Tingkat Pelanggaran Lalulintas	
b) Tingkat Kriminalitas;	
Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pesta Demokrasi (%)	
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	
Tingkat Inflasi (%)	
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	
Indeks Daya Saing Daerah	
a) Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran (%);	
b) Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan ekskul kesenian;	
c) Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah;	
d) Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki.	
a) Persentase Anak usia 0-17 yang memiliki Akte Kelahiran Anak	
b) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	
c) Persentase RT tidak miskin (%)	



Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2025-2045	Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2030
d) Persentase RT dengan kejadian kekerasan anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuhan selama 1 tahun terakhir (%)	
e) persentase RT dengan Anggota rumah tangga lansia (+60 Tahun) (%)	
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	
Kualitas Lingkungan Hidup	
a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	
c) Pengelolaan Sampah	
- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	
- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	
Ketahanan Energi, Air, dan Pangan	
a) Ketahanan Energi	
- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) (Data PLN)	
b) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	
c) Ketahanan Air	
- Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	
- Akses Rumah Tangga terhadap Air bersih Perpipaan (%)	



Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2025-2045	Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2030
- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	
Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	

5.4.4 Indikator Makro Pembangunan

Penyelarasan indikator utama makro pembangunan antara RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025- 2029 bertujuan agar arah kebijakan dan program pembangunan di tingkat nasional dan daerah tetap sejalan. Tujuan ini penting untuk memastikan bahwa upaya pembangunan di daerah dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, serta menghindari adanya perbedaan prioritas yang dapat menghambat kemajuan pembangunan.

Tabel 5.2
Penyelarasan Indikator Makro Pembangunan RPJMD dan RPJMN

NO	RPJMN 2025-2029	RPJMD Provinsi NTT 2025- 2029	RPJMD Kabupaten Belu 2025-2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%): 5.7 - 6.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%): 5.7 - 6.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%): 4,4-5,84
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta): 25.7-35.1	PDRB Per Kapita (Rp Juta): 25.7-35.1	-
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%): 0.6-0.6	Kontribusi PDRB Provinsi (%): 0.6-0.6	-
4	Tingkat Kemiskinan (%): 15.32-15.82 ; 10.21-11.21	Tingkat Kemiskinan (%): 15.32-15.82 ; 10.21-11.21	Tingkat Kemiskinan (%): 12,76 - 9,56



NO	RPJMN 2025-2029	RPJMD Provinsi NTT 2025- 2029	RPJMD Kabupaten Belu 2025-2029
5	Rasio Gini: 0.319-0.324 ; 0.314- 0.319	Rasio Gini: 0.319-0.324 ; 0.314- 0.319	Rasio Gini (Angka): 0,32 – 0,31
6	Indeks Modal Manusia: 0.48- 0.51	Indeks Modal Manusia: 0.48- 0.51	Indeks Pembangunan Manusia: 68,93 – 70,82
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%): 61.82 – 77.71	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%): 61.82 – 77.71	-
8	IKLH: 80.02 – 80.69	IKLH: 80.02 – 80.69	IKLH: 78,34 – 79,02
9	TPT (%): 2.49-2.99 ; 2.10-2.79	TPT (%): 2.49-2.99 ; 2.10- 2.79	TPT (%): 5,33 – 4,73

5.4.5 Program Perangkat Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan 83 Kegiatan Prioritas RPJMN 2025-2029

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 telah menyelaraskan program perangkat daerah dengan 83 Kegiatan Prioritas RPJMN 2025-2029. Penyelarasan ini memastikan bahwa seluruh program pembangunan daerah mendukung pencapaian sasaran nasional, terutama dalam konteks daerah perbatasan, pengembangan KSPP Atambua, swasembada pangan-air-energi, percepatan layanan dasar, serta konektivitas wilayah. Keselarasan program prioritas bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3
Penyelarasan Kegiatan Prioritas RPJMN dan RPJMD

No	83 Kegiatan Prioritas RPJMN 2025-2029	Program Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029
1	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;



No	83 Kegiatan Prioritas RPJMN 2025-2029	Program Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
2	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3	Pengembangan Pangan Hewani	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
4	Pengembangan Pangan lokal dan Nabati	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
5	Konversasi Sumber Daya Air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda); Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
6	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
7	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan
8	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah Serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	Program Pengelolaan Persampahan



No	83 Kegiatan Prioritas RPJMN 2025-2029	Program Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029
9	Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan
10	Pencegahan dan Penanganan Anak tidak sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan
11	Pembangunan dan Penyelenggaraan sekolah unggul	Program Pengelolaan Pendidikan
12	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (E.G. Pelatihan, In Service Training), Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan berbasis kinerja	Program Pengelolaan Pendidikan
13	Pengembangan Manajemen talenta nasional (MTN) Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
14	Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
15	Pencegahan dan Penurunan Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
16	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

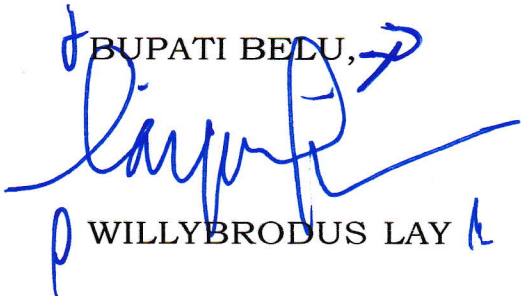


No	83 Kegiatan Prioritas RPJMN 2025-2029	Program Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029
17	Pemberian Makan Bergizi Gratis untuk siswa, santri, ibu hamil. Ibu menyusui dan balita	
18	Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi gratis	
19	Penuntasan TBC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
20	Eliminasi Penyakit Kusta dan Schistosomiasis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
21	Investasi Pelayanan Kesehatan Primer	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
22	Pembangunan RS Lengkap berkualitas di Kabupaten/Kota dan pengembangan layanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
23	Produksi dan pendayagunaan SDM Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
24	Penyaluran Bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
25	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh; Program Kawasan Permukiman;



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Belu
Tahun 2025-2029

No	83 Kegiatan Prioritas RPJMN 2025-2029	Program Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2025-2029
26	Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Program Penyelenggaraan Jalan;
27	Pencegahan tindak pidana korupsi	Program Penyelenggaraan Pengawasan
28	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
29	Transformasi digital layanan publik prioritas	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
30	Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

BUPATI BELU, 
WILLYBRODUS LAY